



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mendorong proses pembangunan, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian masa depan;

b. bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
 11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi.

BAB II VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan selama periode tahun 2020-2045.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyusunan:
 - a. RPJM Daerah;
 - b. RTRWP; dan
 - c. dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pasal 4

Sistematika RPJP Daerah adalah sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta uraian mengenai keterkaitan antara dokumen RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi uraian mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum;

- c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, berisi uraian isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi daerah;
- d. BAB IV Visi dan Misi, berisi uraian kondisi daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah;
- e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, berisi uraian tahapan capaian pembangunan per 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi daerah, termasuk uraian sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah; dan
- f. BAB VI Penutup, berisi pelaksanaan, pembiayaan, dan proses pelaksanaan manajemen risiko RPJP Daerah.

Pasal 5

Isi dan uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) RPJP Daerah berlaku sejak tahun 2025.
- (2) Perubahan RPJP Daerah berlaku sejak ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (3) Rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

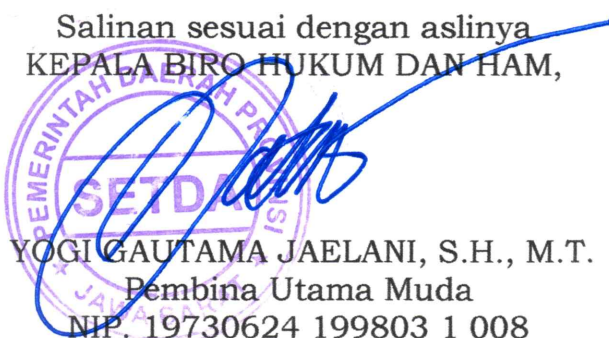
ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (13-304/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730624 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan berdurasi 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ini diharapkan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan penyusunan RPJPD kabupaten/kota. Secara bertahap, diharapkan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud visi Jawa Barat 2045: **“Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan”**.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, Desember 2024

ttd.

Bey Triadi Machmudin

SAMBUTAN

Rasa syukur tak terhingga kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izinnya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 telah dibahas secara komprehensif serta diselesaikan melalui sinergitas yang baik oleh Jajaran Eksekutif dengan Jajaran Legislatif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Arah kebijakan yang dituangkan di dalam RPJPD ini dirumuskan dengan tetap mengacu kepada Peraturan di atasnya yaitu garis besar yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta *guideline* dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga diharapkan proses implementasi kebijakan yang dibuat akan tetap harmoni dan selaras sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 harus dijadikan dasar dalam penentuan arah kebijakan, terutama digunakan sebagai acuan dalam proses perumusan visi serta misi dari Kepala Daerah yang baru, harus dipedomani dalam penyusunan RPJMD serta juga menjadi patokan penyusunan RPJPD Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

DPRD Provinsi Jawa Barat akan selalu mendukung penuh setiap arah kebijakan yang dibuat, namun tentu harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan kualitas dan keseimbangan dengan lingkungan hidup yang terjaga, karena hal tersebut sangat penting untuk sebuah konsep pembangunan berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu serta bersinergi dalam proses penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 demi terwujudnya Jawa Barat yang maju dan berkeadilan dalam menjalankan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Hatur nuhun.

Bandung, Desember 2024

ttd.

Buky Wibawa

SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat, sekaligus bentuk komitmen kita untuk mewujudkan **visi Indonesia Emas 2045**.

RPJPD merupakan pedoman strategis yang imperative, sesuai amanat pemerintah pusat, dalam merumuskan arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknokratis tetapi juga sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan masa depan. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia dan pilar utama perekonomian nasional, memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini telah mengidentifikasi berbagai target strategis yang menjadi baseline pada tahun 2025, termasuk:

1. **Nol Kemiskinan Ekstrem**, sebagai bentuk komitmen untuk mengentaskan ketimpangan sosial.
2. Peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang inklusif dan berkeadilan.
3. Peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merata dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan**.
4. Transformasi ekonomi berbasis **inovasi dan digitalisasi**, serta keberlanjutan lingkungan.
5. Optimalisasi **tata ruang dan infrastruktur** untuk mendukung konektivitas wilayah dan pemerataan pembangunan.

Target-target ini mencerminkan besarnya tanggung jawab dan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat. Upaya luar biasa diperlukan untuk memastikan pencapaian

target ini, dengan tetap memperhatikan prinsip kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan.

Kami memahami bahwa keberhasilan implementasi RPJPD ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

Keberadaan RPJPD juga menjadi pedoman bagi Kepala Daerah terpilih pada setiap periode pemerintahan, untuk melanjutkan dan menyempurnakan program-program pembangunan yang telah dirancang. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami yakin dokumen ini akan menjadi panduan yang relevan dalam mewujudkan **Jawa Barat Termaju Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan** sekaligus berkontribusi pada keberhasilan agenda pembangunan nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPJPD ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan-Nya kepada kita semua.

Bandung, Desember 2024

ttd.

Herman Suryatman

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ini dapat disusun sebagai acuan penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat selama dua dekade kedepan. Penyusunan RPJPD ini merupakan wujud komitmen kita dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, dimana bangsa kita diharapkan mencapai puncak kemajuan, kemandirian, dan kemakmuran yang berkelanjutan.

RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ini hadir sebagai dokumen strategis yang tidak hanya merangkum visi, misi, dan tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam jangka panjang, namun juga menegaskan peran dan kontribusi daerah dalam mendukung target-target pembangunan nasional. Buku ini, memuat berbagai arah kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang diarahkan untuk memaksimalkan potensi lokal, memperkuat ketahanan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam merancang RPJPD ini, kami senantiasa memperhatikan tantangan global dan dinamika perubahan yang kian cepat, termasuk transformasi digital, perubahan iklim, dan urbanisasi. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan yang tertuang dalam dokumen ini dirancang agar selaras dengan agenda global, tetap adaptif terhadap perkembangan zaman dan mewujudkan visi Provinsi kita sebagai daerah yang termaju, berdaya saing dunia, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa terwujudnya visi besar ini memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap RPJPD ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi semua pihak dalam berperan aktif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga



Dokumen RPJPD ini menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, menuju Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Desember 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat,

ttd.

Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
SAMBUTAN	ii
SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-9
1.4.1 Hubungan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045	I-9
1.4.2 Hubungan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042	I-9
1.4.3 Hubungan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan KLHS RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	I-10
1.5 SISTEMATIKA	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1 Geografi	II-1
2.1.2 Demografi	II-35
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-47
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-47
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-57
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-70
2.3.1 Daya Saing Ekonomi.....	II-70
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-79
2.3.3 Daya Saing Infrastruktur	II-88
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-98
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-102
2.4.1 Reformasi Birokrasi	II-102
2.4.2 Pelayanan Publik	II-103



2.4.3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-104
2.4.4	Inovasi Daerah.....	II-105
2.5	EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2023.....	II-106
2.6	TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK.....	II-113
2.6.1	Tren Demografi	II-113
2.6.2	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik .	II-125
2.7	PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.....	II-144
2.7.1	Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi.....	II-144
2.7.2	Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional.....	II-162
2.7.3	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi Jawa Barat ...	II-168
2.7.4	Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045	II-174
2.7.5	Arah Kebijakan Kewilayahan RTRW 2022-2042 ...	II-177
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		III-1
3.1	PERMASALAHAN	III-1
3.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	III-1
3.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III-7
3.1.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	III-13
3.1.4	Aspek Pelayanan Umum	III-21
3.2	ISU SESUAI KONTEKS.....	III-23
3.2.1	Isu Global	III-23
3.2.2	Isu Nasional.....	III-25
3.2.3	Isu Regional Jawa Bali.....	III-29
3.2.4	Isu Berdasarkan <i>West Java Development Forum</i> (WJDF).....	III-31
3.3	ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT	III-36
BAB IV VISI DAN MISI		IV-1
4.1	VISI.....	IV-1
4.1.1	Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-1
4.1.2	Visi Jawa Barat 2045.....	IV-3
4.2	MISI.....	IV-11
4.2.1	Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045.....	IV-11
4.2.2	Misi Pembangunan Jawa Barat 2045.....	IV-13
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		V-1
5.1	ARAH KEBIJAKAN	V-1



5.2 SASARAN POKOK V-74

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah..... V-74

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi..... V-87

5.3 UPAYA TRANSFORMASI SUPER PRIORITAS (*GAME CHANGERS*) V-146

BAB VI PENUTUP VI-1

6.1 KAIDAH PELAKSANAAN..... VI-1

6.2 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN VI-1

6.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI..... VI-2

6.4 PROSES PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO..... VI-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Barat Periode Periode 2012-2022	II-3
Tabel 2.2	Bauran Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023	II-9
Tabel 2.3	Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-10
Tabel 2.4	Tutupan Lahan 2005, 2012, 2015, dan 2021 Provinsi Jawa Barat	II-16
Tabel 2.5	Target dan Realisasi <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Provinsi Jawa Barat	II-42
Tabel 2.6	Target dan Realisasi mCPR Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2023	II-43
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Persentase <i>Unmet Need</i> Provinsi Jawa Barat Tahun 2021- 2023	II-44
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Persentase Angka Kelahiran Remaja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021- 2023	II-45
Tabel 2.9	Target dan Realisasi <i>i-Bangga</i> Provinsi Jawa Barat Tahun 2021- 2023	II-46
Tabel 2.10	Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023	II-97
Tabel 2.11	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-113
Tabel 2.12	Proyeksi Indikator Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2045	II-114
Tabel 2.13	Proyeksi Komposisi Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2045	II-117
Tabel 2.14	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-118
Tabel 2.15	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-120
Tabel 2.16	Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-122
Tabel 2.17	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-126
Tabel 2.18	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-128
Tabel 2.19	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Provinsi Jawa Barat	II-129
Tabel 2.20	Kebutuhan Tenaga Listrik Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-129
Tabel 2.21	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Provinsi Jawa Barat	II-131
Tabel 2.22	Kecukupan Tempat Tidur Rumah Sakit Berdasarkan Regional Wilayah Provinsi Jawa Barat	II-136



Tabel 2.23	Proyeksi Kebutuhan Jumlah Tempat Tidur (TT) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.....	II-138
Tabel 2.24	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-139
Tabel 2.25	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	II-141
Tabel 2.26	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Terkait Perwujudan Pusat-Pusat Permukiman	II-147
Tabel 2.27	Lingkup Wilayah WP di Provinsi Jawa Barat	II-148
Tabel 2.28	Kebijakan Pengembangan Kewilayahan di Provinsi Jawa Barat	II-150
Tabel 2.29	Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat	II-158
Tabel 2.30	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur	II-162
Tabel 2.31	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Cekungan Bandung.....	II-164
Tabel 2.32	Arah Kebijakan WP Bodebekpunjur	II-179
Tabel 2.33	Arah Kebijakan WP Purwasuka.....	II-180
Tabel 2.34	Arah Kebijakan WP Ciayumajakuning.....	II-181
Tabel 2.35	Arah Kebijakan WP Priangan Timur – Pangandaran.....	II-182
Tabel 2.36	Arah Kebijakan WP Sukabumi dan Sekitarnya.....	II-183
Tabel 2.37	Arah Kebijakan WP Cekungan Bandung	II-184
Tabel 4.1	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Visi RPJPN Tahun 2045.....	IV-10
Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.....	V-42
Tabel 5.2	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPN Tahun 2025-2045	V-75
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi untuk Setiap Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	V-88
Tabel 5.4	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan RPJPN Tahun 2025-2045	V-111
Tabel 5.5	Perumusan Sasaran Pokok Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.....	V-117
Tabel 5.6	Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	V-140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tantangan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045	I-1
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat	II-2
Gambar 2.2	Luas Lahan Pertanian Jawa Barat Tahun 2005-2020	II-5
Gambar 2.3	Persentase Lahan Pertanian Tahun 2021 ..	II-6
Gambar 2.4	Luas Lahan Produksi Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 (Ha)	II-6
Gambar 2.5	Produksi Komoditas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Ton)	II-7
Gambar 2.6	Produksi Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-8
Gambar 2.7	Peta Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	II-11
Gambar 2.8	Peta Daya Tarik Wisata Alam Provinsi Jawa Barat	II-12
Gambar 2.9	Rekapitulasi Tingkat Sinkronisasi Program Jangka Menengah 5 Tahunan	II-13
Gambar 2.10	Sinkronisasi Indikasi Program dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042	II-13
Gambar 2.11	Grafik Hasil Analisis Program Jangka Pendek 1 Tahunan Tahun 2024	II-14
Gambar 2.12	Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2021	II-15
Gambar 2.13	Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	II-17
Gambar 2.14	Status DDLH Penyedia Pangan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dalam Sistem Grib 30"x30"	II-19
Gambar 2.15	IKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-20
Gambar 2.16	Status DDLH Penyedia Air Terhadap Ambang Batas Tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat dalam Sistem Grid 30"x30"	II-21
Gambar 2.17	Indeks Penggunaan Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-22
Gambar 2.18	Profil Ketercapaian Penurunan Emisi GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 terhadap Target RAD GRK	II-25
Gambar 2.19	Kontribusi Ketercapaian Penurunan Emisi GRK Provinsi Jawa Barat per Sektor Tahun 2023	II-26
Gambar 2.20	Profil Ketercapaian Tingkat Upaya Penurunan Emisi GRK terhadap Target RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-27
Gambar 2.21	IKLH Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-28



Gambar 2.22	IRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-30
Gambar 2.23	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-35
Gambar 2.24	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-36
Gambar 2.25	LPP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-37
Gambar 2.26	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-37
Gambar 2.27	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022.....	II-38
Gambar 2.28	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-39
Gambar 2.29	Kepadatan Penduduk Jawa Barat Tahun 2023	II-40
Gambar 2.30	Peta Persebaran 13 Kampung Adat di Provinsi Jawa Barat	II-47
Gambar 2.31	LPE Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-48
Gambar 2.32	Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 ..	II-49
Gambar 2.33	Rasio Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-51
Gambar 2.34	NTP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-52
Gambar 2.35	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-53
Gambar 2.36	TPT berdasarkan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023.....	II-54
Gambar 2.37	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-55
Gambar 2.38	Capaian IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-56
Gambar 2.39	Umur Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023	II-58
Gambar 2.40	Capaian Indeks Keluarga Sehat Tahun 2017-2023 ...	II-59
Gambar 2.41	IPKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022	II-60
Gambar 2.42	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022.....	II-61
Gambar 2.43	IPHA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022	II-62
Gambar 2.44	IKG Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-63
Gambar 2.45	IPP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2.46	SDI Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023	II-65
Gambar 2.47	IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.....	II-66
Gambar 2.48	Perbandingan IPK Tahun 2021-2022	II-67
Gambar 2.49	Peta Persebaran 147 Kampung Budaya di Provinsi Jawa Barat	II-68
Gambar 2.50	IDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-69
Gambar 2.51	Perbandingan PDRB-ADHB Provinsi di Jawa-Bali.....	II-70
Gambar 2.52	PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-72
Gambar 2.53	Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-73
Gambar 2.54	Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2023	II-74



Gambar 2.55	PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-75
Gambar 2.56	Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021	II-76
Gambar 2.57	Realisasi <i>Green Economy Index</i> di Provinsi Jawa Barat	II-77
Gambar 2.58	Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023.....	II-78
Gambar 2.59	Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022	II-79
Gambar 2.60	HLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2023	II-80
Gambar 2.61	RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-81
Gambar 2.62	IPLM Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023	II-83
Gambar 2.63	Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022	II-84
Gambar 2.64	Indeks Daya Saing Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.....	II-85
Gambar 2.65	TPAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-86
Gambar 2.66	Angka Ketergantungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022	II-88
Gambar 2.67	Indeks Kinerja Infrastruktur	II-89
Gambar 2.68	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-90
Gambar 2.69	Konektivitas Antarwilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-92
Gambar 2.70	IKSI Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-96
Gambar 2.71	Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2023	II-98
Gambar 2.72	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-99
Gambar 2.73	IKUB Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023.....	II-100
Gambar 2.74	Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023.....	II-101
Gambar 2.75	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	II-102
Gambar 2.76	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	II-103
Gambar 2.77	Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-104
Gambar 2.78	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023	II-105
Gambar 2.79	LPE Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023.....	II-107
Gambar 2.80	IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023	II-108
Gambar 2.81	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023	II-109
Gambar 2.82	Rasio Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023	II-110
Gambar 2.83	TPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023	II-111
Gambar 2.84	PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023.....	II-112



Gambar 2.85	Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2045.....	II-114
Gambar 2.86	Proyeksi Struktur Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2050.....	II-116
Gambar 2.87	Proyeksi Penduduk Usia Produktif Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-121
Gambar 2.88	Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-123
Gambar 2.89	Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	II-124
Gambar 2.90	Kebutuhan Hunian Vertikal untuk Kawasan Perkotaan Prioritas dan Pusat-Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.....	II-127
Gambar 2.91	Proyeksi Penyediaan Energi Berdasarkan Sumber/Jenis Energi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.....	II-130
Gambar 2.92	Desa <i>Blank Spot</i> Berdasarkan Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Barat	II-135
Gambar 2.93	Jumlah Rumah Sakit Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.....	II-136
Gambar 2.94	Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik pada Tingkat Pendidikan yang Menjadi Urusan Provinsi Jawa Barat	II-140
Gambar 2.95	Peta Rencana Pusat Permukiman Provinsi Jawa Barat	II-145
Gambar 2.96	Tema Pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat	II-149
Gambar 2.97	Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat	II-161
Gambar 2.98	Peta Rencana Infrastruktur Transportasi Strategis Provinsi Jawa Barat.....	II-172
Gambar 2.99	Peta Rencana Infrastruktur Sumber Daya Air Strategis Provinsi Jawa Barat	II-173
Gambar 2.100	Peta Rencana Infrastruktur Strategis Lainnya Provinsi Jawa Barat.....	II-174
Gambar 3.1	Permasalahan Geografi Provinsi Jawa Barat	III-1
Gambar 3.2	Permasalahan Demografi Provinsi Jawa Barat	III-5
Gambar 3.3	Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Provinsi Jawa Barat	III-7
Gambar 3.4	Permasalahan Sosial Budaya Provinsi Jawa Barat....	III-9
Gambar 3.5	Permasalahan Daya Saing Ekonomi Provinsi Jawa Barat	III-14
Gambar 3.6	Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.....	III-16
Gambar 3.7	Permasalahan Daya Saing Infrastruktur Provinsi Jawa Barat	III-18
Gambar 3.8	Permasalahan Daya Saing Iklim Investasi Provinsi Jawa Barat	III-20
Gambar 3.9	Permasalahan Pelayanan Umum Provinsi Jawa Barat	III-21



Gambar 3.10	Isu Global	III-24
Gambar 3.11	Isu Nasional.....	III-26
Gambar 3.12	Isu Regional	III-29
Gambar 3.13	Perumusan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat.....	III-36
Gambar 3.14	Isu <i>Green</i> dan <i>Blue Economy</i> serta Pembangunan Inklusif	III-37
Gambar 3.15	Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	III-38
Gambar 3.16	Isu Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar.....	III-39
Gambar 3.17	Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.....	III-40
Gambar 3.18	Isu Keberlanjutan Penataan Ruang.....	III-41
Gambar 3.19	Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	III-42
Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-2
Gambar 4.2	Tema Pembangunan Provinsi di Pulau Jawa.....	IV-4
Gambar 4.3	Keterkaitan Isu Strategis dan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045	IV-5
Gambar 4.4	Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045	IV-6
Gambar 4.5	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	IV-11
Gambar 4.6	Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Misi RPJPN Tahun 2045.....	IV-16
Gambar 5.1	Tema dan Tahap Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.....	V-1
Gambar 5.2	Tahapan Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing.....	V-5
Gambar 5.3	Tahapan Misi Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	V-10
Gambar 5.4	Tahapan Misi Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel, dan Inovatif.....	V-20
Gambar 5.5	Tahapan Misi Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	V-22
Gambar 5.6	Tahapan Misi Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	V-25



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peran Provinsi Jawa Barat dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan akan semakin penting dalam pembangunan nasional. Dengan potensi pengembangan wilayah dan peran sebagai bagian dari Kawasan Megalopolis Jakarta-Bandung, potensi sumber daya manusia, pangan, dan energi terbarukan, serta ketersediaan infrastruktur yang relatif lengkap dan terintegrasi dalam Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitarnya, Provinsi Jawa Barat akan menjadi salah satu destinasi yang menarik bagi tujuan bisnis dan investasi.

Selain memanfaatkan peran dan potensi, pembangunan daerah dalam jangka panjang juga akan dihadapkan pada tantangan Megatren Global 2045, yaitu perubahan besar yang diperkirakan akan terjadi dalam skala global pada 9 (sembilan) aspek sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tantangan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045



Sumber: Hasil analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Beberapa aspek dari Megatren Global 2045 tersebut akan mempengaruhi pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pada aspek demografi, jumlah penduduk serta puncak bonus demografi pada tahun 2030 berimplikasi pada tantangan urbanisasi, migrasi serta penduduk usia lanjut (*aging population*). Tren persaingan sumber daya alam ditandai dengan ketersediaannya yang semakin terbatas, sehingga setiap negara berupaya untuk mempertahankan akses serta mengutamakan kepentingan dalam negeri. Sumber daya alam tersebut mencakup antara lain: pangan, energi, dan sumber daya mineral kritis. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, jumlah kelas menengah akan bertambah sehingga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Potensi peningkatan konsumsi kelas menengah tersebut merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang perlu diimbangi dengan pengarusutamaan penggunaan produk dalam negeri agar dapat menggerakkan percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah.

Tantangan pembangunan jangka panjang lainnya adalah implementasi pembangunan berkelanjutan yang belum optimal sehingga berdampak pada beberapa hal antara lain perubahan iklim yang ditandai oleh kenaikan rata-rata temperatur bumi, perubahan cuaca yang lebih ekstrem serta meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis. Sementara dari aspek teknologi, digitalisasi, dan otomasi membuka ruang yang lebih luas bagi proses inovasi, serta perubahan teknologi lebih cepat di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di tengah tuntutan dan tantangan tersebut, pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Barat akan membutuhkan upaya transformatif pada berbagai aspek pembangunan agar dapat beradaptasi lebih baik pada setiap perubahan lingkungan strategis yang dihadapi. Tuntutan dan tantangan strategis, tujuan pembangunan jangka panjang yang akan dicapai, serta upaya transformatif perlu mewarnai dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD) Jawa Barat Tahun 2025-2045, sebagai keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya tahun 2005-2025.

Dokumen RPJPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan penjabaran visi dan misi, arah

kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, RPJPD dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahunan, serta dioperasionalkan kedalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), agar terwujud kesinambungan, sinergitas, dan keselarasan perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama. Bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka daerah diwajibkan untuk menyusun RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Proses penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Sementara dari aspek pendekatan perencanaan, digunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan pendekatan spasial dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan.

Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 diharapkan menjadi arahan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia atau masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan manusia atau masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas beserta pemutakhirannya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, RPJPD akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana visi, misi, sasaran pokok, arah pembangunan, dan arah kebijakan dalam dokumen ini menjadi pedoman bagi setiap Kepala Daerah terpilih dalam menyusun program kerja yang dituangkan kedalam setiap tahapan RPJMD.

Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 disusun melalui serangkaian proses atau tahapan. Salah satu proses penting yang dilakukan yaitu penjaringan aspirasi dari seluruh *stakeholder* pembangunan berkaitan dengan potensi yang dimiliki, permasalahan, isu, serta harapan atau mimpi Provinsi Jawa Barat 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Proses ini dikemas dalam bentuk *West Java Development Forum* (WJDF) yang dilaksanakan selama periode bulan Mei sampai dengan Oktober tahun 2023. Kegiatan WJDF ini dimulai dengan penjaringan aspirasi melalui Warga Merencana Jabar (Warna Jabar), *Kick Off*, WJDF bersama tokoh-tokoh Jawa Barat dan pemangku kepentingan lainnya, penyelenggaraan *Youth Planning Forum*, serta *Focus Group Discussion* yang melibatkan kabupaten/kota, provinsi perbatasan, pusat, dan internasional. Selanjutnya, dilakukan pembahasan bersama dengan perangkat daerah dan DPRD untuk mendapatkan penyepakatan terhadap rancangan visi, misi, serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Provinsi Jawa Barat 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Implementasi dan perwujudan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, membutuhkan peran serta dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Barat, munculnya inovasi-inovasi baru di berbagai aspek pembangunan, serta alternatif berbagai sumber pendanaan untuk mempercepat proses pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, menjamin

kualitas lingkungan hidup yang lebih baik serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6913);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah untuk menyediakan kerangka kerja strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah dalam jangka waktu panjang (20-25 tahun). Dengan RPJPD, pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas untuk mengarahkan pembangunan di masa depan, sehingga bisa lebih terkoordinasi dan berkesinambungan.

Beberapa maksud utama dari RPJPD adalah:

- a. Visi jangka panjang daerah: RPJPD menetapkan arah pembangunan yang mencerminkan visi besar daerah dalam mencapai tujuan-tujuan strategis dan ideal selama periode tertentu.
- b. Konsistensi kebijakan: Dengan adanya RPJPD, kebijakan pembangunan daerah dapat konsisten dari satu periode pemerintahan ke periode lainnya, sehingga tidak terputus hanya karena pergantian kepala daerah.
- c. Pedoman penyusunan RPJMD: RPJPD menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat lebih operasional dan berjangka menengah (5 tahunan), memastikan bahwa setiap RPJMD mendukung visi jangka panjang daerah.
- d. Sinergi pembangunan: RPJPD juga memastikan bahwa pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan regional, sehingga dapat terjadi sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan.

- e. Keberlanjutan pembangunan: RPJPD mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, demi memastikan keberlanjutan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Dengan RPJPD, daerah memiliki landasan yang kuat untuk mengelola pembangunan yang terarah, efektif, dan mampu menjawab tantangan di masa depan.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah untuk memberikan arah pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan berkesinambungan di tingkat daerah dalam jangka waktu panjang, biasanya 20 hingga 25 tahun. RPJPD disusun untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Beberapa tujuan utama RPJPD adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- b. Membangun kemandirian daerah, dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya alam dan manusia secara optimal, serta memperkuat perekonomian daerah.
- c. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah, dengan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi merata ke seluruh daerah, termasuk daerah tertinggal atau terpencil.
- d. Menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan generasi mendatang.
- e. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, agar daerah dapat berkontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan berpartisipasi dalam pembangunan global.
- f. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- g. RPJPD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup program dan kegiatan yang lebih spesifik dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ini sangat terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini dikarenakan RPJPD merupakan sebuah dokumen yang sifatnya memberikan panduan pembangunan jangka panjang dan akan dijabarkan kedalam dokumen RPJMD. Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 memedomani RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Selain itu, penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Hasil Evaluasi RPJPD Periode 2005-2025.

1.4.1 Hubungan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan dengan menyelaraskan visi, 5 sasaran visi, 8 misi Pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP).

1.4.2 Hubungan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

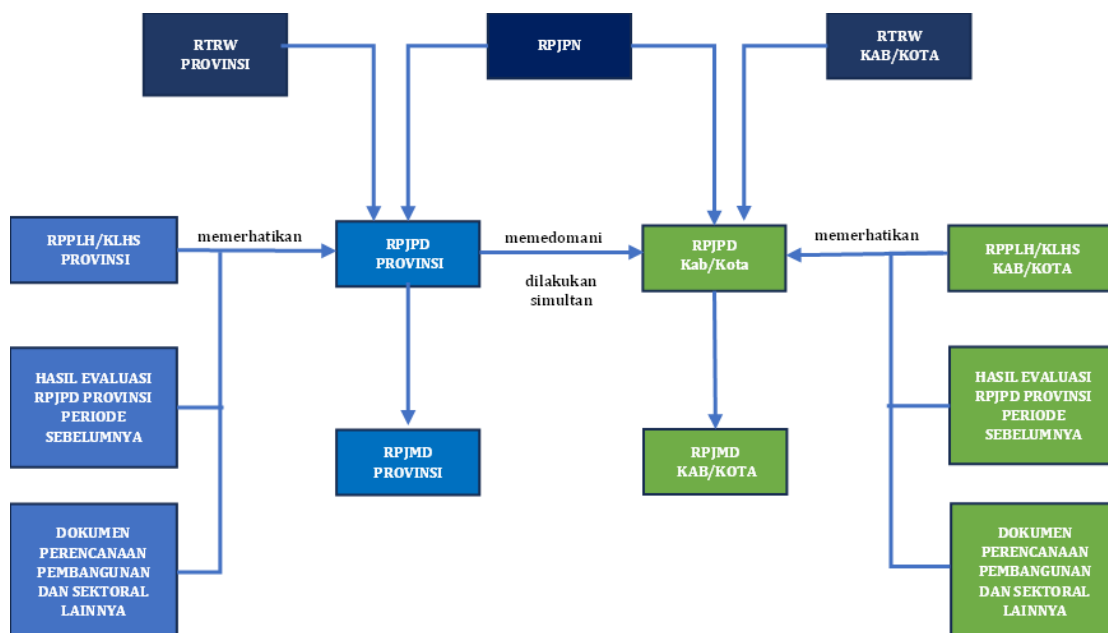
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Hal ini dilakukan dengan menyelaraskan strategi dan kebijakan rencana tata ruang, pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang kedalam dokumen rencana pembangunan daerah.

1.4.3 Hubungan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan KLHS RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045 memedomani Dokumen Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Rekomendasi yang tertuang dalam dokumen KLHS diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Untuk itu, keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 memedomani substansi RPJPN Tahun 2025-2045, terutama terkait dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kinerja atau indikator pembangunan. Adapun substansi RTRW Provinsi Jawa Barat

Tahun 2022-2042 yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah dan indikasi kinerja RTRW.

Adapun substansi KLHS yang diperhatikan yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis. Sedangkan, substansi Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan periode RPJPD Tahun 2005-2025 dan rekomendasinya.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan keterkaitan RPJPD dengan dokumen rencana daerah lainnya.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini diuraikan tentang gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Pada bab ini juga dijabarkan terkait evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik per lima tahun hingga tahun 2045 serta menjelaskan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sesuai regulasi.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan yang disimpulkan dari Bab II. Selanjutnya akan diuraikan isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks

(global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi daerah.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Pada bab ini akan dijelaskan terkait visi yang merupakan kondisi daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini akan dijelaskan terkait dengan arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu, akan dijelaskan sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.

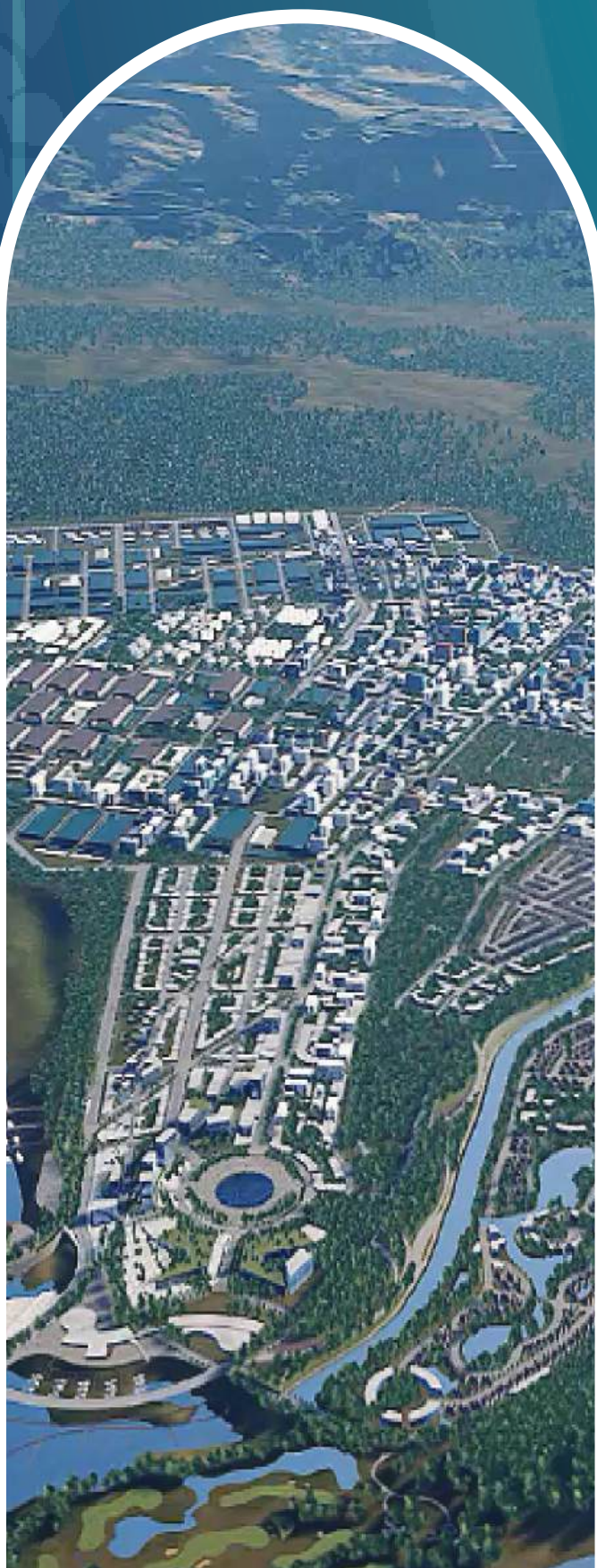
Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Posisi Strategis Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki posisi geostrategis yang penting bagi pembangunan wilayah dan nasional. Posisi strategis tersebut akan semakin meningkat seiring dengan perubahan peran Jakarta yang baru. Jakarta tidak akan menyandang status sebagai Ibu Kota Negara tetapi sebagai kota global dunia dan sebagai pusat bisnis serta ekonomi nasional.

Dalam konstelasi wilayah, Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis, diantaranya sebagai daerah yang mensuplai kebutuhan air baku bagi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pasokan pangan nasional, tulang punggung sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali, serta turut menjaga kestabilan pasokan BBM dari Kilang Balongan, dan lainnya.

Adapun dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, tujuan investasi terbesar, penyumbang terbesar bagi kinerja ekspor, sebagai pusat pendidikan tinggi yang memiliki 727 perguruan tinggi dengan 40 diantaranya adalah perguruan tinggi negeri dan sebagai basis industri manufaktur.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada $106^{\circ} 22' 13''$ BT- $108^{\circ} 50' 1,4''$ BT, dan $5^{\circ} 54' 49,58''$ LS- $7^{\circ} 49' 15,52''$ LS dan memiliki luas wilayah kurang lebih 5.349.484 Ha. Luas ini meliputi wilayah darat termasuk 19 (sembilan belas) pulau kecil dengan luas kurang lebih 3.704.067 Ha dan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai dengan luas kurang lebih 1.645.417 ha. Panjang garis pantai Provinsi Jawa Barat mencapai 988,47 km dengan panjang garis pantai sebelah utara adalah 500,45 km dan panjang garis pantai sebelah selatan adalah 488,02 km.

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.311 desa. Secara

luasan, kabupaten/kota terbesar berada di Kabupaten Sukabumi sedangkan terkecil berada di Kota Cirebon dan Kota Cimahi.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Kehutanan

Sektor kehutanan Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dari segi lingkungan, ekonomi serta sosial budaya. Peran penting tersebut didukung dengan keberadaan kawasan hutan yang mencakup 21,3 persen dari luas Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, menyebabkan perubahan luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat. Adanya perubahan kebijakan tersebut berdampak pada perubahan seluruh tata kelola kehutanan, baik pada level teknis maupun pihak-pihak terkait.

Sumber daya hutan Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk dioptimalkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun hasil hutan terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). HHBK itu antara lain berupa getah pinus, getah damar, daun kayu putih, cengkeh, kelapa, madu, jamur kayu, bambu dan lain-lain. Namun demikian, terdapat tantangan tersendiri bagi pengelola hutan di Provinsi Jawa Barat, mengingat sampai saat ini belum semua manfaat hutan dapat terkuantifikasi dengan baik.

Tabel 2.1
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Barat Periode
Periode 2012-2022

Fungsi Kawasan	Luas Kawasan Hutan s/d 2012 (Ha) ¹⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2017 (Ha) ²⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2018 (Ha) ²⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2019 (Ha) ³⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2021 (Ha) ⁴⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2022 (Ha) ⁴⁾
Hutan Konservasi	132.180,00	139.790,08	170.168,10	170.140,38	172.206,58	173.659,40
Hutan Lindung	291.306,00	274.830,62	228.273,76	225.936,93	229.221,57	229.747,18
Hutan Produksi Tetap	202.965,00	210.311,34	205.883,96	198.287,96	214.412,06	214.412,06



Fungsi Kawasan	Luas Kawasan Hutan s/d 2012 (Ha) ¹⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2017 (Ha) ²⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2018 (Ha) ²⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2019 (Ha) ³⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2021 (Ha) ⁴⁾	Luas Kawasan Hutan s/d 2022 (Ha) ⁴⁾
Hutan Produksi Terbatas	190.152,00	191.763,87	168.374,01	182.465,57	176.602,31	176.602,31
Luas Kawasan Hutan	816.603,00	816.695,91	772.699,83	776.830,84	792.610,42	794.420,95
Area Penggunaan Lain	2.893.458,32	2.887.371,09	2.931.367,17	2.927.236,16	2.911.456,58	2.909.646,05
Total Area Jawa Barat	3.704.067,00					

Sumber:

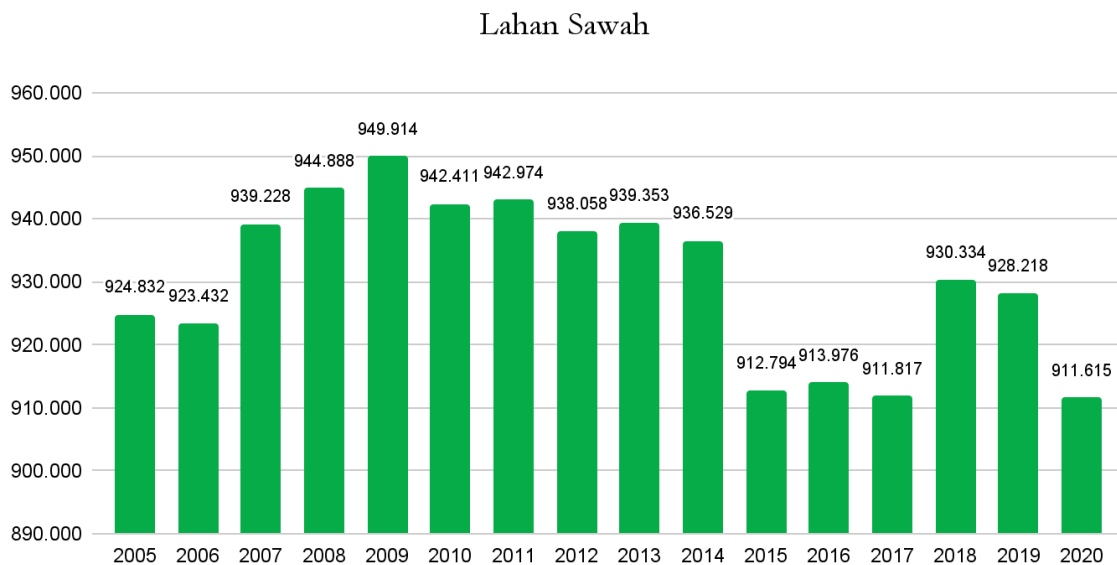
- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 2003 s/d 2011 tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dan perubahan luas melalui penunjukan dari lahan masuk
- 2) BPS Provinsi Jawa Barat, 2023
- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6603/MENLHK-PKTL/PLA.2/10/2020 Tanggal 27 Oktober 2021
- 4) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Disamping potensi sumber daya hutan berupa HHK dan HHBK terdapat juga manfaat ekonomi yang diperoleh langsung dari pengelolaan wisata alam. Beragam unit pengelola dengan fungsi kawasan tertentu menjadi potensi tersendiri yang dapat dioptimalkan dalam memberikan kontribusi ekonomi bagi Provinsi Jawa Barat.

B. Pertanian

Sebagaimana tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Provinsi Jawa Barat memiliki luas kawasan pertanian sebesar 2.066.938 Ha yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan serta kawasan peternakan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan pengendalian luasan kawasan pertanian yang ditetapkan dalam RTRW sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B menggunakan data dasar lahan sawah dilindungi, berikut data luas lahan sawah dari Tahun 2005-2021 serta persentase antara lahan sawah dan bukan sawah sebagaimana terdapat dalam gambar berikut.

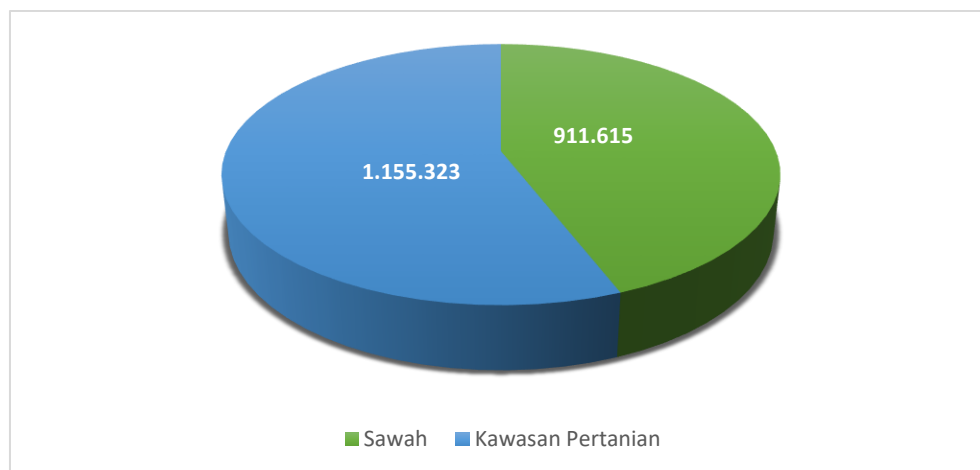
Gambar 2.2
Luas Lahan Pertanian Jawa Barat Tahun 2005-2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Berdasarkan gambar diatas, terdapat penurunan luas lahan sawah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman. Selain itu adanya perubahan metoda perhitungan produksi padi pada tahun 2015 menjadi Kerangka Sampel Area (KSA) sehingga terjadi penurunan produksi dalam perhitungannya. Adapun rasio antara luas lahan sawah dibandingkan dengan luas kawasan pertanian sebesar 911.615 dan 1.155.323 ha, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.

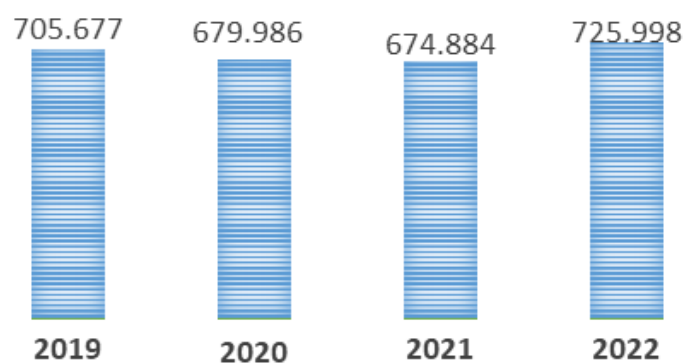
Gambar 2.3
Perbandingan Luas lahan Sawah terhadap Kawasan Pertanian di Jawa Barat Tahun 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Jawa Barat tahun 2022, luas total perkebunan di Provinsi Jawa Barat adalah 468.919 Ha. Proporsi luas terbesar adalah Perkebunan Rakyat (PR) yaitu sebesar 80,62 persen. Adapun jenis tanaman perkebunan yang diusahakan terdiri dari 26 jenis tanaman tahunan dan 7 (tujuh) tanaman semusim.

Gambar 2.4
Luas Lahan Produksi Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 (Ha)

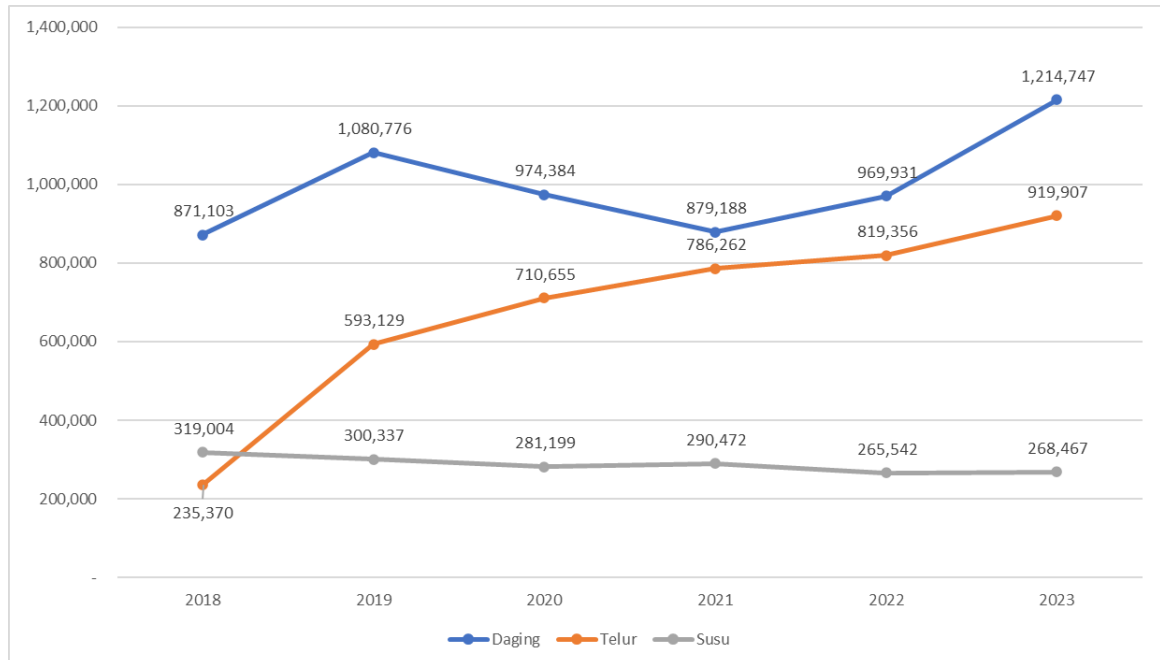


Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Jawa Barat memiliki beberapa komoditi unggulan yang terbagi dalam sektor pertanian adalah padi, jagung, cabai, bawang, manggis, dan mangga. Unggulan sektor perkebunan adalah kopi, teh, dan kelapa. Sektor peternakan adalah sapi pasundan, domba, ayam, dan sapi perah sebagai

sumber protein hewani Jawa Barat dengan data produksi peternakan sebagaimana pada gambar tersebut.

Gambar 2.5
Produksi Komoditas Peternakan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 (Ton)



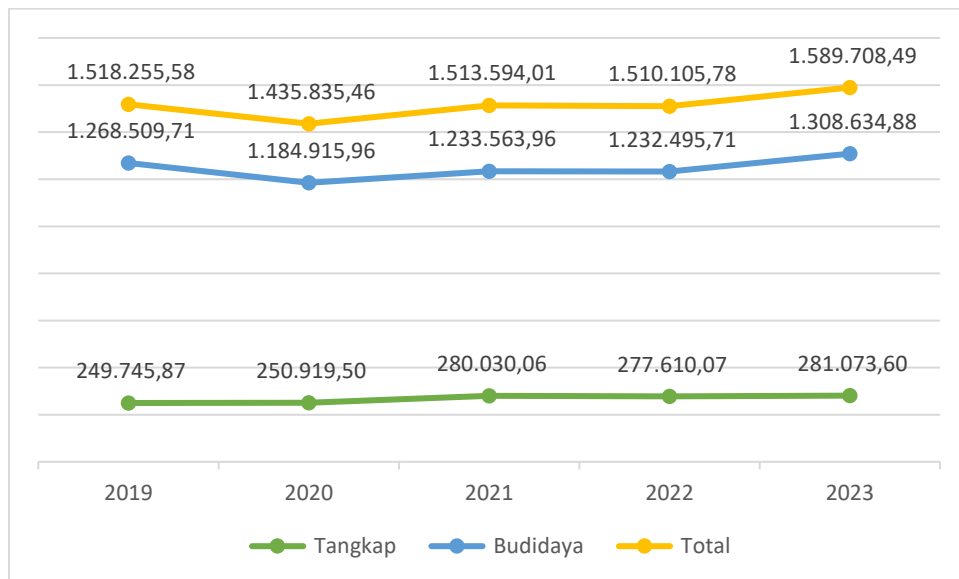
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Pada gambar diatas, terlihat produksi daging dan susu mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2023. Hal tersebut disebabkan karena adanya wabah yang menyerang hewan ternak ruminansia pada tahun 2021, sedangkan produksi telur selalu meningkat setiap tahunnya.

C. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Jawa Barat lebih banyak dibandingkan perikanan tangkap. Kenaikan produksi perikanan budidaya secara absolut lebih banyak dibandingkan dengan kenaikan produksi perikanan tangkap. Hal ini menunjukkan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat mengalami kecenderungan stagnansi, maka pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat perlu dikelola secara berkelanjutan agar Sumber Daya Ikan (SDI) di Provinsi Jawa Barat lestari, sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap kedepannya.

Gambar 2.6
Produksi Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Provinsi Jawa Barat kedepan perlu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Ikan (SDI) merupakan salah satu sumber protein konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 41,88 kg/kapita/tahun, sementara produksi perikanan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mencapai 1.589.709,49 Ton, sehingga terdapat ketimpangan antara konsumsi dengan produksi yang menyebabkan Provinsi Jawa Barat belum swasembada ikan. Adapun faktor yang berpengaruh dalam capaian produksi perikanan Provinsi Jawa Barat diantaranya karena telah diterapkannya penggunaan teknologi baik pada perikanan tangkap maupun budidaya yang efektif dalam meningkatkan produksi perikanan. Kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja jumlah produksi perikanan diantaranya pemberian *smart fishing* kepada nelayan, pembudidaya ikan millennial, pembinaan dan pendampingan pembudidaya ikan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, revitalisasi tambak di Pantai Utara dan Selatan Jawa Barat, dan penebaran benih di perairan umum.

Selain sumber daya perikanan, Provinsi Jawa Barat juga memiliki potensi pengembangan sumber daya kelautan diantaranya produksi garam, sumber daya terumbu karang dengan luas 9.214 Ha, hutan *mangrove* dengan luas 26.544 Ha, padang lamun dengan luas 802 Ha, mikroalga dan

makroalga, kawasan konservasi dengan luas 103.256,62 Ha, serta sumber daya alam lainnya (non-migas) yang terdapat di laut sampai dengan 12 mil dan kawasan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

D. Energi dan Mineral

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melimpah. Dengan total potensi EBT mencapai 192 GW, terdiri dari potensi hidro ($\pm 2,41$ GW), surya ($\pm 147,0$ GW), potensi angin ($\pm 37,50$ GW), potensi bioenergi (biomassa (residu) ± 332 MW) (Sumber: *Danish Energy Agency*, Dinas ESDM, 2023). Selain potensi tersebut, juga terdapat potensi panas bumi (geothermal $\pm 4,76$ GW). Bauran energi daerah Jawa Barat pada tahun 2023 masih mengandalkan minyak bumi dengan komposisi sebesar 35,38 persen, namun demikian terkait penggunaan EBT sudah menunjukkan peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari semula tahun 2021 sebesar 23,41 persen menjadi 24,85 persen di tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Barat sedang dalam tahap transisi menuju pengembangan EBT dan direncanakan akan ditingkatkan lebih masif lagi pada masa yang akan datang.

Tabel 2.2
Bauran Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Energi Daerah	2021				2022				2023	
	BOE	TOE	MTOE	%	BOE	TOE	MTOE	%	MTOE	%
EBT (NRE)	43.265.735,31	6.057.202,94	6,06	23,41	55.433.038,99	7.760.625,46	6,88	23,56	8,74	24,85
Minyak Bumi	56.655.717,76	7.931.800,49	7,93	30,65	69.140.128,13	9.679.617,94	9,68	33,17	12,44	35,38
Gas Bumi	47.694.851,25	6.677.279,17	6,68	25,81	30.965.159,04	4.335.122,27	4,34	14,85	4,45	12,63
Batu Bara	37.203.142,76	5.208.439,99	5,21	20,13	59.232.763,75	8.292.586,92	8,29	28,42	9,55	27,14
Total	184.819.447,08	25.874.722,59	25,88	100%	214.771.089,91	30.067.952,59	30,07	100%	35,18	100%

Keterangan: BOE: *Barrel Oil Equivalent*,
TOE: *Tons Oil Equivalent*.
MTOE: *Millions Ton Oil Equivalent*

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki komoditas sumber daya mineral bukan logam dan batuan sangat besar. Potensi mineral bukan logam tersebut antara lain pasir kuarsa, yodium, belerang, fosfat, zeolit, kaolin, *feldspar*, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, dan oker. Potensi komoditas batuan antara lain andesit, breksi, diorit, gamping, marmer, onyx, opal dan kalsedon, pasir, sirtu, tanah liat, tanah urug, *trass*, dan *tuff*. Potensi komoditas mineral yang



besar seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam lampiran CC mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Sub urusan Geologi huruf f mengamanatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Geologi untuk menetapkan neraca sumberdaya dan cadangan mineral dan energi nasional. Berikut merupakan data sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.3
Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No. Urut	Komoditas	Jumlah Lokasi	Hipotetik	Sumber Daya (Ton)			Cadangan (Ton)		Total Sumber Daya (Ton)	Total Cadangan (Ton)
				Tereka	Tertunjuk	Terukur	Terkira	Terbukti		
1	Andesit	158	513.993.500	180.997.258	204.489.999	214.716.808	42.869.796	71.874.379	600.204.065	114.744.175
2	Ball/Bond Clay	2	20.610.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Basal	2	-	-	87.500.000	-	-	-	87.500.000	-
4	Batuapung	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-
5	Batugamping	35	431.195.000	605.922.239	281.103.185	1.679.696.180	2.027.109.264	1.644.516.575	2.566.721.604	3.671.625.839
6	Belerang	7	1.578.700	-	-	-	-	-	-	-
7	Bentonit	12	1.061.000	18.507.519	9.783.279	9.057.623	3.673.090	4.758.650	37.348.421	8.431.740
8	Felspar	4	-	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	-
9	Fosfat	8	2.556.000	31.100	-	-	-	-	31.100	-
10	Gypsum	1	-	-	-	161.000	-	-	161.000	-
11	Kaolin	4	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-
12	Lempung	7	44.000.000	70.756.485	3.382.158	236.357.858	2.699.569	255.576.329	310.496.501	258.275.898
13	Mamer	4	-	24.000.000	3.065.000	44.348.345	9.727.200	12.587.121	71.413.345	22.314.321
14	Obsidian	1	-	60.075.000	-	-	-	-	60.075.000	-
15	Oker	1	105.000	-	-	-	-	-	-	-
16	Pasir Kuarsa	9	4.184.000	4.184.000	-	33.743.146	2.450.109	413.229	37.927.146	2.863.338
17	Perlit	1	-	14.000.000	-	-	-	-	14.000.000	-
18	Sirtu	78	-	79.433.134	47.801.570	684.622.666	468.020.906	38.951.021	811.857.370	506.971.928
19	Tras	22	456.248.000	171.795.000	68.064.585	28.156.434	22.887.297	10.560.853	268.006.019	33.438.151
20	Zeolit	10	24.651.000	-	16.841.617	8.548.786	-	1.173.321	25.390.403	1.173.321

Keterangan:

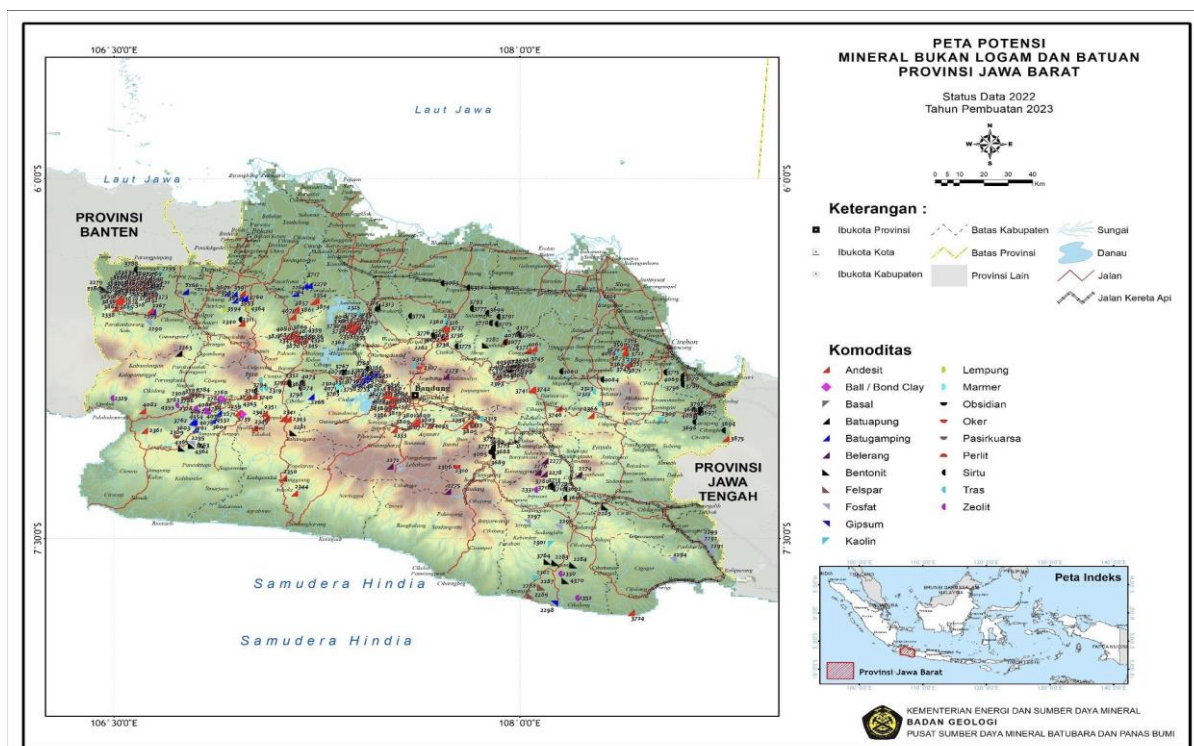
Mineral Kritis

Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Kritis

Berdasarkan kriteria dan jenis mineral kritis dan strategis, Ditjen Minerba 2023
Sumber: Kementerian ESDM, 2024

Gambar 2.7
Peta Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Kementerian ESDM, 2023

Potensi dan penggunaan energi diatas menunjukkan ketahanan energi di suatu daerah yang ditunjukkan melalui Indeks Ketahanan Energi (IKE). Secara umum ketahanan energi juga digambarkan melalui elemen bauran energy (*Energy Mix*) serta keberlanjutan (*sustainability*) dari sistem penyediaan-permintaan energi yang ada. Secara nasional IKE di Indonesia berada pada kategori tahan (skor 6-7,99) dengan capaian skor 6,64. IKE tidak diturunkan pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, namun demikian pada level provinsi IKE ditunjukkan melalui indikator-indikator lain yang berkontribusi dalam perhitungan IKE, diantaranya porsi bauran EBT, konsumsi listrik per kapita, intensitas energi final, dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada sektor energi.

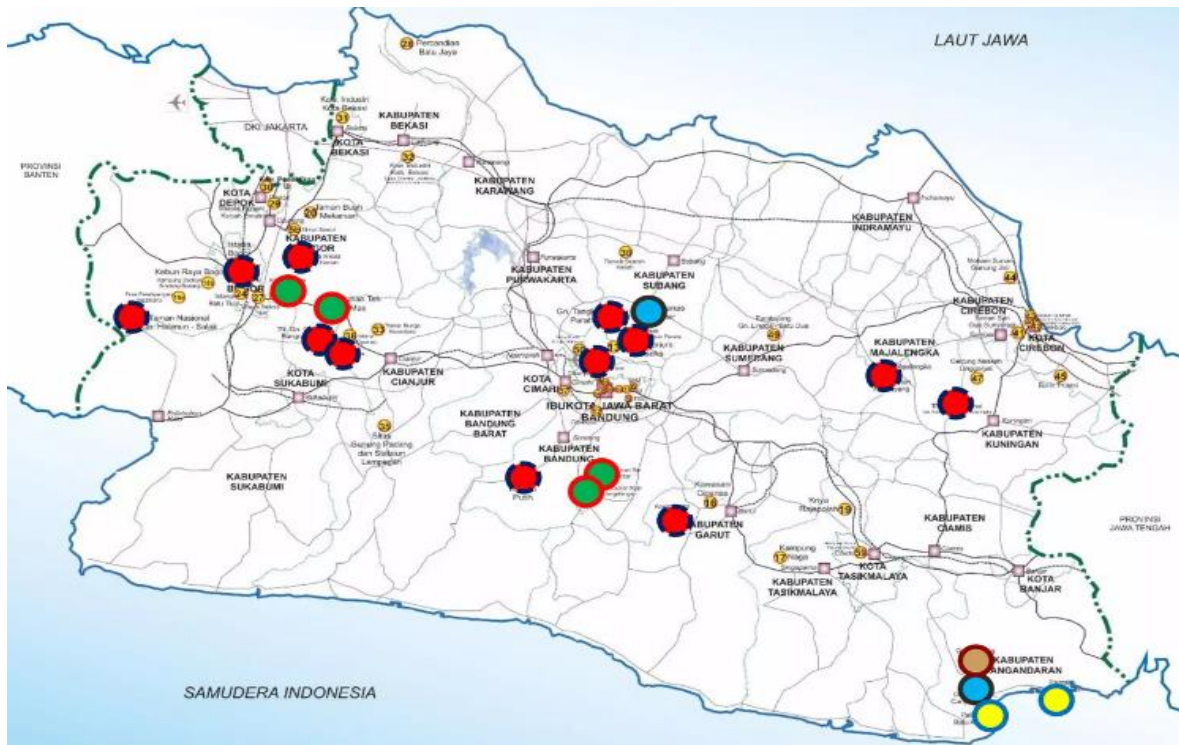
E. Pariwisata Alam

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman objek wisata yang cukup beragam dengan kuantitas yang cukup tinggi. Tipe objek pariwisata tersebut didominasi oleh objek wisata alam yang jumlahnya mencapai 53,71 persen. Hal ini menggambarkan

kondisi alam di Provinsi Jawa Barat yang indah dan menarik untuk dijadikan objek wisata oleh masyarakat sekitar.

Potensi pariwisata alam di Provinsi Jawa Barat dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu perkebunan, perairan sungai dan danau, bentang alam khusus, bentang alam pesisir pantai, serta pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/tahura.

Gambar 2.8
Peta Daya Tarik Wisata Alam Provinsi Jawa Barat



Sumber: RIPPDA Provinsi Jawa Barat, 2023

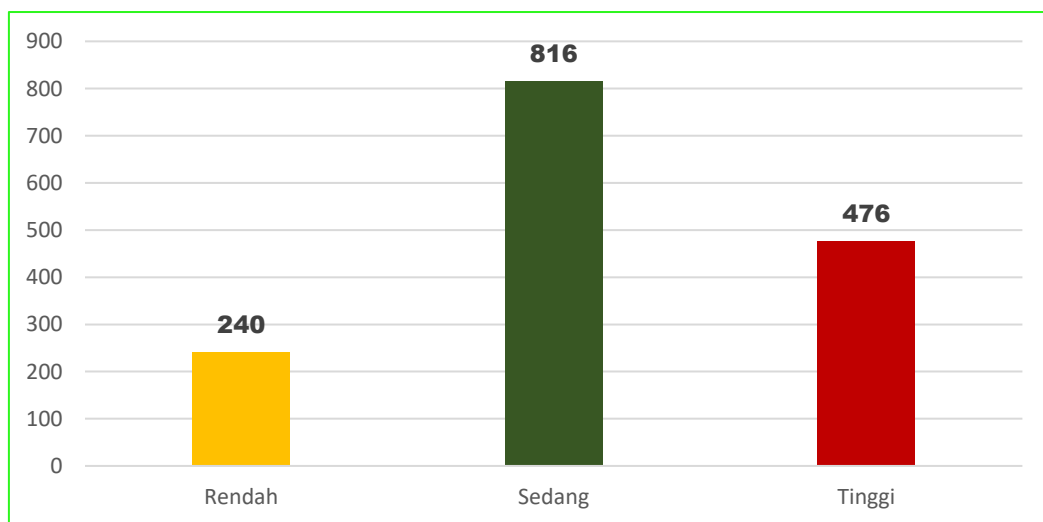
2.1.1.3 Persentase Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang di dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 salah satunya diukur dari Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) tahunan terhadap 1.532 Indikasi Program RTRW Provinsi dan Jangka Pendek 1 (satu) tahunan.

Berdasarkan hasil penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) tahunan, terdapat 240 dengan tingkat sinkronisasi rendah, 816 tingkat sedang, dan 476 tingkat tinggi. Sektor Sumber Daya Air memiliki tingkat

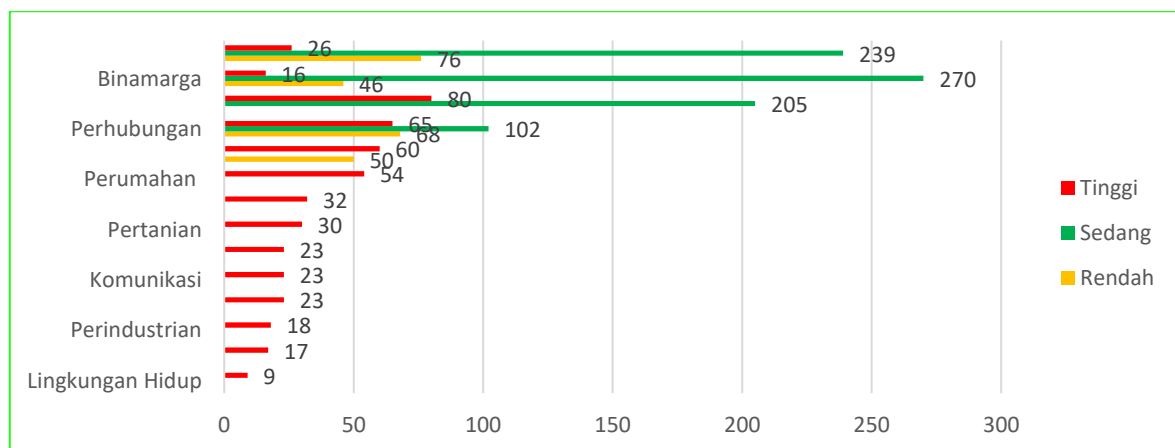
sinkronisasi paling tinggi dan sektor Lingkungan Hidup memiliki tingkat sinkronisasi paling rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat program pemanfaatan ruang yang masih belum sinkron antara RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga masing-masing dokumen perlu menyesuaikan pada saat revisi atau penyusunan kembali.

Gambar 2.9
Rekapitulasi Tingkat Sinkronisasi
Program Jangka Menengah 5 Tahunan



Sumber: Bappeda, 2024

Gambar 2.10
Sinkronisasi Indikasi Program dalam RTRW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2042

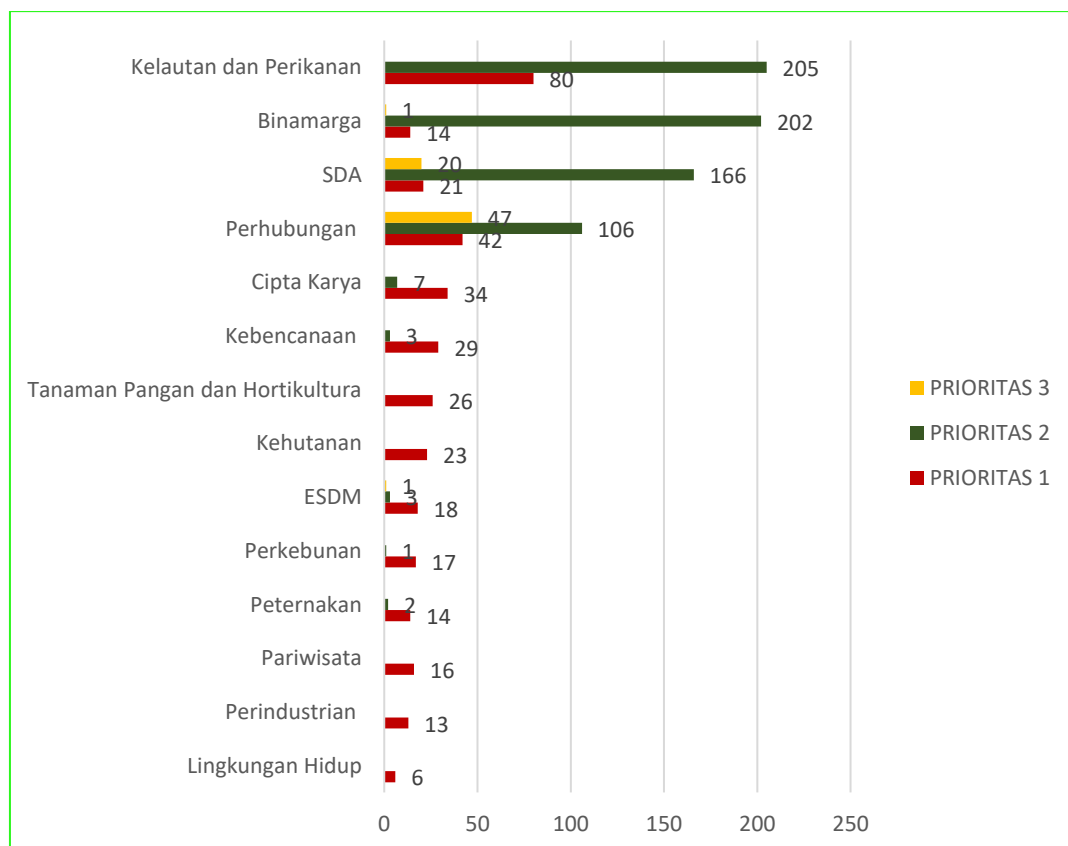


Sedangkan untuk hasil SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan, program tahun 2024 dilakukan dengan sasaran pengembangan

wilayah/kawasan di Pusat Permukiman (Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat PKN, PKW, PKL, WP), Pusat Pertumbuhan (Pusat Pertumbuhan Baru Wilayah Timur, Pusat Pertumbuhan Kelautan, Pusat Pertumbuhan Industri), Kawasan Andalan (Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN Kawasan Andalan Bopunjur, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Ciayumajakuning, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Priangan-Timur Pangandaran), dan Kawasan Strategis (KSP Bandung Utara, KSP Sukabumi Bagian Selatan, KSP Patimban, KSP Kertajati, Serta Kawasan Strategis Nasional Lainnya).

Berdasarkan hasil analisis, untuk program jangka pendek, sektor Kelautan dan Perikanan memiliki program dengan Tingkat prioritas paling tinggi terbanyak. Artinya, program sektor kelautan dan perikanan tersebut sudah ada di berbagai dokumen Pembangunan dan perlu dijadikan prioritas untuk implementasinya. Berikut merupakan grafik hasil analisis program jangka pendek 1 (satu) tahunan tahun 2024.

Gambar 2.11
Grafik Hasil Analisis Program Jangka Pendek 1 Tahunan
Tahun 2024

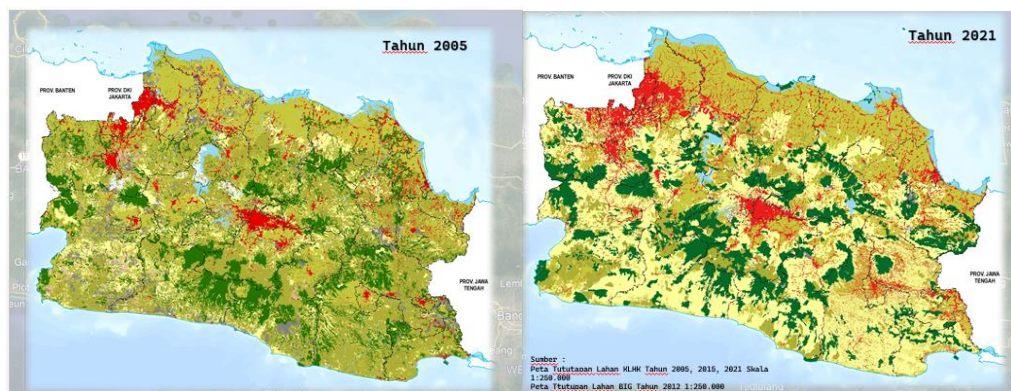


Sumber: Bappeda Jabar, 2024

2.1.1.4 Persentase Alih Fungsi Lahan

Penggunaan lahan wilayah Provinsi Provinsi Jawa Barat yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit, terdiri dari klasifikasi hutan, perkebunan, areal terbangun, sawah, ladang/tegalan, rawa/tambak, belukar/semak, dan sungai/waduk/badan air. Kajian Tutupan Lahan dilakukan secara berkala (4 tahun satu kali) menggunakan analisis *Geographic Information System* (GIS). Kajian Tutupan Lahan Jawa Barat Tahun 2018, memperhatikan perubahan garis pantai Jawa Barat (sumber: Badan Informasi Geospasial Tahun 2017). Luas masing-masing klasifikasi tutupan lahan dalam jangka waktu 24 tahun tercantum dalam gambar dan tabel berikut ini.

Gambar 2.12
Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2021



Sumber: Bappeda 2024

Tutupan lahan di Jawa Barat pada tahun 2005 adalah klasifikasi lahan perkebunan dengan persentase sebesar 40,07 persen. Klasifikasi lahan tahun 2012 didominasi oleh sawah sebesar 30,46 persen. Klasifikasi lahan tahun 2015 didominasi oleh ladang sebesar 43,37 persen. Klasifikasi lahan tahun 2021 didominasi oleh ladang kembali dengan besaran 36,29 persen. Sedangkan untuk tutupan lahan terkecil pada tahun 2005 adalah semak belukar sebesar 1,44 persen. Tahun 2012 adalah 0,0042 persen, tahun 2015 sebesar 0,09 persen, dan tahun 2021 sebesar 0,29 persen.



Tabel 2.4
Tutupan Lahan 2005, 2012, 2015, dan 2021
Provinsi Jawa Barat

Tutupan Lahan/Penggunaan Lahan	2005		2012		2015		2021	
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
Lahan Terbangun	193.275,02	5,24%	426.763,65	11,51%	307.553,38	8,31%	397.232,57	10,72%
Hutan	591.538,93	16,02%	847.177,39	22,86%	637.802,25	17,22%	674.427,10	18,21%
Lahan Terbuka	149.210,54	4,04%	1.288,13	0,03%	13.149,52	0,36%	13.286,70	0,36%
Perkebunan/Kebun	1.479.148,52	40,07%	337.833,61	9,11%	169.417,45	4,58%	231.400,12	6,25%
Ladang	367.704,38	9,96%	855.225,59	23,07%	1.606.091,33	43,37%	1.341.125,80	36,21%
Tubuh Air	111.056,52	3,01%	109.331,95	2,95%	102.926,45	2,78%	97.660,99	2,64%
Sawah	746.410,70	20,22%	1.128.883,80	30,46%	862.507,31	23,29%	937.969,60	25,32%
Semak Belukar	53.312,32	1,44%	1,57	0,00%	3.386,92	0,09%	10.779,06	0,29%
	3.691.656,94	100,00%	3.706.505,69	100,00%	3.702.834,60	100,00%	3.703.881,93	100,00%

Perubahan Tutupan Lahan 2005-2021 Provinsi Jawa Barat

Tutupan Lahan/Penggunaan Lahan	2005-2012		2012-2015		2015-2021		2005-2021	
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
Lahan Terbangun	233.488,63	6,30	-119.210,28	-3,22	89.679,19	2,42	203.957,54	5,51
Hutan	255.638,46	6,90	-209.375,14	-5,65	36.624,85	0,99	82.888,17	2,24
Lahan Terbuka	-147.922,41	-3,99	11.861,39	0,32	137,18	0,0037	-135.923,83	-3,67
Perkebunan/Kebun	-1.141.314,91	-30,79	-168.416,16	-4,55	61.982,66	1,67	-1.247.748,40	-33,69
Ladang	487.521,21	13,15	750.865,74	20,28	-264.965,53	-7,15	973.421,41	26,28
Tubuh Air	-1.724,57	-0,05	-6.405,50	-0,17	-5.265,46	-0,14	-13.395,53	-0,36
Sawah	382.473,10	10,32	-266.376,49	-7,19	75.462,29	2,04	191.558,89	5,17
Semak Belukar	-53.310,75	-1,44	3.385,35	0,09	7.392,15	0,20	-42.533,26	-0,01

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak luput dari fenomena perubahan penggunaan lahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi sejalan dengan semakin meningkatnya pertambahan jumlah penduduk yang secara langsung berdampak pada kebutuhan lahan permukiman yang semakin meningkat. Selain diakibatkan oleh pertambahan jumlah penduduk, perubahan penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jawa Barat juga diakibatkan oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur guna pemerataan pembangunan.

Gambar 2.13
Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



Sumber: Bappeda, 2024

Kondisi alih fungsi lahan pada tahun 2018 tersebut menjadi basis data dalam penyusunan revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Selain menjadi isu dalam penyusunan revisi RTRW Provinsi, alih fungsi lahan juga menjadi salah satu isu dalam KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Pada KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, alih fungsi lahan terjadi karena adanya *driving forces* berupa aktivitas ekonomi di wilayah *ecoregion* dan adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan material yang bersumber dari Sumber Daya Alam Tak Terbarukan, sehingga memicu adanya aktivitas pertambangan. Alih fungsi lahan juga terjadi karena adanya tekanan penduduk yang tinggi sehingga diperlukan perluasan permukiman untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduk. Fenomena ini banyak terjadi pada lahan pertanian menjadi kawasan permukiman/terbangun. Selain menjadi Kawasan Permukiman, alih fungsi lahan pertanian juga banyak terjadi perubahan menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Hal tersebut dikarenakan tingginya

permintaan investasi di Provinsi Jawa Barat, khususnya pada sektor industri. Dampak dari adanya alih fungsi lahan pada lahan pertanian yaitu penurunan daya dukung penyedia pangan dan peningkatan potensi terjadinya kerawanan pangan.

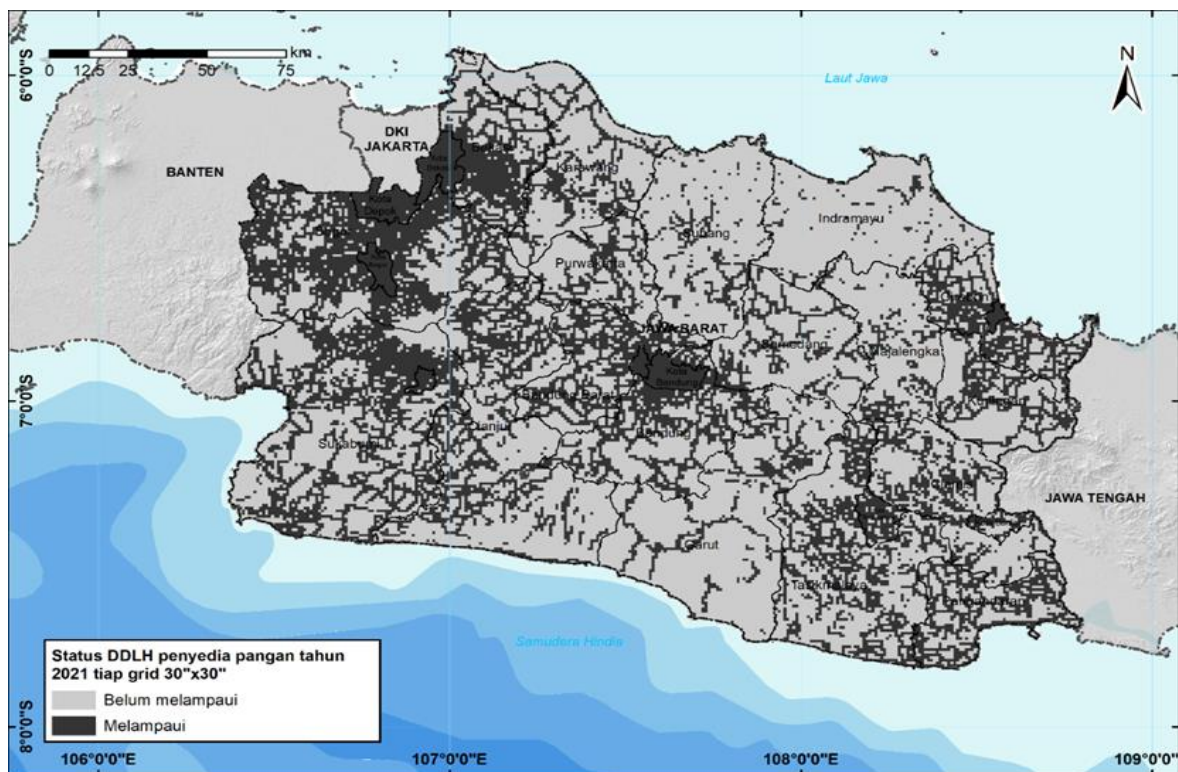
Selain terjadi di darat, alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Barat juga terjadi di Kawasan Pesisir, terutama di Wilayah Pantai Utara (PANTURA). Alih fungsi lahan terjadi pada lahan-lahan tambak yang berubah peruntukan menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Dampak dari adanya perubahan tambak tersebut yaitu berkurangnya produksi perikanan budidaya, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat lokal.

2.1.1.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan manusia untuk menentukan keberlangsungan dan kesejahteraan manusia, yaitu dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Lingkungan alam sangat mempengaruhi kebutuhan fisiologis manusia, melalui penyediaan sumber daya, diantaranya yang paling dasar adalah pangan, air, dan energi. Jasa lingkungan/ekosistem merupakan produk sumber daya alam hayati yang ekosistemnya berupa manfaat baik langsung (*tangible*) dan/atau tidak langsung (*intangible*). Jasa lingkungan dapat digunakan untuk merepresentasikan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). DDDTLH merupakan kapasitas jasa lingkungan dalam mendukung peri kehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Apabila semakin tinggi nilai DDDTLH pada suatu ekoregion, maka ekosistem semakin baik kualitas dan fungsi ekoregion tersebut menyediakan jasa lingkungannya (Riqqi, et al., 2019). DDDTLH ini ditunjukkan melalui status daya dukung lingkungan hidup penyedia pangan dan status daya dukung lingkungan hidup penyedia air bersih.

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. DDLH penyedia pangan tersebut merupakan informasi yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan sehingga ketersediaan sumber daya pangan dapat terjamin.

Gambar 2.14
Status DDLH Penyedia Pangan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
dalam Sistem Grib 30"x30"

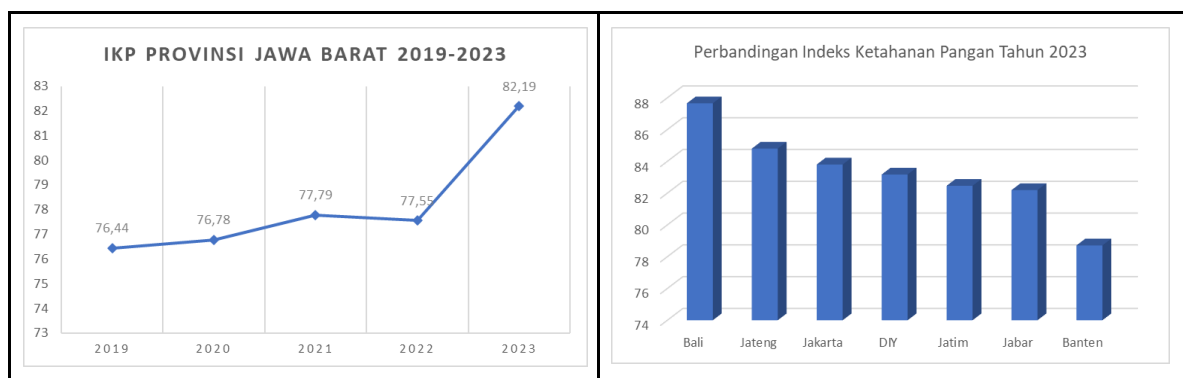


Sumber: Hasil analisis 2023 pada Dokumen KLHS RPJP Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan hasil analisis status DDLH penyedia pangan pada gambar diatas, wilayah dengan status DDLH penyedia pangan yang telah melampaui ambang batas pada tahun 2021 sebagian besar merupakan wilayah kota dan perkotaan. Wilayah tersebut meliputi daerah penyangga ibukota seperti Metropolitan Bandung Raya, khususnya Kota Bandung dan Kota Cimahi, serta kabupaten/kota lain seperti Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya. Wilayah-wilayah dengan status melampaui DDLH penyedia pangan ini terjadi karena merupakan wilayah padat penduduk sehingga memiliki kebutuhan energi bahan pangan yang besar. Secara umum, 63,49 persen wilayah di Provinsi Jawa Barat belum melampaui ambang batas lingkungan dalam hal penyediaan pangan. Hal tersebut berarti bahwa sebagian kebutuhan pangan masih dapat terpenuhi oleh ketersediaan pangan di setiap wilayah itu sendiri. Luasan setiap kabupaten/kota yang memiliki status belum melampaui bervariasi, sebagian besar berada pada rentang 60-90 persen. Kabupaten Indramayu memiliki persentase terbesar, yaitu 92,78 persen luas wilayahnya belum melampaui ambang batas lingkungan dalam hal penyediaan pangan. Sementara itu, Kabupaten Subang,

Kabupaten Garut, dan Kabupaten Majalengka memiliki persentase diatas 80 persen. Namun Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Cirebon memiliki persentase terendah sebesar 0 persen, diikuti oleh Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Sukabumi yang memiliki persentase berturut-turut 0,4 persen, 1,25 persen, dan 7,02 persen. Hal ini juga ditunjukkan melalui Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat yang meningkat dari semula 76,44 persen pada tahun 2019 menjadi 77,55 persen pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pangan Nasional tahun 2023 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.15
IKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

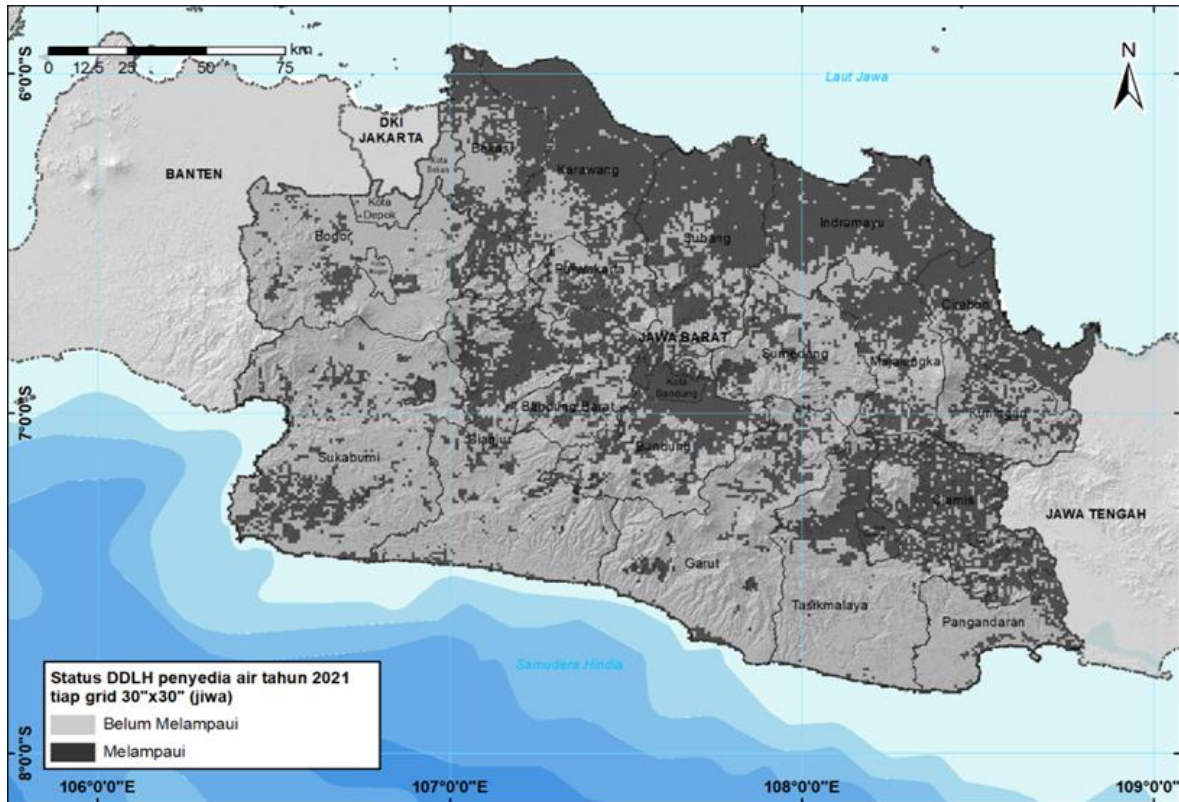


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Pada daya dukung lingkungan hidup penyedia air bersih menunjukkan kondisi ambang batas air bersih terhadap pemenuhan kebutuhan sesuai jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis status DDLH penyedia air sebagaimana tercantum dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Barat, wilayah dengan status telah melampaui ambang batas pada tahun 2021 sebagian besar berada di wilayah Utara Jawa Barat. Wilayah tersebut meliputi daerah pantura (Pantai Utara), seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten/Kota Bekasi serta pada kawasan Metropolitan Bandung Raya, khususnya Kota Bandung dan Kota Cimahi. Wilayah-wilayah dengan status melampaui ini terjadi karena merupakan wilayah padat penduduk sehingga memiliki kebutuhan air bersih yang besar. Secara umum, 60,07 persen wilayah di Provinsi Jawa Barat belum melampaui ambang batas lingkungan dalam hal penyediaan air. Hal

tersebut berarti bahwa sebagian kebutuhan air masih dapat terpenuhi oleh ketersediaan air di tiap wilayah itu sendiri.

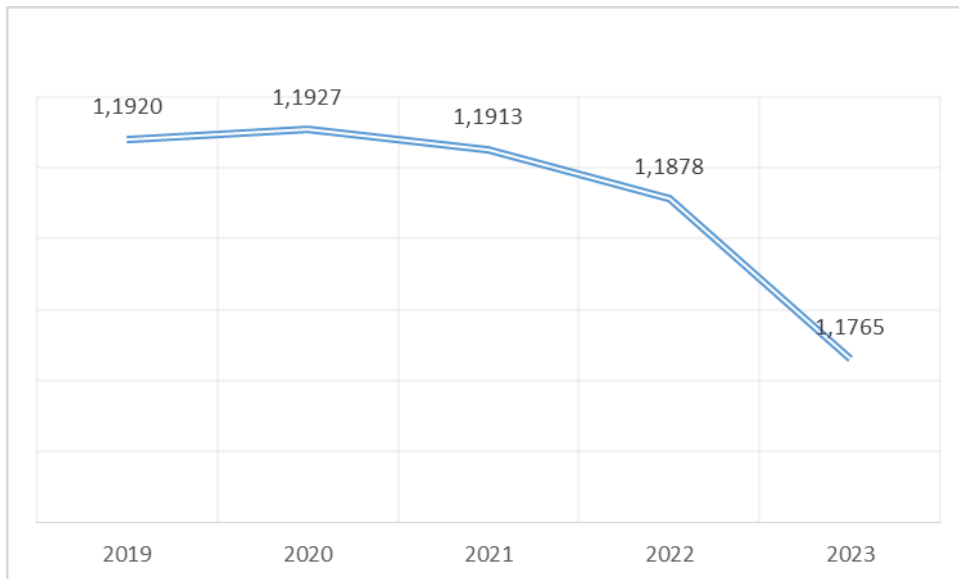
Gambar 2.16
Status DDLH Penyedia Air Terhadap Ambang Batas Tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat dalam Sistem Grid 30"x30"



Sumber: Hasil analisis 2023 pada Dokumen KLHS RPJP Provinsi Jawa Barat, 2024

Sejalan dengan kondisi diatas, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya air yang besar, terlihat pada capaian yang dihitung melalui indikator Indeks Penggunaan Air (IPA). Indeks Penggunaan Air menunjukkan kondisi yang terjaga, dilihat dari capaian pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 1,1878 menjadi 1,1765. Secara empiris, kondisi ini menunjukkan kebutuhan air di Provinsi Jawa Barat masih bisa terpenuhi dengan baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

Gambar 2.17
Indeks Penggunaan Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Keterkaitan Indeks Penggunaan Air dengan Indikator Kapasitas Air Baku yaitu Indeks Penggunaan Air memberikan gambaran data dan informasi secara empiris untuk proyeksi ketersediaan air baku yang digunakan atau dimanfaatkan untuk rumah tangga, komersil, dan industri.

2.1.1.6 Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Perubahan iklim yang ekstrem akibat pemanasan global telah menyebabkan berbagai konsekuensi serius di berbagai sektor kehidupan. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat telah mengalami perubahan signifikan akibat pemanasan global. Dampak yang mulai terasa adalah perubahan pola cuaca yang tidak menentu. Penyimpangan cuaca seperti curah hujan yang tidak merata, periode kekeringan yang panjang, dan intensitas suhu yang ekstrem menjadi permasalahan pembangunan. Perubahan cuaca yang tidak menentu salah satunya disebabkan oleh emisi gas rumah kaca pada berbagai sektor yaitu, energi, lingkungan, transportasi, kehutanan, dan pertanian.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen kuat dalam menangani perubahan iklim. Hal ini tercermin dengan dibentuknya Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat melalui SK Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Nomor

674/Kep-1482/Fisik/13 pada Tahun 2013 yang selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran pada tahun 2024.

Komitmen ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan, yang ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perubahan Iklim pada tahun 2012 yang merupakan dokumen rencana aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dari berbagai bidang terkait, dimana Gubernur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 menetapkan target tingkat upaya penurunan emisi GRK sebesar 9,94 persen pada tahun 2030 pada sektor berbasis lahan (kehutanan dan pertanian), energi (energi dan transportasi) dan pengelolaan limbah, yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha untuk melaksanakan berbagai kegiatan mitigasi, yang secara langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi GRK.

Namun dengan mempertimbangan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri, dimana terdapat penyesuaian nomenklatur indikator dan tata cara perhitungan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini indikator yang ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi adalah Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca serta Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif dan Tahunan. Terhadap kedua indikator tersebut Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan target secara imperatif untuk tahun 2025 dan 2045 berdasarkan hasil permodelan sistem Dinamis tahun 2024.

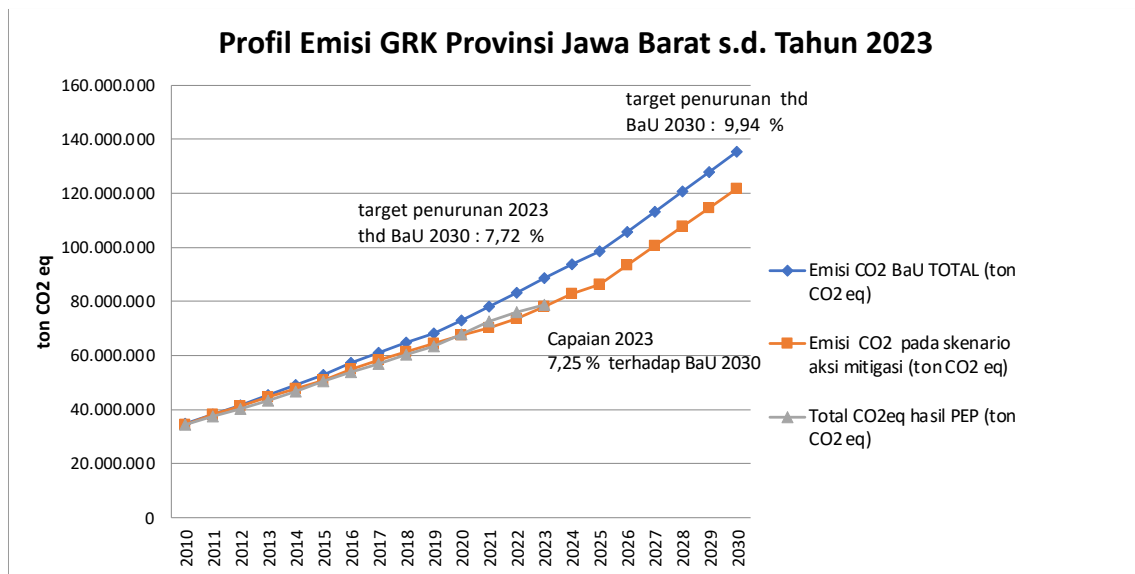
Berdasarkan hasil permodelan tersebut jika tidak dilakukan intervensi kebijakan (*Business as Usual*) maka pada tahun 2045 emisi GRK di Jawa Barat diperkirakan mencapai 436.753.948,20 Ton CO₂eq atau secara kumulatif dihitung dari *baseline* 2010 mencapai 8.199.401.411,19 Ton CO₂eq. Sementara jika terdapat intervensi kebijakan maka emisi GRK di Jawa Barat diperkirakan mencapai 130.676.781,31 Ton CO₂eq atau secara kumulatif dihitung dari *baseline* 2010 mencapai 5.604.115.078,71 Ton CO₂eq. Sehingga terjadi penurunan emisi tahunan sebesar 306.077.166,90 Ton CO₂eq (70,08 %) dan penurunan emisi kumulatif sebesar 2.595.286.332,48 Ton CO₂eq (31,65 %). Adapun angka penurunan

emisi GRK tersebut dihasilkan dari kontribusi sektor AFOLU atau penggunaan lahan, pertanian, peternakan, persampahan, limbah cair, energi, dan transportasi.

Terkait dengan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai emisi GRK aktual yang terlepas ke atmosfer pada tahun tertentu terhadap *output* aktivitas ekonomi dalam hal ini PDRB atas dasar harga Konstan Tahun tersebut, dimana berdasarkan hasil permodelan jika terdapat intervensi kebijakan maka intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 diperkirakan mencapai 21,47 Ton CO₂eq/Rp Miliar. Sementara penurunan intensitas emisi GRK merupakan selisih antara intensitas emisi GRK *initial* atau *baseline* tahun 2010 terhadap intensitas emisi GRK daerah pada tahun tertentu, sehingga untuk persentase penurunan intensitas emisi sendiri dihitung berdasarkan perbandingan penurunan intensitas emisi GRK tahun tertentu terhadap intensitas emisi GRK *initial* atau *baseline* tahun 2010. Dalam hal ini berdasarkan hasil permodelan penurunan intensitas emisi tahun 2045 sebesar 67,39 Ton CO₂eq/Rp Miliar atau sebesar 75,84 persen (dihitung terhadap *baseline* tahun 2010 sebesar 88,85 ton CO₂eq/Rp Miliar).

Kondisi capaian penurunan emisi GRK terdiri dari capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor kehutanan, pertanian dan peternakan, energi dan transportasi, limbah, dan persampahan. Sampai dengan tahun 2023 capaian penurunan emisi GRK telah dilakukan sebesar 9.802.395,19 Ton CO₂ eq dari target penurunan sebesar 13.446.822 Ton CO₂ eq terhadap BaU 2030 135.212.417 Ton CO₂eq (realisasi 7,25 persen dari target tahun 2023 sebesar 5,22 persen dalam RPJMD 2018-2023 yang berubah menjadi 6,1 persen dalam RPD 2024-2026) sebagaimana gambar berikut.

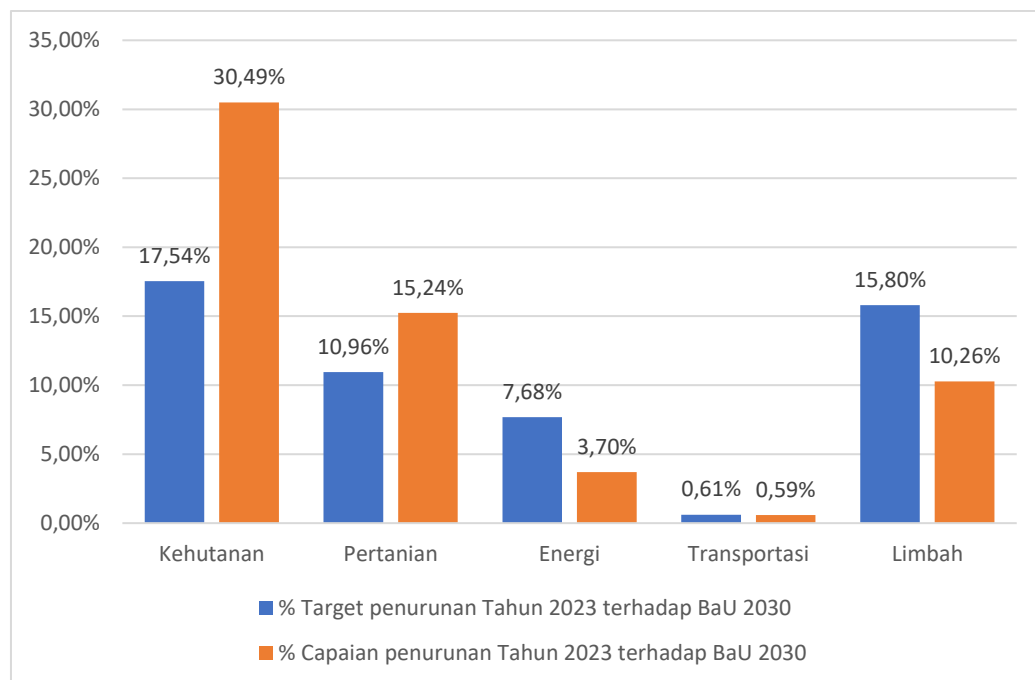
Gambar 2.18
Profil Ketercapaian Penurunan Emisi GRK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2023 terhadap Target RAD GRK



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Capaian penurunan emisi GRK terhadap BaU 2030 tersebut merupakan kontribusi sebesar 30,49 persen (5.690.221,95 Ton CO₂ eq) dari sektor kehutanan, 15,24 persen dari sektor pertanian dan peternakan (4.878.020 Ton CO₂ eq), 3,70 persen dari sektor energi (30.854.863,18 Ton CO₂ eq), 0,59 persen dari sektor transportasi (27.206.166,54 Ton CO₂ eq), 10,26 persen dari sektor limbah dan Persampahan (10.027.279 Ton CO₂ eq) terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19
Kontribusi Ketercapaian Penurunan Emisi GRK Provinsi Jawa Barat per Sektor Tahun 2023



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat berupaya maksimal untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca guna mengendalikan dampak perubahan iklim yang terjadi. Bahkan realisasi ini telah melebihi target-target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 sebelumnya dan sifatnya terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tingkat upaya penurunan Emisi GRK dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 2.20
Profil Ketercapaian Tingkat Upaya Penurunan Emisi GRK terhadap Target RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

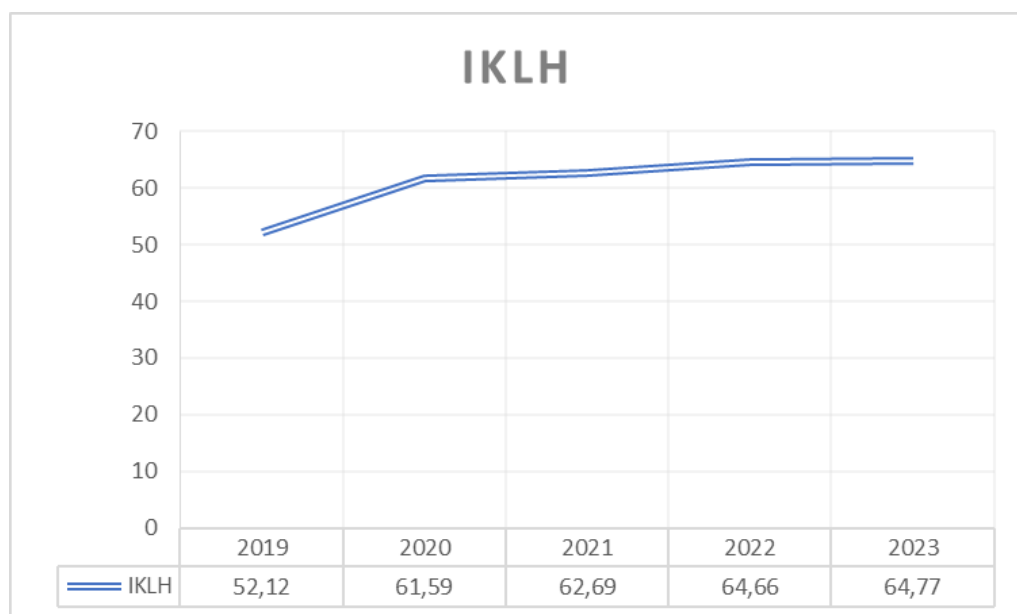
Berdasarkan gambar tersebut, artinya perubahan iklim yang mengakibatkan dampak yang cukup signifikan dalam hal terjadinya pemanasan global diiringi oleh upaya Jawa Barat untuk dapat melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim terutama dalam hal mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang selalu meningkat setiap tahunnya melalui kegiatan-kegiatan aksi mitigasi di beberapa sektor, seperti penerapan Kebijakan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), pembangunan PLTS Atap, rencana pembangunan TPPAS Regional, Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP), pengolahan dan penggunaan pupuk organik, serta pengembangan kendaraan angkutan umum massal perkotaan.

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup direpresentasikan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Metode perhitungan IKLH sangat dinamis dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perkembangan berbagai hasil penelitian. Perhitungan IKLH terkini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan metode terbaru, IKLH provinsi terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara

(IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pada metode sebelumnya, IKAL belum menjadi komponen perhitungan IKLH. Selain itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 capaian IKLH Provinsi Jawa Barat menggunakan perhitungan dengan 3 (tiga) komponen yaitu IKA, IKU dan IKTL. Sedangkan capaian IKLH Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dihitung berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu IKA, IKU, IKAL, dan IKL. Nilai IKLH Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dengan peningkatan capaian IKA, dan IKL, serta masuknya IKAL dalam perhitungan IKLH sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.21
IKLH Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: DLH Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kualitas air bersih menjadi sesuatu yang mempengaruhi pembangunan, melalui peningkatan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan energi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air, diantaranya penggunaan lahan, litologi, waktu, dan curah hujan. Selain itu, aktivitas manusia juga turut mempengaruhi kualitas air melalui pencemaran air sungai, baik fisik, kimia, maupun

biologi. Kualitas air salah satunya dapat dinilai/digambarkan dengan Indeks Kualitas Air (IKA). IKA menggambarkan kondisi kualitas air berupa nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin tinggi skor IKA menunjukkan kualitas air yang lebih baik. Pemantauan kualitas air dilakukan pada 11 (sebelas) sungai, terdiri dari 4 (empat) sungai utama kewenangan Pemerintah Pusat dan 7 (tujuh) sungai kewenangan provinsi dengan parameter yang diukur meliputi 11 (sebelas) parameter. Peningkatan capaian IKA terutama didukung oleh berbagai upaya penanganan DAS Prioritas, diantaranya pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang dilaksanakan secara *pentahelix* melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

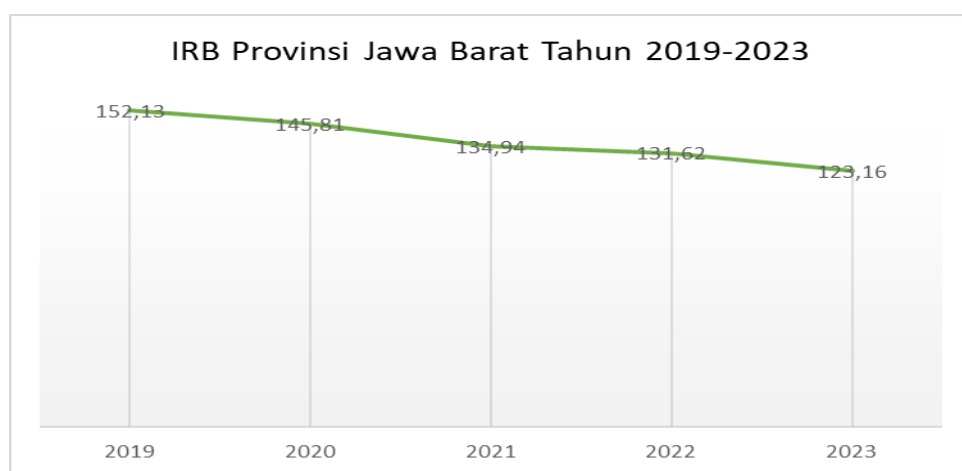
Pemantauan kualitas air laut dilakukan di 2 (dua) titik pantau yang mewakili pantai utara dan pantai selatan Jawa Barat, dengan parameter yang diukur meliputi padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), ammonia total (NH₃-N), orto fosfat (PO₄-P), serta minyak dan lemak. Jumlah titik lokasi pemantauan air laut perlu ditingkatkan agar lebih representatif menggambarkan kualitas air laut di Jawa Barat, meliputi muara sungai utama, lokasi yang berpotensi terdampak kegiatan daratan atau lautan, dan ekosistem penting seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuari, dan ekosistem lainnya. Sama seperti IKA, sumber pencemar yang dapat mempengaruhi nilai dari IKAL adalah limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah pertambangan.

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran/indeks yang digunakan untuk menilai pencemaran udara serta kualitas udara ambien. Nilai IKU dapat menggambarkan kondisi dan perubahan kualitas udara di suatu daerah serta dapat menjadi nilai dasar yang menjadi sumber informasi untuk perencanaan terkait udara bersih. Pemantauan kualitas udara dilakukan di 27 kabupaten/kota dengan parameter yang diuji meliputi sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Pemantauan dilakukan pada 4 (empat) titik yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, permukiman padat penduduk, dan kawasan perkantoran.

Perubahan iklim mempengaruhi sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat. Curah hujan yang tidak merata dan periode kekeringan yang

panjang membuat petani menghadapi tantangan dalam mengelola lahan pertanian. Produksi tanaman menjadi terganggu, mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen. Tidak hanya itu, dampak perubahan iklim dan pemanasan global terhadap lingkungan juga terlihat pada ketersediaan air bersih di Provinsi Jawa Barat. Perubahan pola hujan menyebabkan penurunan ketersediaan air tanah, sungai, dan danau. Masyarakat di beberapa daerah harus menghadapi krisis air bersih yang serius, terutama selama musim kemarau yang panjang.

Gambar 2.22
IRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Indeks Risiko Bencana (IRBI) Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar 123,16 poin masuk dalam kategori Sedang. Jika dilihat per kabupaten/kota masih terdapat 6 (enam) kabupaten di Jawa Barat yang masih memiliki nilai IRBI dengan kategori tinggi, sementara 21 kabupaten/kota lainnya berada pada kategori sedang. Indeks Risiko Bencana tahun 2023 tertinggi adalah Kabupaten Cianjur (185,14 poin) dan terendah adalah Kota Bogor (63,49 poin).

Potensi bencana alam Provinsi Jawa Barat menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2025 meliputi 14 (empat belas) jenis bencana yaitu: 1) Banjir; 2) Banjir Bandang; 3) Cuaca Ekstrem; 4) Epidemik dan Wabah Penyakit; 5) Gelombang Ekstrem dan Abrasi; 6) Gempa Bumi; 7) Kebakaran Hutan dan Lahan; 8) Kegagalan Teknologi; 9) Kekeringan; 10) Letusan Gunung Api; 11) Likuefaksi; 12) Pandemi COVID-19; 13) Tanah Longsor; dan 14) Tsunami.

1) Banjir

Kajian Risiko Bencana untuk bahaya banjir menunjukkan sebanyak 25 kabupaten/kota memiliki bahaya banjir. Sebanyak 21 kabupaten/kota berada pada level bahaya **Tinggi** banjir dan sejumlah 4 (empat) kota masuk ke dalam tingkat bahaya **Sedang**, sementara itu tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kategori tingkat bahaya rendah. Total luas wilayah dengan bahaya banjir di Provinsi Jawa Barat seluas 1.352.100 Ha dengan luas bahaya kelas rendah seluas 552.607 Ha, kelas bahaya sedang seluas 422.582 Ha dan kelas bahaya tinggi seluas 376.911 Ha. Kabupaten/kota dengan bahaya banjir tertinggi adalah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.

2) Banjir Bandang

Terdapat 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang teridentifikasi memiliki bahaya banjir bandang dengan luasan total wilayah yang rawan banjir bandang seluas 180.570 Ha. Dari luas total tersebut seluas 3.629 Ha masuk dalam wilayah kelas bahaya **Rendah**, seluas 17.338 Ha berada di kelas bahaya **Sedang** dan 159.603 Ha berada di kelas bahaya **Tinggi**. Daerah dengan bahaya banjir bandang tertinggi adalah Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya.

3) Cuaca Ekstrem

Terdapat 17 (tujuh belas) kabupaten dan 5 (lima) kota yang berada di tingkat bahaya **Tinggi** Cuaca Ekstrem, 1 (satu) kabupaten dan 2 (dua) kota yang masuk dalam kategori **Sedang**. Dengan luas total wilayah yang berada di daerah rawan cuaca ekstrem seluas 1.218.112 Ha yang terbagi menjadi daerah dengan tingkat bahaya **Rendah** seluas 28 Ha, berada di kelas **Sedang** seluas 851.363 Ha dan daerah dengan kelas bahaya **Tinggi** seluas 366.721 Ha. Kabupaten/kota dengan bahaya tertinggi adalah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.

4) Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Total terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota yang berpotensi terjadi gelombang ekstrem dan abrasi di Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota masuk dalam kelas bahaya tinggi dan 4 (empat) kabupaten masuk ke dalam kelas bahaya rendah. Total wilayah yang berpotensi terjadi bahaya gelombang ekstrem dan abrasi seluas 15.852 Ha. Dengan luas kelas bahaya **Rendah** seluas 11.501

Ha, kelas **Sedang** seluas 421 Ha dan kelas bahaya **Tinggi** seluas 3.930 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrem dan abrasi pada kelas Rendah adalah Kabupaten Cianjur dengan luas 1.408 Ha. Pada kelas Sedang tidak ada sebaran luas bahaya gelombang ekstrem dan abrasi. Sedangkan pada kelas Tinggi adalah Kabupaten Sukabumi dengan luas 2.437 Ha dan Kota Cirebon dengan luas 187 Ha.

5) Gempa Bumi

Kajian Risiko Bencana menunjukkan bahwa 27 kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan daerah dengan bahaya gempa bumi dengan total wilayah total yang memiliki bahaya gempa bumi seluas 3.757.539 Ha. Tingkat bahaya tertinggi meliputi Kabupaten Garut dan Sukabumi.

6) Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dimiliki oleh 27 kabupaten/kota dengan luas total potensi bahaya seluas 3.754.632 Ha. Bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan kelas **Rendah** seluas 2.120.428 Ha, kelas **Sedang** 1.353.549 Ha, dan kelas **Tinggi** dengan luas 280.655 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas **Rendah** adalah Kota Tasikmalaya dengan luas 21.566 Ha. Pada kelas **Sedang** terdapat di wilayah Kabupaten Karawang dengan luas 193.426 Ha dan Kota Banjar dengan luas 13.302 Ha. Sedangkan untuk kelas **Tinggi** terdapat di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan luas 422.538 Ha.

7) Kekeringan

Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah 3.757.246 Ha yang meliputi 27 kabupaten/kota. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas **Rendah** 0 (nol) Ha, kelas **Sedang** 2.409.186 Ha, dan kelas **Tinggi** seluas 1.348.060 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas Rendah adalah Kota Tasikmalaya dengan luas 21.566 Ha. Pada kelas Sedang terdapat di wilayah Kabupaten Karawang dengan luas 193.426 Ha dan Kota Banjar dengan luas 13.302 Ha. Sedangkan untuk kelas Tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan luas 422.538,00 Ha.

8) Letusan Gunung Api

Data dari Kajian Risiko Bencana Jawa Barat Tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa terdapat 20 (dua puluh) kabupaten/kota yang memiliki bahaya Letusan Gunung Api dengan luas total 161.599 Ha. Luas bahaya letusan gunung api tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas **Rendah** seluas 123.871 Ha, kelas **Sedang** seluas 25.612,00 Ha, dan kelas **Tinggi** seluas 12.116 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunung api pada kelas Rendah adalah Kabupaten Subang dengan luas 4.911 Ha dan Kota Tasikmalaya dengan luas 699 Ha. Pada kelas Sedang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor dengan luas 15.600 Ha. Sedangkan untuk kelas Tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Garut dengan luas 44.389 Ha.

9) Tanah Longsor

Total luas bahaya tanah longsor di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah 1.057.230 Ha berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas **Rendah** seluas 83.320 Ha, kelas **Sedang** seluas 851.579 Ha dan kelas **Tinggi** seluas 122.331 Ha, yang meliputi 23 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas Rendah tidak ada sebaran luas bahaya tanah longsor. Pada kelas Sedang terdapat di wilayah Kabupaten Pangandaran dengan luas 15.649 Ha dan Kota Banjar dengan luas 2.021 Ha. Sedangkan untuk kelas Tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Garut dengan luas 191.207 Ha.

10) Tsunami

Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki bahaya bencana Tsunami yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya. Total luas bahaya tsunami di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah 17.871.00 Ha berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tsunami tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas **Rendah** seluas 1.961.00 Ha, kelas **Sedang** seluas 1.535.00 Ha dan kelas **Tinggi** seluas 14.374.00 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami terdapat di wilayah

Kabupaten Sukabumi dengan luas 5.165.00 Ha.

11) Kegagalan Teknologi

Total luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah 10.373 Ha berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kegagalan teknologi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas **Rendah** seluas 5.026 Ha, kelas **Sedang** seluas 1.747 Ha, dan kelas **Tinggi** seluas 3.600 Ha yang meliputi 20 (dua puluh) kabupaten/kota di Jawa Barat. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas Rendah terdapat di wilayah Kabupaten Bogor dengan luas 1.431 Ha dan Kota Bekasi dengan luas 472 Ha. Pada kelas Sedang terdapat di wilayah Kabupaten Karawang dengan luas 1.748 Ha. Sedangkan untuk kelas Tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi dengan luas 3.599 Ha.

12) Epidemik dan Wabah Penyakit

Sebanyak 27 kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan daerah dengan bahaya epidemik dan wabah penyakit. Total luas bahaya epidemik dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah 3.751.392 Ha berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya epidemik dan wabah penyakit tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas **Rendah** seluas 88.741 Ha, kelas **Sedang** seluas 3.292.637 Ha dan kelas **Tinggi** seluas 370.014 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemik dan wabah penyakit terdapat di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan luas 421.501 Ha dan Kota Bekasi dengan luas 21.566 Ha

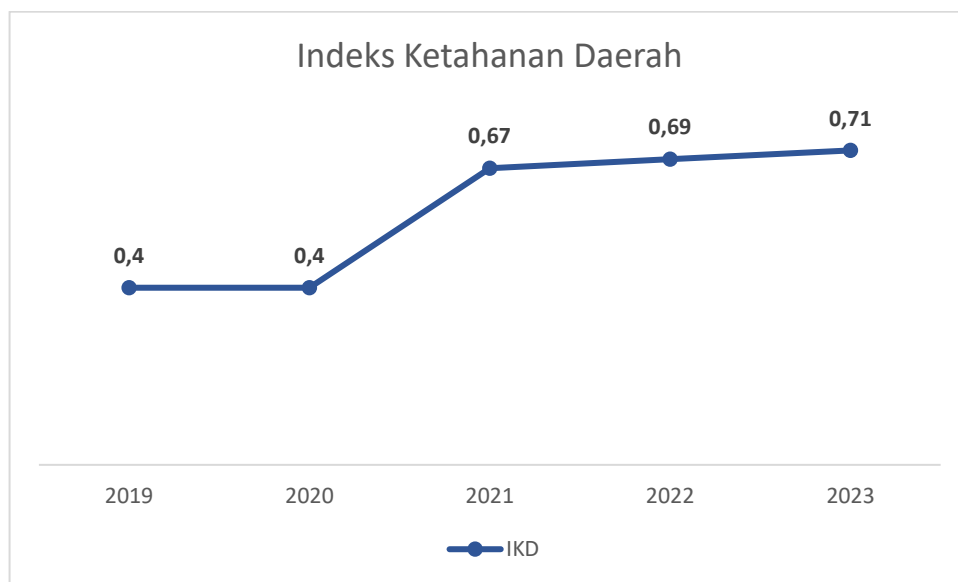
13) Likuefaksi

Terdapat 21 kabupaten/kota yang memiliki bahaya likuefaksi. Total luas bahaya likuefaksi di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah 614.929 Ha berada pada kelas Tinggi. Luas likuefaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas **Rendah** seluas 88.033 Ha, kelas **Sedang** seluas 524.444 Ha, dan kelas **Tinggi** seluas 2.452 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi pada kelas Rendah terdapat di wilayah Kabupaten Bandung dengan luas 28.174 Ha dan Kota Bandung dengan luas 6.257 Ha. Pada kelas Sedang terdapat di wilayah Kabupaten Indramayu dengan luas 149.739 Ha, Kota Banjar dengan luas 4.790 Ha, dan Kota

Bekasi 4.790 Ha. Sedangkan untuk kelas Tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan luas 5.520 Ha.

Namun, dari berbagai potensi bencana yang ada di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi bencana-bencana tersebut sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2.23
Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan gambar diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengalami kenaikan yang menandakan artinya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Bawat semakin meningkat, ditandai dengan capaian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Barat cenderung terus mengalami kenaikan dengan capaian terakhir pada tahun 2023 sebesar 0,71 poin.

2.1.2 Demografi

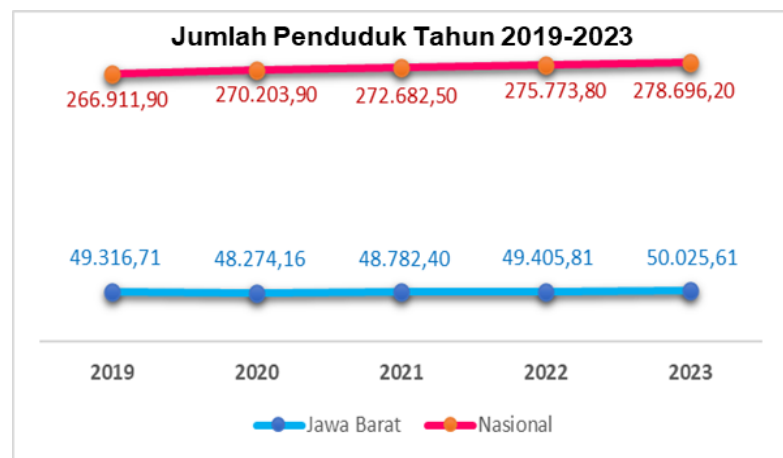
2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal penting yang berperan sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Artinya penduduk dapat menjadi objek tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, sekaligus berperan menjadi pelaku yang

akan melaksanakan pembangunan. Sehingga kualitas penduduk akan berpengaruh terhadap kualitas dan keberhasilan dari pembangunan.

Apabila dilihat dari jumlahnya, penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sekitar 50,02 juta orang atau ekuivalen dengan 17,89 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk tersebut merupakan yang terbanyak di Indonesia.

Gambar 2.24
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

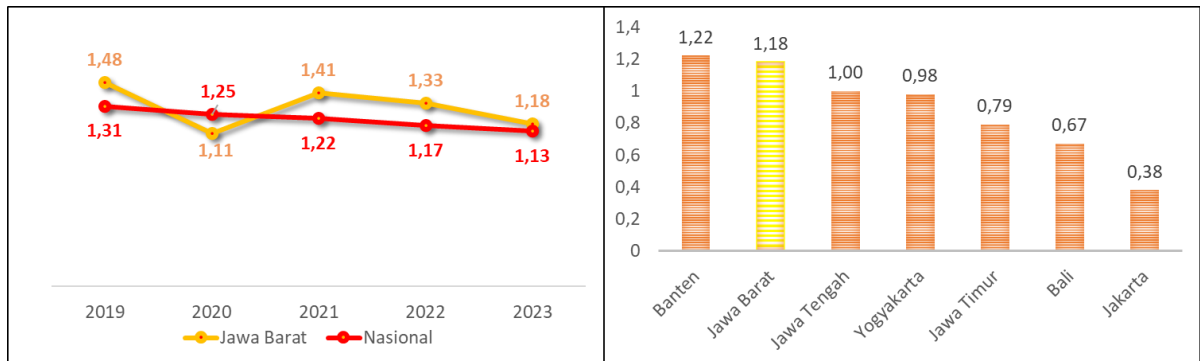


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Perubahan jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu, diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi penduduk.

Meskipun Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak, namun capaian LPP Provinsi Jawa Barat tahun 2023 masih di bawah capaian Provinsi Banten sebesar 1,22 persen. Sedangkan, jika dibandingkan dengan LPP Nasional sebesar 1,13 persen, LPP Provinsi Jawa Barat masih di atasnya yaitu sebesar 1,18 persen.

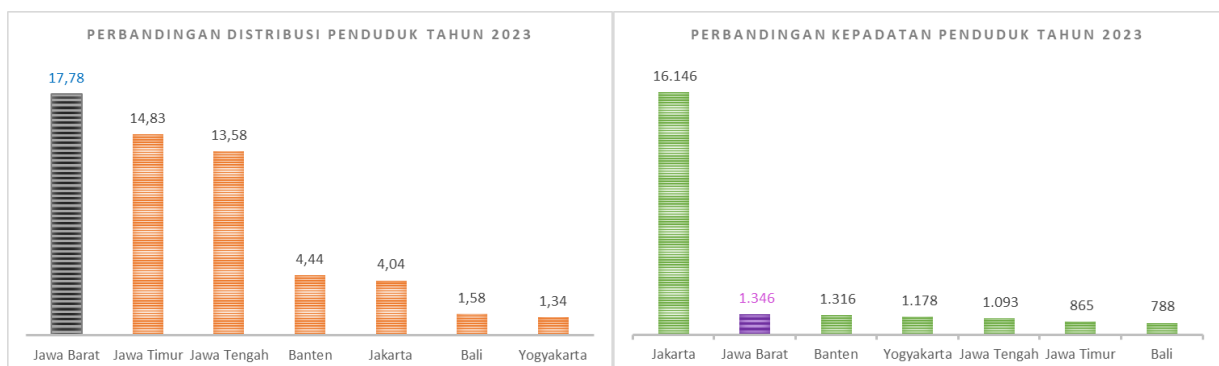
Gambar 2.25
LPP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 sebesar 1.346 km², masih jauh di bawah kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 16.146 km². Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan setara dengan kepadatan penduduk Provinsi Banten yaitu sebesar 1.316 km².

Gambar 2.26
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Mencermati dinamika penduduk Provinsi Jawa Barat yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan.

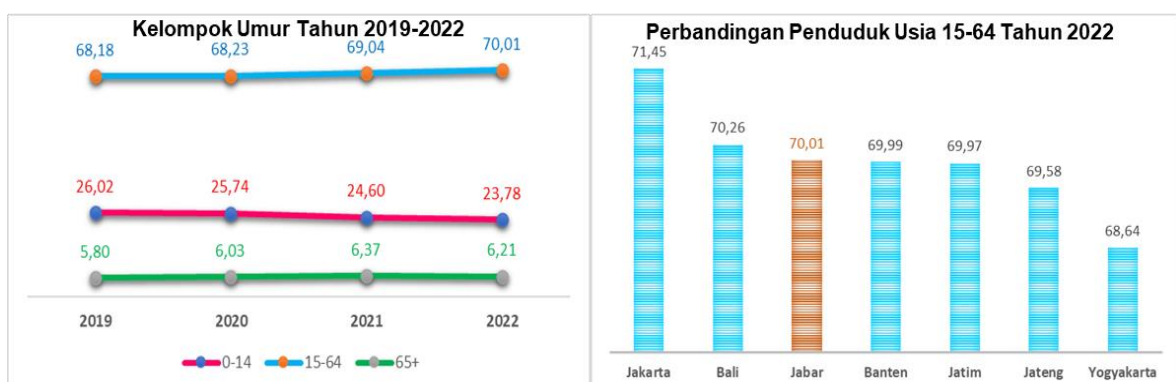
Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan rasio gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal;
2. Keberlanjutan sosial budaya, melalui peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan;
3. Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang aktivitas pembangunan; dan
4. Investasi SDM untuk menjawab daya saing Jawa Barat agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif diberbagai aspek di level internasional, memaksimalkan era industri 4.0 menuju *society 5.0* yang ditandai dengan masyarakat telah mencapai *comport, vitality and high quality life*.

2.1.2.2 Komposisi Penduduk

Berdasarkan komposisi penduduk, Provinsi Jawa Barat berada pada periode jendela kesempatan atau *window opportunity* untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

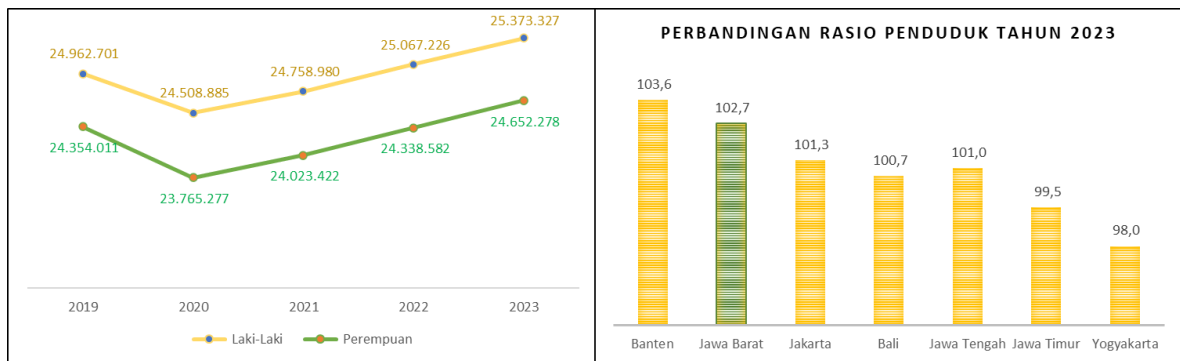
Gambar 2.27
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Tren penduduk usia produktif Provinsi Jawa Barat cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan angka tersebut mencapai 70,01 persen di tahun 2022. Dibandingkan dengan provinsi di Jawa-Bali, penduduk usia produktif Provinsi Jawa Barat masih dibawah Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Penduduk usia produktif yang tinggi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian yang sama-sama rendah.

Gambar 2.28
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

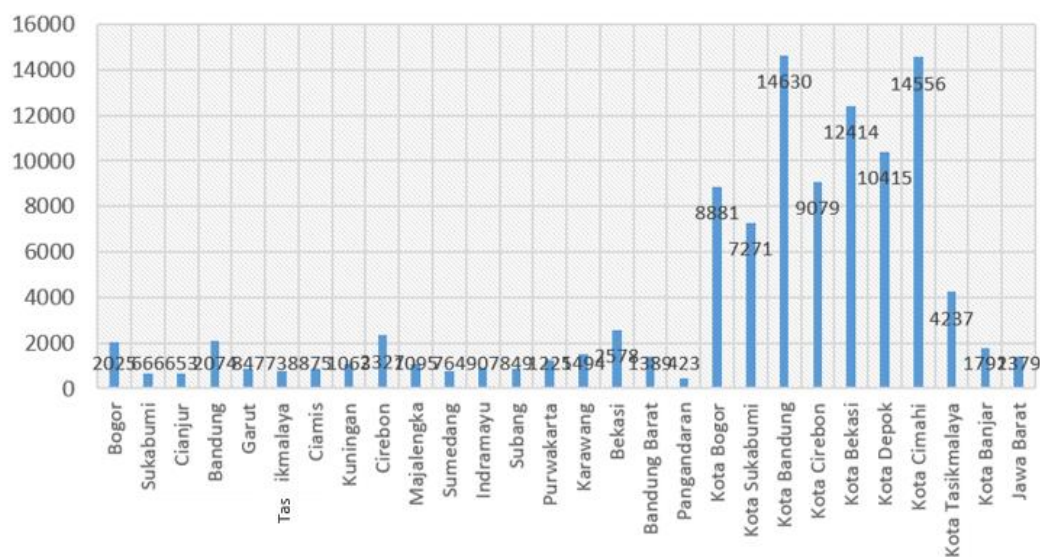
Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Provinsi Jawa Barat cenderung lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, Rasio Penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 102,72 persen yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin mempengaruhi tingkat kesetaraan gender (*gender equality*), yaitu kesamaan hak dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, tantangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menangani jumlah penduduk yang besar dengan rasio penduduk yang relatif setara adalah bagaimana memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Sehingga tidak ada diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

2.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Berdasarkan klasifikasi Kabupaten/Kota, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor. Pertama, karena adanya mobilitas penduduk (orang datang) yang tinggi di 2 (dua) wilayah tersebut. Kedua, wilayah Bandung Raya merupakan *buffer zone* Kota Metropolitan Bandung, sehingga penduduk yang bekerja di Kota Bandung memiliki tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Bogor, wilayah padat seperti Cibinong, Gunungputri dan Cileungsi merupakan basis penduduk yang bekerja di DKI Jakarta. Kepadatan penduduk perlu diatur agar kondisi komunitas aman dalam berbagai aspek, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.29
Kepadatan Penduduk Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling kecil untuk wilayah kota adalah Kota Banjar, sedangkan untuk wilayah kabupaten adalah Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah 7,37 persen luas Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk hanya 3,4 persen dari total penduduk Jawa Barat. Apabila dibandingkan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat dengan luas 45,340,799 km², Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah paling luas di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi memiliki luas 11,19 persen dari seluruh luas Provinsi Jawa Barat dengan jumlah

penduduk sebanyak 2.790.320 jiwa, namun kepadatan penduduk hanya 670 orang/km². Kepadatan penduduk berada di Kota Bandung dengan kepadatan penduduk sebesar 15.421 jiwa/km². Adapun untuk kabupaten yang paling padat penduduknya adalah Kabupaten Bekasi dengan luas sebesar 3,42 persen dari luas Jawa Barat, namun menampung 6,62 persen penduduk Jawa Barat.

Agregat kepadatan penduduk dalam 8 (delapan) tahun terakhir relatif tidak berubah, perubahan kepadatan terjadi di Kota Bandung relatif menurun dibandingkan dengan kota Cimahi. Kota Cimahi menyumbang kepadatan tertinggi di tahun 2023. Demikian juga pada wilayah tertentu terjadi kenaikan kepadatan penduduk, seperti di Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya. Adapun kepadatan tertinggi di Jawa Barat berada di Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Bandung Raya yang telah masuk habitat III, dicirikan dengan suatu kondisi dimana jumlah penduduk dalam 1 (satu) kilometer persegi dihuni oleh lebih dari 1.500 jiwa. Kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dipengaruhi oleh arus mobilitas penduduk dan natalitas sehingga membuat wilayah menjadi sudah sangat jenuh untuk hunian manusia.

Apabila ditinjau dari pergantian Provinsi DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global, yang diproyeksikan akan mengalami penurunan jumlah penduduk, Provinsi Jawa Barat perlu mempersiapkan kebijakan pengendalian penduduk dan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung laju pertumbuhan penduduk sebagai implikasi pertambahan jumlah penduduk di wilayah Jawa Barat yang berada di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti memprioritaskan pembangunan pusat pertumbuhan Bekasi-Karawang, pengembangan Kawasan Megapolitan Cekungan Bandung, serta pengembangan kawasan Strategis Maritim dan Perikanan. Selain itu, pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Patimban yang menjadi nadi dari pengembangan kawasan Rebana dan penopang kawasan industri yang ada di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Sehingga Jawa Barat dapat menjadi bagian dari pengembangan Megapolitan Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, industri dan kebudayaan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa.

2.1.2.4 Pengendalian Penduduk

Pengendalian penduduk menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kepadatan penduduk, terutama di Jawa Barat. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengendalian penduduk adalah *Total Fertility Rate* (TFR). Angka Kelahiran Total atau TFR merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita usia subur (15-49 tahun). Angka Kelahiran Total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya, apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Semakin rendah angka ini menunjukkan makin terkendalnya jumlah kelahiran penduduk.

Tabel 2.5
Target dan Realisasi *Total Fertility Rate* (TFR) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Status Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Angka Kelahiran Total (TFR)	2,12	2,3	91,51	2,15	2,1	102,33	1,92	2,06	92,71	

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel diatas, kelahiran total di Jawa Barat tahun 2023 adalah 2,06. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk Jawa Barat adalah 1,92 sehingga capaian kinerja tahun 2023 terhadap target nasional sudah mencapai 106,79 persen. Manfaat tercapainya TFR untuk masyarakat salah satunya adalah menunjang pencapaian bonus demografi dengan terciptanya SDM yang berkualitas, kecukupan pendidikan, dan kesehatan. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan tahun 2022.

Pengukuran Indikator Angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR*) cara modern (persentase) dilakukan dengan membandingkan jumlah perempuan yang berstatus kawin usia 15-49 tahun dan menggunakan alat/cara KB modern dengan jumlah



perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Semakin tinggi angka mCPR menunjukkan capaian kesertaan berKB masyarakat khususnya pada metode kontrasepsi modern semakin baik.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi mCPR Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Status Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Angka Prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	63,27	58,9	93,09	65,95	63	95,53	65,04	63,2	97,17	

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel diatas, angka prevalensi kontrasepsi modern di Jawa Barat tahun 2023 adalah sebesar 63,2 persen. Hasil ini belum bisa mencapai target yang ditetapkan sebesar 65,04 persen sehingga capaian kinerja tahun 2023 baru mencapai 97,17 persen, namun capaian ini lebih baik dari capaian nasional sebesar 60,4 persen. Manfaat tercapainya target mCPR untuk masyarakat salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi dengan menggunakan KB cara modern yang sesuai dengan tujuan dan kondisi kesehatan reproduksinya.

Di sisi lain, Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*Unmet Need*) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjaga jarak kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.



Tabel 2.7
Target dan Realisasi Persentase *Unmet Need* Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021- 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Status Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	7,69	12,66	35,37	14,09	14,1	99,93	12,69	10,6	116,47	

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel diatas, persentase *unmet need* di Jawa Barat tahun 2023 adalah sebesar 10,6 persen. Hasil ini sudah dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 12,69 persen. Sementara capaian kinerja tahun 2023 adalah 116,47 persen namun jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2023 baru mencapai 62,34 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena dengan meningkatnya angka *unmet need*, KB perlu ditinjau secara lebih mendalam karena faktor penyebab terjadinya *unmet need* tidak hanya masalah akses pelayanan. Beberapa wilayah yang telah dilakukan monev di wilayah *unmet need* terdapat permasalahan sosial seperti wilayah tersebut banyak PUS yang menjadi TKI/TKW sehingga para pasangan yang tinggal di wilayah tersebut merasa tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan tinggal berjauhan. Hal ini menjadi permasalahan pada saat evaluasi angka *unmet need* menjadi tinggi karena kasus tersebut masuk kedalam indikator *unmet need* dengan definisi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selain itu terdapat juga wilayah yang masih menganggap bahwa KB tidak diperbolehkan dalam agama.

Belum optimalnya peran PKB/PLKB dalam memberikan pembinaan kesertaan berKB kepada peserta KB baru agar konsisten menjadi peserta KB Aktif. Pembinaan yang kurang sistematis dan terukur oleh peran PKB/PLKB, OPD KB kabupaten/kota dan peran mitra terkait menyebabkan banyak pasangan usia subur yang belum bisa merubah sikap dan perilaku terhadap manfaat penggunaan kontrasepsi, sehingga hal tersebut berdampak pada putus pakai dan menurunnya pemakaian kontrasepsi modern terutama di wilayah *Unmet Need*.



Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19 tahun) merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut usianya. Angka kelahiran menurut usia/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Persentase Angka Kelahiran Remaja Provinsi Jawa Barat Tahun 2021- 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Status Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Angka Kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i>)	29	21,4	126,21	25	26,5	94,00	24	22,4	106,67	

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel diatas, angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun di Jawa Barat tahun 2023 adalah 22,4. Hasil ini sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 24 sehingga capaian kinerja tahun 2023 sudah mencapai 106,67 persen. Dibandingkan dengan target Renstra Jawa Barat tahun 2024 capaian kinerja baru mencapai 98,18 persen, sedangkan apabila dibandingkan dengan target nasional tahun 2023 capaian kinerja baru mencapai 88 persen. Capaian kinerja ASFR 15-19 tahun di tahun 2023 adalah sebesar 22,4 dan sudah mendekati target akhir renstra untuk ASFR 15-19 tahun sebesar 22. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian tahun 2023 sudah mulai mendukung capaian renstra untuk ASFR 15-19 tahun secara lebih signifikan. Manfaat capaian ASFR bagi masyarakat salah satunya adalah dengan ASFR yang rendah dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, meningkatkan status kesehatan ibu, dan menurunkan kejadian *stunting*.

Selain itu, terdapat Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) yang digunakan untuk mengukur program pembangunan keluarga, yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.



Tabel 2.9
Target dan Realisasi *i-Bangga* Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021- 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Status Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	58,2	52,34	89,93	60,32	57,87	95,94	62,44	60,15	96,33	

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Pembangunan Keluarga di Jawa Barat tahun 2023 adalah sebesar 60,15. Hasil ini belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 62,44 sehingga capaian kinerja tahun 2023 baru mencapai 96,33 persen. Dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Barat tahun 2024 capaian kinerja baru mencapai 93,18 persen, sedangkan apabila dibandingkan dengan target nasional tahun 2023 capaian kinerja sudah mencapai 101,95 persen. Manfaat capaian *iBangga* bagi masyarakat salah satunya adalah dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemandirian keluarga di satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tingkat kemandirian juga berkorelasi dengan upaya keluarga bertahan dari kesulitan hidup.

2.1.2.5 Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat.

Gambar 2.30
Peta Persebaran 13 Kampung Adat di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Olahan Data DPMD Provinsi Jawa Barat, 2023

Masyarakat adat di Provinsi Jawa Barat akan menghadapi tantangan yang unik dan kompleks ketika berhadapan dengan pengaruh globalisasi. Tantangan-tantangan ini berdampak pada hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Tantangan tersebut tentunya dapat diatasi dengan mengakui hak-hak masyarakat adat, memperkuat identitas budaya dan pengetahuan tradisional mereka, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memastikan akses yang setara ke layanan dasar, serta memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

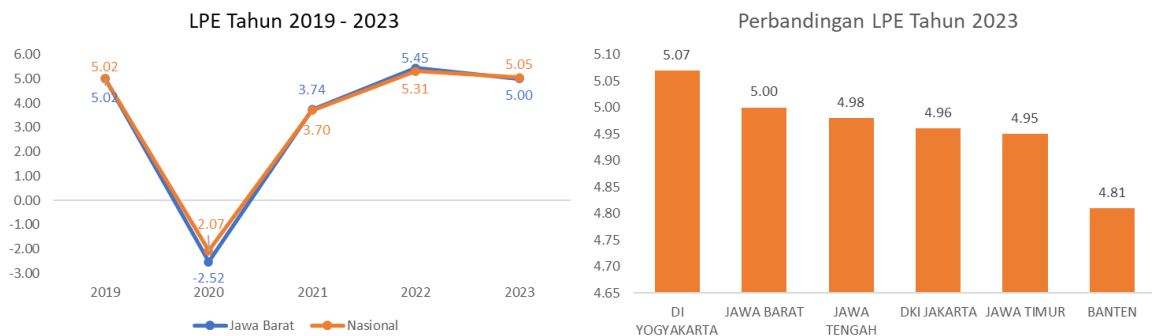
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan politik. Jika faktor-faktor tersebut bekerja dengan tepat maka peningkatan pertumbuhan ekonomi tak dapat dielakkan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik. Hal ini

menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2023 tumbuh 5,00 persen (*c-to-c*), atau lebih rendah pertumbuhannya jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat tumbuh sebesar 5,45 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah DIY sebesar 5,07 persen. Tiga sektor terbesar penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi dengan *share* terhadap PDRB ADHK masing-masing sebesar 41,87 persen; 14,43 persen; dan 8,44 persen secara *c to c*. Secara nasional, perekonomian Jawa Barat juga memberikan kontribusi 16,77 persen dari PDB ADHB Nasional pada tahun 2023. Sementara di sektor lapangan usaha industri pengolahan, Jawa Barat memberikan kontribusi 28,26 persen terhadap PDB ADHB sektor Industri Pengolahan nasional.

Gambar 2.31
LPE Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Upaya menjaga keberlanjutan perekonomian Provinsi Jawa Barat perlu terus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh *stakeholder* terkait melalui penyesuaian program kerja dan upaya mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah mendorong promosi investasi, menjaga kinerja industri khususnya padat karya sehingga mampu mendorong penciptaan tenaga kerja, serta menjaga tingkat inflasi.

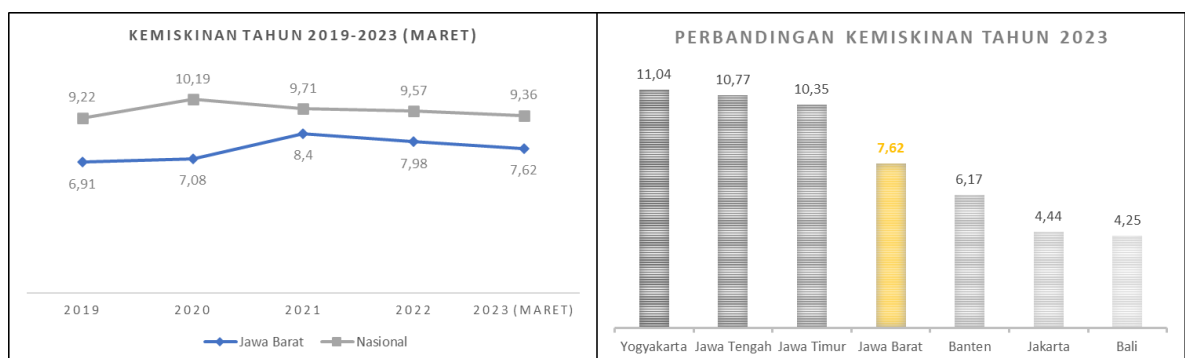
2.2.1.2 Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan erat kaitannya dengan kemiskinan, karena dengan berkurangnya penduduk miskin dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan bukan hal yang terbentuk dengan sendirinya, tidak melekat dari aspek yang lain, kemiskinan merupakan hasil interaksi dalam kehidupan manusia yaitu dari beberapa aspek utamanya yang berkaitan dengan aspek sosial serta aspek ekonomi.

Perbaikan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan tercatat sebesar 7,98 persen pada September 2022 dan tercatat sebesar 7,62 persen pada Maret 2023. Angka kemiskinan tersebut menurun jika dibandingkan September 2021 yang sebesar 7,97 persen. Adapun jumlah penduduk miskin pada periode September 2022 mencapai 4.071,0 ribu jiwa dan Maret 2023 sebanyak 3.888,6 ribu jiwa. sementara itu, pada September 2021 tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 4.195,3 ribu jiwa. Artinya terdapat penurunan sebanyak 124,3 ribu jiwa dari September 2021 ke September 2022 dan terdapat penurunan sebanyak 306,7 ribu jiwa dari September 2021 ke Maret 2023.

Angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat tersebut masih lebih baik dari nasional, tetapi berada di tengah antara provinsi Jawa-Bali.

Gambar 2.32
Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024(diolah)

Jika dicermati lebih dalam, peningkatan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat terjadi di perkotaan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan angka

kemiskinan di pedesaan sejalan dengan perbaikan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun angka kemiskinan absolut di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai tambah dari kegiatan perekonomian masih tersentralisasi di daerah perkotaan sehingga dibutuhkan penguatan sinergi dalam pemerataan perekonomian.

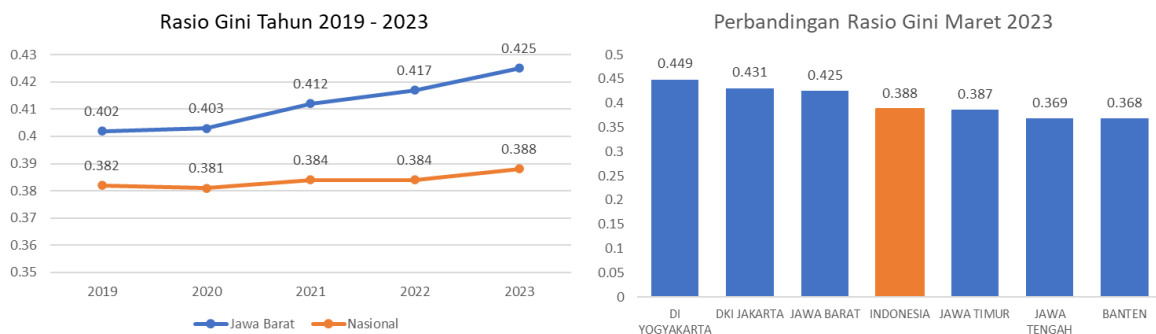
Pemerataan program pengembangan SDM, pemerataan investasi, perbaikan infrastruktur untuk mendukung konektivitas pedesaan dan perkotaan, dan berbagai program lainnya dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi lintas sektoral di pedesaan seperti Program Strategis Petani Millenial dan Hilirisasi Sektor Pertanian perlu terus didorong. Hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan di pedesaan sekaligus mencegah perpindahan penduduk desa menuju perkotaan dan pusat-pusat industri.

2.2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan akan menggambarkan rata atau timpangnya pembagian hasil dari pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan penduduk. Distribusi pendapatan yang tidak merata secara teori dapat diminimalisir melalui pembangunan ekonomi.

Perkembangan ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh Indeks gini mengalami fluktuasi sepanjang periode Maret 2019-Maret 2023. Indeks gini Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan secara gradual pada Maret 2020 sampai Maret 2023. Pandemi COVID-19 menekan ketimpangan di Jawa Barat semakin lebar. Hal ini dapat dilihat pada Maret 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,013 poin dibanding September 2022. Secara kewilayahan, Indeks Gini di daerah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Pada Maret 2023, indeks gini di perkotaan tercatat sebesar 0,439 poin lebih tinggi dibanding indeks gini pada pedesaan sebesar 0,321 poin.

Gambar 2.33
Rasio Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Rasio Gini Provinsi Jawa Barat masih termasuk yang tertinggi ketiga dan melebihi Rasio Gini yang ada di nasional, sehingga diperlukan program-program pembangunan berbasis pedesaan yang dilaksanakan cukup efektif mempersempit ketimpangan di wilayah pedesaan. Kedepan, program pengembangan ekonomi di wilayah perkotaan perlu lebih memperkuat sisi inklusif dan pemerataan, khususnya usaha mikro dan kecil, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

2.2.1.4 Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara agraris dan maritim, dengan proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan cukup besar maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dan nelayan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu alat ukur untuk melihat kesejahteraan petani dan nelayan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

NTP Jawa Barat dari Tahun 2019 - 2023 cenderung berfluktuasi, angka tertinggi adalah 107,46 poin pada tahun 2023, namun angka ini masih berada dibawah angka Nasional sebesar 117,76 poin. NTP Jawa Barat terdiri dari sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura,

peternakan, perkebunan, dan perikanan. NTP sektor tanaman hortikultura memberikan kontribusi terbesar terhadap NTP Jawa Barat

Gambar 2.34
NTP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



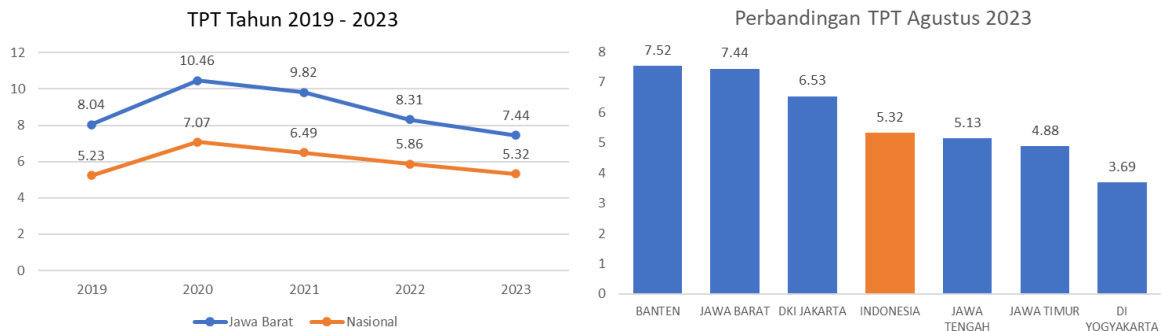
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Seiring dengan meningkatnya LPE, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,44 persen pada tahun 2023. Hal tersebut berimplikasi terhadap NTP Provinsi Jawa Barat yang meningkat di tahun 2023 menjadi 107,46, meski masih di bawah angka nasional serta di bawah Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, dan Banten.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain. Selama Tahun 2019-2023, kondisi TPT di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,42 persen, selanjutnya turun sebesar 0,64 persen tahun 2021. Pada tahun 2022, TPT Jawa Barat mencapai 8,31 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian target ini telah mencapai target tahun 2022 sebesar 10,16 persen. Pada Agustus 2023 TPT di Jawa Barat tercatat mengalami penurunan kembali menjadi 7,44 persen, menurun 0,87 persen poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di Jawa Barat mungkin mengalami perbaikan, dengan lebih banyak pekerja yang menemukan pekerjaan atau adanya penciptaan lapangan kerja baru.

Gambar 2.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Analisis berdasarkan gender menunjukkan bahwa pada Agustus 2023, TPT laki-laki lebih tinggi daripada TPT perempuan, yaitu sebesar 8,09 persen dibandingkan dengan 6,25 persen. Ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak menghadapi pengangguran dibandingkan perempuan. Dari Agustus 2022 ke Agustus 2023, TPT laki-laki turun sebesar 0,46 persen, sementara TPT perempuan turun lebih signifikan, sebesar 1,64 persen.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan tercatat lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Pada Agustus 2023, TPT di perkotaan adalah 7,92 persen, sementara di pedesaan adalah 5,65 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPT di perkotaan turun 1,00 poin, sementara di pedesaan turun 0,52 poin. Ini menunjukkan bahwa pengangguran terkonsentrasi lebih tinggi di daerah perkotaan, yang mungkin disebabkan oleh konsentrasi industri yang lebih tinggi, yang mengalami fluktuasi ekonomi lebih besar.

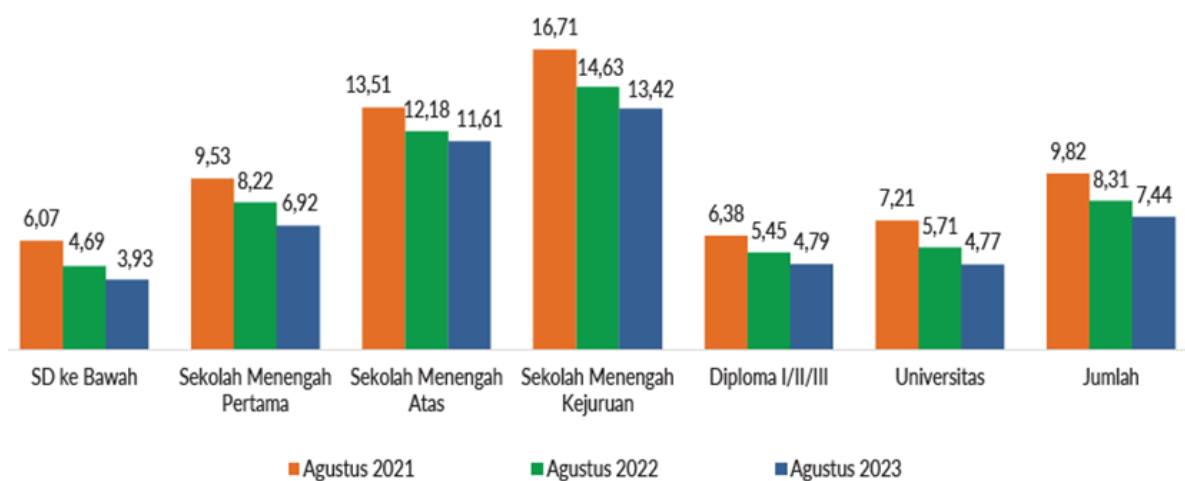
Sementara itu berdasarkan tingkat pendidikan, TPT tertinggi terlihat pada kelompok dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mungkin mencerminkan kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan dan kebutuhan pasar kerja. Ini juga bisa menunjukkan bahwa lulusan SMK mungkin memiliki ekspektasi kerja yang lebih tinggi dengan pekerjaan yang tersedia.

Kemudian, kelompok dengan pendidikan SD ke bawah memiliki TPT yang relatif lebih rendah, yang mungkin menandakan bahwa individu

dengan tingkat pendidikan lebih rendah akan lebih cepat diterima di pekerjaan dengan kualifikasi yang lebih rendah atau kurang formal.

Secara keseluruhan, terjadi penurunan TPT di Jawa Barat di semua kategori pendidikan dari Agustus 2022 ke Agustus 2023, dengan penurunan terbesar terjadi di kategori pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penurunan ini mungkin menunjukkan perbaikan dalam perekonomian atau keberhasilan program intervensi pemerintah untuk menangani pengangguran di kalangan lulusan SMP.

Gambar 2.36
TPT berdasarkan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023



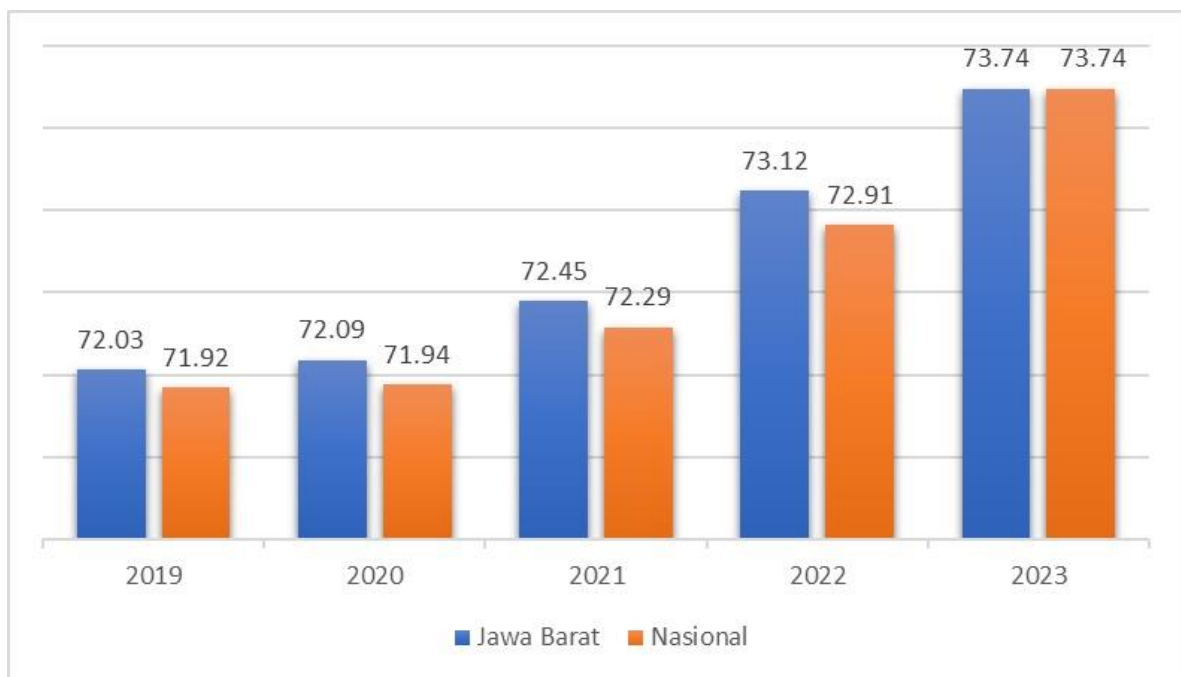
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan pengangguran melalui 3 (tiga) Balai Latihan Kerja (BLK) yaitu BLK Kompetensi, BLK Mandiri dan BLK PMI/LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap PMI). BLK tersebut menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja kompetensi untuk pemenuhan tenaga kerja di bidang manufaktur, wirausaha, dan calon pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat. Selanjutnya dengan kerja sama antara BLK dengan perusahaan-perusahaan sehingga tenaga kerja hasil pelatihan di BLK ditempatkan bekerja di perusahaan. Melalui layanan antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan unit pencari kerja dapat ditempatkan. Penyediaan Sistem Informasi Warga Jawa Barat Sejahtera (SiJu) dan *job fair* yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Selain itu faktor kemudahan perizinan investasi dan akses pemberian modal dapat membuka lapangan kerja bagi pencari kerja.

2.2.1.6 Pembangunan Manusia

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Gambar 2.37
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

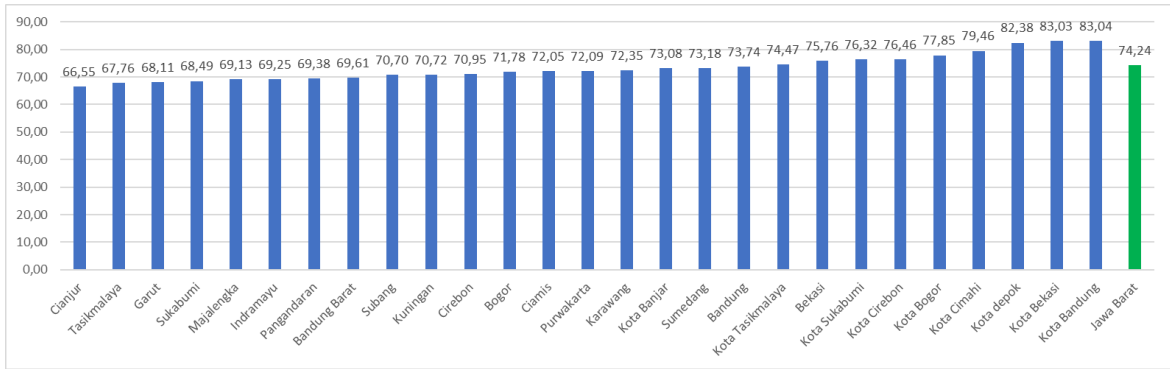
IPM Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari 73,12 poin pada tahun 2022 menjadi 73,74 poin pada tahun 2023, meskipun masih dibawah capaian IPM Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas, pemerataan, akses terhadap sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Barat terus pulih seiring proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan. Secara umum, posisi IPM Provinsi Jawa Barat tetap berada pada IPM kelompok tinggi karena nilainya lebih dari 70 poin.

Peningkatan IPM di Provinsi Jawa Barat didorong oleh peningkatan nilai semua indikator dimensi yang diukur, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi atau standar hidup layak. Pada dimensi kesehatan, yang ditunjukkan indikator Umur Harapan Hidup, terdapat peningkatan dari 73,52 poin pada tahun 2022 menjadi 74,91 poin pada tahun 2023. Pada

dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah pada penduduk berusia lebih dari 25 tahun mengalami peningkatan menjadi 8,83 tahun pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang sebesar 8,78 tahun. Dari sisi harapan lama sekolah bagi anak usia 7 (tujuh) tahun, meningkat dari 12,62 tahun menjadi 12,68 tahun atau setara dengan pendidikan diploma. Dimensi ekonomi yang ditunjukkan oleh indikator pengeluaran perkapita per tahun tercatat mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni dari Rp11,27 juta pada 2022 menjadi Rp11,69 juta pada tahun 2023.

Apabila ditinjau dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota, masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota. IPM masuk kedalam kategori baik apabila sudah mencapai 80 persen keatas, sedangkan dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, baru 3 (tiga) kabupaten/kota yang IPMnya sudah diatas 80 persen, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bandung sebagaimana ditunjukkan gambar dibawah ini.

Gambar 2.38
Capaian IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Kualitas Pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mana capaian kedua indikator tersebut perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. Pada tahun 2023, masih terdapat 128 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA/SMK Negeri. Selain

itu, Provinsi Jawa Barat juga masih perlu melaksanakan optimalisasi pusat kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah.

Kualitas kesehatan ditunjukkan dengan capaian indikator Usia Harapan Hidup dimana indikator tersebut dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan yang memadai dalam memberikan pelayanan. Selain itu, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di masyarakat juga perlu diterapkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan daya beli masyarakat bergantung pada pendapatan yang diperoleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga hal tersebut berbanding lurus dengan tersedianya lapangan pekerjaan terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja maka dibutuhkan pengembangan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

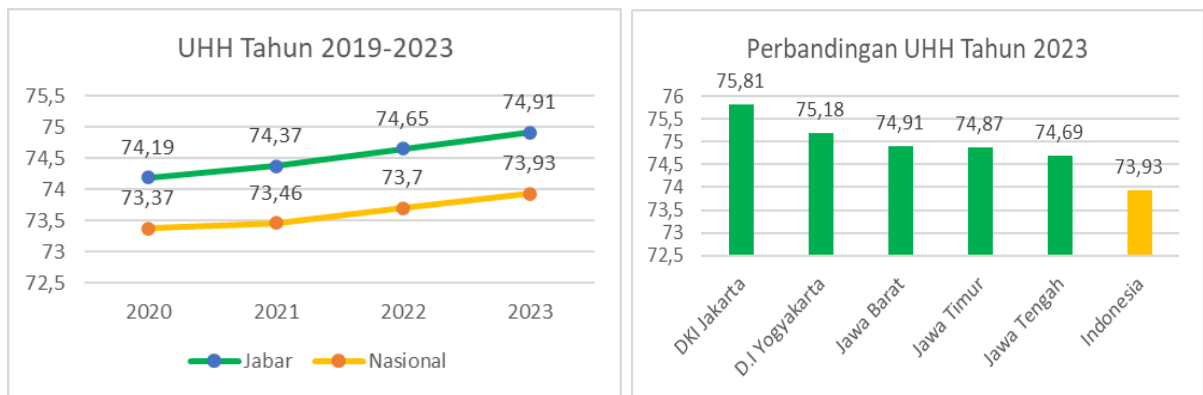
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Keluarga Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH diantaranya adalah faktor kesehatan yaitu tingkat kelahiran dan kematian, pelayanan kesehatan, serta gizi buruk selain itu dapat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial.

Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan UHH yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. UHH Provinsi Jawa Barat tahun 2023 berada diatas angka nasional tetapi masih dibawah Provinsi DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta. Pertumbuhan UHH yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program kesehatan di Jawa Barat sehingga berkontribusi terhadap kenaikan IPM.

Gambar 2.39
Umur Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

UHH di Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor kondisi lingkungan yaitu rendahnya tingkat sanitasi aman, akses terhadap air bersih serta air minum layak. Faktor berikutnya adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, tingginya angka penyakit menular dan tidak menular, serta pelayanan kesehatan yang belum merata. Hal-hal tersebut perlu terus menjadi perhatian Provinsi Jawa Barat agar UHH hidup dapat terus ditingkatkan.

Selain indikator UHH, terdapat indikator lain yang bisa menggambarkan atau mengukur derajat kesehatan masyarakat yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS). Pembangunan kesehatan dapat dimulai dari unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. IKS adalah indeks yang menggambarkan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan dan dilaksanakan oleh setiap keluarga. Indikator keluarga sehat terdiri dari perhitungan 12 (dua belas) Indikator yaitu :

1. Keluarga mengikuti Program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita *tuberculosis* paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat;

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh dalam pedoman Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan.

Gambar 2.40
Capaian Indeks Keluarga Sehat Tahun 2017-2023



Sumber: Dinas Kesehatan, Oktober 2023

Capaian IKS Provinsi Jawa Barat rata-rata meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis yang disebabkan salah satunya oleh adanya pandemi COVID-19. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat tahun 2045, sesuai dengan amanat dari Kementerian Kesehatan, pembangunan kesehatan difokuskan untuk penguatan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

2.2.2.2 Kualitas Keluarga

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas diatas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta memiliki kemampuan fisik dan non fisik guna hidup mandiri dan mengembangkan diri beserta keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Gambar 2.41
IPKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022



Sumber: BAPPENAS, 2023 (diolah)

Kualitas keluarga di Provinsi Jawa Barat direfleksikan dengan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). Pada tahun 2022, IPKK Provinsi Jawa Barat mencapai 70,18 persen, meningkatkan sebesar 3,52 persen, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 66,66 persen. Capaian tersebut berada diatas capaian nasional, namun jika dibandingkan dengan provinsi di Jawa-Bali masih berada dibawah capaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

2.2.2.3 Kualitas Anak

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat ditentukan oleh kualitas hidup manusia sejak usia dini. Perwujudan SDM yang berkualitas tersebut, tidak terlepas dari anak-anak yang akan memegang peranan penting dalam

upaya perwujudan Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang saat ini masih berada di bangku sekolah adalah generasi harapan bangsa yang akan meneruskan tonggak perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah seharusnya menjadi fokus pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia tentunya juga tidak dapat lepas dari upaya untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Upaya ini direfleksikan dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang terdiri dari 5 (lima) klaster pengukur, meliputi: 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan 5) Perlindungan khusus.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2022, menunjukkan bahwa capaian Provinsi Jawa Barat belum cukup baik. Meskipun sudah mampu melampaui capaian nasional, namun dalam konteks wilayah Jawa-Bali berada dibawah capaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Gambar 2.42
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022



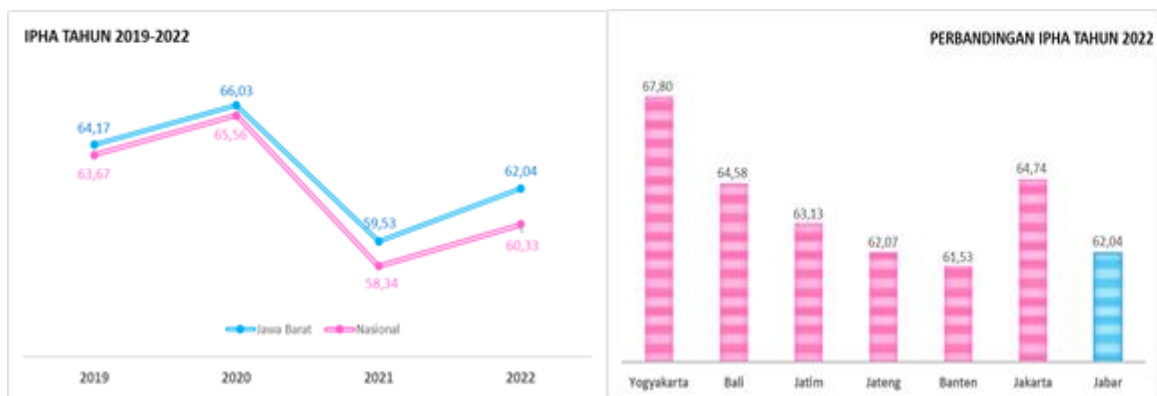
Sumber: KemenPPA, 2024 (diolah)

Disamping itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) juga dapat menggambarkan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus

anak, yang selanjutnya diukur dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Jika dicermati lebih dalam, klaster IPA dan IPHA Provinsi Jawa Barat masih rendah pada klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ketiga klaster tersebut perlu menjadi perhatian agar kedepannya angka IPA dan IPHA Provinsi Jawa Barat dapat lebih baik.

Gambar 2.43
IPHA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022



Sumber: KemenPPA, 2024 (diolah)

Sementara itu, capaian IPKA Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menunjukkan peningkatan dan melebihi capaian nasional, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019. Meski demikian, IPKA Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 lebih baik dari provinsi lainnya di wilayah Jawa-Bali, terkecuali DKI Jakarta.

2.2.2.4 Pemberdayaan Perempuan

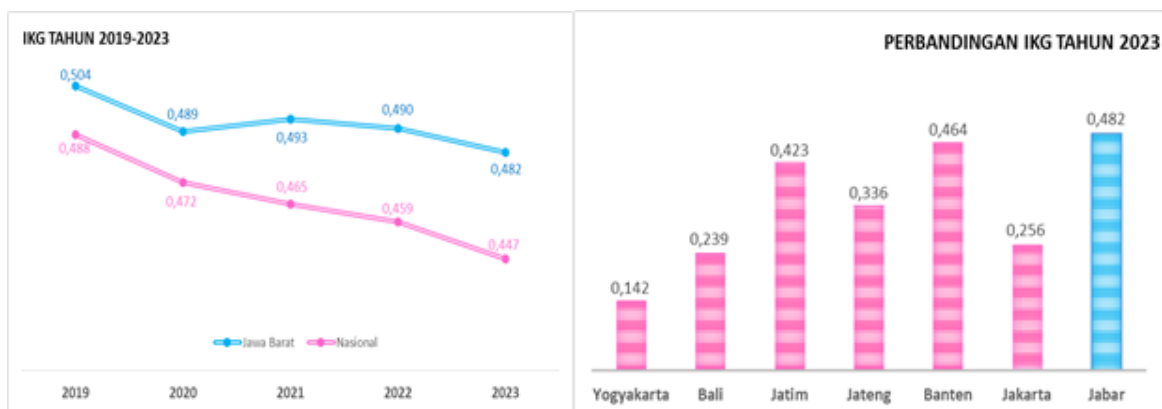
Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan tersebut tidak menjadi masalah apabila terdapat kesetaraan dalam pelayanan dan perlakuan.

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Memperhatikan adanya perubahan terhadap indikator pembangunan gender ditingkat

global sebagai acuan perhitungan indikator kesetaraan gender di Indonesia, maka indikator *Gender Empowerment Measure (GEM)* atau *IDG* digantikan dengan *Gender Inequality Index (GII)* atau IKG.

Pada dasarnya, IKG berkorelasi dengan capaian IPG sebagai penghitung pembangunan gender. Artinya angka IPG yang rendah menunjukkan bahwa ketimpangan gender yang direfleksikan dengan IKG yang akan semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari capaian IKG Provinsi Jawa Barat yang berada diatas nasional dan tertinggi di Jawa-Bali. Meski demikian, IKG Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan di tahun 2022. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan.

Gambar 2.44
IKG Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Mencermati ketimpangan gender di Provinsi Jawa Barat yang masih cukup tinggi, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk perbaikan dalam berbagai dimensi. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat perlu melakukan tindakan afirmatif dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

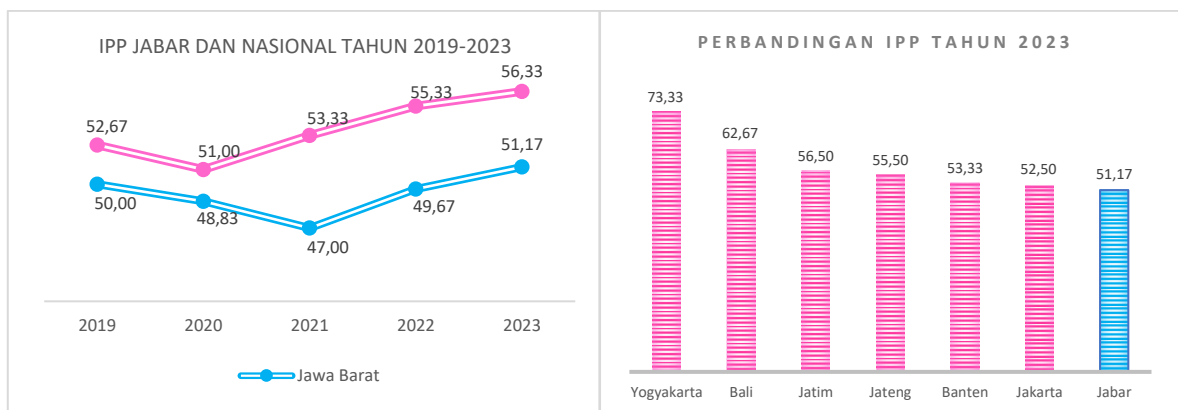
2.2.2.5 Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas para generasi muda yang merupakan ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan salah satu aktor dalam pembangunan dengan fisiknya

yang kuat, pengetahuan yang inovatif serta kreativitasnya yang tinggi. Namun demikian, keberadaan pemuda tidak dapat dipungkiri bagaikan dua sisi mata uang yaitu dapat menjadi potensi namun juga dapat menjadi tantangan bagi pembangunan. Apabila dapat dikelola dengan baik maka potensi tersebut dapat menjadi salah satu modal dasar pembangunan, sekaligus dapat meleburkan tantangan tersebut.

Berdasarkan penghitungan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat 49,86 juta jiwa penduduk di Jawa Barat dengan 23,85 persen penduduk yang berada pada kelompok umur pemuda yaitu antara 16-30 tahun. Pembangunan pemuda diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang terdiri dari 5 (lima) domain, meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan dan kesejahteraan; 3) lapangan dan kesempatan kerja; 4) partisipasi dan kepemimpinan; serta 5) gender dan diskriminasi.

Gambar 2.45
IPP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

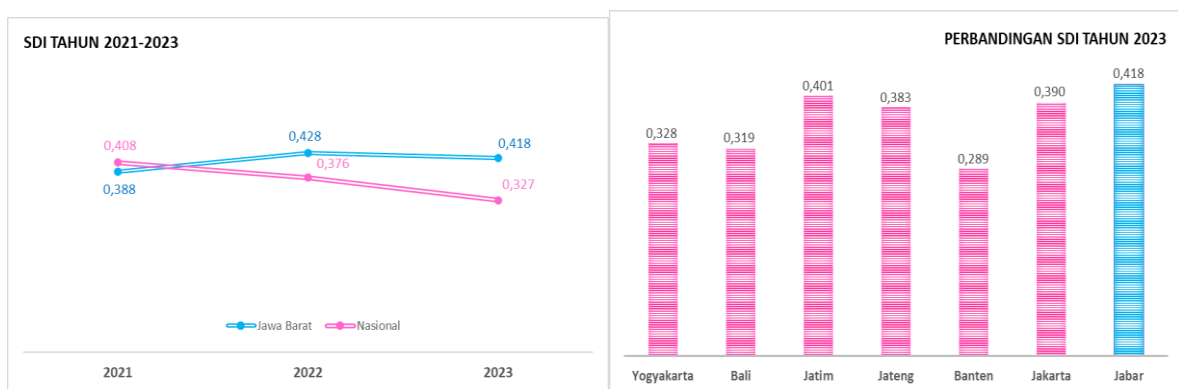


Sumber: Kemenpora, 2023 (diolah)

IPP Jawa Barat tahun 2023 sebesar 51,17 poin, terendah diantara provinsi di Jawa-Bali. Angka IPP Provinsi Jawa Barat yang masih rendah tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Perubahan cara pandang terhadap pemuda harus segera ditanamkan kepada seluruh pihak bahwa kunci keberhasilan pembangunan pemuda yang paling dasar adalah tingginya kepedulian terhadap masa depan pemuda. Provinsi Jawa Barat sendiri masih memiliki kendala dalam meningkatkan pembangunan pemuda, mengingat jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang terbanyak di Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2021 merilis *Sport Development Index* (SDI) untuk mengukur pembangunan olahraga dengan 9 (sembilan) dimensi yaitu sumber daya manusia olahraga, literasi fisik, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa. Pembangunan Olahraga di Jawa Barat selaras dengan tujuan Desain Besar Olahraga Nasional yaitu: 1) meningkatkan budaya olahraga di masyarakat; 2) meningkatkan kapasitas, sinergitas; dan 3) produktivitas olahraga prestasi, serta memajukan perekonomian berbasis olahraga.

Gambar 2.46
SDI Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Kemenpora, 2023 (diolah)

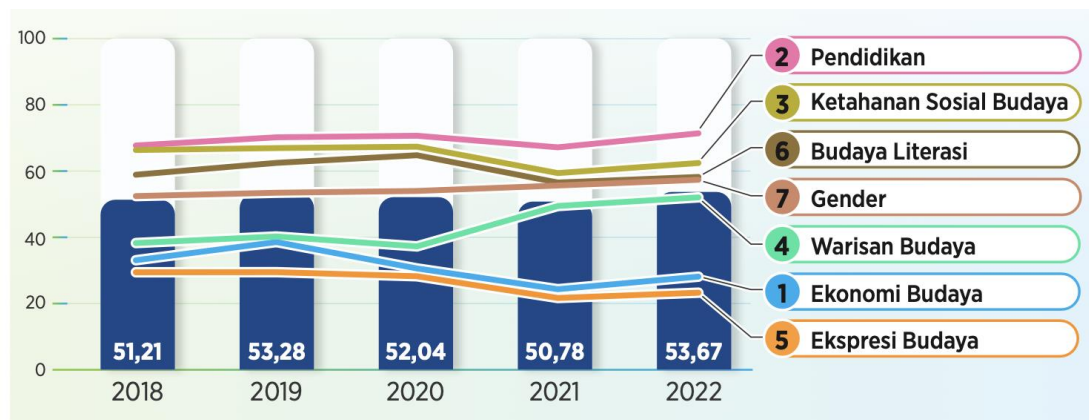
Pembangunan olahraga Jawa Barat tahun 2023 mengalami penurunan 0,01 poin dari tahun 2022. Sehingga perlu lebih ditingkatkan dengan menerapkan budaya olahraga di masyarakat, mengoptimalkan peran sentra keolahragaan (membangun Sekolah Khusus Olahraga) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara berkelanjutan, serta sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian. Dengan cara ini, Jawa Barat tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas olahraga dan kesehatan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian melalui pengembangan industri olahraga dan pariwisata.

2.2.2.6 Pembangunan Kebudayaan

Keberagaman budaya merupakan modal dasar yang kuat dalam pembangunan. Pemerintah telah menyadari bahwa khazanah kebudayaan merupakan aset yang sangat berharga. Pembangunan kebudayaan

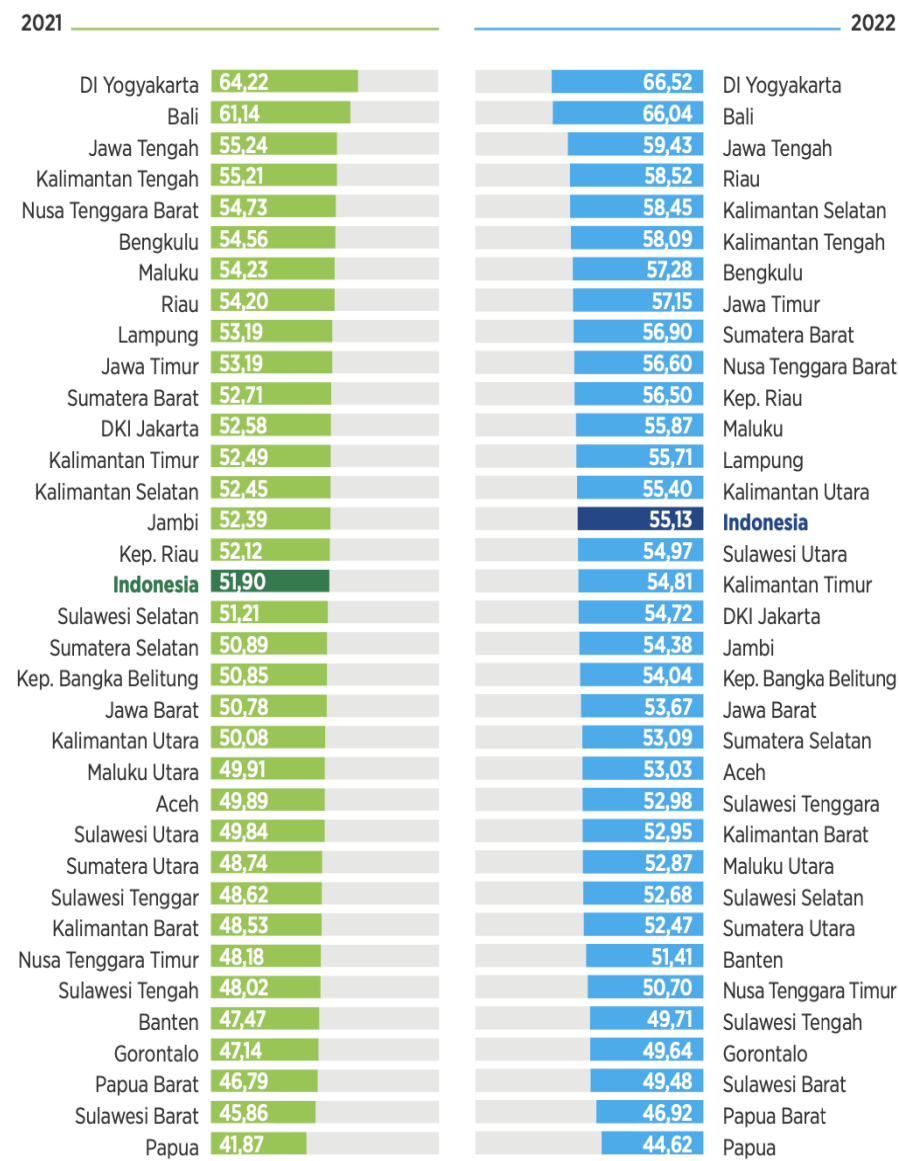
merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Tujuan utama pembangunan budaya adalah menyejahterakan masyarakat dengan melakukan berbagai usaha pembangunan dan perubahan. Salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Gambar 2.47
IPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022



Sumber: IPK 2022 dan Analisis Komparatif, Kemdikbud, 2023

Gambar 2.48
Perbandingan IPK Tahun 2021-2022



Sumber: IPK 2022 dan Analisis Komparatif, Kemdikbud, 2023

Skor IPK Provinsi Jawa Barat tahun 2021 berada dibawah capaian nasional. Bahkan termasuk rendah di Jawa-Bali dan hanya lebih baik dari Provinsi Banten.

Berdasarkan beberapa penelitian, IPK memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM, karena semakin tinggi IPK suatu daerah maka semakin tinggi pula IPM daerah tersebut. Dengan demikian, semakin baik tingkat kebudayaan suatu daerah maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Karena itu, untuk meningkatkan IPK Provinsi Jawa Barat, perlu kiranya dimensi ekonomi budaya (aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan) dan ekspresi budaya

(aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat) perlu menjadi fokus perhatian. Hal itu menjadi penting, mengingat kedua dimensi tersebut memiliki nilai yang sangat rendah.

Upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Provinsi Jawa Barat. Semakin menguatnya modernitas di lingkungan global yang mengakibatkan berkurangnya apresiasi terhadap budaya lokal merupakan hal yang perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat dan memasuki berbagai sendi kehidupan masyarakat belum dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Timbulnya pergeseran identitas primordial dan sentimen sektarian yang dapat menghancurkan sendi-sendi budaya masyarakat maka saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 147 Kampung Budaya yang menjadi kekuatan dalam mempertahankan dan melestarikan budaya yang ada.

Gambar 2.49
Peta Persebaran 147 Kampung Budaya di Provinsi Jawa Barat



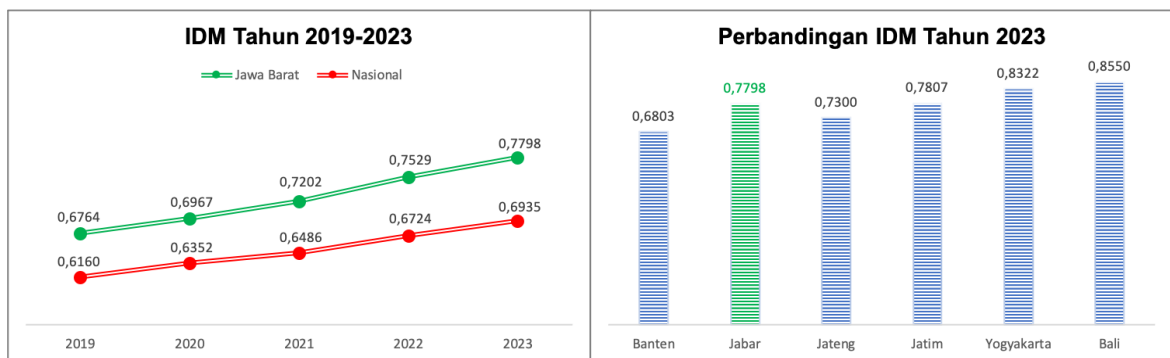
Sumber: Hasil Olahan Data DPMD Provinsi Jawa Barat, 2023

2.2.2.7 Pembangunan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial,

Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa.

Gambar 2.50
IDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2023 (diolah)

Selama Tahun 2019-2020, IDM Provinsi Jawa Barat berada pada status berkembang, tetapi tahun pada 2021 sudah mengalami kenaikan status menjadi maju. Jika dilihat dari nilai IDM nya, Provinsi Jawa Barat selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, nilai IDM Provinsi Jawa Barat meningkat dari tahun sebelumnya dari 0,7529 menjadi 0,7798 dan nilai tersebut melampaui rata-rata nilai IDM nasional. Secara keseluruhan pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat kelima nasional dengan status maju.

IDM Provinsi Jawa Barat yang sudah baik masih tetap perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan dari ketiga indeks komposit IDM, pada tahun 2023 Provinsi Jawa Barat memiliki nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Sosial yaitu sebesar 0,8463, nilai Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,7687, dan nilai terendah pada Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu sebesar 0,7245. Hal ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah maupun *stakeholders* dalam membangun desa untuk dapat meningkatkan pada pengembangan aspek ekonomi.

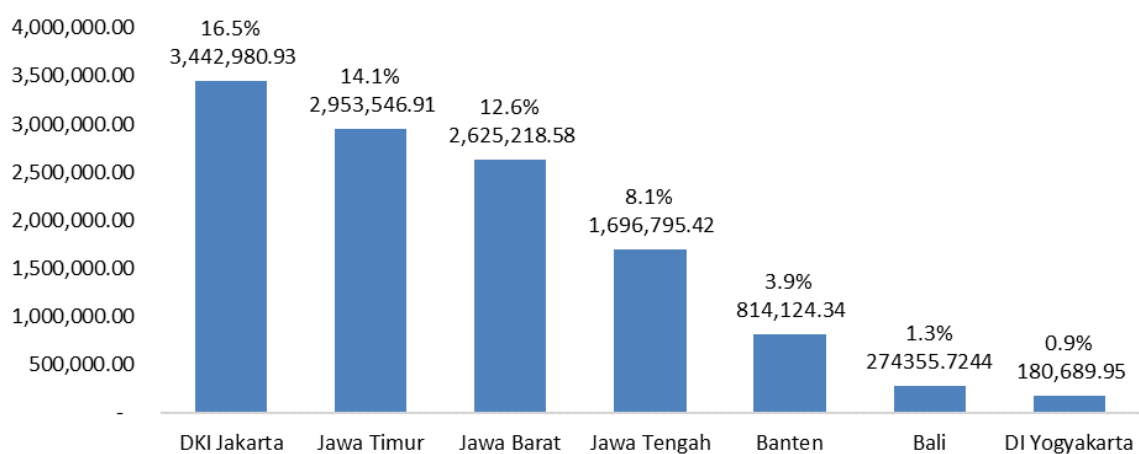
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi

2.3.1.1 Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Pada tahun 2023, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp2.625.218,58 triliun. PDRB ADHB tersebut merupakan terbesar ketiga di Jawa-Bali dan berkontribusi sebesar 12,65 persen dari total PDRB seluruh provinsi. Adapun 4 (empat) lapangan usaha sebagai kontributor utama dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 yaitu lapangan usaha industri pengolahan (42,88 persen), lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (14,41 persen), konstruksi (8,00 persen) serta lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (6,79 persen). Peningkatan nilai nominal PDRB yang cukup besar di 4 (empat) lapangan usaha tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan strategis dalam rangka pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Total PDRB 6 (enam) Provinsi 11.987.711,86 Miliar Rupiah atau 57,4 persen terhadap PDB-ADHB tahun 2023.

Gambar 2.51
Perbandingan PDRB-ADHB Provinsi di Jawa-Bali
Tahun 2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Karakteristik sektor industri pengolahan yang memiliki produktivitas relatif tinggi serta memiliki keterkaitan dan memasok kebutuhan bagi sektor lainnya menjadikan sektor ini tumbuh pesat. Selain itu, jenis industri yang berkembang mulai dari industri padat karya, padat modal hingga padat teknologi mempengaruhi serapan tenaga kerja yang menentukan produktivitas ekonomi. Sektor industri pengolahan memiliki prospek kedepan yang baik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Barat melalui kombinasi pendekatan sektoral dengan mengembangkan klaster industri dan pendekatan regional atau kawasan yang berlandaskan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

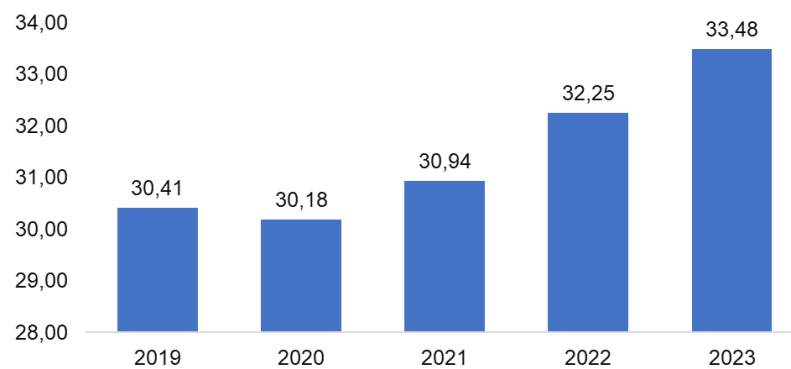
Selain mempunyai sektor unggulan, pada hasil analisis tipologi Klassen Provinsi Jawa Barat juga mempunyai beberapa sektor yang memiliki potensi. Sektor potensial ini berada pada Kuadran II (progresif) yang dikategorikan menjadi sektor yang dapat berkembang cepat dan ditingkatkan kapasitas kemampuannya untuk mencapai penambahan *output*. Sektor-sektor yang termasuk sektor potensial di Provinsi Jawa Barat antara lain: (1) Konstruksi; (2) Informasi dan Komunikasi; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (5) Jasa Pendidikan; dan (6) *Real Estate*.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi dengan penyumbang jumlah produk bersertifikat halal terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Hingga tahun 2023, produk bersertifikat halal dari Provinsi Jawa Barat yaitu 694.684 buah. Disusul berikutnya Provinsi Jawa Tengah (535.624 buah), Provinsi Jawa Timur (483.568 buah), Provinsi Lampung (156.574 buah), dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (99.414 buah). Meningkatnya jumlah produk halal di Provinsi Jawa Barat ini tidak lepas dari makin berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan makin meningkatnya pengumpulan dana pihak ketiga maupun pembiayaan yang dilakukan perbankan umum syariah, regulasi yang mendukung, dan tentu saja jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita mencerminkan pertumbuhan ekonomi penduduk suatu wilayah. Di samping itu, PDRB per kapita juga merupakan komponen utama untuk menghitung indeks ketimpangan antarwilayah yaitu Indeks Williamson. Dengan demikian, tingginya keragaman PDRB per kapita antarwilayah secara tidak langsung mengindikasikan terjadinya ketimpangan pendapatan antarwilayah. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah.

Gambar 2.52
PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata masyarakatnya. Di satu sisi, dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah *output* dari setiap sektor ekonomi.

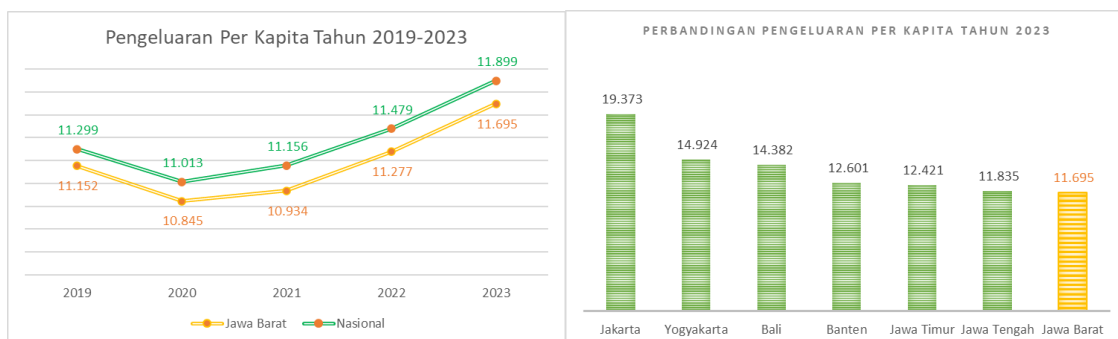
2.3.1.3 Pengeluaran Per Kapita

Tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Daya beli adalah

kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Selama periode sebelum pandemi COVID-19, rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar 2,02 persen per tahun. Pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam. Hal tersebut berimbas pada pengeluaran per kapita penduduk. Pada tahun 2023 seiring pulihnya perekonomian, pengeluaran per kapita mencapai Rp11,695 juta. Meski memiliki pertumbuhan yang tinggi, angka tersebut masih di bawah nasional dan terendah di Jawa-Bali. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena besarnya jumlah penduduk yang menjadi faktor pembagi angka per kapita.

Gambar 2.53
Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

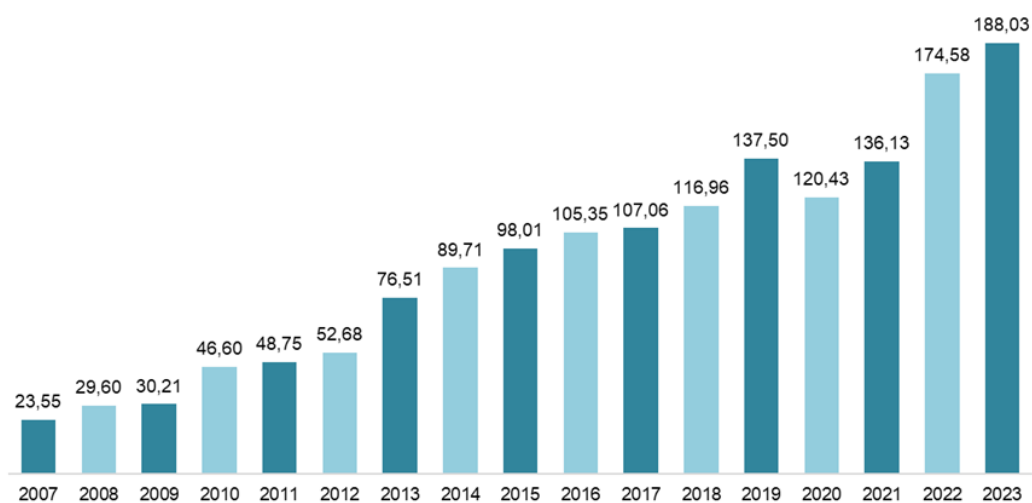
Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduknya. Faktor jumlah penduduk yang besar dan cenderung bertambah menuntut agar produktivitas ekonomi yang direfleksikan dengan PDRB agar selalu tumbuh tinggi. Selain itu, kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita yang terjadi untuk wilayah Jawa Barat bagian Selatan masih berada pada kisaran kurang dari Rp9 juta per tahun. Berbeda dengan Jawa Barat bagian Utara yang secara umum menunjukkan nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada kisaran Rp9-16 juta per tahun. Gambaran ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah Jawa Barat bagian Utara dengan Jawa Barat bagian Selatan dalam hal rata-rata pengeluaran per kapita penduduknya.

2.3.1.4 Investasi

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di tengah meningkatnya dampak ketidakpastian global yang berpengaruh besar terhadap komponen investasi, dimana potensi perlambatan ekonomi, inflasi tinggi, dan kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan bank sentral dunia, investasi Jawa Barat masih menunjukkan peningkatan kinerja. Menurut Kementerian Investasi/BKPM, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan realiasi investasi tertinggi di Indonesia tahun 2023. Realisasi investasinya mencapai nilai sebesar Rp210,60 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat sebagai destinasi utama investasi di Indonesia yang didukung oleh berbagai keunggulan yang ditawarkan melalui iklim investasi yang kondusif, konektivitas infrastruktur terbaik, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, potensi pasar yang besar, *extensive supply chain* serta pelayanan investasi terbaik.

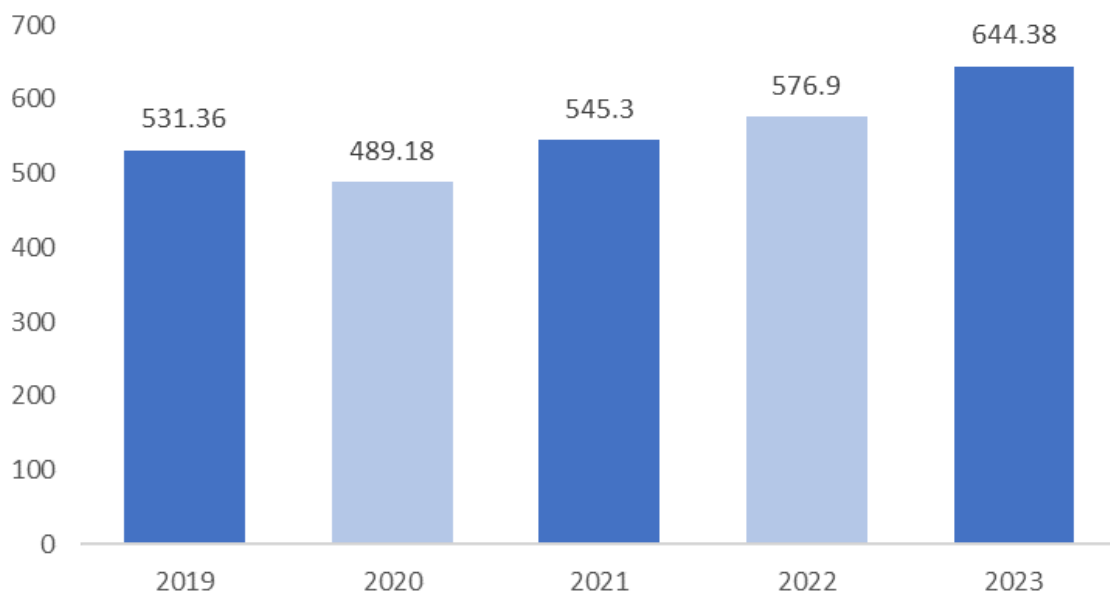
Gambar 2.54
Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2023



Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2024

Sepanjang tahun 2023, tujuan investasi terbesar yaitu di daerah yang memang sudah terdapat kawasan industri seperti di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Sementara itu, investasi yang masuk juga umumnya merupakan investasi yang padat karya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Meski Provinsi Jawa Barat selalu menjadi destinasi investasi, terdapat beberapa isu yang harus dipertimbangkan untuk ke depannya. Isu itu terutama terkait dengan hilirisasi, energi baru terbarukan, *vocational education*, dan *new investment area*.

Gambar 2.55
PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Jawa Barat di tahun 2023 masih tumbuh positif sebesar 7,73 persen (*c-to-c*). PMTB merupakan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi yang mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

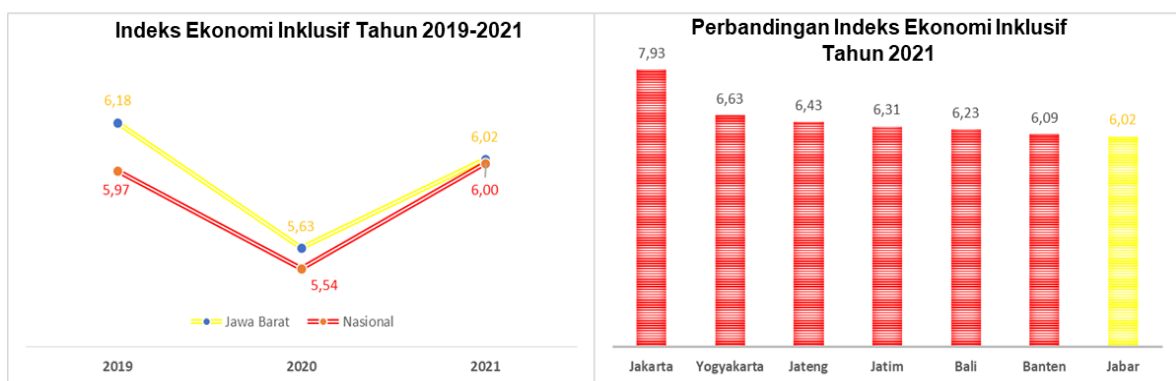
2.3.1.5 Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan

kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.

Kemajuan pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Inklusif pasca COVID-19 menunjukkan angka yang meningkat dan masuk kategori memuaskan pada tahun 2021. Angka Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat tersebut masih diatas nasional, tetapi berada di peringkat ke-21 di Indonesia dan peringkat terakhir di Jawa-Bali.

Gambar 2.56
Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021



Sumber: Bappenas, 2023 (diolah)

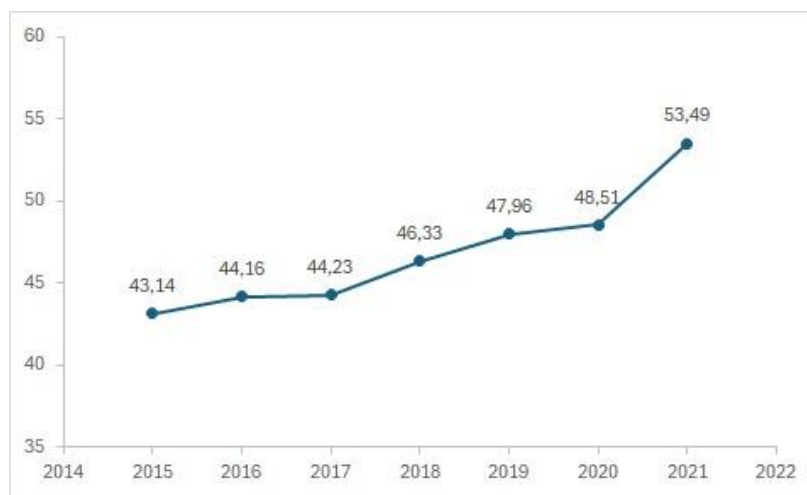
Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Barat perlu untuk ditingkatkan kedepannya. Terutama pada pilar pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Karena pilar tersebut termasuk rendah dan berada di peringkat ke-31. Tantangan terbesarnya adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat terbesar di Indonesia sehingga perlu strategi khusus agar inklusivitas pembangunan dapat merata.

2.3.1.6 Penerapan Ekonomi Hijau

Jawa Barat merupakan wilayah yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan PDB Nasional. Namun, dibalik pencapaian tersebut, terdapat masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan di Jawa

Barat. Sehingga, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan, penerapan ekonomi hijau menjadi solusi yang sangat relevan. Dari aspek pengarusutamaan ekonomi hijau, penerapannya di berbagai sektor lapangan usaha seperti pertanian organik, *urban farming*, kawasan industri dan industri hijau, penurunan emisi gas rumah kaca, serta ekonomi sirkular dan penanganan susut pangan masih perlu didorong implementasinya agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat ditopang oleh pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien serta menjamin keberlanjutannya.

Gambar 2.57
Realisasi *Green Economy Index* di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2021



Sumber : Bappenas 2022, Diolah

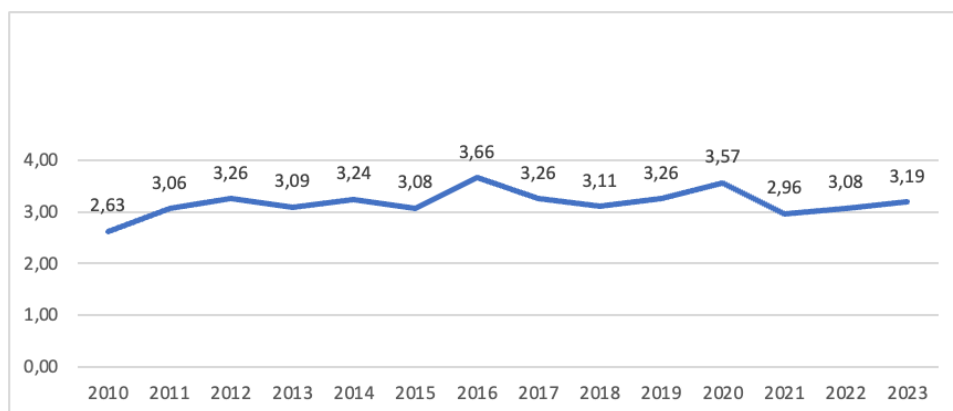
Kinerja penerapan ekonomi hijau diukur dengan indikator indeks ekonomi hijau, dimana capaian pada tahun 2021 sebesar 53,49 poin, angka ini meningkat dibandingkan dengan kondisi di tahun 2015 sebesar 43,14 poin. Dalam waktu enam tahun Jawa Barat berhasil naik tingkat yang semula masuk dalam kategori sedang pada tahun 2015, naik menjadi baik di tahun 2021. Aspek-aspek yang perlu didorong lebih cepat dalam implementasinya adalah peningkatan investasi hijau untuk pilar ekonomi. Selain itu, pelestarian lingkungan (lahan, kualitas air, dan udara) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan ekonomi hijau.

2.3.1.7 Rasio Kewirausahaan

Jawa Barat memiliki pasar domestik yang sangat besar. Selain itu, letak geografis yang strategis, infrastruktur yang cukup baik, dan aksesibilitas yang tinggi membuat Jawa Barat menjadi tujuan yang menarik. Potensi ini mendorong banyak masyarakat Jawa Barat untuk memulai usaha sendiri. Disatu sisi, Kewirausahaan merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu faktor dalam peningkatan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, kewirausahaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun hingga saat ini data terkait UMKM merupakan suatu masalah yang belum terselesaikan di lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa alternatif perhitungan yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kewirausahaan di suatu daerah. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, perhitungan terkait kewirausahaan telah ditentukan rumusnya sehingga lebih mudah untuk mengukurnya.

Gambar 2.58
Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2023



Sumber : Sakernas, Diolah, 2024

Berdasarkan data tersebut, Secara keseluruhan pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat dengan nilai Indeks rasio Kewirausahaan Daerah sebesar 3,19%. Selain karena data ini sangat dipengaruhi oleh data tenaga kerja, Tren ini cenderung bertumbuh namun masih landai mengingat bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045.

Penguatan Kewirausahaan Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian perlu dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu, elemen dasar yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kewirausahaan suatu daerah perlu diperkuat dengan meningkatkan kemampuan wirausaha, akselerasi penggunaan teknologi digital, partisipasi dan perluasan pada rantai nilai domestik dan global, peningkatan inovasi dan penguatan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

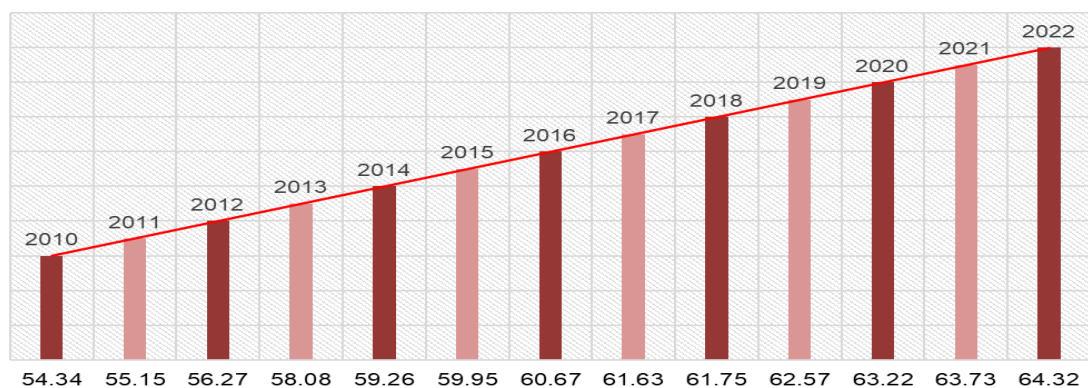
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah/bangsa di masa yang akan datang. Di era persaingan bebas saat ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan SDM yang unggul agar daerahnya tidak tertinggal dengan daerah lain. Salah satu ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu daerah yaitu dengan melihat angka Indeks Pendidikan. Menurut BPS, Indeks Pendidikan merupakan penggabungan 2 (dua) indikator pendidikan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2022, Indeks Pendidikan di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,42 persen. Kenaikan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 3,22 persen dari tahun 2012, kenaikan terendah pada tahun 2018 sebesar 0,19 persen dari tahun 2017.

Gambar 2.59
Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022

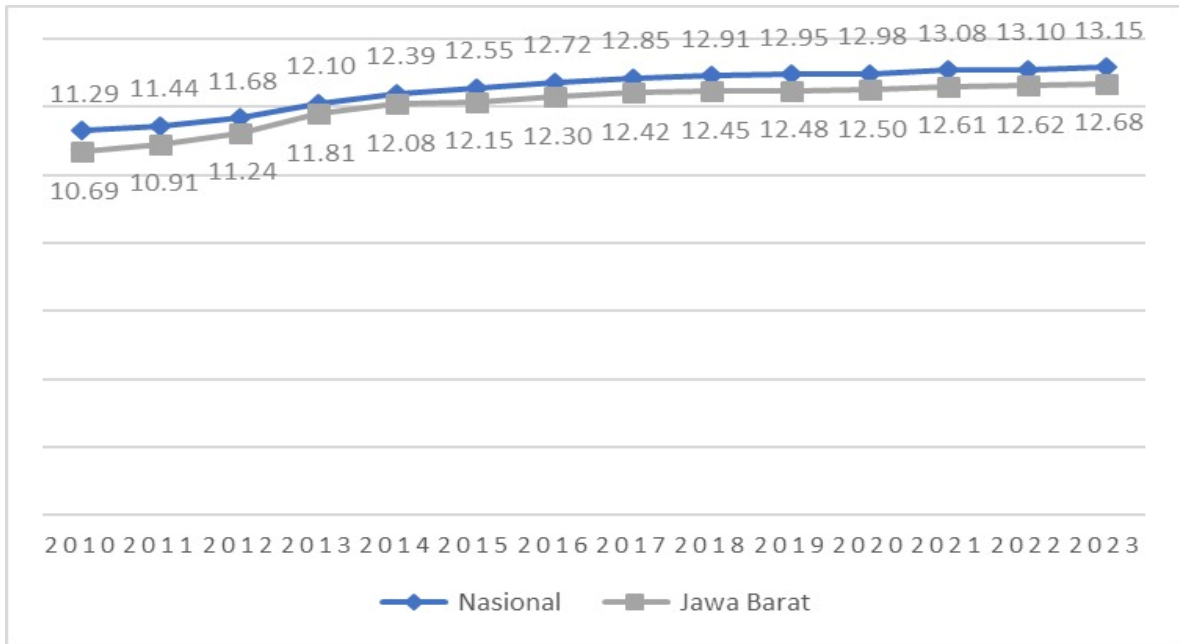


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Pada tabel diatas, Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat periode 2010-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,42 persen. Kenaikan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 3,22 persen, yang didorong Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan, pendistribusi SDM pendidikan secara merata, dan peningkatan kualitas kuantitas pendidikan. Sementara pada Tahun 2017-2018 Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan terendah yaitu sebesar 0,19 persen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya peningkatan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Barat.

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Selama periode 2010-2022, rata-rata pertumbuhan HLS Provinsi Jawa Barat sebesar 1,40 persen per tahun. Pada tahun 2023, HLS Provinsi Jawa Barat mencapai 12,68 tahun, yang berarti anak umur 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I capaian ini lebih rendah di banding capaian nasional yaitu 13,15 tahun.

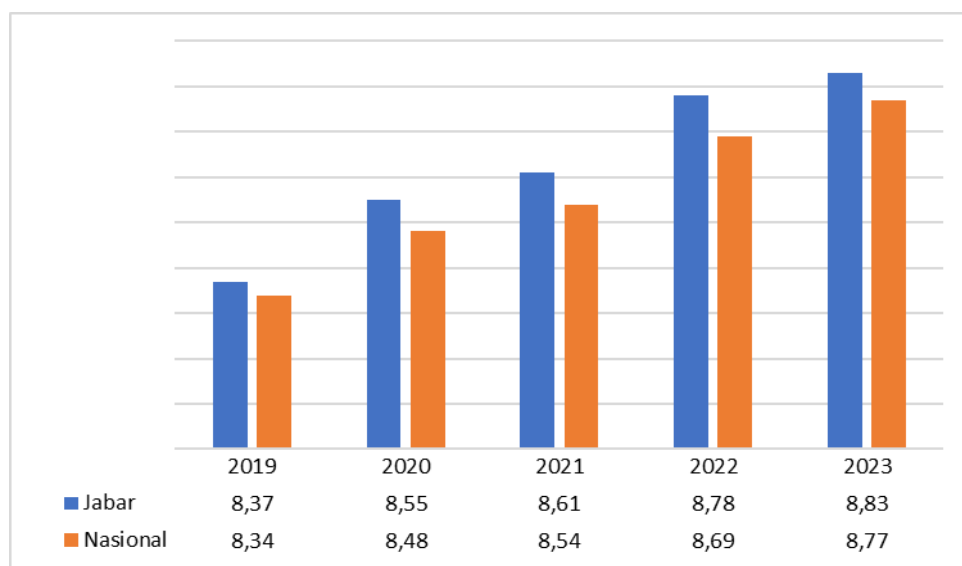
Gambar 2.60
HLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

RLS didefinisikan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Selama periode 2010-2022, RLS Provinsi Jawa Barat rata-rata tumbuh sebesar 1,44 persen per tahun. Pada tahun 2023, RLS Provinsi Jawa Barat mencapai 8,83 tahun atau hampir sama dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX capaian ini lebih baik dari capaian nasional yaitu 8,77 tahun.

Gambar 2.61
RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Pada 2023, RLS Jawa Barat mencapai 8,83 tahun atau hampir sama dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX. Artinya lebih baik dibanding capaian nasional 8,77 tahun. Meningkatkan RLS di Provinsi Jawa Barat memerlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Beberapa strategi yang dapat membantu meningkatkan HLS dan RLS Provinsi Jawa Barat, antara lain: (1) Menerapkan pendidikan inklusif dengan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kesehatan; (2) Menerapkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sehari-hari; (3) Memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkannya untuk mengatasi hambatan ekonomi; (4) Memberikan dukungan sosial dan psikologis berupa

dukungan emosional dan psikologis kepada siswa, termasuk konseling dan mentorship; (5) dan lainnya.

2.3.2.2 Literasi/Numerasi

Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan *modern* karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau mengelola keuangan pribadi, seseorang harus memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik.

Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah 2 (dua) keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah.

Pembangunan literasi menjadi tulang punggung peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang. Untuk itu, penyediaan pelayanan terbaik terhadap akses literasi masyarakat sangat diperlukan. Dengan demikian, budaya literasi, inovasi dan kreativitas dapat untuk mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Salah satu indikator untuk melihat perkembangan pembangunan literasi tersebut yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang terdiri dari beberapa unsur pembentuknya, meliputi: 1) Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1); 2) Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2); 3) Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3); 4) Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4); 5) Perpustakaan ber-SNP (UPLM5); 6) Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6); dan 7) Anggota Perpustakaan (UPLM7).

Pengukuran IPLM mulai dilakukan pada tahun 2021, dimana capaian IPLM Provinsi Jawa Barat adalah 9,64 poin. Namun perhitungan indikator tersebut mengalami perubahan di tahun 2022, sehingga capaiannya akan jauh berbeda. IPLM Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mencapai 72,73 poin,

dan menunjukkan penurunan secara signifikan sebesar 12,71 poin di tahun 2023 menjadi 60,02 poin. Angka ini berada dibawah capaian nasional yaitu sebesar 69,42 poin. Capaian IPLM Provinsi Jawa Barat tersebut termasuk dalam kategori “cukup”, yang artinya secara nasional nilai IPLM sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh PERPUSNAS. Meski demikian, apabila disandingkan dengan Provinsi di Jawa-Bali, IPLM Provinsi Jawa Barat masih dibawah capaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali.

Gambar 2.62
IPLM Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023



Sumber: Perpunas, 2024 (diolah)

Mengingat jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang merupakan terbanyak se-Indonesia dan adanya perkembangan teknologi informasi yang masif, maka perlu untuk menghadirkan perpustakaan-perpustakaan yang bersifat digital. Hal tersebut penting untuk menunjang kemudahan akses sehingga meningkatkan minat baca masyarakat kedepannya. Inovasi perpustakaan digital dapat menjadi destinasi penguatan yang menarik pada seluruh segmen usia dan lapisan masyarakat. Inovasi perpustakaan digital merupakan bukti nyata transformasi layanan digital yang sesuai dengan tren yang mulai bergeser cenderung menggunakan *smartphone*.

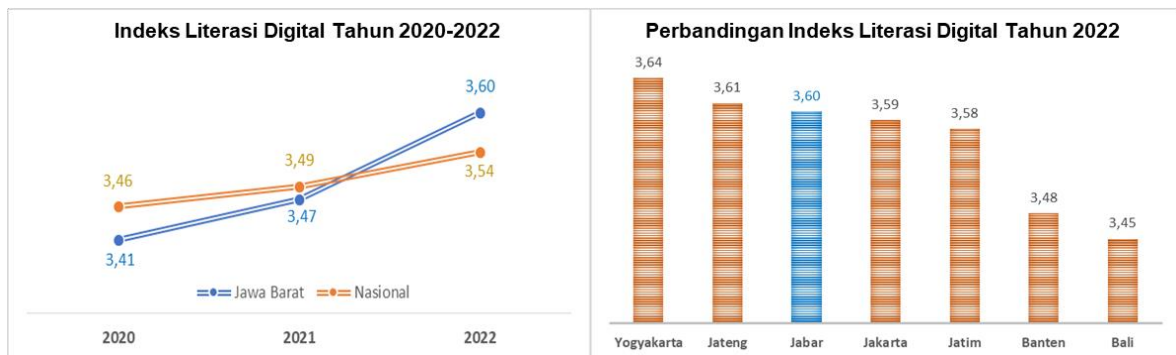
2.3.2.3 Literasi Digital

Saat ini digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari dan memiliki peran strategis bagi seluruh lapisan masyarakat. Di masa sekarang serta ke depan nanti, digitalisasi salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing baik secara

mikro di tatanan pribadi/keluarga/unit bisnis dan secara makro di tatanan wilayah atau negara.

Digitalisasi sangat erat kaitannya dengan literasi digital masyarakat. Semakin baik literasi digital masyarakat akan semakin membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital.

Gambar 2.63
Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022



Sumber: literasidigital.id, 2023 (diolah)

Literasi digital di Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan Indeks Literasi Digital menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Bahkan Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ketujuh di Indonesia dan peringkat ketiga di Jawa-Bali di tahun 2022.

Jika ditelusuri lebih dalam, budaya digital di Provinsi Jawa Barat merupakan pilar yang berkontribusi besar dalam pencapaian Indeks Literasi Digital. Namun demikian, pilar keamanan digital yang merupakan kemampuan pengguna dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari masih perlu menjadi perhatian.

2.3.2.4 Daya Saing Digital

Provinsi Jawa Barat dengan kondisi demografis didominasi oleh generasi produktif (69,95 persen) menjadikan masyarakatnya semakin akrab dengan teknologi. Digitalisasi menemukan lahan subur untuk terus

bertumbuh. Hal tersebut juga menempatkan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pemimpin dalam proses digitalisasi di Indonesia.

Berbagai penilaian dan indikator menjadi cerminan akan hal tersebut, salah satunya adalah Indeks Daya Saing Digital yang dikeluarkan oleh *East Ventures*. Secara keseluruhan pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat kedua nasional dengan nilai Indeks Daya Saing Digital sebesar 62,2 poin. Jika ditinjau lebih dalam, perolehan nilai tertinggi yaitu pada pilar keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki pengetahuan mengenai keuangan digital yang baik dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.

Gambar 2.64
Indeks Daya Saing Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023



Sumber: East Ventures, 2023

Dengan melihat tabel diatas, Indeks Daya Saing Digital selama 4 (empat) tahun dari tahun 2020 – 2023 mengalami kenaikan 7,21 poin. Hal ini didorong adanya Sumber Daya Manusia (SDM), adanya apresiasi dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kondisi perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, ketenagakerjaan, infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat di setiap daerah dalam menghadapi digitalisasi.

Dengan modal yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, maka penguatan ekosistem digital dalam rangka meningkatkan perekonomian digital perlu dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu, elemen dasar yang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu ekosistem perlu untuk terus diperkuat, yaitu penguatan infrastruktur digital yang diiringi dengan

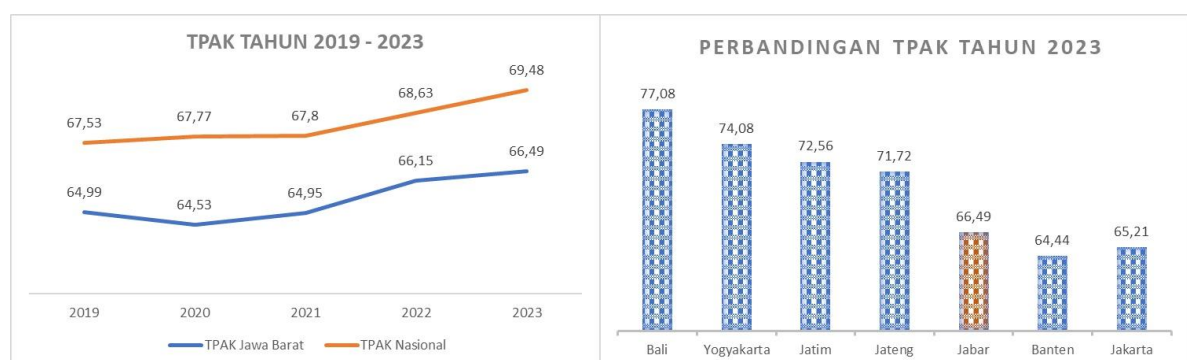
penguatan aplikasi pendukung, peningkatan *skills* dan kapabilitas sumber SDM dalam pemanfaatan teknologi digital dan riset, serta penguatan regulasi/kebijakan yang pro dan ramah terhadap proses transformasi digital.

2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk yang makin besar berkorelasi pada jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru.

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2022 adalah 38,67 juta orang, meningkat sebesar 0,58 juta orang dibandingkan Agustus 2021, pada tahun 2023 sebesar 38,18 juta orang, menurun sebesar 0,49 juta orang dari tahun 2022. Dari 38,18 juta orang penduduk usia kerja ini, sebanyak 25,39 juta orang (66,5 persen) merupakan Angkatan Kerja, sedangkan sisanya 12,79 juta orang (33,5 persen) tergolong Bukan Angkatan Kerja. Memperhatikan komposisi angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar didominasi oleh penduduk bekerja dengan persentase sebesar 92,56 persen atau 23,50 juta orang. Sisanya adalah pengangguran dengan presentase sebesar 7,44 persen atau 1,89 juta orang.

Gambar 2.65
TPAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Barat secara umum cenderung meningkat. TPAK pada Agustus 2023 mencapai 66,49 persen atau meningkat sebesar 0,51 persen dibandingkan Agustus 2022 sebesar 66,15 persen. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2023 mencapai 84,63 persen, sedangkan TPAK perempuan adalah sebesar 47,98 persen. Peningkatan TPAK Provinsi Jawa Barat ini didorong oleh adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar, adanya pengembangan inkubator bisnis, dan pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Namun TPAK Jawa Barat tersebut masih berada dibawah TPAK nasional dan di Jawa-Bali hanya lebih baik dari Banten dan Jakarta. Hal ini diakibatkan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, kurangnya lembaga balai pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, terbatasnya anggaran pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, belum meratanya lapangan kerja, dan masih minimnya akses lapangan kerja di setiap kabupaten/kota.

2.3.2.6 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan sangat erat dengan produktivitas penduduk suatu wilayah. Rasio ini bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk. Apabila rasio ketergantungannya tinggi, maka beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk besar, tentunya akan semakin memiliki daya saing SDM yang baik jika rasio ketergantungannya rendah. Jika dilihat tren dalam beberapa tahun terakhir, angka ketergantungan Provinsi Jawa Barat cenderung membaik dan masih dibawah angka nasional. Pada tahun 2022, angka ketergantungannya sebesar 42,84, artinya setiap 100 orang yang berusia

produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Gambar 2.66
Angka Ketergantungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Angka ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat yang cenderung mengalami penurunan, disertai dengan makin rendahnya *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka kematian sebagai dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Hal tersebut erat kaitannya dengan makin meningkatnya dan meluasnya kesempatan pendidikan untuk semua, terkhusus bagi perempuan, sehingga berdampak pada berkurangnya angka kelahiran dan angka kematian. Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat saat ini berada di era bonus demografi dan perlu untuk merubah paradigma dari “KB dua anak cukup”, menjadi “KB dengan anak lahir sehat dan berkualitas”.

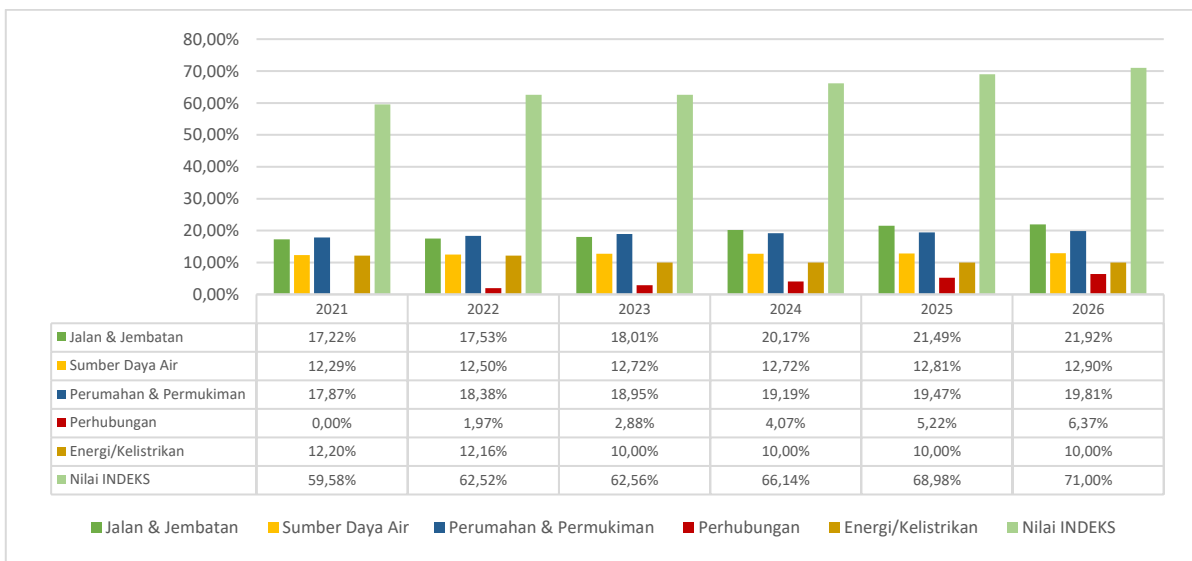
2.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Infrastruktur menjadi komponen penting dalam peningkatan daya saing daerah, menjadi penggerak ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Selain itu, infrastruktur juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa, serta penurunan biaya logistik yang tentunya akan bermuara pada terciptanya efisiensi ekonomi.

Tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat adalah bagaimana percepatan implementasi dari mulai tahap rencana sampai dengan konstruksi yang saat ini membutuhkan waktu rata-rata 15-

30 tahun. Kinerja Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat, terlihat dari terbangunannya infrastruktur strategis dalam kurun waktu RPJPD tahun 2005-2025, berupa 11 ruas jalan tol baru, 8 bendungan/waduk strategis, TPPAS Regional, serta terbangunnya 4 (empat) proyek strategis sektor transportasi diantaranya Bandara Internasional Kertajati, Pelabuhan Internasional Patimban, kereta cepat jakarta bandung, LRT Bogor Depok Bekasi serta pembangunan rel ganda (*double track*) kereta api (*Sumber: Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, KPPIP*). Oleh karena itu, pembiayaan kreatif (*kreatif financing*) yang tidak mengandalkan APBN dan APBD sangat diperlukan.

Gambar 2.67
Indeks Kinerja Infrastruktur

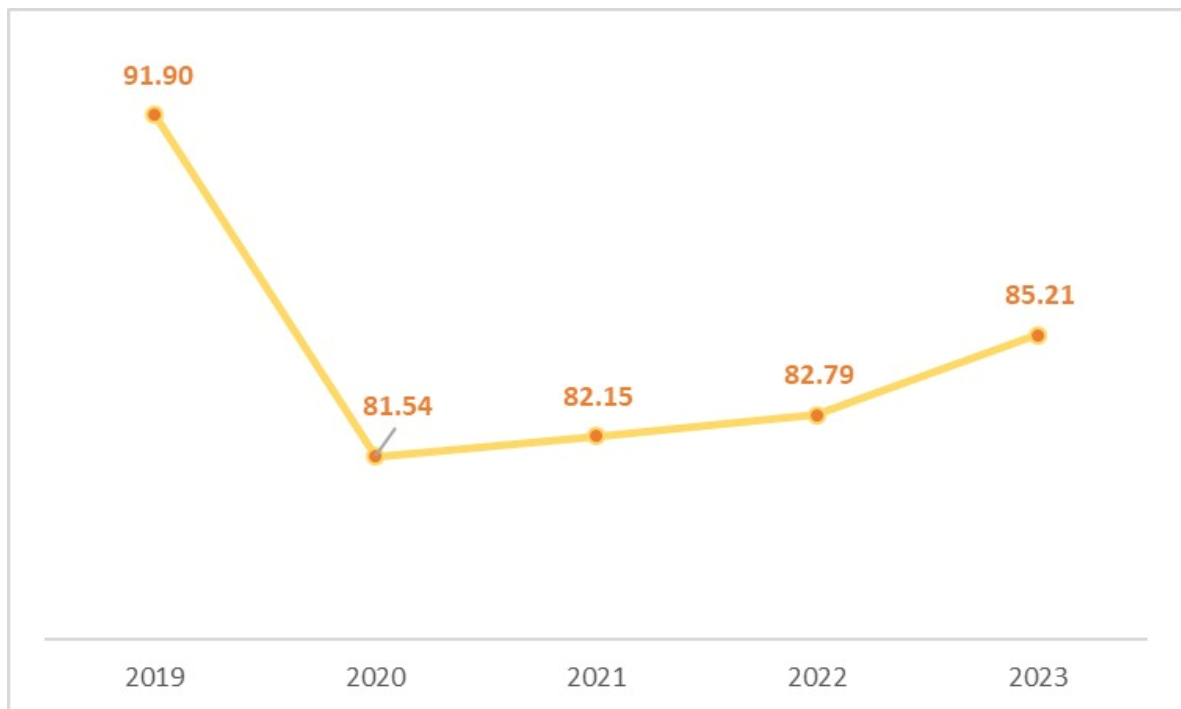


Kondisi infrastruktur Jawa Barat terlihat dari capaian kinerja infrastruktur diatas, bahwa di tahun 2021 dan tahun 2022, indeks kinerja infrastruktur di Jawa Barat masih berada pada angka 59,89 persen dan 62,52 persen pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, namun angka kondisi infrastruktur masih dibawah 80 persen menandakan kondisi infrastruktur di Jawa Barat masih belum baik, terutama dalam aspek transportasi. Kinerja Infrastruktur tersebut disumbangkan oleh 5 (lima) sektor utama secara agregat yaitu jalan dan jembatan, infrastruktur transportasi (perhubungan) atau tingkat konektivitas, sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta infrastruktur energi (kelistrikan).

2.3.3.1 Kemantapan Jalan

Sistem jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022, panjang jalan nasional adalah 1.782,65 km. Sementara jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.884-DBMTR/2022, yaitu sepanjang 2.362,183 km. Sedangkan jalan kabupaten/kota sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.883-DBMTR/2022 yaitu sepanjang 53.100,275 km dan menjadi kewenangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.68
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: DBMPR Provinsi Jawa Barat, 2024

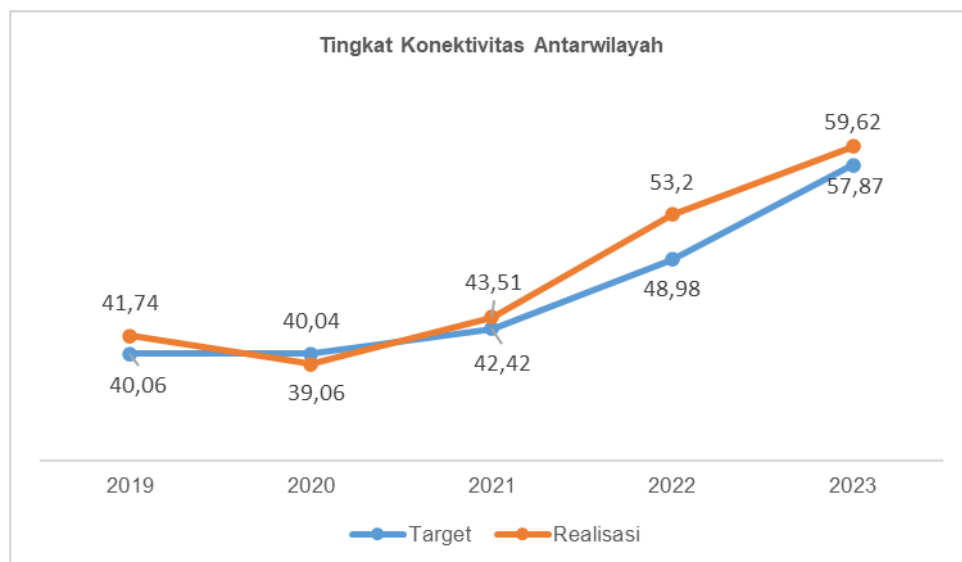
Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur jalan adalah Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi. Indikator tersebut menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan kondisi jalan dalam keadaan sedang berdasarkan pelaksanaan *survey* kondisi jalan yang dilakukan dengan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) dan atau dengan Analisis Perhitungan *Surface Distress Index* (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga.

Tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan penurunan dari tahun 2019 sebesar 91,90 persen menjadi 81,54 persen di tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda Indonesia sehingga terjadi pengalihan anggaran untuk menanggulangi wabah tersebut. Kondisi ini kemudian meningkat tahun di tahun 2021 menjadi 82,15 persen, dengan adanya dukungan pendanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembiayaan pembangunan berangsur pulih sehingga capaian kemantapan jalan juga meningkat dan pada tahun 2023 tingkat kemantapan jalan mencapai 85,21 persen.

2.3.3.2 Tingkat Konektivitas Antarwilayah

Peningkatan konektivitas antarwilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dan merupakan aspek penting dalam perkembangan suatu wilayah. Penilaian indeks kualitas infrastruktur di Jawa Barat tidak terlepas dari komponen yang juga menjadi variabel dalam perhitungan tingkat konektivitas antarwilayah yaitu: capaian tingkat kemantapan jalan provinsi, aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan atau yang merepresentasikan infrastruktur jalan, dan ketersediaan sarana, prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan, ketersediaan prasarana dan fasilitas keselamatan perhubungan laut dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), ketersediaan prasarana perhubungan udara dan ketersediaan jaringan transportasi massal berbasis rel atau dikenal sebagai ketersediaan prasarana transportasi

Gambar 2.69
Konektivitas Antarwilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2023



Sumber: DBMPR dan Dishub Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Tingkat Konektivitas Antarwilayah Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 46,13 persen pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 39,06 persen. Terjadinya penurunan capaian tingkat konektivitas antarwilayah pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya pengalihan anggaran untuk menanggulangi wabah tersebut. Namun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tingkat konektivitas terus mengalami peningkatan menjadi 59,62 persen seiring dengan pulihnya kondisi pembiayaan pembangunan Jawa Barat.

Kondisi Infrastruktur Transportasi (Perhubungan) menjadi salah satu komponen yang berkontribusi sangat besar terhadap rendahnya nilai kinerja infrastruktur di Jawa Barat. Kondisi *modal share* pengguna angkutan umum di Jawa Barat, yang baru sebesar 4,15 persen (Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022) terlihat masih jauh jika dibandingkan DKI Jakarta sebesar 18,45 persen (Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI, Jawa Barat, 2022). Ketersediaan transportasi massal masih menjadi sebuah kondisi yang kompleks, dengan tingginya penggunaan kendaraan pribadi baik motor ataupun mobil menjadi sebuah tantangan tersendiri. Selain itu, kondisi konektivitas antarwilayah perlu didukung dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi

yang terintegrasi baik antar moda baik darat, laut, dan udara yang hingga saat ini masih perlu dilakukan.

Terkait kondisi infrastruktur transportasi perhubungan ini, dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 telah terdapat rencana struktur ruang jaringan transportasi dimana salah satunya terdapat rencana pengembangan pelabuhan secara hierarkis mulai dari pengembangan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpul lokal, terminal khusus, hingga pelabuhan perikanan, sebagai berikut:

- a) Pengembangan Pelabuhan Utama: Kabupaten Subang (Pelabuhan Patimban);
- b) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul: Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon);
- c) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional:
 1. Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ratu);
 2. Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Indramayu/Losarang) (rencana);
 3. Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Pangandaran).
- d) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 1. Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan Muara Gembong);
 2. Kabupaten Subang (Pelabuhan Pamanukan Blanakan, Pelabuhan Ciasem, Pelabuhan Mayangan, Pelabuhan Muara Tawar);
 3. Kabupaten Cirebon (Pelabuhan Astanajapura, Pelabuhan Muara Gebang, Pelabuhan Bondet, Pelabuhan Gebang Mekar);
 4. Kota Cirebon (Pelabuhan Kejawanen);
 5. Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Balongan, Pelabuhan Eretan, Pelabuhan Juntinyuat, Pelabuhan Karangsong, Pelabuhan Patrol, Pelabuhan Sukra, Pelabuhan Tirtamaya);
 6. Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Pangandaran, Pelabuhan Batu Karas, Pelabuhan Parigi, Pelabuhan Majingklak);
 7. Kabupaten Tasikmalaya (Pelabuhan Cipatujah);

8. Kabupaten Garut (Pelabuhan Pameungpeuk, Pelabuhan Pakenjeng, Pelabuhan Caringin);
 9. Kabupaten Cianjur (Pelabuhan Sindang Barang); dan
 10. Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Teluk Palangpang/Ciwaru, Pelabuhan Ujung Genteng, Pelabuhan Cisolok.
- e) Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus: Perairan Kabupaten Sukabumi, Perairan Kabupaten Cianjur, Perairan Kabupaten Cirebon, Perairan Kabupaten Karawang, Perairan Kabupaten Bekasi, dan Perairan Kabupaten Indramayu;
- f) Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Lainnya: Inland Waterways CBL Cikarang – Bekasi – Laut Jawa;
- g) Pembangunan Galangan Kapal Perikanan: Kabupaten/Kota di Pesisir Jawa Barat;
- h) Pelabuhan Perikanan:
1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan: PPN Kejawanen, PPN Palabuhanratu, PPP Eretan Wetan, PPP Bondet, PPP Cilauteureun, PPP Ciparage, PPP Blanakan, PPP Muara Ciasem, PPI tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Cirebon;
 2. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS): PPS Palabuhanratu;
 3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): PPP Eretan Wetan, PPP Bondet, PPP Cilauteureun, PPP Ciparage, PPP Blanakan, PPP Muara Ciasem;
 4. Pengembangan dan Penataan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI):
 - i. Kabupaten Bekasi: PPI Paljaya, PPI Muara Jaya, PPI Muara Bendera, PPI Muaragembong;
 - ii. Kabupaten Karawang: PPI Pakis Jaya, PPI Sedari, PPI Cemara, PPI Sungai Buntu, PPI Pasir Putih, dan PPI Tangkolak;

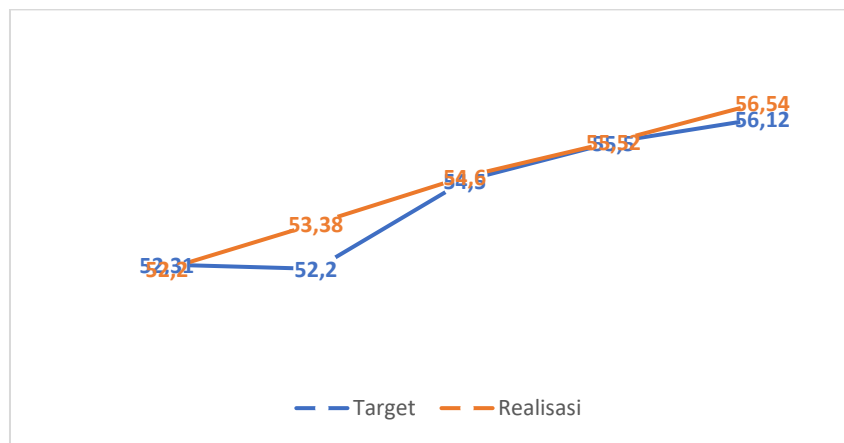
- iii. Kabupaten Subang: PPI Rawameneng, PPI Mayangan, Terungtum, PPI Genteng, PPI Anggasari, PPI Cirewang, PPI Cilamaya Girang, PPI Muara;
- iv. Kabupaten Indramayu: PPI Ujung Gebang, PPI Sukahaji, PPI Eretan Kulon, PPI Majakerta, PPI Lombang, PPI Glayem (Juntinyuat), PPI Limbangan, PPI Dadap, PPI Karangsong, PP Tegalagung, PPI Pabean Udik;
- v. Kabupaten Cirebon: PPI Mundu Pesisir, PPI Gebang Mekar, PPI Ambulu, PP Bungko Lor, PP Karangreja, PP Selopenganten (PPI Bandengan), PP Ender;
- vi. Kota Cirebon: PPI Pesisir, PPI Cangkol, PPI Kesenden;
- vii. Kabupaten Sukabumi: PPI Cikembang, PPI Cibangban, PPI Cisolok, PPI Loji, PPI Ciwaru, PPI Kalapa Condong, PPI Ujung Genteng, PPI Mina Jaya, dan PPI Tegal Buleud;
- viii. Kabupaten Cianjur: PPI Cikakap, PPI Jayanti;
- ix. Kabupaten Garut: PPI Rancabuaya, PPI Cimari Muara, PPI Cijeruk;
- x. Kabupaten Tasikmalaya: PPI Pamayangsari, PPI Nusa Cimanuk; dan
- xi. Kabupaten Pangandaran: PPI Muara Gatah, PPI Legok Jawa, PPI Madasari, PPI Batukaras, PPI Nusawiru, PPI Bojongsalawe, PPI Cikidang, PPI Plataragung, dan PP Majingklak.

2.3.3.3 Sistem Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat sebanyak 103 Daerah Irigasi dengan luas areal mencapai 100.600 Ha. Seluas 23.637 Ha merupakan daerah irigasi lintas kabupaten/kota pada 52 Daerah Irigasi, seluas 70.099 Ha Daerah Irigasi utuh kabupaten/kota pada 45 Daerah Irigasi dan seluas 6.864 Ha pada 6 (enam) Daerah Irigasi tambak.

Kondisi capaian indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu melebihi target dengan capaian 56,54 persen, adapun rata-rata pertambahan IKSI sebesar 1,08 persen setiap tahun, hal ini masih menunjukkan kinerja layanan irigasi yang masih dibawah standar. Faktor yang menyebabkan masih rendahnya kinerja layanan irigasi tersebut adalah sistem operasi dan pemeliharaan belum maksimal sehingga fungsi layanan irigasi tidak berfungsi secara optimal.

Gambar 2.70
IKSI Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

2.3.3.4 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebelum tahun 2021, penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan dengan sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga menjadi Akses Air Minum layak, Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan.

Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan terutama sebagai akibat dari minimnya

intervensi pembangunan yang disebabkan adanya keterbatasan anggaran (pemerintah, swasta dan masyarakat) terutama dampak COVID-19. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, belum tersedianya perencanaan yang komprehensif dalam rangka peningkatan akses infrastruktur permukiman, dan manajemen pengelolaan yang masih kurang baik serta masih kurangnya dukungan pendanaan diluar APBN dan APBD.

Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m² per orang; 3) memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak. Pencapaian indikator RTHL tahun 2021 sebesar 53,14 persen dan pada tahun 2023 sebesar 54,17 persen. Dengan demikian masih terdapat *gap* yang besar (45,83 persen) untuk mencapai kondisi ideal yakni seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat menempati rumah yang layak huni. Capaian indikator kinerja tersebut, telah melampaui target tahunan namun merujuk pada tantangan perumahan untuk Indonesia Emas 2045 sebesar 100 persen, maka masih diperlukan upaya percepatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan *stakeholder* pembangunan perumahan dan permukiman baik dari unsur pemerintah (pusat dan daerah kabupaten/kota), swasta, dan masyarakat.

Tabel 2.10
Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023	
			T	R	T	R	T	R
1	Akses Air Minum Layak	Persen	95,12	93,24	96,75	93,04	98,37	93,86
2	Akses Sanitasi Layak	Persen	80,37	77,08	83,58	83,78	86,79	74,88
3	Akses Penanganan Sampah Perkotaan	Persen	72,3	70,70	77	77,02	79,00	74,64
4	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	51,70	53,14	52,80	53,37	53,90	54,17

Sumber: LKPJ Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Iklim Demokrasi

Iklim demokrasi yang kondusif sangat mempengaruhi daya saing daerah sehingga dapat menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Iklim demokrasi yang diukur dengan Indeks Demokrasi juga memiliki peran penting sebagai pendeteksi dini dalam mengatasi kelemahan sistem demokrasi.

Gambar 2.71
Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Iklim demokrasi di Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang makin membaik. Hal itu tercermin dari skor Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat yang meningkat hingga berada peringkat keempat di Indonesia pada tahun 2023. Skor Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 sebesar 83,04 poin (Tinggi) yang mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,30 poin. Pencapaian indeks demokrasi Provinsi Jawa Barat ditopang oleh kenaikan pada aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Penurunan Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat memerlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan. Mengingat dari 3 (tiga) aspek yang ada, Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada aspek kebebasan dari tahun 2022 sebesar 90,61 poin menjadi 87,97 poin di tahun 2023.

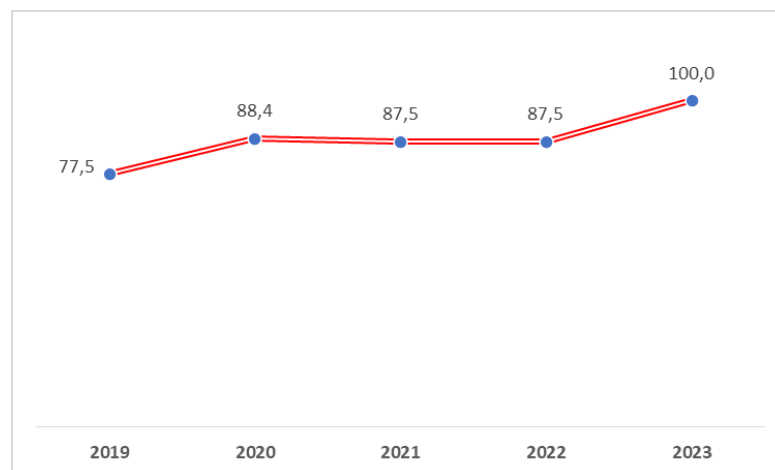
Sedangkan pada aspek kesetaraan dan aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 Aspek Kesetaraan sebesar 82,61 poin mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 83,63 poin. Aspek lembaga demokrasi tahun 2022 sebesar 77,05 poin mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 77,49 poin.

2.3.4.2 Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman dan ketertiban merupakan salah satu syarat dalam mendukung kelancaran pembangunan. Artinya, semakin kondusif daerah tersebut maka gangguan pelaksanaan pembangunan semakin kecil. Untuk mencapai kondusifitas oleh karena itu, perlu terus dilakukan kolaborasi dari berbagai *stakeholder*.

Kondisi ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang tinggi sebesar 100 persen di tahun 2023. Artinya, secara umum masyarakat Jawa Barat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari patuh terhadap aturan.

Gambar 2.72
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2023



Sumber: Satpol PP Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

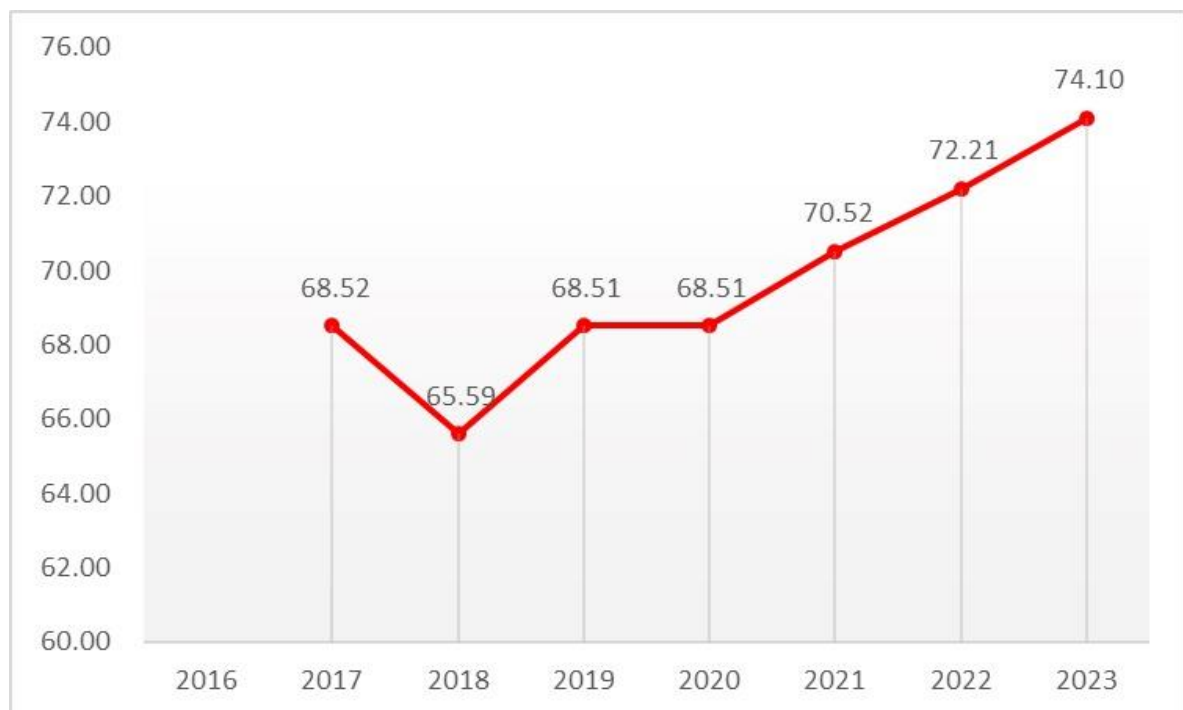
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat yang sudah baik harus tetap dipertahankan melalui upaya-upaya preventif, represif, dan kuratif sebagai alat kontrol dinamika sosial. Selain itu, pengarusutamaan pemanfaatan teknologi berbasis digital perlu terus dilakukan agar respon cepat di lapangan meningkat.

2.3.4.3 Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam Agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu (1) Toleransi, (2) Kesetaraan, dan (3) Kerjasama. IKUB ini pun juga telah digunakan oleh Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2.73
IKUB Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023



Sumber: Kemenag, 2024

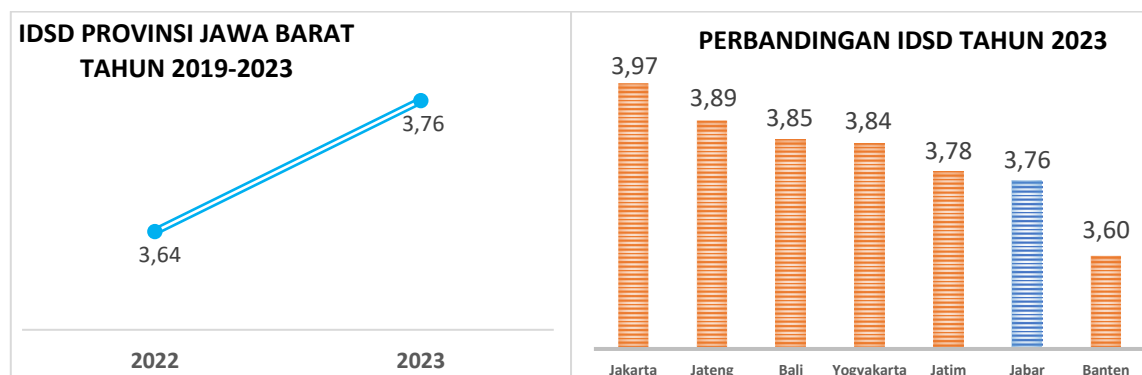
Pentingnya kerukunan umat beragama tentunya juga untuk menghindari konflik yang dapat tumbuh di masyarakat. Karena itu, Provinsi Jawa Barat perlu mempunyai basis data terkait potensi konflik,

sehingga konflik tersebut dapat dimitigasi dan berupaya untuk dicegah dan diatasi sejak dini. Konflik yang berdimensi keagamaan, kalau dibiarkan akan mengakibatkan korban dan akan menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan.

2.3.4.4 DAYA SAING DAERAH

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi baik dari aspek sumber daya alam, demografi, maupun aspek lainnya. Pemanfaatan dan optimalisasi potensi suatu daerah sangat dipengaruhi produktivitas daerah itu sendiri. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah membuat instrumen pengukuran berupa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat daerah untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing yaitu institusi, infrastruktur adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisasi bisnis, dan kapabilitas inovasi. Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 memperoleh skor Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,76 poin yang artinya lebih besar dari rata-rata skor Indeks Daya Saing Daerah secara nasional yaitu sebesar 3,44 poin.

Gambar 2.74
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menempatkan Provinsi Jawa Barat pada peringkat ke-6 dari Provinsi lainnya di Pulau Jawa maupun secara nasional. Provinsi Jawa Barat perlu

terus meningkatkan daya saingnya terutama pada aspek ketenagakerjaan karena berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023, Pilar dengan skor terendah yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Barat adalah pilar pasar tenaga kerja.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi tidak lagi hanya mengurus masalah tata kelola yang cenderung administratif, tetapi diarahkan untuk mengejar dampak yang dirasakan masyarakat. Dampak tersebut diantaranya soal kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas nasional seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.

Pada perjalanannya, pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat telah mengalami perubahan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Sebelumnya, reformasi birokrasi ditekankan pada birokrasi yang dinamis dan kolaboratif, tetapi dengan dinamika yang terjadi, reformasi birokrasi ditekankan pada birokrasi digital. Evolusi reformasi birokrasi tersebut berkorelasi dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat. Jika tahun-tahun sebelumnya, indeks yang dicapai selalu berada pada kategori BB (Sangat Baik), saat ini pada tahun 2022 meningkat menjadi A (Memuaskan). Pencapaian peringkat tersebut setara dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 2.75
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Kemenpan RB, 2023 (diolah)

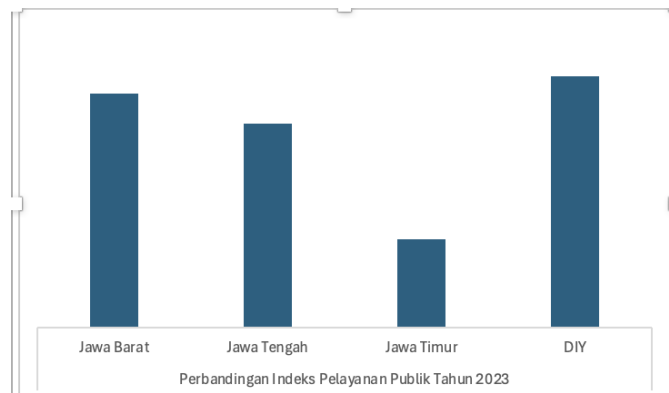
Jawa Barat berhasil mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel. Birokrasi Jawa Barat yang kapabel, bersih, dan akuntabel terbentuk dari reformasi birokrasi yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Barat pada tahun 2023 sudah masuk kedalam Kategori A dengan capaian 113,50 persen dari target sebesar 82,01 poin dan terealisasi sebesar 93,08 poin.

Dari segi realisasi, Indeks Reformasi Birokrasi meningkat 12,38 poin yaitu pada tahun 2022 sebesar 80,70 poin dan pada tahun 2023 menjadi 93,08 poin. Perolehan tersebut melebihi rata-rata realisasi Indeks Reformasi Birokrasi nasional sebesar 69,71 poin dan menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbaik dalam implementasi reformasi birokrasi di Indonesia.

2.4.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sudah berada pada predikat A (Pelayanan Prima) dengan nilai 4,53. Perolehan tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu dari 2 (dua) provinsi dengan capaian predikat tertinggi di Indonesia.

Gambar 2.76
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Kemenpan RB, 2023

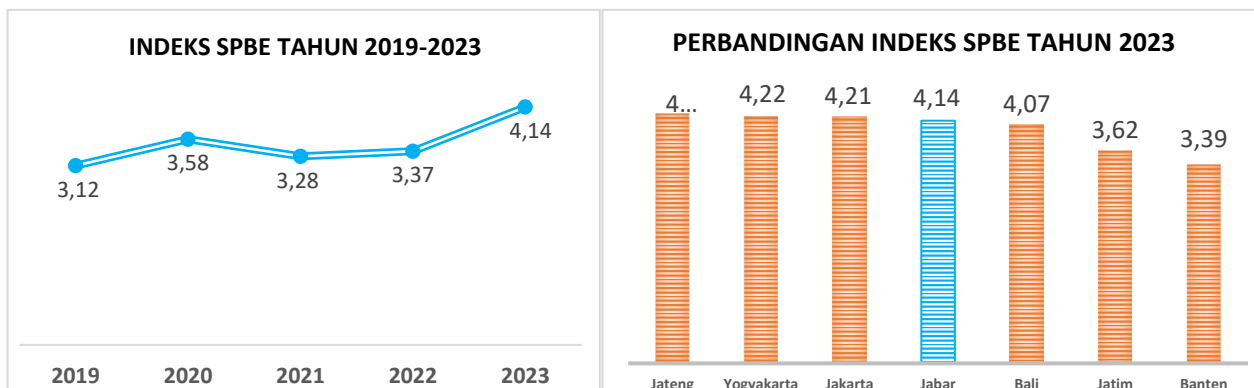
Pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat masih memerlukan penguatan yang berkesinambungan meskipun sudah mencapai predikat tertinggi. Penguatan tersebut yaitu terkait sistem manajemen pelayanan agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia

pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, aksi pada periode mendatang difokuskan pada peningkatan pelayanan publik secara terintegrasi berbasis teknologi informasi.

2.4.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peningkatan penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat membantu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan penerapan SPBE tercermin dari capaian Indeks SPBE yang meningkat pada tahun 2023. Capaian Indeks SPBE Tahun 2023 menempatkan Provinsi Jawa Barat pada peringkat ke-4 diantara Provinsi lainnya di Pulau Jawa bahkan Nasional.

Gambar 2.77
Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023



Sumber: KemenpanRB, 2024

Capaian Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menjadikan Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat sangat baik dalam penerapan SPBE meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi SPBE Tahun 2023, domain manajemen SPBE adalah domain yang memiliki tingkat kematangan yang paling rendah dibandingkan dengan domain SPBE lainnya. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan penerapan manajemen SPBE melalui penerapan

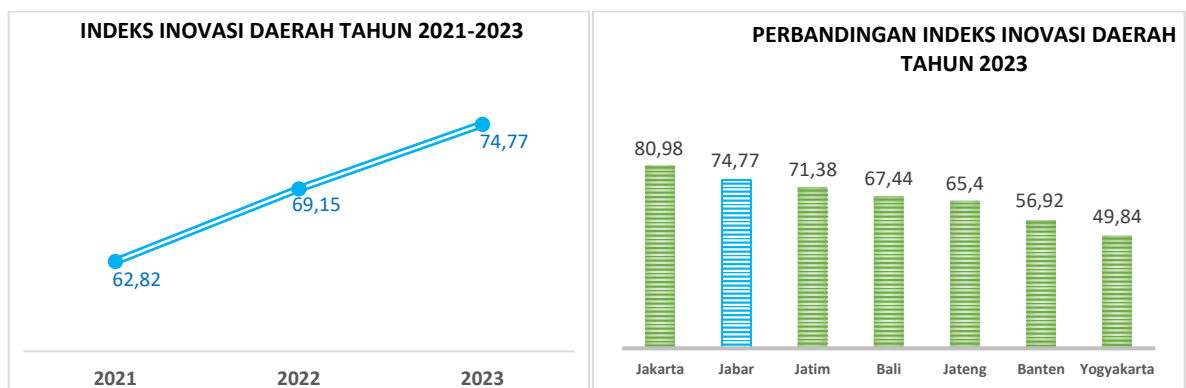
secara menyeluruh pada manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan, serta audit infrastruktur dan audit keamanan SPBE.

2.4.4 Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan itu, semakin baiknya inovasi di daerah juga akan semakin meningkatkan daya saing daerah.

Provinsi Jawa Barat telah menyandang predikat provinsi terinovatif selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2023 dalam ajang *Innovation Government Award* (IGA). Meskipun tidak selalu menjadi nomor satu, tetapi capaian tersebut sudah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat sangat mendukung inovasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik. Hingga saat ini, jumlah inovasi yang dimiliki sekitar 224 inovasi yang terdiri dari 61 inovasi tata kelola pemerintah daerah, 110 inovasi pelayanan publik, dan 53 inovasi daerah lainnya. Inovasi itu terbagi menjadi inovasi digital dan inovasi *non-digital*.

Gambar 2.78
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023



Sumber: BP2D Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Capaian inovasi di tingkat Provinsi Jawa Barat sejauh ini sudah cukup baik. Namun perlu terus mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dan mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasinya. Selain itu, pelaksanaan inovasi tidak hanya berfokus pada ide-

ide baru dan kreatif, regulasi, dan tatanan kelembagaan semata namun harus menambahkan peran budaya inovasi didalamnya. Budaya inovasi yang kuat memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan. Karena itu, budaya inovasi harus menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja.

2.5 EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2023

Capaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan Visi “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia” telah menunjukkan kemajuan. Dalam perjalanannya, perwujudan pencapaiannya penuh dengan dinamika yang cukup kompleks sebagai dampak dari kondisi nasional dan global. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memajukan pembangunan daerah, namun masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Keberhasilan pembangunan ini, tidak lepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang berhasil diterjemahkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan di dokumen RPJMD dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan di dokumen RKPD. Selain itu, keberhasilan pembangunan ini juga merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang adaptif, stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur, serta berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor ini pada dasarnya mengalami dinamika seiring waktu, namun respons yang tepat dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan para pemangku kepentingan melalui penyesuaian strategi membuat pembangunan yang dilakukan membawa pada keberhasilan.

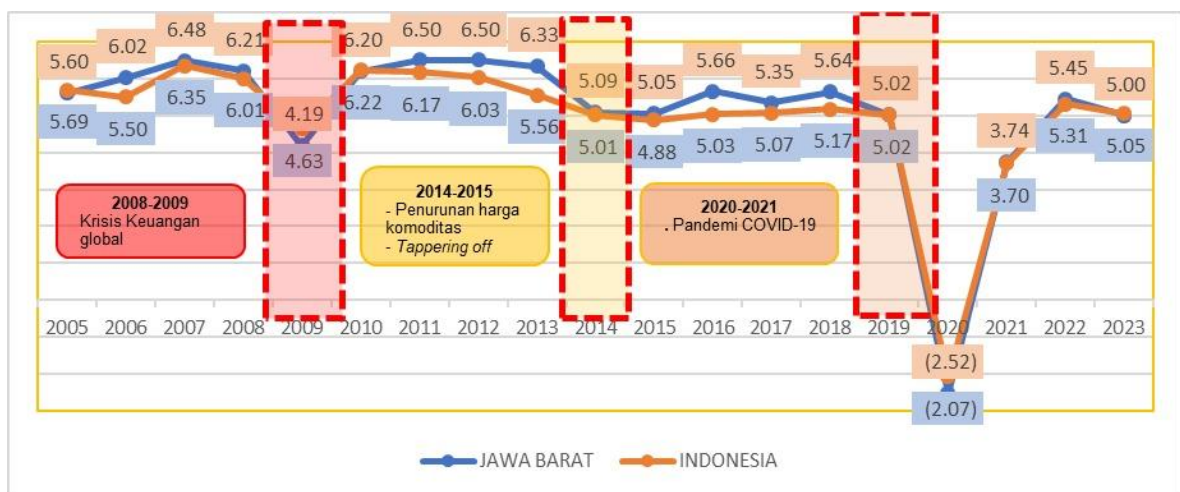
Kemajuan dan keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang direfleksikan dengan indikator-indikator terpilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2019 adalah 5,75 persen, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan

nasional yang mencapai 5,39 persen. Meskipun rata-rata LPE di atas nasional, terlihat bahwa setiap terjadi *shock* dalam perekonomian (kecuali Tahun 2015-2016), LPE Provinsi Jawa Barat selalu berkontraksi lebih dalam dibandingkan perekonomian nasional. Salah satu penyebab dari lebih dalamnya kontraksi LPE Provinsi Jawa Barat dominan di sektor industri pengolahan yang bahan baku dalam proses produksinya masih banyak bergantung pada bahan baku impor, sehingga lebih rentan dibanding perekonomian nasional ketika terjadi *shock* dalam perekonomian (khususnya karena *external shock*).

Gambar 2.79
LPE Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Secara umum, Provinsi Jawa Barat memiliki LPE yang kompetitif dan berkontribusi penting dalam perekonomian nasional. Meskipun mengalami tantangan dalam beberapa periode, Provinsi Jawa Barat masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam jangka panjang. Sehingga untuk terus bersaing dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan meningkatkan posisinya secara nasional perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi serta peningkatan daya saing daerah.

2. Pembangunan SDM

Secara umum, terlihat tren positif dalam peningkatan pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Jawa Barat. Terlihat bahwa pencapaian IPM ini hampir selalu berada diatas target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini juga menandakan adanya upaya untuk meningkatkan sektor-sektor kunci seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Gambar 2.80
IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

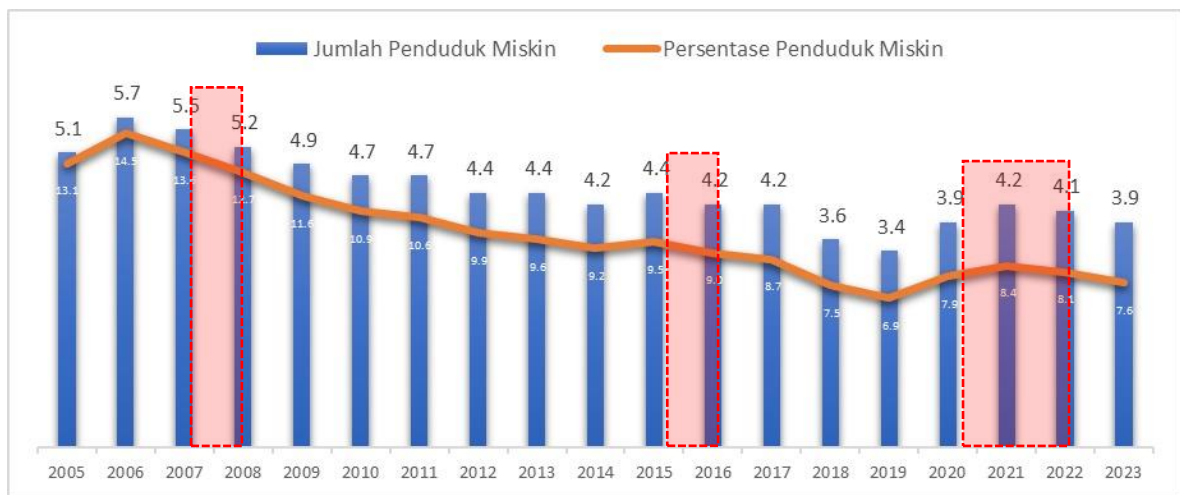
Dengan mencermati perkembangan IPM Provinsi Jawa Barat, upaya untuk meningkatkan variabel kunci pembentuk IPM masih tetap diperlukan. Dengan melanjutkan usaha untuk meningkatkan sektor-sektor penting, diharapkan kualitas kehidupan masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat terus ditingkatkan. Peningkatan yang berkelanjutan tentunya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan masa depan masyarakat secara keseluruhan.

3. Kemiskinan

Dalam rentang tahun 2005–2023, jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2006 diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), konversi minyak tanah ke gas, dan tekanan inflasi (inflasi nasional mencapai 17,11 persen). Sementara itu kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2015 diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada kebijakan moneter

negara mitra dagang, pelemahan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan menurunnya nilai ekspor, dan tekanan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Sedangkan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2020-2021 diakibatkan oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan pendapatan, pengangguran, dan berhentinya kegiatan ekonomi masyarakat.

Gambar 2.81
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2023



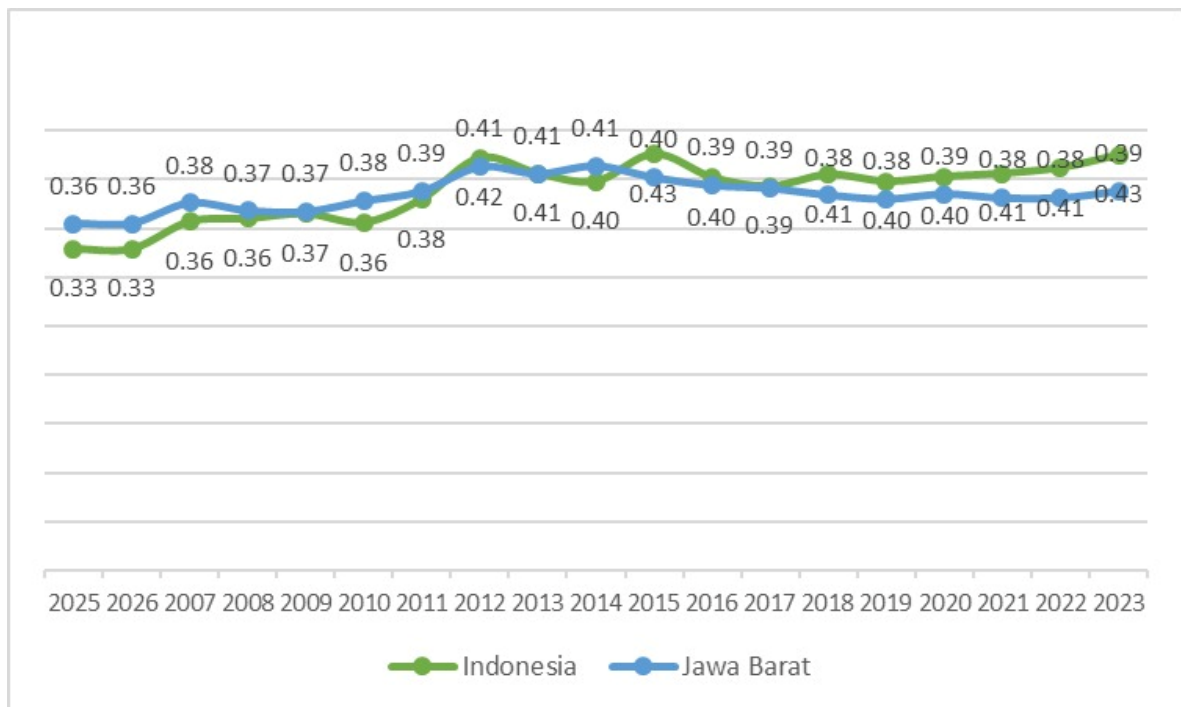
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dari rata-rata nasional, namun dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan provinsi lain, yakni penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 berjumlah sekitar 50,02 juta penduduk Jawa Barat atau 17,89 persen dari penduduk nasional, Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Tantangan untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat antara lain terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi penduduk miskin ekstrem, terutama mereka yang berusia dibawah 24 tahun dengan tingkat pendidikan SMP kebawah. Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi juga perlu diperhatikan, termasuk memperbaiki akses jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik. Selanjutnya, perlu dilakukan upaya dalam diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non-pertanian dan non-informal di daerah-daerah tersebut.

4. Ketimpangan

Ketimpangan di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan dengan Rasio Gini merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasinya. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu yang nilai Rasio Gininya tertinggi, terutama setelah tahun 2018. Rasio Gini Provinsi Jawa Barat hanya lebih rendah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 2.82
Rasio Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Tantangan dalam penanganan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat antara lain terkait dengan peningkatan aksesibilitas bagi semua individu agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan peluang. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara luas melalui kerja sama kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

5. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah tujuan bagi pencari kerja, namun tidak semua pencari kerja dapat diserap oleh pasar tenaga kerja, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat.

Gambar 2.83
TPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

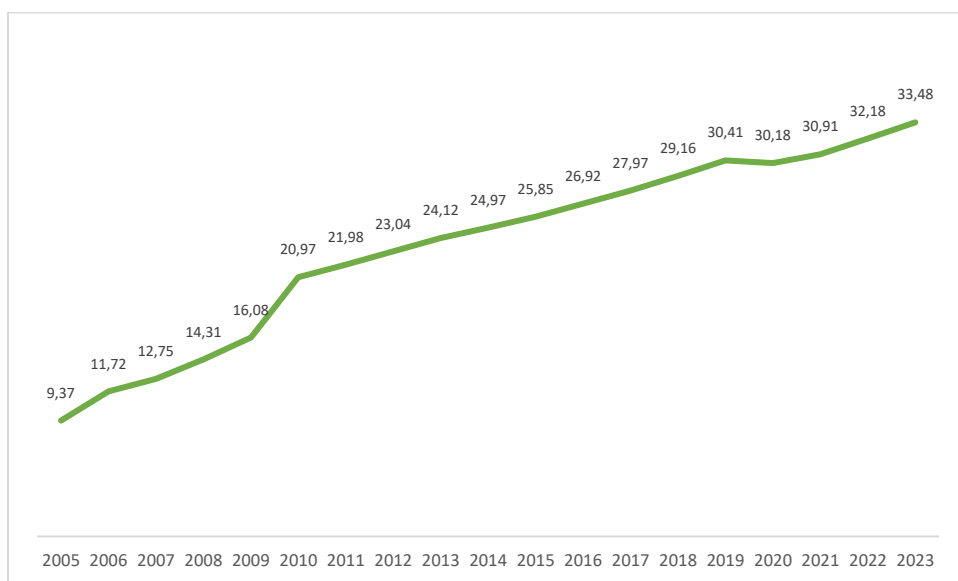
Tantangan dalam penanganan pengangguran di Provinsi Jawa Barat antara lain terkait perbedaan tingkat pengangguran antara jenis kelamin yang menunjukkan bahwa penganggur terbuka berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022 didominasi oleh laki-laki. Hal ini sejalan dengan TPAK laki-laki selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2018, jumlah penganggur terbuka berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.212.648 orang. Jumlah tersebut merupakan 7,96 persen dari seluruh angkatan kerja laki-laki. Jumlahnya penganggur terbuka laki-laki meningkat di tahun 2022 menjadi 1.400.965 orang. Sementara itu jumlah penganggur terbuka perempuan pada 2022 sebanyak 724.461 orang. Pada tahun 2023 TPT laki-laki sebesar 8,09 persen dan TPT perempuan sebesar 6,25 persen. Tidak hanya itu, perbedaan tingkat pengangguran juga terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Tingkat pengangguran laki-laki cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan, sementara tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi di desa. Perbedaan ini kemungkinan terkait dengan struktur pekerjaan yang berbeda di kedua wilayah tersebut. Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu wilayah tujuan utama bagi pencari kerja dari

daerah lain. Karenanya, fenomena ini perlu diatasi dengan kebijakan yang bersifat lintas daerah dan bahkan melibatkan Pemerintah Pusat.

6. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode waktu 2005-2022. Pada tahun 2005, PDRB per kapita hanya sebesar Rp9,37 juta, namun telah mengalami kenaikan yang tajam pada tahun 2010, yaitu mencapai Rp20,97 juta. Peningkatan tersebut terus berlanjut hingga mencapai Rp33,48 juta pada tahun 2023. Peningkatan PDRB per kapita yang terus menerus ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.84
PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Peningkatan PDRB per kapita yang terus menerus ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Provinsi Jawa Barat. Namun tantangan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja itu antara lain menjaga produksi, investasi, dan konsumsi masyarakat. Kestabilan inflasi juga perlu tetap dijaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga perlu diperhatikan mengingat PDRB per kapita sangat erat terkait dengan jumlah penduduk.



2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Tren Demografi

A. Tren Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Proyeksi penduduk perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi penduduk di perkotaan dan perdesaan.

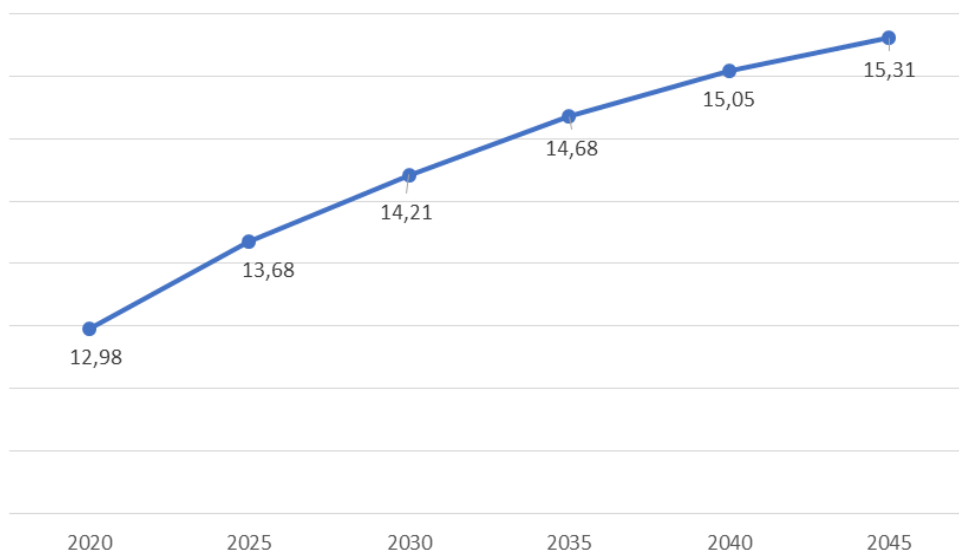
Tabel 2.11
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	50.025.605	50.759.010	52.698.960	54.444.910	55.831.310	56.805.780

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 50.025.605 jiwa dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan/pertumbuhan penduduk, hingga pada tahun proyeksi maksimum yaitu tahun 2045 mencapai 56.805.780 jiwa.

Gambar 2.85
Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2045



Sumber : Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS

Berdasarkan proyeksi, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat akan mengalami peningkatan. Hal ini menjelaskan bahwa daya tampung di Provinsi Jawa Barat yang tetap, sedangkan kebutuhan lahan sendiri terus bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk hingga tahun 2045.

Tabel 2.12
Proyeksi Indikator Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan 2045

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Capaian 2020	2045
Aspek Kelahiran (Fertalitas)				
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,11	1,84
2	Crude Birth Rate (CBR)	Kelahiran/ 1000 Penduduk	17,14	12,12
3	Jumlah Kelahiran	Jiwa	825.470	688.680
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,00	77,16
Aspek Kematian (Mortalitas)				
1	Infant Mortality Rate (IMR)	Kematian/ 1000 Penduduk	14,33	6,58
2	Jumlah kematian	Jiwa	240.630	521.950
Aspek Migrasi				
1	Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR)	Angka	0,18	-0,16

Sumber : Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS

Perhitungan perkembangan penduduk baik dari segi jumlah dan penambahan dan/atau perubahan penduduk sesuai dengan faktor

pengaruhnya menggunakan indikator masing-masing. Untuk angka kelahiran digunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), angka kematian menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta angka migrasi menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR).

Berdasarkan proyeksi indikator penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2045, diketahui pada aspek fertilitas terjadi penurunan angka kelahiran. Indikator yang memperlihatkan penurunan, antara lain:

- a. *Total Fertility Rate* (TFR) diproyeksikan turun dari 2,11 di tahun 2020 menjadi 1,84 di tahun 2045;
- b. *Crude Birth Rate* (CBR) diproyeksikan turun dari 17,14 di tahun 2020 menjadi 12,12 di tahun 2045;
- c. Jumlah kelahiran diproyeksikan turun dari 825.470 jiwa di tahun 2020 menjadi 688.680 jiwa di tahun 2045; dan
- d. Usia Harapan Hidup (UHH) diproyeksikan naik dari 74,00 di tahun 2020 menjadi 77,16 di tahun 2045.

Di sisi lain, terjadi peningkatan pada aspek mortalitas di Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2045. Meskipun terjadi penurunan pada proyeksi kematian bayi berusia kurang dari 1 (satu) tahun, namun masih terdapat peningkatan pada indikator mortalitas lainnya, antara lain:

- a. *Infants Mortality Rate* (IMR) diproyeksikan turun dari 14,33 di tahun 2020 menjadi 6,58 di tahun 2045; dan
- b. Jumlah kematian diproyeksikan naik dari 240,630 jiwa di tahun 2020 menjadi 521,950 jiwa di tahun 2045.

Sedangkan dari aspek perpindahan penduduk, angka migrasi keluar dari Provinsi Jawa Barat akan lebih besar daripada migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat, dimana perubahan yang terjadi adalah *Net Migration Rate* 0,18 (di tahun 2020) menjadi -0,16 (di tahun 2045). Kondisi ini disebabkan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang diikuti oleh perpindahan penduduk khususnya ASN K/L dan keluarganya ke IKN dengan tahapan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam Perpres

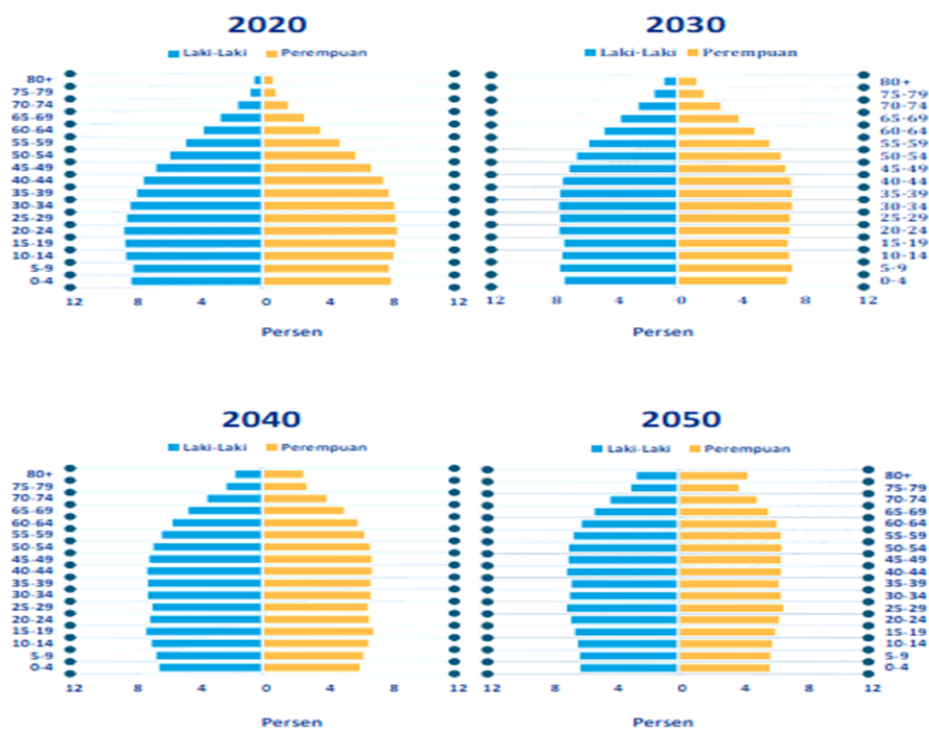
tersebut dinyatakan bahwa total ASN K/L yang akan dipindahkan ke IKN sampai dengan Tahun 2045 sebanyak 100.023 orang.

Dampak relokasi industri keluar Jawa Barat diikuti oleh perpindahan pekerja terutama sektor industri padat karya. Hal ini sejalan dengan tren investasi yang masuk ke Jawa Barat yang semakin bersifat padat modal dan padat teknologi yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja lebih sedikit, sehingga menurunkan daya tarik migrasi masuk.

B. Tren Struktur Penduduk

Badan Pusat Statistik (BPS) telah memproyeksikan struktur penduduk per 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2050. Dari proyeksi tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Provinsi Jawa Barat akan mengalami perubahan, terutama pada kelompok usia lanjut yang semakin melebar.

Gambar 2.86
Proyeksi Struktur Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2050



Sumber: Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS

Di lihat dari klasifikasi berdasarkan kelompok usia, maka proyeksi komposisi penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 akan didominasi

oleh kelompok usia produktif yakni usia 15-59 tahun (60,34 persen), disusul oleh kelompok usia lanjut produktif dan tidak produktif yakni usia 60 tahun ke atas (21,12 persen), dan terakhir kelompok usia muda/belum produktif dengan rentang usia 0-14 tahun (18,53 persen).

Tabel 2.13
Proyeksi Komposisi Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2045

Komposisi Penduduk (%)	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0 - 14	24,45	23,08	22,04	20,84	19,48	18,53
15 - 59	66,30	65,46	63,99	62,65	61,54	60,34
60 - 64	3,66	4,31	4,87	5,36	5,76	5,91
65+	5,59	7,15	9,10	11,14	13,21	15,21

Sumber : Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sampai dengan tahun 2045 cenderung menurun. Bahkan pada tahun tersebut rasionya sebesar 99,02 persen yang artinya jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat kedepannya harus memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi seluruh penduduk khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, termasuk disabilitas dan anak-anak (*safety, security, health as human needs*).



Tabel 2.14
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)			Tahun Proyeksi														
		Laki-Laki	Perempuan	Rasio	2025			2030			2035			2040			2045		
					Laki-Laki	Perempuan	Rasio	Laki-Laki	Perempuan	Rasio	Laki-Laki	Perempuan	Rasio	Laki-Laki	Perempuan	Rasio	Laki-Laki	Perempuan	Rasio
1.	Kabupaten Bogor	2.886.435	2.740.586	105,32	2.930.563	2.791.055	105,00	3.018.466	2.899.792	104,09	3.102.622	3.011.147	103,04	3.174.787	3.113.117	101,98	3.225.856	3.194.970	100,97
2.	Kabupaten Sukabumi	1.421.474	1.380.930	102,94	1.444.445	1.407.662	102,61	1.493.283	1.467.643	101,75	1.531.368	1.518.198	100,87	1.556.955	1.556.560	100,03	1.571.012	1.582.302	99,29
3.	Kabupaten Cianjur	1.09.539	1.248.603	104,88	1.333.933	1.276.383	104,51	1.386.258	1.339.120	103,52	1.428.714	1.393.658	102,52	1.460.568	1.438.239	101,55	1.482.3346	1.472.096	100,70
4.	Kabupaten Bandung	1.894.101	1.827.010	103,67	1.923.110	1.860.103	103,29	1.958.363	1.935.089	102,60	2.034.812	1.999.792	101,75	2.067.607	2.049.489	100,88	2.082.797	2.081.693	100,05
5.	Kabupaten Garut	1.372.689	1.310.976	104,71	1.404.181	1.344.518	104,44	1.474.709	1.421.781	103,72	1.534.098	1.489.282	103,01	1.579.985	1.554.099	102,32	1.613.484	1.586.502	101,70
6.	Kabupaten Tasikmalaya	965.602	941.443	102,57	977.908	955.906	102,30	1.003.161	987.624	101,57	1.021.296	1.012.962	100,82	1.030.874	1.029.808	100,10	1.032.836	1.038.197	99,48
7.	Kabupaten Ciamis	625.771	625.773	100,00	632.454	633.877	99,78	646.036	651.442	99,17	655.394	664.717	98,60	659.318	671.966	98,12	658.938	673.633	97,82
8.	Kabupaten Kuningan	608.669	593.095	102,63	620.199	605.294	102,46	646.009	633.423	101,99	668.183	658.492	101,47	685.673	679.047	100,98	698.917	695.144	100,54
9.	Kabupaten Cirebon	1.195.535	1.164.906	10,63	1.221.080	1.192.734	102,38	1.274.184	1.253.359	101,66	1.313.846	1.302.364	100,88	1.340.995	1.339.929	100,08	1.359.115	1.368.501	99,31
10.	Kabupaten Majalengka	672.694	667.923	100,71	683.327	680.428	100,43	705.998	708.536	99,64	723.834	732.255	98,85	735.814	750.009	98,11	742.574	761.913	97,46
11.	Kabupaten Sumedang	593.815	584.420	101,61	601.748	593.783	101,34	619.061	615.051	100,65	632.982	632.953	100,00	642.380	645.896	99,46	647.549	653.713	99,06
12.	Kabupaten Indramayu	950.963	943.362	100,81	968.762	963.760	100,52	1.005.898	1.008.819	99,71	1.034.229	1.046.230	98,85	1.053.172	1.074.582	98,01	1.063.700	1.093.878	97,24
13.	Kabupaten Subang	826.509	823.312	100,39	837.814	837.705	100,01	860.547	868.877	99,04	876.483	893.403	98,11	884.961	909.934	97,26	887.337	919.041	96,55
14.	Kabupaten Purwakarta	526.035	511.033	102,94	538.611	524.354	102,72	566.236	554.683	102,08	589.290	581.304	101,37	607.304	603.580	100,62	620.817	621.538	99,88
15.	Kabupaten Karawang	1.277.610	1.248.392	102,34	1.302.947	1.278.298	101,93	1.357.374	1.354.756	100,86	1.401.343	1.404.251	99,79	1.434.164	1.452.445	98,74	1.456.352	1.489.673	97,76
16.	Kabupaten Bekasi	1.640.191	1.597.229	102,69	1.670.412	1.632.611	102,32	1.730.482	1.708.623	101,28	1.786.092	1.783.325	100,16	1.832.529	1.852.037	98,95	1.866.646	1.910.503	97,70
17.	Kabupaten Bandung Barat	948.045	911.591	104,00	971.554	936.270	103,77	1.025.726	994.567	103,13	1.073.805	1.047.990	102,46	1.113.679	1.094.096	101,79	1.145.478	1.132.340	101,16
18.	Kabupaten Pangandaran	215.696	215.768	99,97	217.904	218.590	99,69	221.924	224.364	98,91	224.055	228.298	98,14	224.423	230.209	97,49	223.574	230.360	97,05
19.	Kota Bogor	542.408	528.311	102,67	548.329	535.447	102,41	559.775	550.735	101,64	571.163	566.542	100,82	579.402	579.540	99,98	583.186	588.001	99,18
20.	Kota Sukabumi	181.305	179.339	101,10	186.133	184.548	100,86	197.483	197.138	100,18	207.837	208.986	99,45	216.802	219.555	98,75	224.524	228.912	98,08
21.	Kota Bandung	1.259.236	1.247.367	100,95	1.277.989	1.270.795	100,57	1.320.319	1.326.249	99,55	1.355.868	1.376.077	98,53	1.380.499	1.415.426	97,53	1.393.655	1.442.986	96,58
22.	Kota Cirebon	171.638	170.342	100,76	174.364	173.173	100,69	180.165	179.442	100,40	184.574	184.501	100,04	187.291	187.963	99,64	188.549	189.929	99,27
23.	Kota Bekasi	1.320.682	1.306.525	101,08	1.328.712	1.319.560	100,69	1.335.882	1.341.094	99,61	1.354.440	1.374.383	98,55	1.368.748	1.403.263	97,54	1.372.493	1.419.969	96,66
24.	Kota Depok	1.080.541	1.064.859	101,47	1.089.830	1.078.131	101,09	1.103.220	1.102.953	100,02	1.136.761	1.147.989	99,02	1.171.888	1.195.099	98,06	1.198.984	1.234.142	97,15
25.	Kota Cimahi	297.855	292.938	101,67	305.474	300.901	101,52	323.237	319.893	101,05	338.830	337.154	100,50	351.088	351.439	99,90	360.172	362.597	99,33
26.	Kota Tasikmalaya	375.737	366.023	102,65	375.397	375.397	102,28	402.696	397.476	101,31	418.987	417.546	100,35	432.006	434.622	99,40	442.176	448.873	98,51
27.	Kota Banjar	104.152	103.358	100,77	106.361	105.603	100,72	111.239	110.703	100,48	115.226	114.982	100,21	118.211	118.245	99,97	120.544	120.759	98,82
28.	Jawa Barat	25.264.916	24.595.414	102,72	25.682.117	25.076.886	102,41	26.554.731	26.144.232	101,57	27.128.781	27.128.781	100,69	27.891.123	27.940.194	99,82	28.263.611	28.542.165	99,02

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS, 2023

Kementerian Kesehatan mengkategorikan masyarakat kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok usia muda (<15 tahun), kelompok usia produktif (rentang usia 15-64 tahun), dan masyarakat usia non produktif (>65 tahun). Hal ini diperkuat oleh McKenzie dkk. (2006), dimana pada rentang usia 15-64 tahun, banyak orang yang menyelesaikan pendidikan formalnya, mencari, membangun karir, membangun sebuah keluarga, aktif terlibat dalam pembangunan komunitas, dan sebagainya. Dalam konsep ekonomi, usia produktif merupakan usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa.



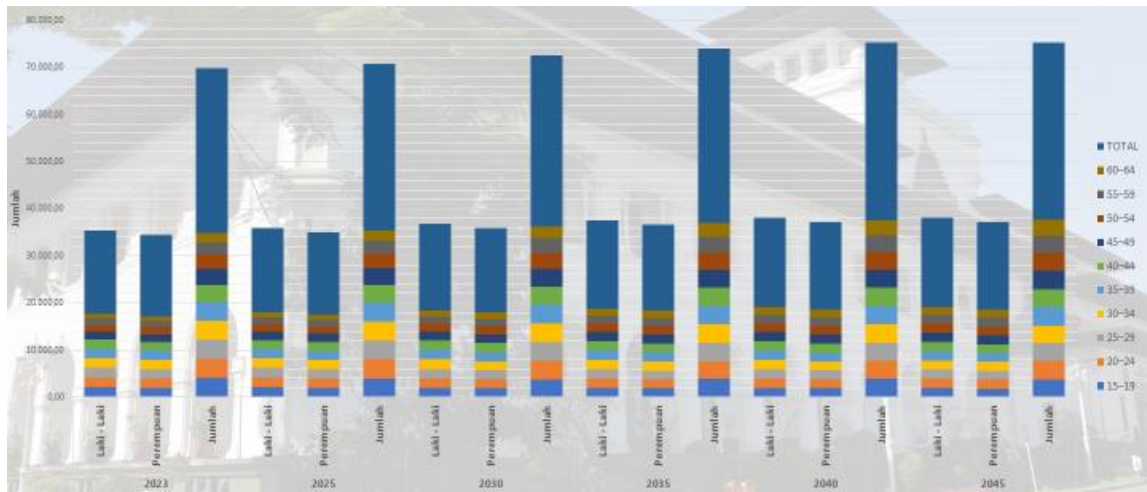
Tabel 2.15
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)			Tahun Proyeksi														
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	2025			2030			2035			2040			2045		
					Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	2.035,24	1.947,84	3.983,08	2.032,39	1.951,06	3.983,45	1.930,32	1.852,77	3.783,09	1.842,79	1.767,72	3.610,51	1.784,56	1.710,93	3.495,49	1.752,22	1.679,20	3.431,42
2.	5-9	1.972,68	1.886,54	3.859,22	1.990,07	1.899,26	3.889,33	2.022,14	1.943,16	3.965,30	1.926,24	1.850,53	3.776,77	1.839,42	1.766,42	3.606,39	1.782,15	1.709,82	3.491,97
3.	10-14	2.006,50	1.904,21	3.910,71	1.962,21	1.875,60	3.837,81	1.976,86	1.887,59	3.864,45	2.017,59	1.939,59	3.957,18	1.924,92	1.849,94	3.774,86	1.828,74	1.765,81	3.604,55
4.	15-19	2.089,93	1.961,35	4.051,28	2.067,26	1.943,85	4.011,11	1.947,28	1.864,62	3.811,90	1.970,08	1.888,45	3.853,33	2.012,86	1.937,20	3.950,06	1.920,44	1.847,66	3.768,10
5.	20-24	2.092,65	1.977,77	4.070,42	2.067,70	1.949,32	4.017,02	2.030,67	1.913,68	3.944,35	1.927,24	1.850,16	3.777,40	1.953,68	1.872,23	3.825,91	1.996,14	1.925,70	3.921,84
6.	25-29	2.088,38	1.993,21	4.081,59	2.078,34	1.974,83	4.053,17	2.017,37	1.903,30	3.920,67	2.003,05	1.894,43	3.897,48	1.906,93	1.838,53	3.745,46	1.933,05	1.860,37	3.793,42
7.	30-29	4.014,37	3.899,36	7.913,73	4.042,11	3.913,89	7.956,00	4.046,60	3.879,71	7.926,31	4.107,47	3.817,03	7.834,50	3.978,96	3.774,54	7.753,50	3.875,85	3.718,15	7.594,00
8.	40-44	1.862,48	1.841,57	3.704,05	1.889,13	1.860,40	3.749,53	1.965,82	1.921,62	3.887,44	1.990,88	1.927,69	3.918,57	2.003,38	1.916,02	3.919,40	1.972,68	1.874,41	3.847,09
9.	45-49	1.724,83	1.723,95	3.448,78	1.777,42	1.776,80	3.554,22	1.851,62	1.835,95	3.687,57	1.935,27	1.903,50	3.838,77	1.963,08	1.912,15	3.875,23	1.975,76	1.900,93	3.876,69
10.	50-54	1.514,94	1.514,85	3.029,79	1.581,04	1.590,23	3.171,27	1.728,73	1.747,34	3.476,07	1.807,16	1.811,30	3.618,46	1.891,47	1.880,46	3.771,93	1.919,44	1.889,69	3.809,13
11.	55-59	1.278,27	1.276,71	2.554,98	1.349,41	1.359,13	2.708,54	1.514,52	1.553,04	3.067,56	1.661,83	1.711,54	3.373,37	1.740,31	1.776,84	3.517,15	1.822,99	1.845,77	3.668,76
12.	60-64	1.008,75	1.007,36	2.016,11	1.084,92	1.101,06	2.185,98	1.259,33	1.309,55	2.568,88	1.419,16	1.501,40	2.920,56	1.560,80	1.657,72	3.218,52	1.636,77	1.722,78	3.359,55
13.	65-69	734,24	733,30	1.467,54	797,19	810,40	1.607,59	971,20	1.034,15	2.005,35	1.133,20	1.235,87	2.360,07	1.281,57	1.421,31	2.702,88	1.412,62	1.572,11	2.984,73
14.	70-74	468,97	483,44	952,41	530,66	553,64	1.084,30	665,39	724,54	1.389,93	817,15	932,81	1.749,96	958,76	1.120,99	2.079,75	1.088,54	1.293,86	2.382,40
15.	> 75	372,71	443,97	816,68	432,27	517,41	949,68	626,87	773,23	1.400,10	837,03	1.101,76	1.938,79	1.089,89	1.504,91	2.594,80	1.336,24	1.935,90	3.272,14
Total																			

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2025-2045, BPS, 2023

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh BPS, didapatkan angka bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 sebesar 66,26 persen dari proyeksi jumlah penduduk sebesar 56.805.780 penduduk.

Gambar 2.87
Proyeksi Penduduk Usia Produktif Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2025-2045, BPS, 2023 (diolah)

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) anak usia sekolah yaitu golongan anak yang berusia antara 7-15 tahun. Masa anak sekolah sering disebut sebagai masa intelektual. Pada tahap perkembangannya, usia anak sekolah ini secara relatif lebih mudah dididik. Sementara itu, penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Barat didefinisikan yaitu penduduk yang berusia antara 5-24 tahun sesuai dengan data BPS Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan proyeksi, diperoleh jumlah penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 sebesar 14.786.460 jiwa atau sekitar 26,03 persen dari jumlah penduduk hasil proyeksi tahun 2045.



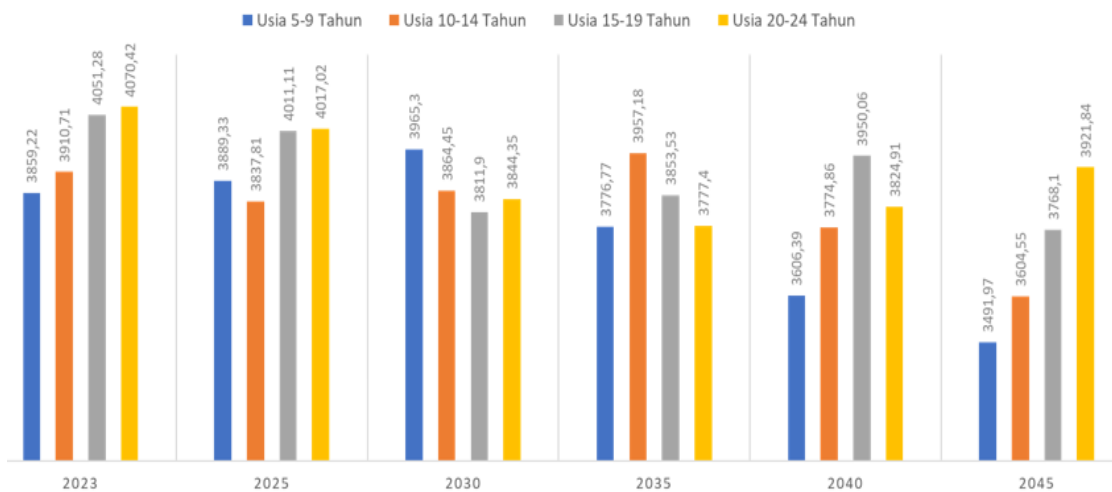
Tabel 2.16
Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)			Tahun Proyeksi																	
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	2025			2030			2035			2040			2045			2050		
					Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	5-9	1.972,68	1.886,54	3.869,22	1.999,07	1.899,26	3.889,33	2.022,14	1.943,16	3.965,30	1.926,24	1.850,53	3.776,77	1.39,97	1.766,42	3.606,39	1.782,15	1.709,82	3.491,97	1.750,10	1.678,23	3.428,23
2.	10-14	2.006,50	1.904,21	3.910,71	1.962,21	1.875,60	3.837,81	1.976,86	1.887,59	3.864,45	2.017,59	1.939,59	3.957,18	1.924,92	1.849,94	3.774,86	1.838,74	1.765,81	3.604,55	1.781,16	1.709,34	3.490,50
3.	15-19	2.089,93	1.961,35	4.051,28	2.067,26	1.934,85	4.011,11	1.947,28	1.864,62	3.811,90	1.970,08	1.883,45	3.853,53	2.012,86	1.937,20	3.950,06	1.920,44	1.847,66	3.768,10	1.834,61	1.763,71	3.598,32
4.	20-24	2.092,65	1.977,77	4.070,42	2.067,70	1.949,32	4.017,02	2.030,67	1.913,68	3.944,35	1.927,24	1.850,16	3.777,40	1.953,68	1.872,23	3.825,91	1.996,14	1.925,70	3.921,84	1.904,46	1.836,57	3.741,03
		8.161,76	7.729,87	15.891,63	8.087,24	7.668,03	15.755,27	7.976,95	7.609,05	15.586,00	7.841,15	7.841,15	15.364,88	7.731,43	7.425,79	15.157,22	7.537,47	7.248,99	14.786,46	7.270,33	6.987,85	14.258,18

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS, 2023

Berdasarkan proyeksi, penduduk kelompok usia 5-9 tahun mengalami penurunan secara signifikan, sedangkan untuk kelompok usia 10-14, usia 15-19, dan usia 20-24 mengalami tren naik dan turun. Berdasarkan informasi tersebut, maka kebijakan pendidikan khususnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) perlu dipertimbangkan dalam rangka memenuhi jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.88
Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045

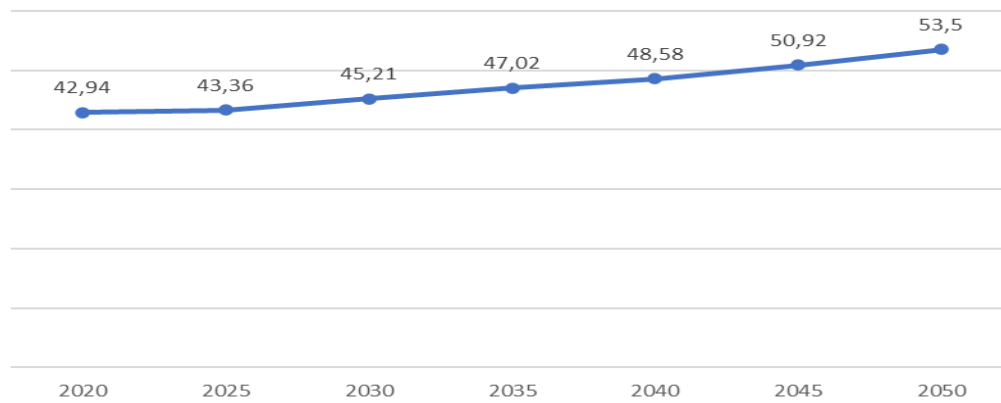


Sumber: BPS, 2023 (diolah)

C. Tren Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan diartikan sebagai perbandingan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan >65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan umumnya diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah. Dampak yang terjadi jika suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan yang besar antara lain dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas wilayah, karena banyaknya penduduk yang berada di luar usia angkatan kerja. Selain itu, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit untuk berkembang, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah.

Gambar 2.89
Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2040 masih dibawah 50 persen, yang artinya penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Hal ini menjadi kesempatan bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan penduduk usia produktif dalam pembangunan.

Di sisi lain, tren rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Bahkan, proyeksi pada tahun 2045 mencapai lebih dari 50 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi Provinsi Jawa Barat untuk mendorong kualitas penduduk usia belum produktif sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk usia produktif sebagai pelaku pembangunan yang berkualitas. Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga perlu mendorong terciptanya penduduk lanjut usia yang produktif (lansia produktif) sehingga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan seperti yang diuraikan diatas erat kaitannya dengan bonus demografi. Bonus demografi diartikan sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pergeseran struktur usia penduduk, terutama ketika jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk non-usia kerja (14 tahun ke bawah dan 65 tahun keatas) dan lebih tua. Bonus demografi merupakan peluang yang dapat dinikmati sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi tentunya merupakan sebuah modalitas yang dapat mendukung

upaya untuk mencapai target generasi emas di tahun 2045. Di sisi lain, bonus demografi ini dapat berubah menjadi bencana bila tidak dipersiapkan dengan matang.

Periode bonus demografi Indonesia dimulai pada tahun 2020 dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2041. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat dimulai pada tahun 2021 dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2043. Tantangan dalam menghadapi bonus demografi yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi, antara lain:

- Penyesuaian pergeseran lapangan kerja ke arah informal dan kemunculan bentuk kerja baru (*gigworker*) yang bersifat sangat fleksibel;
- Menciptakan pasar kerja yang fleksibel mengikuti perubahan lapangan kerja yang cepat;
- Menciptakan tenaga kerja dengan keahlian tinggi (*high-skilled*) dan menengah (*semi-skilled*) yang sesuai kebutuhan pasar kerja;
- Sistem pengembangan keahlian (*skill development system*) kita masih parsial dan belum berbasis kebutuhan pasar kerja;
- Perlindungan pekerja masih parsial dan belum banyak menjangkau sektor informal; dan
- Masalah kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia yang belum optimal.

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat saat ini merupakan yang terbesar dan 20 (dua puluh) tahun kedepan akan makin meningkat. Untuk itu, proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat.

A. Kebutuhan Hunian

Dalam menghitung kebutuhan rumah, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu data demografi dan data *backlog*. Data demografi berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk dan asumsi jumlah kepala keluarga yang menghuni tiap-tiap rumah. Sementara itu, data *backlog* dihitung dengan mengurangi jumlah rumah yang sudah ada dari jumlah kebutuhan rumah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, jumlah rumah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 12.951.170 unit dengan jumlah penduduk sebesar 48.738.808 jiwa sehingga rata-rata setiap rumah ditempati 4 (empat) jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2021 sebanyak 16.080.238 KK dengan demikian *backlog* rumah sebanyak 3.129.068 unit.

Tabel 2.17
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045

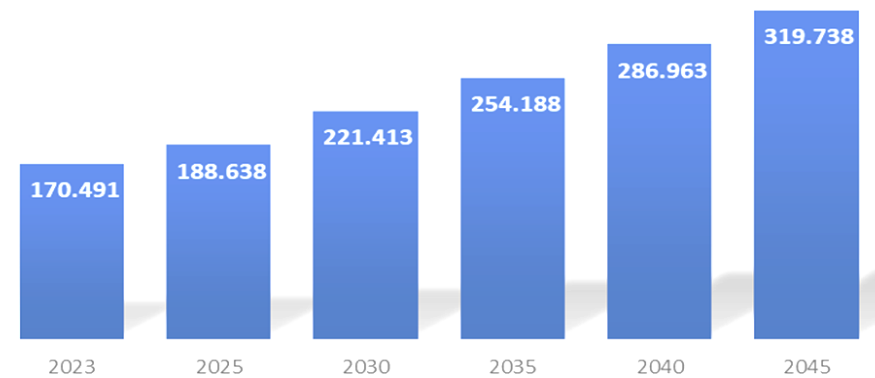
Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	50.025.605	50.759.010	52.698.960	54.444.910	55.831.310	56.805.780
Proyeksi Kebutuhan Rumah	16.708.165	18.486.516	21.698.465	24.910.415	28.122.365	31.334.314

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2023

Dengan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 4 (empat) jiwa maka proyeksi kebutuhan rumah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 adalah 15.084.131 unit. Jika diasumsikan, 1 (satu) KK menghuni 1 (satu) rumah maka kebutuhan rumah pada tahun 2045 sebesar 31.334.314 unit. Hal ini sesuai dengan proyeksi jumlah KK berdasarkan Metode Aritmatika.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hunian Provinsi Jawa Barat, terdapat masalah keterbatasan lahan khususnya di kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan. Karenanya, pemerintah menyusun strategi berupa pembangunan hunian secara vertikal, dalam bentuk rumah susun (rusun) untuk kebutuhan pekerja dan masyarakat khususnya MBR di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan.

Gambar 2.90
Kebutuhan Hunian Vertikal untuk Kawasan Perkotaan Prioritas dan Pusat-Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2023

Proyeksi hunian vertikal menggunakan asumsi kebutuhan hunian vertikal 20 persen dari hunian tapak dimana pemenuhannya diprioritaskan pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan. Apabila 1 (satu) *twin block* rusun terdiri atas 98 unit satuan rumah susun (sarusun), maka sampai tahun 2045 dibutuhkan lebih dari 319 ribu *twin block* rusun.

B. Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih/minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, dan pengklasifikasian jenis kebutuhan. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan air bersih Provinsi Jawa Barat sebesar 296.810 liter/detik dengan jumlah penduduk sebesar 56.805.776 jiwa.

Tabel 2.18
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	50.025.605	50.759.010	52.698.960	54.444.910	55.831.310	56.805.780
Jumlah Kebutuhan Air Bersih	130.260	132.608	275.352	284.475	291.719	296.810

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2023

Pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut melalui kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM terdiri dari SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) yang dikelola PDAM/Pengembang/Kelompok Masyarakat ataupun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan terutama sumber air tanah (sumur).

Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air minum sangat bergantung kepada ketersediaan air baku, baik dari air permukaan (sungai, danau, waduk), air tanah, air tadah hujan bahkan air laut. Perencanaan penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi dengan ketersediaan air baku menjadi menjadi suatu keharusan, sehingga diperlukan sinkronisasi program SPAM dengan program pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Barat.

C. Kebutuhan Energi/Kelistrikan

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita.

Tabel 2.19
Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	50.025.605	50.759.010	52.698.960	54.444.910	55.831.310	56.805.780
Jumlah Rumah	16.708.165	18.486.516	21.698.465	24.910.415	28.122.365	31.334.314
Proyeksi Kebutuhan Listrik	73.702	78.758	93.913	120.954	161.052	209.277

Sumber: Pengolahan Data BPS dan Data RUKD, 2023

Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Provinsi Jawa Barat sejalan dengan semakin meningkatnya pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Jawa Barat, kebutuhan energi/kelistrikan sesuai kelompok konsumen Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dengan target sebesar 1.340 kWh per kapita. Apabila diproyeksikan hingga tahun 2045, kebutuhan energi/kelistrikan sebesar 3.470 kWh per kapita dengan jumlah penduduk sebesar 56.805.776 jiwa.

Tabel 2.20
Kebutuhan Tenaga Listrik Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

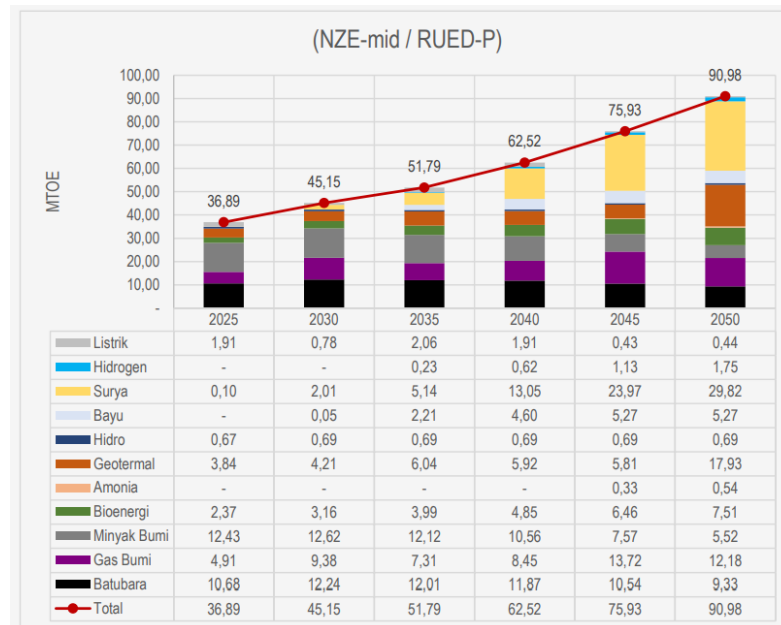
KELOMPOK KONSUMEN	TAHUN					
	2024	2025	2030	2035	2040	2045
Rumah Tangga	27.098	28.171	33.036	40.246	49.952	62.309
Industri	36.708	37.901	42.960	50.479	61.507	76.564
Bisnis	8.963	9.397	11.444	14.407	18.390	23.726
Publik	2.870	2.997	3.599	4.495	5.741	7.396
Transportasi	147	292	2.874	11.327	25.463	39.283
Total	75.786	78.758	93.913	120.954	161.052	209.277
Pertumbuhan (%)	2,8	3,9	4,7	5,2	5,9	5,0
Konsumsi Listrik/Kapita (kWh)	1.466	1.508	1.716	2.123	2.737	3.470

Sumber: Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Barat 2022-2050

Sektor industri menjadi konsumen utama, dengan kebutuhan tinggi untuk mendukung operasional pabrik dan fasilitas produksi baru. Kenaikan jumlah penduduk dan urbanisasi juga meningkatkan permintaan listrik dari sektor rumah tangga. Pertumbuhan sektor bisnis dan publik, termasuk perkantoran dan pusat perbelanjaan, berkontribusi signifikan terhadap total konsumsi listrik. Sedangkan, untuk sektor transportasi diperkirakan akan terus meningkat dalam dekade mendatang seiring dengan penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat. Selain bertujuan

untuk mengurangi emisi karbon tetapi juga untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor transportasi.

Gambar 2.91
Proyeksi Penyediaan Energi Berdasarkan Sumber/Jenis Energi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045



Sumber: Pemutakhiran Rencana Umum Energi Daerah
Provinsi Jawa Barat, 2024

Meningkatnya kebutuhan energi/listrik Provinsi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Karenanya diperlukan alternatif sumber penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus lebih ekonomis untuk jangka panjang. Berdasarkan pemutakhiran Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat, proyeksi penyediaan energi pada awal tahun perencanaan (2025-2030) terlihat masih didominasi oleh energi primer bersumber fosil, yaitu batubara, minyak bumi, dan gas. Puncak penyediaan/pembangkitan energi bersumber batubara diharapkan terjadi pada tahun 2030-2035 (12,24-12,01 MTOE) diikuti penurunan secara bertahap sampai dengan tahun 2050. Penyediaan energi primer pada tahun 2045 diproyeksi telah didominasi oleh EBT (58,07 persen), bersumber surya (23,97 MTOE), bioenergi (6,46 MTOE), *geothermal* (5,81 MTOE), dan sumber EBT lainnya seperti angin, hidro, dan hidrogen. Sedangkan penyediaan energi bersumber energi fosil pada tahun yang 2045 didominasi oleh gas bumi

(18,07 persen) yang lebih rendah emisi karbon, dibandingkan batubara (13,89 persen) dan minyak bumi (9,97 persen).

D. Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Perkembangan pengelolaan sampah yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dimana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul-pilah-olah-angkut-buang”. Paradigma ini memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS).

Tabel 2.21
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	50.025.605	50.759.010	52.698.960	54.444.910	55.831.310	56.805.780
Proyeksi Timbulan Sampah (kg/org/hari)	21.511,01	21.826,37	22.660,55	23.411,31	24.007,46	24.426,49
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		2	3	3	4	4

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang pesat di Provinsi Jawa Barat, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan aktual dan kapasitas pengelolaan sampah yang ada. Karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat perlu difokuskan pada penanganan sampah di hulu sehingga tidak ada penambahan TPA dan TPPAS Regional. Adapun yang akan dibangun adalah yang sudah masuk

dalam tahapan perencanaan dan konstruksi. Sedangkan penanganan sampah lebih menitikberatkan pada pembangunan TPST dan TPS3R.

Penting bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk segera mengatasi persoalan persampahan. Diperlukan investasi signifikan dalam pembangunan baru dan peningkatan kapasitas TPA yang sudah ada. Selain itu, pendekatan yang berbasis pada pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang efisien perlu diperkuat. Langkah-langkah strategis juga harus diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

E. Proyeksi Kebutuhan Jalan

Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktu. Mobilitas yang dimaksud lebih ditekankan pada pergerakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Pertambahan penduduk, tentunya akan meningkatkan kebutuhan akan alat transportasi yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kemacetan. Terlebih apabila kapasitas jalan yang ada tidak mencakup jumlah kendaraan yang melewati jalan.

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, diproyeksikan akan memiliki penduduk sebesar 56.805.776 jiwa pada tahun 2045. Kondisi ini tentunya memerlukan dukungan prasarana jalan yang memadai agar dapat mengimbangi peningkatan jumlah penduduk sehingga mobilitas pergerakan barang maupun jasa dapat tetap terlayani. Pada saat ini, panjang jalan di Provinsi Jawa Barat yaitu 28.446,953 Km dengan rata-rata kemantapan jalan berada diangka 84,79 persen.

Mobilitas menjadi alat ukur untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk terhadap pelayan infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk kebutuhan mobilitas sendiri akan direduksi menjadi jalan yang memiliki peran penunjang menuju ke Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, panjang jalan yang menunjang ke pusat kegiatan tersebut sepanjang 12.183,59 Km. Untuk itu, Angka Mobilitas Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka 2,86 Km/ 10.000 jiwa.

Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2045 akan mencapai 1.533,61 (jiwa/km²). Angka ini termasuk kedalam kategori IV sesuai dengan angka mobilitas berdasarkan kepadatan penduduk yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010. Pada kategori ini angka mobilitas yang ditunjukkan oleh panjang jalan dibagi 10.000 jiwa adalah pada angka 3,00.

Memperhatikan angka perolehan mobilitas pada tahun 2045 senilai 2,86 Km/10.000 jiwa maka pencapaian mobilitas dengan target senilai 95,32 persen. Untuk pencapaian persentase mobilitas 100 persen, dengan prediksi jumlah penduduk akhir tahun 2045 sebesar 56.805.776 jiwa, maka untuk angka mobilitas 3,00 diperlukan penambahan panjang jalan kurang lebih 812,19 Km.

F. Kebutuhan Pengelolaan Limbah

Sarana dan prasarana air limbah domestik Provinsi Jawa Barat direncanakan melalui kegiatan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik, terdiri dari SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).

Penyelenggaraan air limbah domestik Provinsi Jawa Barat masih difokuskan pada pemenuhan akses layak yang identik dengan tersedianya Kloset Leher Angsa dilengkapi dengan *Septik Tank* dimana capaian sampai dengan tahun 2022 baru mencapai angka 74,02 persen. Tren kedepan, air limbah domestik (*blackwater*, *greywater*, dan lumpur tinja) dikelola secara aman sesuai dengan *proxy* SDGs tahun 2030 yang identik dengan adanya kegiatan penyedotan tinja secara berkala pada *septik tank* atau IPAL Komunal (SPALD-S) dan dibuang ke IPLT atau sanitasi yang dikelola dalam sarana prasarana SPALD-T berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana air limbah domestik tersebut diperhitungkan berdasarkan proyeksi penduduk dan disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan akses layak serta akses aman sesuai dengan tahapan yang diarahkan pemerintah pusat. Pada tahun Provinsi Jawa Barat adalah : 1) SPALD-S (*Tangki Septik Individual* 1 (satu) KK sebanyak 9,835,514 unit dan *Tangki Septik Komunal* 10 (sepuluh) KK sebanyak 3,934,206 unit); 2) SPALD-T (SPALD-T Permukiman 70 KK sebanyak 147,695 KK dan SPALD-T IPAL Kota untuk 284,029 KK; 3) IPAL Kawasan/Perkotaan 10 (sepuluh) Unit; 4) IPLT 429 unit, dengan jumlah penduduk sebesar 56.805.776 jiwa.

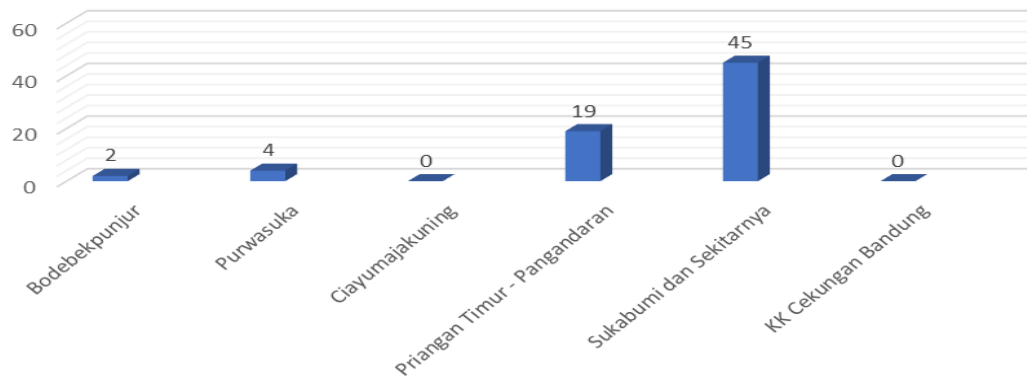
Penyelenggaraan air limbah domestik/sanitasi merupakan suatu sistem terintegrasi untuk peningkatan kesehatan lingkungan. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah domestik harus didukung dengan perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui dukungan kegiatan pemicuan oleh tenaga kesehatan serta tata kelola serta dan penciptaan ekosistem yang mendorong penyelenggaraan SPALD yang berkelanjutan.

G. Proyeksi Kebutuhan Internet

Seiring bertambahnya penduduk Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2045, kebutuhan pelayanan publik pun akan semakin meningkat. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik Provinsi Jawa Barat terus berinovasi melalui pelayanan publik berbasis digital sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pelayanan publik berbasis digital tentu harus ditunjang dengan ketersediaan internet sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik berbasis digital. Digitalisasi pelayanan publik tidak akan berdampak signifikan apabila cakupan internet (*internet covarage*) sebagai akses untuk mendapatkan pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak menjangkau seluruh masyarakat atau belum merata.

Gambar 2.92
Desa *Blank Spot* Berdasarkan Wilayah Pengembangan
Provinsi Jawa Barat



Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2023

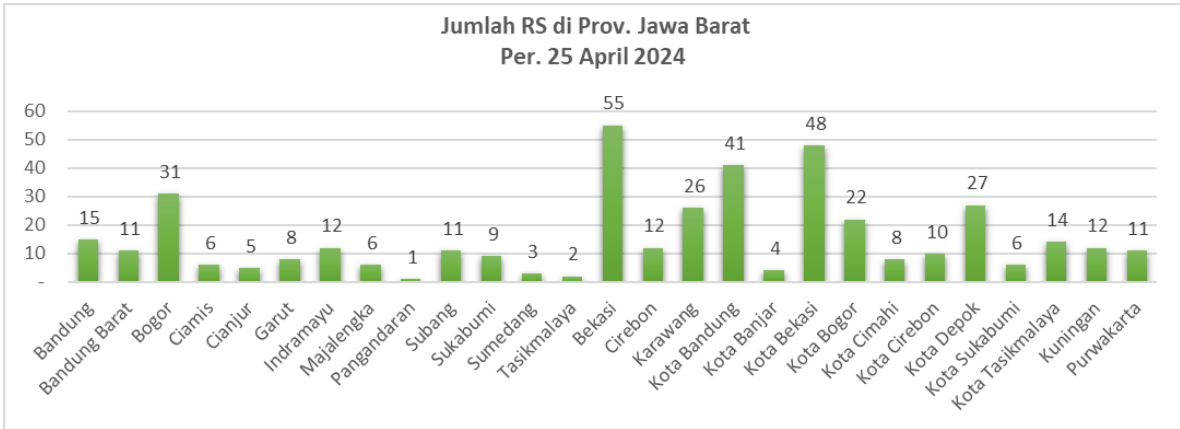
Berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023, masih terdapat desa di Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam desa *blank spot* atau desa tanpa internet. Untuk itu, pada tahun 2045 keberadaan desa *blank spot* tersebut diproyeksikan sudah tidak ada lagi.

H. Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Infrastruktur kesehatan adalah seluruh fasilitas, sumber daya, sistem, dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Infrastruktur kesehatan mencakup berbagai komponen yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat, serta untuk mengatasi penyakit dan kondisi kesehatan. Pemenuhan infrastruktur kesehatan salah satunya dilakukan melalui pemenuhan jumlah kebutuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan.



Gambar 2.93
Jumlah Rumah Sakit Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Sumber: SIM RS, 25 April 2024

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit per 25 April 2024, jumlah rumah sakit sebanyak 397 unit dan distribusinya belum merata. Dari jumlah itu, rumah sakit swasta lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah rumah sakit pemerintah. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan swasta dalam peningkatan akses maupun kualitas RS cukup besar dan perlu dilibatkan dalam sistem rujukan.

Menurut WHO, suatu negara idealnya memiliki 1 (satu) tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1000 penduduk, sehingga kecukupan tempat tidur suatu daerah dihitung dengan rasio tersebut. Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022, jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit sebanyak 57.118 unit. Mengacu pada standar WHO tersebut maka ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Provinsi Jawa Barat sudah mencukupi. Namun jika dibagi berdasarkan regional di Provinsi Jawa Barat masih terdapat wilayah yang kurang tempat tidurnya.

Tabel 2.22
Kecukupan Tempat Tidur Rumah Sakit Berdasarkan Regional Wilayah Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah RS	Jumlah TT	Jumlah TT Dibutuhkan (2022) Rasio 1 TT : 1000 Penduduk	Selisi Jumlah TT : Penduduk (1:1000)	Keterangan
Bandung	3.721.111	15	2.412	3.721	1.309	Kurang TT
Bandung Barat	1.859.636	11	1.157	1.860	703	Kurang TT
Bogor	5.627.021	31	5.427	5.627	200	Kurang TT
Ciamis	1.251.544	6	794	1.252	458	Kurang TT
Cianjur	2.558.142	5	1.114	2.558	1.444	Kurang TT
Garut	2.683.665	8	1.178	2.684	1.506	Kurang TT



Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah RS	Jumlah TT	Jumlah TT Dibutuhkan (2022) Rasio 1 TT : 1000 Penduduk	Selisi Jumlah TT : Penduduk (1:1000)	Keterangan
Indramayu	1.894.325	12	1.500	1.894	394	Kurang TT
Majalengka	1.340.617	6	948	1.341	393	Kurang TT
Pangandaran	431.464	1	246	431	185	Kurang TT
Subang	1.649.821	11	1.169	1.650	481	Kurang TT
Sukabumi	2.802.404	9	1.740	2.802	1.062	Kurang TT
Sumedang	1.178.235	3	438	1.178	740	Kurang TT
Tasikmalaya	1.907.045	2	317	1.907	1.590	Kurang TT
Bekasi	3.237.420	55	6.240	3.237	(3.003)	Lebih TT
Cirebon	2.360.441	12	2.688	2.360	(328)	Lebih TT
Karawang	2.526.002	26	3.392	2.526	(866)	Lebih TT
Kota Bandung	2.506.603	41	6.715	2.507	(4.208)	Lebih TT
Kota Banjar	207.510	4	582	208	(374)	Lebih TT
Kota Bekasi	2.627.207	48	6.198	2.627	(3.571)	Lebih TT
Kota Bogor	1.070.719	22	3.437	1.071	(2.366)	Lebih TT
Kota Cimahi	590.782	8	1.801	591	(1.210)	Lebih TT
Kota Cirebon	341.980	10	1.352	342	(1.010)	Lebih TT
Kota Depok	2.145.400	27	3.850	2.145	(1.705)	Lebih TT
Kota Sukabumi	360.644	6	1.294	361	(933)	Lebih TT
Kota Tasikmalaya	741.760	14	1.660	742	(918)	Lebih TT
Kuningan	1.201.764	12	1.553	1.202	(351)	Lebih TT
Purwakarta	1.037.068	11	1.550	1.037	(513)	Lebih TT
Jawa Barat	49.860.330	416	60.752	49.860	10.892	Lebih TT

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, provinsi memiliki kewenangan untuk memberikan izin mendirikan dan izin operasional untuk Rumah Sakit Kelas B. Dalam upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan berfokus pada pengembangan Rumah Sakit Tipe C dan D naik kelas menjadi Tipe B dan Rumah Sakit Tipe B dapat naik kelas menjadi Tipe A. Dengan meningkatnya kelas Rumah Sakit Tipe C dan D, diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan pelayanan lanjutan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan di rumah sakit kabupaten/kota.

Perhitungan proyeksi kebutuhan penambahan jumlah rumah sakit sampai tahun 2045 dilakukan dengan perhitungan proyeksi kebutuhan jumlah Tempat Tidur berdasarkan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2022, rasio ketersediaan tempat tidur di Provinsi Jawa Barat mencapai 1,15/1.000 penduduk, dimana rasio tersebut masih berada dibawah capaian nasional sebesar 1,4/1.000 penduduk. Berdasarkan asumsi tersebut maka proyeksi kebutuhan jumlah tempat tidur sebagai berikut.

Tabel 2.23
Proyeksi Kebutuhan Jumlah Tempat Tidur (TT)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Tahun	Penduduk	Target Rasio 1 TT : 1000 Penduduk	Jumlah Kebutuhan TT	Jumlah Kebutuhan Penambahan TT	Keterangan
2023	49.860.330	1:873	57.118		Kondisi <i>Eksisting</i>
2025	50.759.000	1:850	59.716	2.598	
2030	52.698.960	1:800	65.874	6.157	
2035	54.444.910	1:750	72.593	6.720	
2040	55.831.320	1:700	79.759	7.166	
2045	56.805.780	1:650	87.394	7.634	

Sumber: Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2022

Dilihat dari capaian rasio jumlah tempat tidur dari tahun 2017-2022 dapat dihitung proyeksi kebutuhan rasio jumlah tempat tidur di Jawa Barat yaitu sebesar 2,5:1.000. Berdasarkan proyeksi tersebut, dapat diketahui berapa jumlah kebutuhan penambahan tempat tidur dalam kurun jangka waktu per 5 (lima) tahun. Dalam menambah tempat tidur pada fasilitas kesehatan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Jenis fasilitas kesehatan yang akan dibangun atau ditingkatkan kapasitasnya;
2. Tipe rumah sakit yang akan dibangun dengan mempertimbangkan jumlah kasus penyakit tertinggi di setiap daerah;
3. Lokasi pembangunan infrastruktur kesehatan berdasarkan kebutuhan dan dokumen RTRW masing-masing daerah; dan
4. Jenis pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Jika diproyeksikan kedalam proyeksi kebutuhan penambahan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangan Provinsi yaitu Rumah Sakit Tipe B dengan minimal 200 Tempat Tidur, maka dapat diproyeksikan kebutuhan fasilitas kesehatan di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 2.24
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	49.860.330	50.759.000	52.698.960	54.444.910	55.831.320	56.805.780
Fasilitas Kesehatan:						
Rumah Sakit	416	442	534	629	726	822
Puskesmas	1.111	1.692	1.757	1.815	1.861	1.894

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2024

Jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 tercatat sebanyak 1.111 puskesmas, puskesmas yang sudah teregistrasi sebanyak 1.106 Puskesmas sedangkan terdapat 5 Puskesmas yang belum teregistrasi namun sudah beroperasi di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2023, Rasio puskesmas sebesar 1:44.879, masih dibawah target nasional dimana rasio puskesmas dengan penduduk sebesar 1:30.000. Perhitungan proyeksi kebutuhan penambahan puskesmas sampai tahun 2045 dilakukan dengan melihat proyeksi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2045 dan dihitung untuk memenuhi rasio puskesmas 1:30.000 yang artinya terus mengupayakan bahwa 1 puskesmas bisa memberikan pelayanan untuk 30.000 penduduk pada wilayah kerjanya.

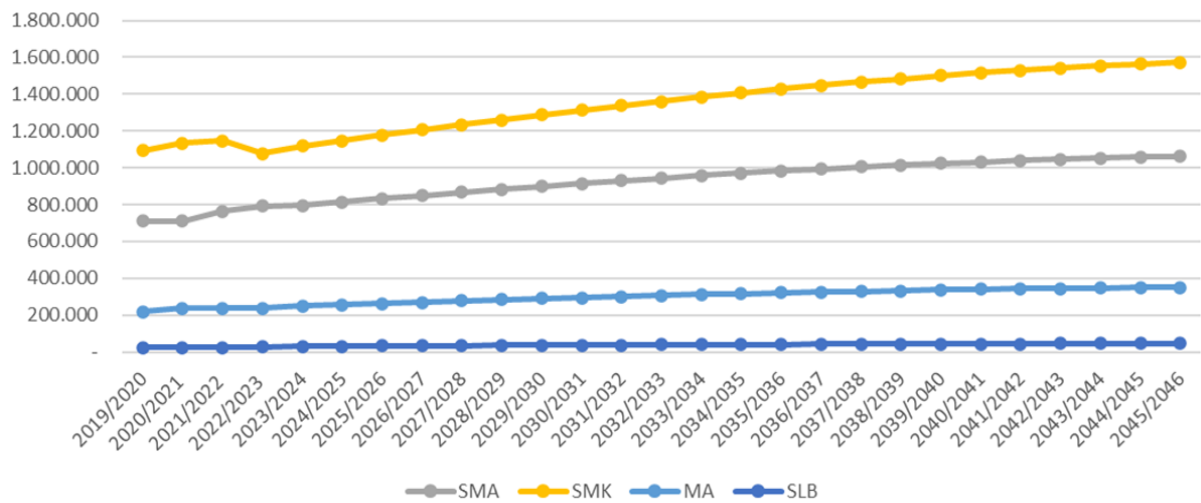
I. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Fasilitas pendidikan meliputi sarana pembelajaran, laboratorium, pusat pelatihan, pusat penelitian, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, ruang praktik siswa, perpustakaan, fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan, serta kawasan sekolah yang aman dan tahan bencana. Fasilitas pendidikan juga mencakup tata kelola sekolah yang meliputi manajemen, pengelolaan, dan pengembangan sekolah.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Gambar 2.94
Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Peserta Didik pada Tingkat Pendidikan yang Menjadi Urusan Provinsi Jawa Barat



Sumber: Analisis, 2023

Dengan penduduk usia SMA mencapai hampir 3 juta jiwa pada tahun 2045, maka proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tingkat SMA dapat diperoleh dari 2 (dua) pendekatan:

1. Berdasarkan standar kebutuhan sarana pendidikan per jumlah penduduk, diperoleh kebutuhan sarana pendidikan setingkat SMA sebesar 9.468 sekolah yang terdiri dari 3 rombongan belajar atau 4.734 unit sekolah dengan masing-masing 6 (enam) rombongan belajar;
2. Berdasarkan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dengan menggunakan standar maksimal peserta didik per rombongan belajar, diperoleh kebutuhan total 82.905 rombongan belajar, yang dapat diuraikan kedalam jumlah sekolah sesuai kapasitas rombongan belajar rata-rata sebagai berikut:
 - a. Dengan standar minimum 3 (tiga) rombongan belajar/sekolah, dibutuhkan sejumlah 27.635 unit sekolah setingkat SMA/SMK/MA.
 - b. Dengan standar ideal 6 (enam) rombongan belajar/sekolah, dibutuhkan sejumlah 13.818 unit sekolah setingkat SMA/SMK/MA.

Berdasarkan data demografi dan proyeksi pertumbuhan penduduk, Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan memiliki peningkatan populasi yang signifikan selama 20 tahun ke depan. Peningkatan populasi ini tentunya akan berdampak pada peningkatan jumlah peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, berikut adalah beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi:

1. Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan Baru

- a. Pembangunan Sekolah Baru: Hingga tahun 2045, diproyeksikan bahwa Jawa Barat membutuhkan pembangunan setidaknya 8.243 unit sekolah baru di berbagai tingkatan. Jumlah ini mencakup, 3.851 Taman Kanak Kanak (TK) Perwujudan 1 Tahun Pra Sekolah, 429 Sekolah Dasar (SD), 2.847 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1.116 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	49.860.300	50.122.002	52.148.437	53.963.183	55.447.851	56.460.506
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (Jumlah Satuan Pendidikan / Sekolah)						
TK	9.406	10.070	10.767	11.597	12.427	13.257
SD	19.553	19.627	19.705	19.797	19.890	19.982
SMP	5.945	6.206	6.852	7.499	8.146	8.792
SMA/SMK	4.681	4.777	5.032	5.287	5.542	5.797

Sumber: Bappeda, diolah, 2024

Sumber Proyeksi Jumlah Penduduk diambil dari <http://proyeksipenduduk.bappenas.go.id/query>

Sumber Proyeksi Fasilitas Pendidikan (jumlah satuan pendidikan/sekolah) diambil dari Statistik Pusdatin Kemendikbudristek, <https://data.kemdikbud.go.id/publikasi>, dengan menggunakan metode *Forecast*. Tidak termasuk MI, MTs dan MA dikarenakan tidak memiliki datanya

- b. Fokus Wilayah Prioritas: Daerah-daerah yang minim fasilitas pendidikan, terutama di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, akan menjadi prioritas pembangunan. Ini termasuk daerah pedalaman seperti Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Kuningan;

- c. Kebutuhan Ruang Kelas Baru: Selain sekolah baru, pemerintah Jawa Barat diproyeksikan akan membutuhkan tambahan sekitar 150.000 ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang sudah ada untuk mengakomodasi jumlah peserta didik yang terus meningkat.
2. Peningkatan dan Rehabilitasi Fasilitas yang Sudah Ada
 - a. Renovasi Sekolah Lama: Hingga 2045, sekitar 30% dari sekolah yang ada di Jawa Barat diproyeksikan akan membutuhkan renovasi atau rehabilitasi. Ini mencakup perbaikan fisik gedung, penambahan fasilitas sanitasi, dan penguatan infrastruktur agar tahan terhadap bencana alam;
 - b. Modernisasi Fasilitas: Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21, modernisasi fasilitas pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Setiap sekolah diharapkan memiliki laboratorium sains, perpustakaan digital, fasilitas olahraga, serta akses internet yang stabil;
3. Penambahan Guru dan Peningkatan Kompetensi
 - a. Kebutuhan Tenaga Pengajar Baru: Dengan peningkatan jumlah sekolah dan ruang kelas, diperkirakan Provinsi Jawa Barat akan membutuhkan sekitar 250.000 tenaga pendidik baru hingga 2045, mencakup semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA/SMK;
 - b. Pelatihan dan Sertifikasi Guru: Untuk meningkatkan kualitas pengajaran, setiap guru diharapkan mengikuti pelatihan rutin dan program sertifikasi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional dan internasional. Pelatihan akan difokuskan pada penggunaan teknologi dalam pengajaran, pendidikan inklusif, dan metode pembelajaran berbasis proyek.
4. Pengembangan Pendidikan Vokasi
 - a. Pembangunan SMK dan Pendidikan Vokasi: Pendidikan vokasi akan menjadi fokus utama dalam menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang. Jawa Barat menargetkan pembangunan 500 SMK baru dengan program-program vokasi yang sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja, seperti teknologi informasi, manufaktur, agribisnis, dan pariwisata;

- b. Kerjasama dengan Industri: Program magang dan kerjasama dengan sektor industri akan diperluas, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman kerja nyata dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri di masa depan.

5. Penerapan Teknologi Digital dalam Pendidikan

- a. Pendidikan Digital: Hingga 2045, seluruh sekolah di Jawa Barat diharapkan telah terhubung dengan platform pembelajaran digital. Program ini akan mencakup: Penyediaan perangkat teknologi (seperti laptop dan tablet) bagi siswa dan guru; Integrasi kurikulum digital yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan *hybrid*; Pengembangan aplikasi pembelajaran lokal yang dapat diakses oleh siswa di daerah-daerah terpencil.
- b. Program Pendidikan Jarak Jauh: Sistem pendidikan jarak jauh akan diperkuat terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara fisik. Dengan demikian, akses pendidikan yang merata dapat tercapai meskipun terdapat kendala geografis.

6. Fasilitas Pendidikan Inklusif dan Ramah Lingkungan

- a. Sekolah Inklusif: Pemerintah Jawa Barat menargetkan pembangunan 1.000 sekolah inklusif yang mampu melayani siswa berkebutuhan khusus dengan fasilitas yang lengkap, termasuk ruang terapi, alat bantu belajar, dan pelatihan bagi guru khusus;
- b. Sekolah Ramah Lingkungan: Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, sekolah-sekolah yang dibangun akan menerapkan konsep ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan sistem pengelolaan air yang efisien.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pusat pertumbuhan wilayah merujuk pada daerah atau lokasi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah biasanya memiliki berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan, seperti investasi, infrastruktur, akses ke pasar, sumber daya manusia, dan sebagainya. Pusat pertumbuhan wilayah dapat berupa kota besar, kawasan perkotaan, ibu kota, kecamatan, maupun kawasan fungsional tertentu. Tujuan dari pengembangan pusat pertumbuhan wilayah adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi atas 27 kabupaten/kota memiliki berbagai pusat pertumbuhan, baik yang tumbuh secara organik maupun didorong untuk tumbuh melalui intervensi kebijakan. Dalam hal ini pusat pertumbuhan dapat dipandang sebagai suatu simpul (*node*) wilayah yang menjadi pusat kegiatan, maupun kawasan aglomerasi yang memiliki keterkaitan fungsi.

2.7.1 Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif provinsi adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah provinsi. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah provinsi.

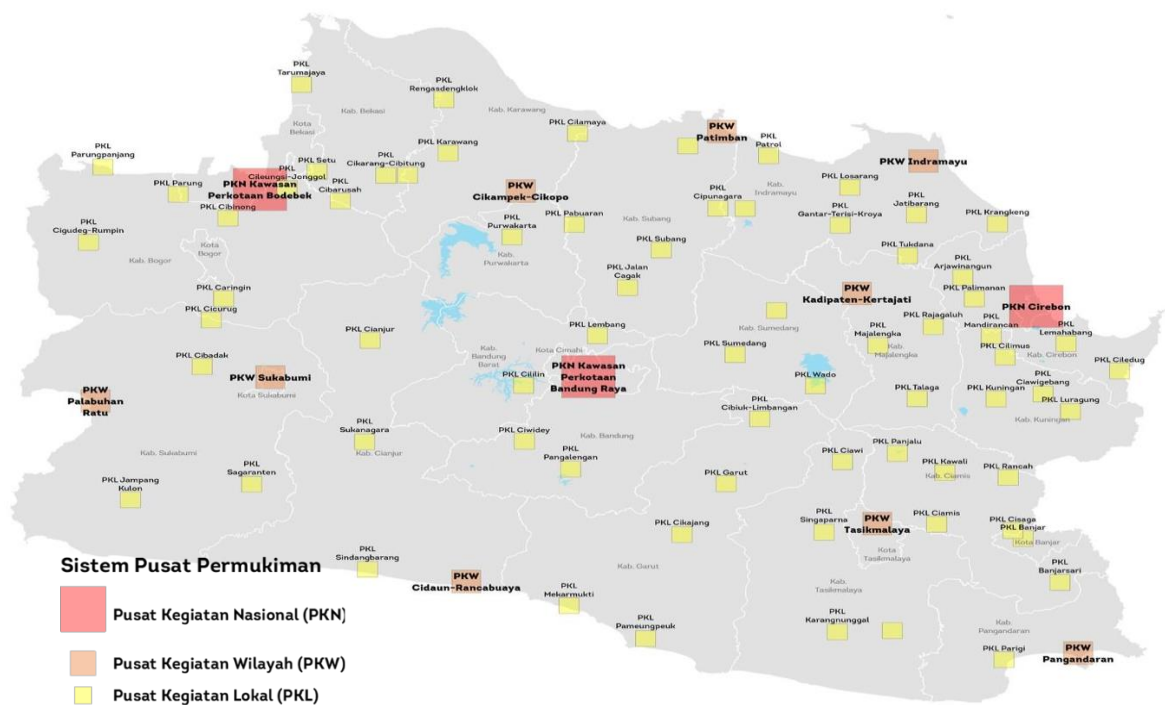
Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif provinsi dalam hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

2.7.1.1 Pusat-Pusat Permukiman

Dalam rencana struktur ruang, direncanakan pusat-pusat permukiman yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai strategis mulai dari skala nasional, wilayah, dan lokal. Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui penetapan:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional; dan
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.

Gambar 2.95
Peta Rencana Pusat Permukiman Provinsi Jawa Barat



Sumber: Lampiran Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 (diolah)

Lokasi yang ditetapkan menjadi PKN sesuai RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 sebanyak 3 (tiga) kawasan yaitu: (a) Kawasan Perkotaan Bodebek; (b) Kawasan Perkotaan Bandung Raya; dan (c) Cirebon. Untuk lokasi PKW sebanyak 9 (sembilan) kawasan, meliputi: (a) Sukabumi;

(b) Palabuhanratu; (c) Indramayu; (d) Tasikmalaya; (e) Pangandaran; (f) Cidaun-Rancabuaya; (g) Patimban; (h) Kadipaten-Kertajati; dan (i) Cikampek-Cikopo. Adapun lokasi PKL sebanyak 69, yang lokasi menyebar di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan, dimana kawasan Pangandaran dan Sukabumi sedang dikembangkan menjadi kawasan sentra garam dengan kualitas garam yang baik dan juga Pangandaran dan Sukabumi juga merupakan kawasan konservasi perairan laut yang tersebar di:

- a. Daerah Kabupaten Bekasi sebagai sentra industri maritim;
- b. Daerah Kabupaten Subang sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan serta sentra industri bioteknologi kelautan;
- c. Daerah Kabupaten Karawang, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, serta sentra industri bioteknologi kelautan;
- d. Daerah Kabupaten Indramayu, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, dan pelabuhan perikanan;
- e. Daerah Kota Cirebon, sebagai pusat pelabuhan perikanan dan sentra industri maritim;
- f. Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budi daya, dan sebagai pelabuhan perikanan;
- g. Daerah Kabupaten Sukabumi selain pariwisata juga dikembangkan, kawasan konservasi perairan dan pesisir salah satunya Pantai Pangumbahan, begitu juga Pangandaran terdapat kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- h. Daerah Kabupaten Garut, sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya serta pelabuhan perikanan;
- i. Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata serta sentra industri bioteknologi kelautan; dan

j. Cidaun-Rancabuaya, sebagai destinasi wisata.

Bila dikaitkan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang Provinsi Jawa Barat yang diamanatkan dalam RTRW, maka terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung perwujudan pusat-pusat permukiman sebagaimana duraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Terkait Perwujudan
Pusat-Pusat Permukiman

No	KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan kawasan yang dikendalikan perkembangannya, kawasan yang didorong perkembangannya, kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan kawasan yang ditingkatkan perkembangannya	a. Meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
2.	Pemantapan peran perkotaan di daerah provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, meliputi PKN, PKW, dan PKL	a. Meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap kawasan; b. Mewujudkan kawasan perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan kawasan permukiman baru di kawasan tersebut; c. Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya; d. Meningkatkan peran PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
3.	Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di daerah provinsi;	a. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya- Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL; b. Mewujudkan sistem sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di wilayah timur daerah provinsi yang meliputi daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten



No	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

2.7.1.2 Wilayah Pengembangan (WP)

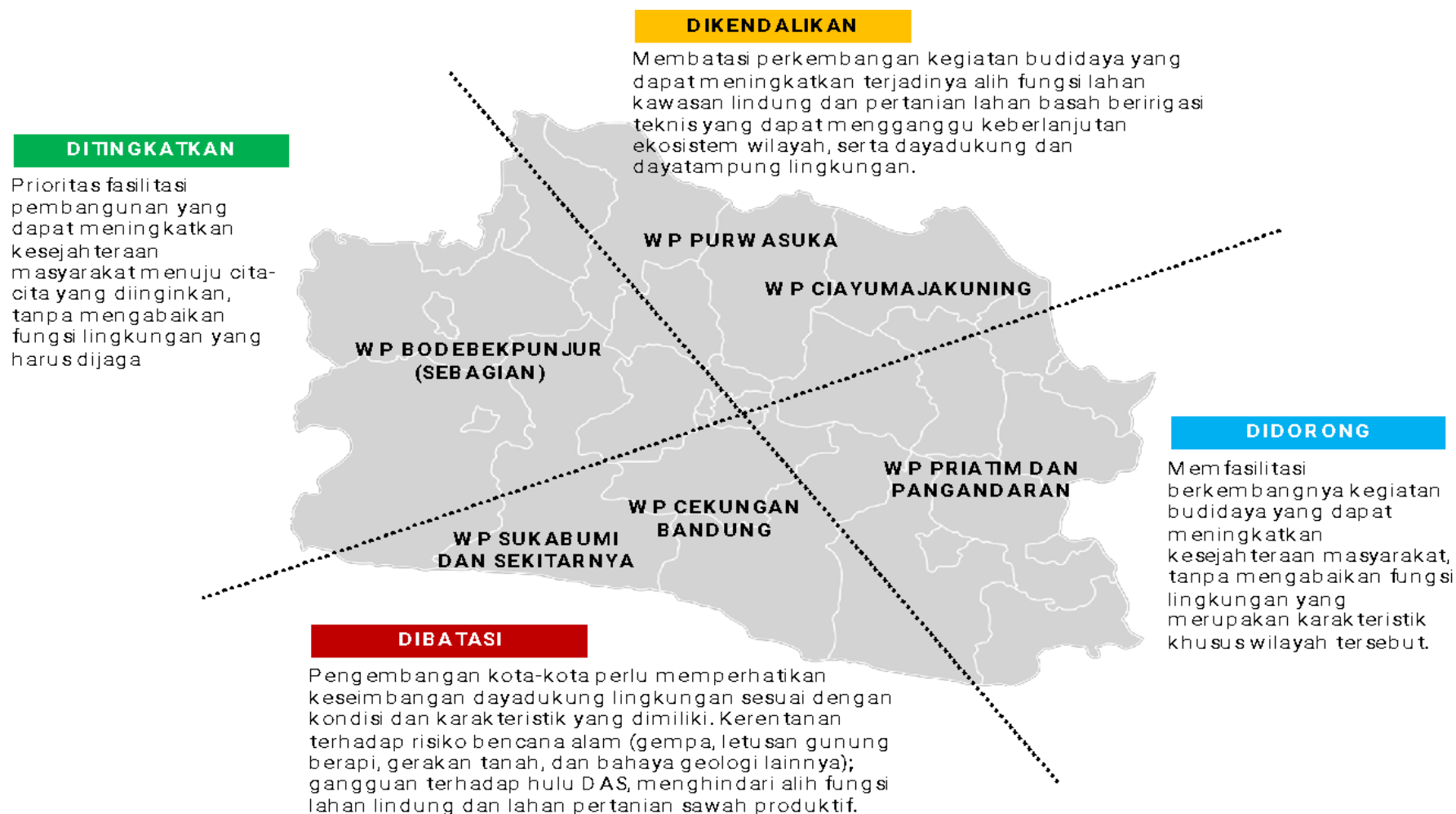
Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yaitu pembangunan berbasis kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini mengacu pada terminologi Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. WP Provinsi Jawa Barat terbagi habis ke dalam 6 (enam) WP, yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya.

Tabel 2.27
Lingkup Wilayah WP di Provinsi Jawa Barat

No	WP	Lingkup Wilayah
1.	Bodebekpunjur	Pengembangan kawasan perkotaan di wilayah daerah provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur serta antisipasi terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur
2.	Purwasuka	Penjabaran dari kawasan andalan Purwasuka, meliputi daerah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang
3.	Ciayumajakuning	Penjabaran dari kawasan andalan Ciayumajakuning yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang
4.	Priangan Timur-Pangandaran	Penjabaran dari kawasan andalan Priangan Timur Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran Kalipucang-Segara Anakan yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran
5.	Sukabumi dan Sekitarnya	Penjabaran dari kawasan andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur
6.	Cekungan Bandung	meliputi daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Gambar 2.96
Tema Pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat



Sumber: : Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Tabel 2.28
Kebijakan Pengembangan Kewilayahan di Provinsi Jawa Barat

(WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
WP Bodebekpunjur	Mengendalikan perkembangan fisik wilayah	Melengkapi fasilitas pendukung PKL	1. Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi diarahkan sebagai kota terdepan ibukota Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja; 2. Kabupaten Bogor dan Bekasi diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; dan 3. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor - Cianjur diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur.	Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata
		Mengembangkan infrastruktur strategis		
		Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata		
		Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, non-polutif		
		Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal		
WP Purwasuka	Mendorong pengembangan	Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani)	1. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
		Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL		

(WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
	kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura	Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (<i>hinterland</i>); 2. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam; 3. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; dan 4. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis kelautan, kegiatan agroindustri, industri non-	perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.

(WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
WP Ciayumajakuning	Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat	Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL Mengembangkan infrastruktur strategis Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran Mendorong pengembangan hutan <i>mangrove</i>, rumput laut dan perikanan tambak Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan	polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, serta kegiatan agroindustri. 1. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (<i>hinterland</i>), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; 2. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, industri kreatif, bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; 3. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan KP2B, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri;	Tanaman pangan dan hortikultura, Agroforestri, agribisnis, agroindustri, industri kreatif, perikanan, pertambangan, pariwisata

(WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
		dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi	4. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan <i>Aerocity</i> di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, industri bahan bangunan, dan pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten; 5. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan 6. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, industri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta dan kegiatan pertambangan mineral.	
WP Priatim - Pangandaran	Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL; Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk	1. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa;	Kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral

(WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
	Daerah bagian Selatan.		2. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam; 3. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura dan agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKL Rancabuaya; 4. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; 5. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang DAERAH berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;	

(WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			6. Kabupaten Pangandaran, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, serta sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.	
WP Sukabumi dsk	Mendorong perkembangan koridor Sukabumi Cianjur dan PKW Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus. Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global	1. Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi; 2. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut, serta pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan	Kehutanan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, budidaya perikanan laut (lobster), serta pertambangan mineral

(WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKW Palabuhanratu; dan 3. Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agroindustri, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Cidaun, serta pertambangan mineral logam dan non-logam.	
WP KK Cekungan Bandung	Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah	Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal	1. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata; 2. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan;	Pertanian hortikultura, perikanan, agroforestri, industri non-polutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas

(WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			3. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi; 4. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan 5. Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimangung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan) diarahkan sebagai bagian dari PKN, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, serta industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	kab/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

2.7.1.3 Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi. Hasil evaluasi KSP di Provinsi Jawa Barat ditetapkan 5 (lima) KSP dari 24 KSP sebelumnya, yang terdiri dari beberapa sudut kepentingan.

Tabel 2.29
Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Tujuan dan Arah Pengembangan
1	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	KSP Bandung Utara	Tujuan: Mengendalikan ruang di KBU sehingga terjamin pembangunan yang berkelanjutan. Arah Pengembangan: • Perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga makro <i>climate</i>, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; • Penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya secara terkendali sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; menerapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; • Perwujudan Stuktur Ruang yang mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas; • Pencegahan peningkatan kekritisian fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis; • Pemulihan dan penanggulangan pada lahan dengan kondisi fungsi hidrologis kritis dan sangat kritis; • Penerapan prinsip minimalisasi larian dengan melakukan rekayasa teknis dan rekayasa vegetasi untuk mengurangi air larian, dan meningkatkan fungsi resapan lahan; • Penerapan prinsip bangunan ramah lingkungan untuk setiap pembangunan gedung;

No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Tujuan dan Arah Pengembangan
2	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Sukabumi Bagian Selatan dsk	- Pembangunan gedung secara vertikal dan membatasi penambahan bangunan gedung yang bersifat horizontal. Tujuan: mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis perikanan dan pariwisata dengan tetap mempertahankan Kawasan lindung geologi. Arah Pengembangan: - Pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan tangkap berupa pengembangan minapolitan, peningkatan teknologi sarana perikanan tangkap dan pengembangan pelabuhan perikanan; - Pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam; - Penataan dan pengembangan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu <i>UNESCO Global Geopark</i> (CPUGGp); - Mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung geologi; - Pengembangan infrastruktur penghubung ke Kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; - Menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai, penanganan rawan tsunami, pengendalian Pemanfaatan Ruang di pesisir; dan - Menerapkan mitigasi bencana.
3	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Aerocity-Kertajati	Tujuan: mengembangkan Kawasan Perkotaan baru yang ramah lingkungan, terintegrasi dengan PKW serta terpadu dengan <i>aerocity</i>. Arah Pengembangan: - Pengembangan Kawasan Perkotaan baru yang ramah lingkungan dan mendukung peran PKW Kadipaten-Kertajati; - Pengembangan Kawasan pendukung dan penghubung untuk mendukung <i>aerocity</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; - Peningkatan konektivitas ke Bandara Kertajati dari dalam dan luar Kawasan; - Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik; dan - Menjaga Kawasan yang berfungsi lindung.

No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Tujuan dan Arah Pengembangan
4	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Patimban	Tujuan: mengembangkan Kawasan Perkotaan baru yang ramah lingkungan, terintegrasi dengan PKW serta terpadu dengan Pelabuhan Patimban. Arah Pengembangan: • Pengembangan Kawasan Perkotaan baru yang ramah lingkungan dan mendukung peran PKW Patimban; • Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung operasionalisasi Pelabuhan Patimban dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; peningkatan konektivitas ke Pelabuhan Patimban dari dalam dan luar Kawasan; • Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik; • Menjaga keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir; • Mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas pelabuhan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat; dan • Menjaga Kawasan yang berfungsi lindung.
5	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Mundu - Losari	Tujuan: mengembangkan Kawasan yang mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang di Kawasan perbatasan provinsi. Arah Pengembangan: • Pengembangan Kawasan yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; • Peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; • Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan kawasan serta pelayanan publik; • Melindungi Kawasan pesisir dan pantai; • Menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; • Menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan • Peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi.

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Gambar 2.97
Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat



Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

2.7.2 Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional

Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional merepresentasikan upaya pemerintah pusat untuk memajukan dan mengembangkan wilayah-wilayah di Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang seimbang di seluruh wilayah NKRI, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.

2.7.2.1 Kawasan Metropolitan Bodebekpunjur

Kawasan Metropolitan Bodebekpunjur dinaungi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Dalam Perpres ini dinyatakan bahwa Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri atas: (a) Kawasan Perkotaan Bogor di Kota Bogor; (b) Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi di Kabupaten Bogor; (c) Kawasan Perkotaan Depok dan Kawasan Perkotaan Cinere di Kota Depok; (d) Kawasan Perkotaan Tangerang di Kota Tangerang; (e) Kawasan Perkotaan Balaraja dan Kawasan Perkotaan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang; (f) Kawasan Perkotaan Ciputat di Kota Tangerang Selatan; (g) Kawasan Perkotaan Bekasi di Kota Bekasi; dan (h) Kawasan Perkotaan Cikarang di Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.30
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

No	Kebijakan	Strategi
1.	Pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya	a. Mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam Kawasan Perkotaan

No	Kebijakan	Strategi
	sesuai dengan fungsi dan perannya	Jabodetabek-Punjur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti; b. Mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai peran dan fungsinya masing-masing; c. Meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dalam rangka mendukung keterpaduan peran dan fungsi antara kota inti dan kota sekitarnya melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi; dan d. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.
2.	Pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti untuk membatasi penjaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya	a. Mengembangkan konsep kota kompak (<i>compact city</i>) di kawasan Perkotaan Inti; b. Meningkatkan pembangunan perumahan vertikal di Kawasan Perkotaan Inti; dan c. Menyebarkan beberapa fungsi dan peran lain ke Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai potensi yang dimiliki.
3.	Pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, serta meningkatkan keterhubungan dalam konteks internasional dan nasional	a. Meningkatkan keterpaduan dalam penyediaan sistem prasarana dan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya untuk mendukung terwujudnya Struktur Ruang yang efektif dan efisien; b. Mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan dan memantapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas; c. Mengembangkan sistem transportasi <i>massal</i> melalui pengembangan jalur komuter berbasis jalan dan rel, serta pengembangan prasarana transportasi berbasis air; d. Mengembangkan keterpaduan sistem transportasi Kawasan perkotaan melalui konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (<i>Transit Oriented Development</i>); dan e. Mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020

2.7.2.2 Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Kawasan perkotaan Cekungan Bandung dinaungi oleh Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan

Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti terdiri dari: Kota Bandung dan Kota Cimahi. Adapun Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri dari:

- a. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat;
- b. Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin-Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan Majalaya-Ciparay, Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung; dan
- c. Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.31
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Cekungan Bandung

No	KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien melalui keterpaduan sistem pusat kegiatan yang didukung dengan sistem jaringan infrastruktur yang handal	a. Menetapkan Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat kegiatan utama kawasan dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya sebagai pusat pendukung yang memiliki fungsi khusus, berhierarki, dan interdependen; b. Mengembangkan pusat Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana transportasi dan sistem angkutan <i>massal</i>; c. Meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana lainnya; d. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya serta distribusi kegiatan industri; e. Memantapkan keterkaitan fungsional antarpusat kegiatan; dan f. Mengembangkan jaringan jalan yang mendukung transportasi <i>massal</i> dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan Kawasan Hutan.



No	KEBIJAKAN	STRATEGI
2.	Pengembangan dan peningkatan fungsi utama masing-masing pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	a. Menetapkan Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat aktivitas utama kawasan dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat pendukung yang memiliki fungsi khusus, berhierarki, dan interdependen; b. Mengembangkan kawasan permukiman kepadatan tinggi di Kawasan Perkotaan di sekitarnya dengan berbasis pada pelestarian, daya dukung, dan daya tampung lingkungan; c. Mengembangkan industri kreatif dan industri berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan serta membatasi pengembangan industri di Kawasan Perkotaan Inti; d. Mengembangkan permukiman secara vertikal untuk menunjang fungsi kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung di zona dengan intensitas kegiatan tinggi dan sedang; e. Meningkatkan keterkaitan antarkawasan dan antarpusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana lainnya; f. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian utara dan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian Selatan secara terbatas dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, pertanian, pariwisata, dan konservasi; g. Meningkatkan koordinasi lintas wilayah dalam rangka pelaksanaan pembangunan kawasan; h. Melakukan pemantauan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala melalui kerja sama antardaerah; i. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan; j. Mengendalikan kerusakan lingkungan dengan cara memantau secara berkala; k. Mengembangkan sistem pengendalian banjir dan menjamin ketersediaan air baku permukaan tanah; l. Mempertahankan dan meningkatkan RTH paling sedikit 30% dari luasan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan m. Mengembalikan fungsi serta mencegah alih fungsi situ dan waduk.
3.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana Kawasan Perkotaan	a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya;

No	KEBIJAKAN	STRATEGI
	Cekungan Bandung yang handal, merata, dan terpadu	b. Mengembangkan transportasi <i>massal</i> yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya; c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air melalui upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; e. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan f. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu antarkawasan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat serta kerja sama antardaerah.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018

2.7.2.3 Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan

Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) dan Jawa Barat bagian Selatan dinaungi oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam Perpres ini dinyatakan bahwa Percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Adapun percepatan pembangunan di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan meliputi: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan. Arah pengembangannya, yaitu:

A Kawasan Rebana

Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang terdiri atas: 3 (tiga) titik di Kabupaten Subang; 6 (enam) titik di Kabupaten Indramayu; 2 (dua) titik di Kabupaten Majalengka; 1 (satu) titik di Kabupaten Sumedang; dan 1 (satu) titik di Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industri berwawasan lingkungan.

B Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Rencana pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berlokasi di 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Isu-isu strategis di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan antara lain infrastruktur, agribisnis dan agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata terpadu. Ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan dengan wilayah lainnya juga menjadi isu strategis di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan. Keenam kabupaten di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan merupakan titik pengembangan yang akan dikembangkan di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kabupaten Pangandaran diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan;
2. Kabupaten Ciamis diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis;
3. Kabupaten Tasikmalaya diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan perikanan;
4. Kabupaten Garut diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan;
5. Kabupaten Cianjur diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan; dan
6. Kabupaten Sukabumi diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan. Selain pariwisata juga dikembangkan Kawasan konservasi perairan dan pesisir salah

satunya Pantai pangumbahan, begitu juga Pangandaran terdapat kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri kelautan dan perikanan.

2.7.3 Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi Jawa Barat

Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berikut ini daftar PSN yang berada di lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat.

A Jalan dan Jembatan

- Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (sudah terbangun)
- Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang (2025-2029)
- Jalan Tol Serpong - Cinere (sudah terbangun)
- Jalan Tol Cinere - Jagorawi (sudah terbangun)
- Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (sudah terbangun)
- Jalan Tol Cibitung - Cilincing (sudah terbangun)
- Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (sudah terbangun)
- Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan (2025)
- Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) (2025-2029)
- Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda) (sudah terbangun)
- Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (2025-2029)
- Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban (2025-2029)

B Pelabuhan

- Pembangunan Pelabuhan Patimban (2019-2042)
- Pelabuhan Palabuhanratu (2025)

- Pelabuhan Cirebon (sudah terbangun dan sudah beroperasi)
- Pelabuhan Bojongsalawe (sudah terbangun)

C Perkeretaapian

- Kereta Api Jakarta - Surabaya (2025-2035)
- Double Track Jawa Selatan (2025-2030)
- *High Speed Railway* Jakarta - Bandung (sudah terbangun)
- Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (2030)
- *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta *East - West Phase I* (sudah *groundbreaking*)

D Bendungan dan Irigasi

- Bendungan Kuningan (sudah terbangun)
- Bendungan Ciawi (sudah terbangun)
- Bendungan Sukamahi (sudah terbangun)
- Bendungan Leuwikeris (sudah terbangun)
- Bendungan Cipanas (sudah terbangun)
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang (on going, s.d tahun 2026)
- Bendungan Cibeet (2024-2028)
- Bendungan Cijuray (2024-2028)
- Bendungan Cipunagara (2030 – 2042)
- Bendungan Cimahi (2030 – 2042)
- Bendungan Matenggeng (2030 – 2042)
- Bendungan Kadumalik (2030 – 2042)
- Bendungan strategis lainnya (2030 – 2042)

E Air Bersih dan Sanitasi

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede (2029-2033)

- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (2023-2027)
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur (2022-2025)

F Tanggul Pantai

- Tanggul Pantai

G Energi

- *Upgrading* Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan (2024-2026)
- Pembangunan Jaringan Gas Kota (2024)
- Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang dan Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai) (2024-2025)
- Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Bio Refinery Revamping dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, Green Refinery RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek) (sudah selesai di 2023)

H Pendidikan

- Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (sudah terbangun)

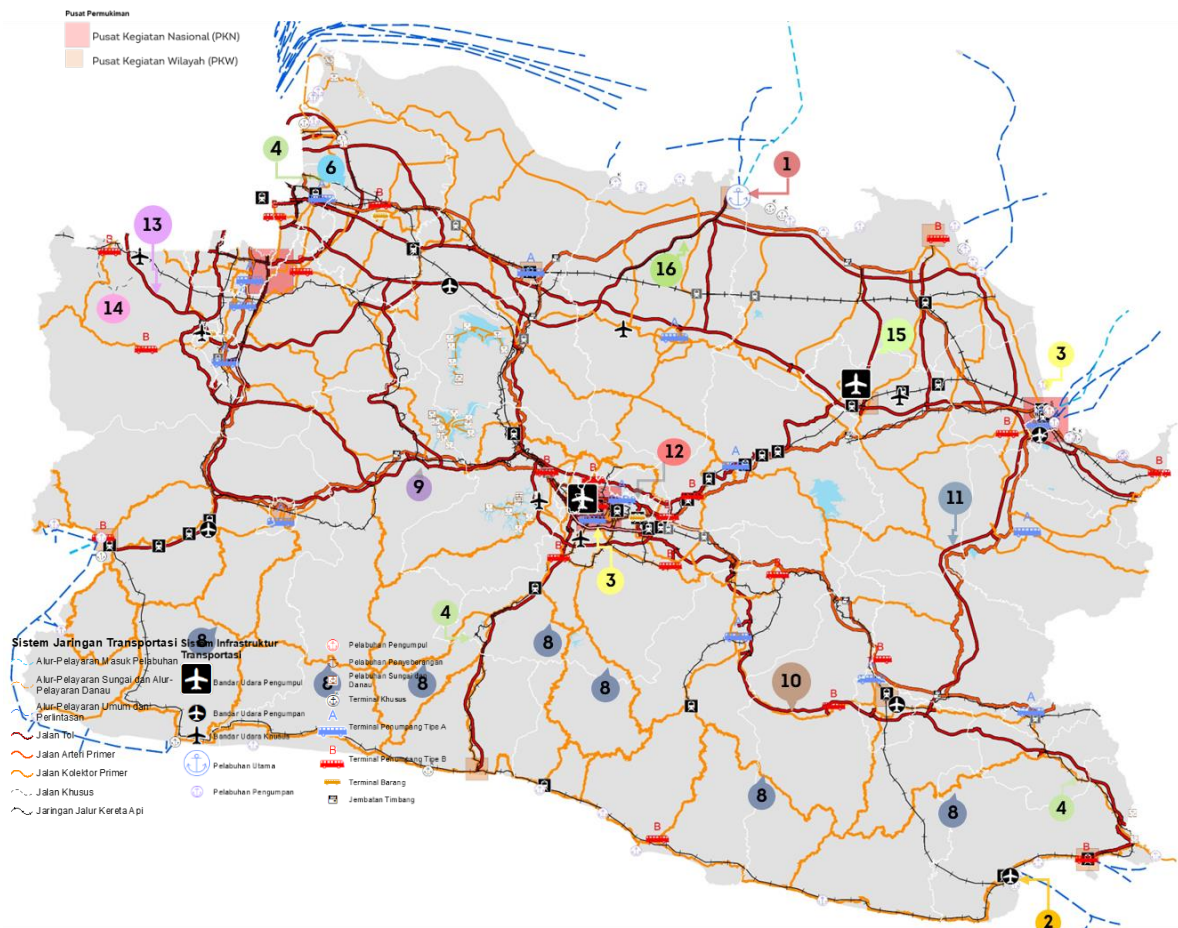
Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, terdapat program pembangunan infrastruktur sebagai indikasi program utama penataan ruang. Program infrastruktur tersebut yang diidentifikasi bernilai strategis, antara lain:

A Transportasi

- Pengembangan Pelabuhan Patimban;
- Pengembangan Bandar Udara Nusawiru;
- Pengembangan Kereta Api Perkotaan;
- Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api

- Pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan Kawasan Perkotaan Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon Raya;
- MRT *East-West*;
- Pembangunan Kereta Cepat Bandung-Surabaya;
- Pembangunan Jalur Tengah Selatan;
- Pengembangan Jalan Kolektor Primer Naringgul - Cidaun
- Pembangunan Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang;
- Pembangunan Tol Gedebage Tasik Cilacap;
- Pembangunan Tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya;
- Pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road;
- Pembangunan Jalan Tol JORR 3;
- Pembangunan Jalan khusus Tambang;
- Pembangunan Tol Kertajati-Indramayu;
- Pembangunan Tol Akses Patimban;
- Pembangunan Tol Soreang–Ciwidey-Cidaun; dan
- Pelebaran Tol Cibadak – Palabuhanratu.

Gambar 2.98
Peta Rencana Infrastruktur Transportasi Strategis
Provinsi Jawa Barat



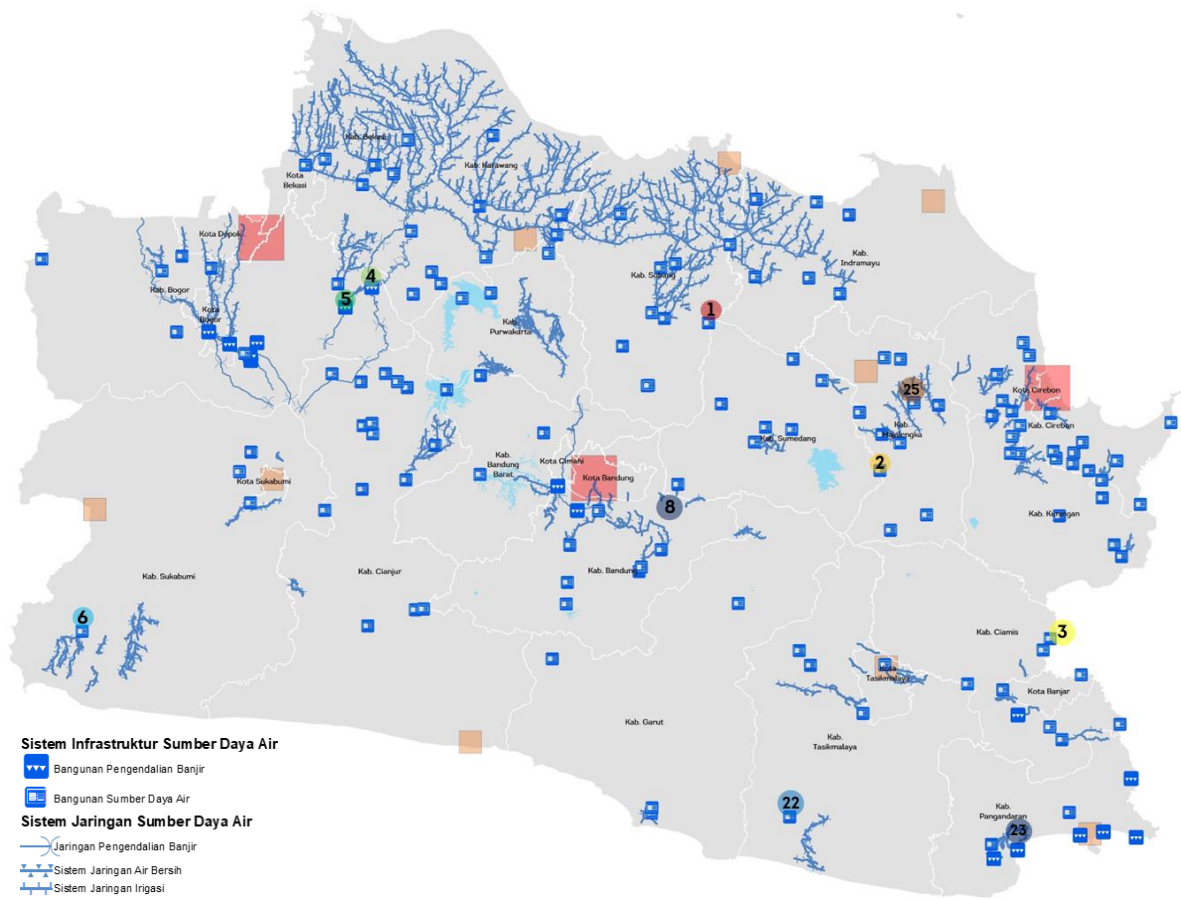
Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 (diolah)

B Sumber Daya Air

- Pembangunan Bendungan Cipunagara Kab. Subang.
- Pembangunan Bendungan Kadumalik Kab. Majalengka.
- Pembangunan Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis - Cilacap.
- Bendung Cibeet, Kab. Bogor.
- Bendungan Cijuray, Kab. Bogor.
- Pembangunan Waduk Multiguna di kawasan Cekungan Bandung
- Pembangunan Daerah Irigasi Baru Cikalong, Kab. Tasikmalaya.
- Pembangunan Daerah Irigasi Parigi, Kab. Pangandaran
- Pembangunan DI Curug Dengdeng, Kab. Cianjur, DI. Candragoyang, Kab. Garut.

- Modernisasi Daerah Irigasi Renrang, WS Cimanuk-Cisanggarung.

Gambar 2.99
Peta Rencana Infrastruktur Sumber Daya Air Strategis
Provinsi Jawa Barat

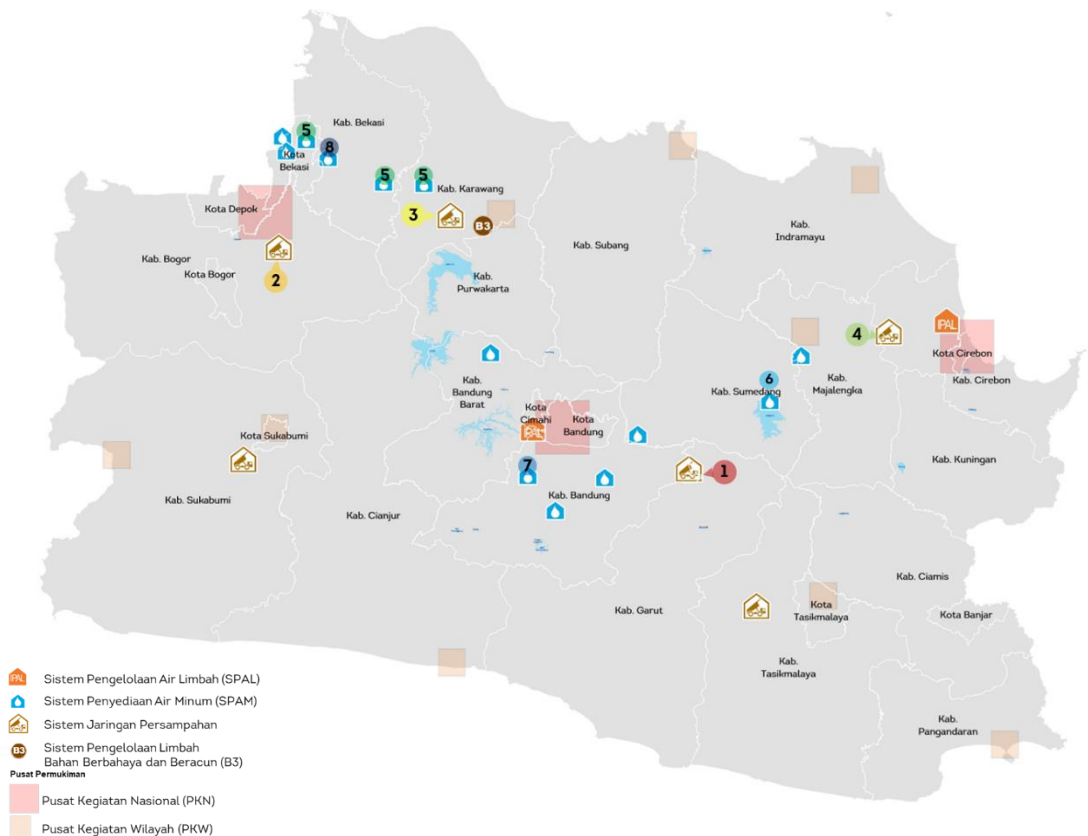


Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 (diolah)

C Persampahan dan Air Bersih

- Pembangunan TPPAS Legok Nangka.
- Pembangunan TPPAS Nambo Tahap II.
- Pembangunan TPPAS Bekasi Karawang Purwakarta (Bekarpur).
- Pembangunan TPPAS Cirebon Raya.
- Pembangunan SPAM Juanda / Jatiluhur II.
- Pembangunan SPAM Jatigede.
- Pembangunan SPAM Sinumbra.
- Pembangunan SPAM Jatiluhur I.

Gambar 2.100
Peta Rencana Infrastruktur Strategis Lainnya Provinsi Jawa Barat



Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 (diolah)

2.7.4 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, kebijakan terkait Provinsi Jawa Barat tertuang dalam kebijakan nasional wilayah Pulau Jawa. Dalam hal ini, secara nasional wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Berdasarkan proyeksi, wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi wilayah pada kisaran 48,3 persen pada tahun 2045. Dalam konteks arah kebijakan, wilayah Jawa secara umum diarahkan untuk berfokus pada transformasi ekonomi menjadi wilayah **"industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi"**.

Secara lebih detail, beberapa arah kebijakan kewilayahan yang diamanatkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 terkait Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. **Pengembangan hub pendidikan tinggi global (*global higher education hub*)**, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta

penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset dan inovasi berkelas dunia di wilayah **Metropolitan Bandung**.

2. **Pengentasan kemiskinan** di seluruh wilayah terutama **Jawa Barat bagian Selatan** melalui perlindungan sosial adaptif dan akses layanan dasar. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
3. **Pengembangan industri hijau ramah lingkungan di Kawasan Rebana**. Pengembangan industri hijau ramah lingkungan dimaksud seperti Pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*) dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*) didukung dengan Pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Wilayah Jawa untuk industri hijau diarahkan pada lokasi lokasi pesisir dan pelabuhan salah satunya yang ada di Jawa Barat yaitu Kawasan Rebana.

Sebagai kawasan industri strategis di Provinsi Jawa Barat, Kawasan Rebana menaungi 13 (tiga belas) kawasan industri seluas 43,913 hektar dan memiliki 9,28 juta penduduk yang merepresentasikan hampir 20 persen dari total penduduk Provinsi Jawa Barat. Melalui dekarbonisasi industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lewat pengembangan kawasan industri yang terintegrasi serta rendah emisi.

4. **Pengembangan kawasan strategis industri (*klaster consumer goods dan general manufacture*)** di wilayah **Bekasi-Karawang-Subang**, yang meliputi klaster industri *consumer goods* dan *general manufacture*.
5. **Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata** diarahkan pada wilayah **Jawa Barat bagian Selatan**, yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam, konsep hub kebudayaan dan industri kreatif (*cultural hub and creative industry*), mengedepankan atraksi yang unik, amenities, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik, serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi ***urban & health/medical tourism*** (Bandung).

6. **Pengembangan kawasan strategis agrikultur** untuk mendukung kemandirian pangan di **Citarum, Cimanuk, Cisanggarung, Citanduy**, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih.
7. **Pengembangan sentra produksi pangan** yang dilakukan secara kolektif antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan.
8. **Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya di pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat** (WPP-712 dan WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*.
9. **Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan** untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang inklusif dan global (*global city*) di **Metropolitan Bandung** serta pusat aglomerasi di wilayah **Cirebon**. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
10. **Peningkatan pemantauan kualitas air di Jawa Barat**, diprioritaskan pada sungai-sungai utama kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat, waduk, situ, embung dan sumber air lainnya serta pemantauan kualitas air laut di **utara dan Selatan Jawa Barat**.
11. **Penguatan ketangguhan area pesisir pantai utara Jawa Barat**, termasuk masyarakat lokal terhadap **ancaman perubahan iklim di wilayah Jabodetabek**.
12. **Penyelesaian Pelabuhan Patimban**. Pelabuhan Patimban merupakan infrastruktur strategis yang memfasilitasi interaksi ekonomi nasional dan internasional yaitu kebutuhan ekspor impor dan perdagangan antarpulau dalam menghadapi Indonesia Emas pada 2045.

Progres Pembangunan Pelabuhan Patimban fase 1-1 telah selesai dilaksanakan, yang selanjutnya akan dilaksanakan pembangunan Pelabuhan Patimban Fase 1-2 yang terdiri dari Kegiatan

Pengembangan Pembangunan terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban dan paket 6 yang merupakan Kegiatan Pengembangan Pembangunan Peti Kemas.

13. **Optimalisasi dan pengembangan Bandara utama (BIJB Kertajati);**

Bandar Udara Kertajati atau dikenal juga sebagai Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) adalah bandar udara yang dibangun di daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bandar Udara Kertajati dirancang untuk melayani daerah cakupan yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Purwakarta, Subang, serta sebagian Jawa Tengah bagian Barat dan sekitarnya.

14. **Pengembangan transportasi perkotaan (Bandung dan Cirebon) dan pembangunan infrastruktur transportasi nasional dapat menjadi landasan atau batu loncatan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi *massal* modern menuju Indonesia Emas masa depan.** Pembangunan transportasi dalam upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah serta dapat melayani mobilitas manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan selamat, aman dan nyaman.

15. **Percepatan pembangunan dan penguatan potensi wilayah (Jabar Selatan) yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif dari segi transformasi tata kelola.**

2.7.5 Arah Kebijakan Kewilayahan RTRW 2022-2042

Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 12,65 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2045 Provinsi Jawa Barat diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 17,79 persen penduduk Indonesia, sebesar 89,3 persen diperkirakan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2035, dan akan makin meningkat pada tahun 2045. Arah RPJPN Tahun 2025-2045, Wilayah Jawa akan menjadi wilayah **“Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”** melalui 5 (lima) prioritas yaitu: *Pertama*, pengembangan sumber daya manusia berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. *Kedua*, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis

industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi, riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan. *Ketiga*, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan guna menjamin ketahanan energi, air dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan. *Keempat*, pengembangan infrastruktur pendukung seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *maritime backbone* yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur. *Kelima*, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Untuk mendukung terwujudnya “**Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan**”, arah kebijakan Provinsi Jawa Barat pada setiap Wilayah Pengembangan (WP) sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur

WP Bodebekpunjur meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur. Pengembangan pada WP Bodebekpunjur diarahkan pada kesetaraan fungsi dan peran kawasan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur, antisipasi terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan serta pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang harus dijaga dengan fokus pada pengendalian perkembangan fisik wilayah.

Tabel 2.32
Arah Kebijakan WP Bodebekpunjur

Fokus	Arah kebijakan
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di WP Bodebekpunjur diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah serta pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pusat pertumbuhan baru yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi digital, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.
SDM	Pengembangan SDM berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di WP Bodebekpunjur diarahkan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan kerja, meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan sistem perlindungan sosial.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKL; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi, efisien, merata, serta adaptif terhadap bencana.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan; mendorong investasi yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi dan non polutif; mendorong pembangunan industri padat karya dan penyerapan tenaga lokal; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor perekonomian; meningkatkan produktivitas, daya saing dan pengembangan IKM/UMKM; meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; meningkatkan produksi dan distribusi pangan; meningkatkan stabilitas daerah; membangun kolaborasi dan kemitraan dengan swasta, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Lingkungan	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKL; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi, efisien, merata, serta adaptif terhadap bencana.

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

2. Wilayah Pengembangan Purwasuka

WP Purwasuka meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang Pengembangan WP Purwasuka ini diarahkan pada pembatasan perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan, alih fungsi kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis, yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fokus pada pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura.



Tabel 2.33
Arah Kebijakan WP Purwasuka

Fokus	Arah kebijakan
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas PKN, PKW dan PKL; mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; dan mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mengembangkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan pendidikan.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana serta membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

3. Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning

WP Ciayumajakuning meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang. Pengembangan WP ini diarahkan pada pembatasan perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan, alih fungsi kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis, yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan serta merupakan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan. Fokus pengembangan wilayah ini pada gerbang Timur Jawa Barat.

Tabel 2.34
Arah Kebijakan WP Ciayumajakuning

Fokus	Arah kebijakan
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif; mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan; pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah.
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera; membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; mengembangkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya; serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan pendidikan.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur strategis yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana serta membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan sektor dan komoditas unggulan; mendorong agribisnis; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan; mengembangkan wisata budaya, religi dan alam; mendorong pengembangan hutan <i>mangrove</i> , rumput laut dan perikanan tambak; mengendalikan perikanan tangkap; serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

4. Wilayah Pengembangan Priangan Timur – Pangandaran

WP Priangan Timur–Pangandaran meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. WP ini merupakan pengembangan dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran Kalipucang–Segara Anakan serta sebagai antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, dengan fokus untuk mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran,

pengembangan secara terbatas kawasan daerah bagian selatan serta pengembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus wilayah ini.

Tabel 2.35
Arah Kebijakan WP Priangan Timur – Pangandaran

Fokus	Arah kebijakan
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; serta mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera serta mengembangkan sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata dalam mendukung kegiatan pariwisata dan adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; meningkatkan kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan); mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan kawasan pariwisata terintegrasi; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

5. WP Sukabumi dan sekitarnya

WP Sukabumi dan sekitarnya terdiri atas Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Pengembangan WP ini merupakan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, dengan fokus untuk mendorong koridor Sukabumi – Cianjur dan PKW Pelabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian Selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur.



Tabel 2.36
Arah Kebijakan WP Sukabumi dan Sekitarnya

FOKUS	ARAH KEBIJAKAN
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; dan mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera serta mengembangkan sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata dalam mendukung kegiatan pariwisata dan adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; meningkatkan kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan); mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan kawasan pariwisata terintegrasi; mengembangkan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki, kerentanan terhadap risiko bencana alam, gangguan hulu DAS, menghindari alih fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.

6. WP Cekungan Bandung

WP Cekungan Bandung meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang. Pengembangan WP ini diarahkan untuk mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Pengembangan kota-kota perlu

memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki, kerentanan terhadap risiko bencana alam, gangguan hulu DAS, menghindari alih fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.

Tabel 2.37
Arah Kebijakan WP Cekungan Bandung

Fokus	Arah kebijakan
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL; pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; meningkatkan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik; mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera; membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; meningkatkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya; serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan kegiatan perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi, industri non polutif dan pariwisata; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan; mengendalikan pengembangan kegiatan kawasan perkotaan; mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal; meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan; serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Sumber: Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Geografi

Permasalahan aspek geografi meliputi rawan bencana, kualitas lingkungan hidup, energi fosil, sistem pangan, pengelolaan pesisir dan ekowisata terintegrasi, sebagaimana pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Permasalahan Geografi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Relatif masih tingginya risiko bencana, hal ini disebabkan belum optimalnya penanggulangan bencana, meskipun pencapaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 134,94 poin, tahun 2022 sebesar 131,62 poin, dan pada tahun 2023 sebesar 123,16 poin dengan kategori sedang. Dengan penurunan indeks risiko bencana tersebut, menunjukkan kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana semakin membaik. Belum optimalnya

penanggulangan bencana diantaranya pada aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan pasca bencana. Pada masa yang akan datang, tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai dampak dari perubahan iklim.

Struktur geologi yang kompleks menjadikan wilayah Jawa Barat rawan terhadap bencana alam. Wilayah yang dibentuk oleh pengaruh tumbukan lempeng eurasia menjadikan struktur batuan berupa lipatan dan patahan yang secara geografis menghasilkan formasi pegunungan dan gunung vulkanik yang berada di bagian tengah dan selatan menjadikan wilayah tersebut rawan longsor dan adanya sesar aktif pada 6 (enam) zona (sesar cimandiri, sesar cipamingkis, sesar lembang, sesar garsela, sesar baribis dan sesar citanduy), serta *megathrust* di Pantai Selatan Jawa Barat menjadikan wilayah tersebut memiliki resiko tinggi bencana geologi. Sedangkan wilayah Utara Jawa Barat yang memiliki karakteristik wilayah endapan aluvial menjadikan wilayah tersebut rentan terhadap ancaman banjir. Kondisi tersebut mengakibatkan perkembangan aksesibilitas wilayah tengah dan selatan relatif lebih lambat dibandingkan wilayah utara, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan.

Banjir dan penenggelaman (*submergence*) wilayah daratan di pesisir pantai utara. Di wilayah pesisir pantai utara Provinsi Jawa Barat, lebih dari 700 Ha wilayah daratan mengalami penenggelaman (*submergence*) sebagai akibat dari abrasi dan kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Disamping itu, alih fungsi lahan ruang terbuka hijau dan kawasan hutan di wilayah hulu yang tidak terkendali berdampak pada semakin meningkatnya intensitas banjir dan genangan pada wilayah dataran khususnya di pesisir pantai utara. Tantangan masa depan adalah menekan laju alih fungsi lahan serta mengembangkan kawasan pesisir pantai utara dengan infrastrukturnya yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan pemanfaatan ruang dan iklim global.

Masih tingginya emisi gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global, disebabkan masih rendahnya upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca disebabkan oleh masih adanya

penebangan hutan, penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan pupuk kimia, pembakaran sampah, dan proses industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Kualitas lingkungan hidup relatif rendah, yang disebabkan oleh masih tingginya pencemaran sungai dan laut, pencemaran udara di perkotaan, kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah yang masih terbatas, serta berkurangnya kualitas tutupan lahan. Pencemaran sungai semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas perkotaan di sektor industri dan rumah tangga, hal ini disebabkan oleh terbatasnya partisipasi masyarakat dan sektor industri dalam pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian dan pengawasan masih rendah, serta teknologi pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal. Pencemaran udara di perkotaan khususnya metropolitan disebabkan oleh kegiatan transportasi dan industri, serta pengelolaan sampah masih menggunakan sistem pembakaran yang tidak sempurna dan kebijakan *Reduce, Reuse & Recycle* (3R) yang belum efektif. Berkurangnya kualitas tutupan lahan disebabkan belum efektifnya rehabilitasi lahan dan hutan, serta masifnya alih fungsi lahan hutan menjadi non hutan.

Luas kawasan yang berfungsi lindung masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 45 persen, hal ini disebabkan belum optimalnya upaya pengelolaan kawasan lindung melalui konservasi lahan dan rehabilitasi lahan kritis, pengendalian pemanfaatan ruang yang belum efektif, ketaatan terhadap pemanfaatan ruang yang rendah, serta terbatasnya sosialisasi dan peran serta masyarakat dalam perwujudan kawasan lindung. Hal ini menyebabkan berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), disebabkan oleh keterbatasan lahan, khususnya di daerah perkotaan, kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang kurang mendukung penyediaan RTH, urbanisasi yang tidak terkendali, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman pengembang perumahan dalam penyediaan RTH.

Sistem pangan masih rentan terhadap perubahan faktor internal dan eksternal, hal ini disebabkan oleh proses produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat, stok cadangan pangan belum terpenuhi, perubahan iklim yang berdampak pada turunnya produksi dan

produktivitas tanaman pertanian, meningkatnya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun banjir dan kekeringan, pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim belum optimal, implementasi *Research & Development*, uji *demonstration plot* belum efektif, sistem logistik dan distribusi belum tertata dengan baik sehingga belum dapat menjangkau wilayah rentan pangan serta masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan beras.

Belum optimalnya pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap dalam batas wilayah laut 12 mil, hal ini disebabkan karena masih rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati, terbatasnya prasarana dan sarana perikanan tangkap, masih rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, kurangnya inovasi penelitian dan pengembangan, serta belum optimalnya tata kelola pesisir. Pada aspek prasarana dan sarana, sebagian besar pelabuhan perikanan tidak dapat menampung kapal nelayan dengan kapasitas diatas 5 (lima) *Gross tonnage* (GT), karena kedalaman kolam labuh hanya dapat melayani kapal dengan kapasitas kecil (dibawah 5GT), sedangkan pemanfaatan wilayah penangkapan belum optimal, karena armada kapal pada umumnya memiliki kapasitas kecil. Dari aspek budidaya, potensi sumber daya ekonomi wilayah pesisir masih belum termanfaatkan secara optimal dikarenakan terbatasnya teknologi budidaya dan rantai nilai tambah produksi.

Belum optimalnya pengembangan ekowisata terintegrasi, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya amenitas, daya tarik wisata (*attraction*), kemudahan mencapai destinasi wisata (*accessibility*), keamanan dan keramahtamahan (*ancillary*). Terbatasnya amenitas yang dilengkapi dengan fasilitas *showcase* dan galeri yang tertata serta belum berkembangnya ekonomi kreatif di dalam kawasan ekowisata, sehingga belum memberikan *trickle down effect* yang lebih besar untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih inklusif.

Tingginya ketergantungan pembangkit listrik terhadap konsumsi bahan bakar fosil ditengah pencapaian Target *Net Zero Emission* (NZE). Dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 7,24 GW, sekitar 60,26 persen atau 4,36 GW berasal dari sumber energi non-terbarukan (batubara, gas, dan BBM).

Tingginya ketergantungan terhadap sumber energi non-terbarukan tersebut berdampak pada tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor energi. Untuk mencapai target NZE di tahun 2060 atau lebih cepat, diperlukan penerapan Mekanisme Transisi Energi (*ETM*) secara bertahap yang salah satunya ditempuh dengan melakukan *early retirement* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bersumber batubara yang direncanakan dilakukan secara gradual dimulai di tahun 2030.

B. Demografi

Permasalahan demografi mencakup pertumbuhan penduduk, kualitas SDM, penduduk usia tua, dan tingkat urbanisasi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2
Permasalahan Demografi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya angka migrasi dan tingkat kelahiran. Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan pedesaan dalam jangka panjang serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang, untuk memenuhi kebutuhan hunian dan aktivitas penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas orang, barang dan jasa, yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah. Tingkat konektivitas wilayah tahun 2023 masih 59,62 persen, menunjukkan belum optimalnya infrastruktur pendukung

pergerakan orang, barang dan jasa, khususnya di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah diindikasikan dengan tingkat rata-rata lama sekolah setara jenjang kelas II SMP serta prevalensi *stunting* pada balita sebesar 21,7 persen (tahun 2023), hal ini disebabkan oleh rendahnya akses dan kualitas pendidikan, partisipasi masyarakat, akses dan kualitas kesehatan, serta gizi buruk. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam mewujudkan sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat yang unggul dan berkualitas pada setiap tingkatan struktur penduduk.

Kompetensi angkatan kerja dan penduduk usia tua yang belum optimal dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah serta jenis pelatihan vokasi yang belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja industri menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Komposisi penduduk yang sudah memasuki *ageing population* dengan usia diatas 60 tahun jumlahnya lebih dari 10,53 persen (tahun 2023) serta penanganan penduduk usia tua yang belum optimal menyebabkan rasio ketergantungan lansia meningkat, perlindungan dan pemberdayaan lansia masih belum optimal yang ditandai dengan masih tingginya persentase lansia yang tinggal sendiri, tinggal di rumah tidak layak huni, rendahnya lansia yang memiliki jaminan sosial, serta angka kesakitan lansia masih diatas rata-rata nasional khususnya di kawasan perdesaan.

Tingkat urbanisasi yang masih tinggi menyebabkan kawasan perkotaan menjadi lebih padat, hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur, ketersediaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat dikawasan perdesaan serta tidak berfungsinya pusat-pusat pertumbuhan kegiatan wilayah. Tingginya urbanisasi selain meningkatkan pertambahan penduduk di kawasan perkotaan juga menyebabkan krisis perumahan, terutama bagi penduduk dengan pendapatan rendah yang kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan kesejahteraan ekonomi di Jawa Barat sebagaimana pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3
Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi barang dan jasa. Tantangan pencapaian kesejahteraan ekonomi adalah pengendalian inflasi, dimana harga-harga tingkat konsumen rentan oleh gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok global, maupun faktor internal. Hal ini ditunjang dengan belum optimalnya stabilitas pasokan dan sistem rantai pasok yang belum optimal.

Angka kemiskinan absolut di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Walaupun tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren penurunan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, namun capaian sampai dengan tahun 2023 masih pada level tinggi yaitu 7,62 persen dengan jumlah 3,89 juta orang. Berdasarkan kewilayahan, kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah.

Tingkat pengangguran masih tinggi. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja, serta masih

rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya angka pengangguran. Selain dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah (53,6 persen tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah), tingginya pengangguran juga disumbang oleh angka putus sekolah jenjang SMA (menyumbang 45 persen dari jumlah pengangguran), kurikulum pendidikan vokasi jenjang SMA yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya jumlah dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) kompetensi maupun mandiri dalam mendorong peningkatan akses angkatan kerja terhadap lapangan kerja. Secara kewilayahan, tingkat pengangguran di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian Selatan saat ini masih diatas rata-rata tingkat pengangguran provinsi, dikarenakan terbatasnya perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa berbasis sumber daya pertanian di wilayah tersebut.

Kesenjangan pendapatan antar wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok masyarakat. Ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Barat hingga pertengahan 2019 sebesar 0,408 poin. Adanya pandemi COVID-19 menjadi titik balik fenomena ketimpangan pendapatan terutama di wilayah perkotaan yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan bahkan mencapai 0,425 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan pendapatan terutama di sektor lapangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 49 persen PDRB berasal dari Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor, dan Kota Bandung. Ketimpangan di Provinsi Jawa Barat juga ditunjukkan dengan penetapan upah minimum kabupaten/kota, dimana wilayah utara relatif lebih tinggi (diatas rata-rata Rp3 juta) dibandingkan kabupaten/kota wilayah selatan khususnya wilayah priangan timur (Rp2-2,5 juta).

Masih terdapat ketimpangan akses dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang tinggi dengan rata-rata di atas 5 (lima) persen masih belum dapat mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Investasi besar di sektor industri manufaktur belum sepenuhnya dapat menumbuhkan dan menarik sektor IKM menjadi bagian dari kesatuan rantai pasok industri. Faktor lainnya adalah penumbuhan dan pemberdayaan UMKM dan

ekonomi kreatif masih dihadapkan pada terbatasnya akses permodalan, rendahnya manajemen pengelolaan, serta rendahnya produktivitas dan akses pemasaran. Pariwisata sebagai sektor ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan sektor jasa, akomodasi makan dan minuman, serta industri kreatif dan UMKM perlu terus dipercepat pertumbuhannya dalam rangka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Kesejahteraan petani dan nelayan perlu didukung dengan pengembangan rantai nilai tambah (*add value chain*) berbasis pertanian dan perikanan. Sebagai provinsi dengan urutan nomor 2 (dua) kontributor produksi beras nasional (17 persen dari produksi nasional), tingkat kesejahteraan petani khususnya pangan masih rendah dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Nilai NTP (Gabungan) pada tahun 2023 mencapai 107,46 poin, hal ini mengindikasikan sisi pendapatan petani masih lebih rendah dari pengeluarannya. Berdasarkan jenis komoditas, capaian NTP untuk sektor perikanan dan sektor hortikultura telah diatas 100 poin, namun untuk sektor perkebunan dan tanaman pangan masih dibawah nilai tersebut. Kesejahteraan petani di Provinsi Jawa Barat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya, harga jual rendah; akses terbatas ke pasar; ketidakpastian iklim dan bencana alam; serta kurangnya akses pengetahuan terhadap perkembangan teknologi pertanian.

B. Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya di Jawa Barat sebagaimana pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Permasalahan Sosial Budaya Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Akses layanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang masih belum inklusif. Akses masyarakat dalam mendapatkan pendidikan belum sepenuhnya inklusif. Masih terdapat keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang disebabkan keterbatasan akses geografis dan kewilayahan, keterbatasan fisik masyarakat serta keterbatasan ekonomi keluarga. Jika dilihat dari akses geografis dan kewilayahan sampai 2023 masih terdapat 16 (enam belas) kecamatan masih belum memiliki sekolah jenjang pendidikan menengah sehingga siswa harus mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah di luar kecamatan dengan jarak yang relatif jauh dari domisili. Tidak berbeda dengan pendidikan, pada bidang kesehatan, layanan kesehatan masyarakat juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut diindikasikan oleh rasio puskesmas per penduduk di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 masih di atas 1:40.000 penduduk. Permasalahan selanjutnya yaitu jumlah tenaga kesehatan yang belum tersebar secara merata di setiap daerah. Permasalahan kesehatan selanjutnya adalah tingkat kesadaran (*awareness*) yang masih rendah terhadap kesehatan mental, serta tantangan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk masyarakat dimana capaian kepesertaan di Provinsi Jawa Barat sebesar 90,36 persen.

Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan dan nilai agama. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat masih dibawah rata-rata Nasional yang disebabkan masih rendahnya peran ekonomi budaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peran budaya dalam mendorong peningkatan partisipasi pendidikan, peran ketahanan sosial budaya dalam menciptakan sikap masyarakat yang toleran dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, peran ekspresi budaya dalam menghilangkan diskriminasi sosial yang menyangkut aspek budaya serta kriminalisasi pengetahuan dan ekspresi budaya serta masih rendahnya budaya dalam mendorong kesetaraan gender.

Sementara itu, peran nilai agama belum sepenuhnya optimal membentuk nilai-nilai, motivasi, dan kontrol sosial dalam kehidupan individu dan masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan tingginya angka kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 45.689 jumlah kasus kejahatan. Selain itu permasalahan belum

optimalnya nilai agama dalam membentuk nilai-nilai, motivasi, dan kontrol sosial dalam kehidupan individu dan masyarakat dilihat dari masih tingginya jumlah kasus pengidap AIDS di Provinsi Jawa Barat mencapai 2.178 kasus pada tahun 2023. Jumlah kasus tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

Peran pemuda dalam pembangunan yang belum optimal. Indeks Pembangunan Pemuda menggambarkan kondisi pemuda yang memiliki kapasitas individu yang berkualitas dan dapat memiliki penghidupan dan pekerjaan yang layak sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Kondisi Indeks Pembangunan Pemuda Jawa Barat saat ini berada pada posisi kedua terbawah di Indonesia. Akar permasalahan yang menyebabkan rendahnya pembangunan pemuda antara lain angka partisipasi kepemimpinan pemuda pada tahun 2023 hanya mencapai 36,67 poin. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana kepemudaan belum dimanfaatkan secara optimal dimana persentase sarana dan prasarana termanfaatkan baru sebesar 68 persen. Selain itu, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan baru mencapai 17,3 persen. Faktor lain yang mempengaruhi pembangunan pemuda yaitu kondisi lapangan dan kesempatan kerja pemuda. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka pemuda tahun 2023 yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 18,83 persen dan masih berada diatas nasional yaitu 13,41 persen.

Ketimpangan gender masih tinggi dan masih rendahnya perlindungan perempuan. Tingginya ketimpangan gender disebabkan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini diindikasikan masih tingginya kesenjangan akses ekonomi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal kesempatan kerja dan penghasilan. Capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 masih dibawah rata-rata nasional dimana terdapat kesenjangan antara IPM perempuan sebesar 70,10 dan laki-laki sebesar 77,69. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan, serta kesenjangan akses kesehatan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal akses ke pelayanan kesehatan reproduksi. Selain itu, ketimpangan gender yang tinggi di Provinsi Jawa Barat juga disebabkan masih kurangnya pemberdayaan gender yang dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan perempuan di

parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan.

Sementara itu, perlindungan perempuan di Provinsi Jawa Barat juga masih rendah. Hal ini terlihat dari tingginya kekerasan terhadap perempuan dimana Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia (berdasarkan data SIMFONI-PPA, KEMENPPPA), yaitu mencapai 1.660 kasus di tahun 2023. Kekerasan terhadap perempuan tersebut terjadi paling banyak di rumah tangga, fasilitas umum, dan tempat kerja yang melibatkan kekerasan seksual, psikis, dan kekerasan fisik.

Perlindungan anak yang belum optimal. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mencapai 65,74, dan berhasil melampaui rata-rata capaian nasional yaitu sebesar 63,30. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi di Jawa-Bali, berada di bawah capaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa perlindungan anak di Jawa Barat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya capaian pada beberapa klaster pembangunan Indeks Perlindungan Anak. Klaster dengan capaian terendah diantaranya klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan sebesar 36,13 persen, klaster hak sipil dan kebebasan sebesar 50,8 persen, serta klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebesar 76,68 persen. Sedangkan klaster perlindungan anak sebesar 80,15 persen serta klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 81,75 masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, apabila dilihat dari jumlah kasus kekerasan, upaya perlindungan anak di Provinsi Jawa Barat juga belum optimal, yang ditunjukkan dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 2.473 kasus di tahun 2023 (berdasarkan data SIMFONI-PPA, KEMENPPPA).

Belum optimalnya kualitas keluarga. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mencapai 70,18 persen, berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 73,43 persen. Namun pembangunan kualitas keluarga di Jawa Barat belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan capaian pada dimensi-dimensi pembangunannya yang masih perlu ditingkatkan diantaranya Dimensi Kesejahteraan yang salah satunya

diwakili oleh indikator Persentase Rumah Tangga Yang Tidak Ada Saat Di Mana Anda/ART Lainnya Tidak Dapat Menyantap Makanan Sehat Dan Bergizi Karena Kurangnya Uang Atau Sumber Daya Lainnya mencapai 90,84 persen di tahun 2022, berada dibawah capaian nasional yaitu 91,12 persen. Pada Dimensi Ketahanan yang salah satunya diwakili oleh indikator Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya) mencapai 53,54 persen, juga berada dibawah capaian nasional yaitu 58,43 persen. Sedangkan pada Dimensi Partisipasi, salah satunya diwakili oleh indikator Ikut Kegiatan Sosial dengan capaian 0,412 poin. Capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, sehingga diperlukan suatu upaya yang dapat mengintervensi peningkatan dimensi-dimensi pembangun kualitas keluarga.

Kondisi lingkungan yang belum mendukung derajat kesehatan.

Kesehatan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam segi kesehatan, akses penduduk terhadap air minum memenuhi syarat dan akses penduduk terhadap fasilitas sanitasi layak masih menjadi permasalahan karena capaiannya yang masih rendah. Pada Tahun 2023 hasil pemeriksaan sampel sarana air minum di Provinsi Jawa Barat dari 44.301 sarana air minum yang diperiksa hanya sekitar 55,62 persen sarana yang memenuhi syarat baik dari segi fisik, bakteriologis, maupun kimia. Selanjutnya, akses penduduk terhadap fasilitas sanitasi layak juga masih rendah, dimana sanitasi ini adalah faktor kunci dalam mendukung kesehatan manusia. Pada tahun 2023, tingkat keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak yaitu sebesar 84,9 persen sedangkan jika dilihat dari keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman (jamban sehat) capaiannya lebih rendah lagi yaitu sebesar 18,19 persen. Hal tersebut masih harus menjadi perhatian karena kesehatan lingkungan ini merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mendukung upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan.

3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Ekonomi

Permasalahan daya saing ekonomi di Jawa Barat sebagaimana pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5
Permasalahan Daya Saing Ekonomi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal antara lain dicirikan dengan tingginya ketergantungan pada sektor industri pengolahan (kontribusi pada tahun 2023 mencapai 42,88 persen) dan penyebaran investasi yang masih terkonsentrasi di Wilayah Bekasi, Karawang, Bogor serta Bandung dan sekitarnya, Sektor industri pengolahan juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor sehingga rentan terhadap adanya gangguan rantai pasok global. Sekitar 70 persen dari impor yang masuk ke Jawa Barat merupakan bahan baku, bahan penolong serta komponen yang digunakan oleh industri pengolahan.

Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian masih belum sebanding dengan potensinya. Dengan rata-rata pertambahan angkatan kerja Provinsi Jawa Barat mencapai 400 ribu per tahun, upaya penciptaan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan memerlukan sumber daya investasi yang besar. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan masih belum menjangkau keseluruhan angkatan kerja. Selain faktor pendidikan, masih rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat antara lain disebabkan oleh kapasitas teknologi dalam menghasilkan nilai tambah masih terbatas. Berbagai sektor perekonomian masih belum dikembangkan optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Sektor-sektor tersebut antara lain meliputi pariwisata, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan skala kecil (IKM/UMKM).

Kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kapasitas usaha, termasuk didalamnya kapasitas teknologi dan akses pembiayaan IKM dan UMKM terbatas, *enabling environment* dalam penciptaan wirausaha baru dan *start up*, maupun peningkatan skala usaha belum optimal, pembangunan pemuda di sektor ekonomi masih rendah, daya saing produk masih rendah, serta kelincahan UMKM dan keberlanjutannya masih kurang dikarenakan ketidakmampuan untuk memahami teknologi.

Tingginya investasi belum diikuti oleh percepatan peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi investasi dan pemerataanya perlu ditingkatkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian Selatan. Kontribusi realisasi investasi tertinggi secara nasional masih belum dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara optimal dikarenakan semakin bersifat padat modal. Dari penyerapan angkatan kerja tahun 2022 sebesar 1,1 juta orang (Agustus 2022), sebanyak 183 ribu orang disumbang dari realisasi investasi PMA dan PMDN. Dalam jangka panjang, seiring dengan perkembangan teknologi di sektor industri yang menuju padat modal maka kapasitas penyerapan tenaga kerja manufaktur akan semakin menurun dikarenakan otomasi dan penggunaan AI dalam proses produksinya. Selanjutnya percepatan peningkatan pendapatan masyarakat membutuhkan investasi yang lebih besar serta SDM yang lebih berkualitas. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan konsumsi yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi barang dan jasa di berbagai sektor perekonomian.

Kinerja ekosistem ekonomi digital masih belum optimal. Di tengah era digitalisasi ekonomi yang telah terakselerasi oleh Pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan sektor lapangan usaha Informatika dan Komunikasi dengan rata-rata pertumbuhan 6-7 persen, sebanyak 73 persen UMKM masih belum terdigitalisasi yang disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur digital serta terbatasnya literasi digital dari pelaku UMKM. Sementara dari aspek transaksi keuangan digital, pertumbuhan nilai transaksi yang meningkat tajam di tahun 2020 kembali kepada nilai rata-ratanya mulai awal tahun 2022.

B. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Permasalahan daya saing sumber daya manusia di Jawa Barat sebagaimana pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6
Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Masih adanya disparitas kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan capaian IPM yang relatif rendah, tingkat pendidikan relatif rendah, dan derajat kesehatan masyarakat tidak merata.

Masih rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya anak tidak sekolah. Jumlah penduduk terbesar secara nasional namun belum sebanding dengan kualitas sumberdaya. Hal ini dapat dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat, SMP/Sederajat, hingga SMA/Sederajat. Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat mayoritas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan masing-masing capaian 94,89 persen, 79,64 persen dan 69,63 persen. Sedangkan angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun sebesar 0,53 persen, usia 13-15 tahun sebesar 8,53 persen dan usia 16-18 tahun 27,16 persen. Angka tersebut masih diatas rata-rata nasional. Permasalahan pendidikan selanjutnya yaitu kurikulum yang belum mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja global serta belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Keterkaitan yang lemah (*link and match*) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja. Lemahnya keterkaitan (*link and match*) antara lulusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimana berdasarkan data hasil sakernas BPS pada bulan Agustus tahun 2023

sebanyak 13,42 persen dari pengangguran merupakan lulusan jenjang SMK. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurikulum pendidikan serta sarana dan prasarana belajar mengajar SMK yang belum adaptif dengan perubahan lanskap pasar kerja sehingga lulusannya tidak dapat diserap oleh Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA).

Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kemampuan literasi digital yaitu masih rendahnya kemampuan digital *skill* masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta masih rendahnya kemampuan masyarakat melindungi data pribadi dan keamanan digital. Pada tahun 2022 capaian pilar *digital safety* dan *digital skill* merupakan pilar dengan capaian terendah terhadap indeks literasi digital Provinsi Jawa Barat dimana pilar *digital safety* menyumbang sebesar 3,32 poin dan pilar *digital skill* sebesar 3,52 poin.

Kurangnya SDM yang kompeten yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keterserapan tenaga kerja penduduk dilihat dari kualifikasi pendidikan di Provinsi Jawa Barat masih rendah. Pada tahun 2023 penduduk bekerja berdasarkan kualifikasi pendidikan, masih didominasi tenaga kerja yang berpendidikan SD kebawah yaitu sebanyak 40,52 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 10,63 persen. Selain disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, kurangnya SDM yang kompeten juga disebabkan oleh keterbatasan keberadaan BLK yang tersertifikasi, baik dari aspek sarana prasarana maupun tenaga pelatih yang kompeten, serta belum berkembangnya pusat pendidikan dan inovasi.

C. Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur di Jawa Barat sebagaimana pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7
Permasalahan Daya Saing Infrastruktur Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Pemerataan dan kualitas infrastruktur belum optimal. Dalam mengimbangi peningkatan kebutuhan layanan masyarakat dan perkembangan perkotaan berkelanjutan. Tingkat konektivitas pada tahun 2023 baru mencapai 53,62 persen, hal ini disebabkan masih belum selarasnya pembangunan infrastruktur dengan perkembangan kegiatan ekonomi. Adapun salah satu komponen pembentuk infrastruktur konektivitas adalah sebaran dari *hub-hub* penghubung yang menjadi titik simpul transportasi masih belum terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi, selain itu sarana transportasi *massal* masih belum merata di wilayah Provinsi Jawa Barat. Transportasi perkotaan masih belum terintegrasi dengan seluruh moda yang ada, sehingga menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum masih kecil. Paradigma masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum juga belum berubah, yaitu masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum. Selain masalah infrastruktur konektivitas pada wilayah perkotaan, infrastruktur konektivitas wilayah antar pusat kegiatan khususnya di bagian selatan Provinsi Jawa Barat masih terbatas dikarenakan kondisi geografis yang berbukit serta rawan bencana gerakan tanah. Dari aspek infrastruktur sumber daya air, kinerja layanan jaringan irigasi belum sepenuhnya menopang peningkatan produktivitas pertanian. Jaringan irigasi (kewenangan provinsi) dengan status dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 48,89 persen di tahun 2019 menjadi 30,12 persen di tahun 2022. Kondisi ini berdampak pada penurunan intensitas tanam dan produktivitas pertanian. Beberapa faktor penyebabnya antara lain intensitas

kejadian bencana alam yang tidak diimbangi dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi, umur bangunan jaringan irigasi yang telah melewati umur konstruksi, serta alih fungsi lahan.

Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman belum menjangkau keseluruhan masyarakat. Kondisi infrastruktur perumahan berdasarkan dokumen teknokratik RP3KP Provinsi Jawa Barat (*update* tahun 2023) menunjukkan data masih tingginya angka *backlog* penghunian sebesar 2.164.421 pada jumlah KK sebesar 14.708.781 (rasio *backlog*/KK sebesar 14,72%), banyaknya rumah tidak layak huni sebesar 800.068 unit dan terdapat 619 kawasan permukiman kumuh dengan total luasan sebesar 4.474,79 Ha, serta minimnya ketersediaan lahan di perkotaan untuk pengembangan perumahan. Hingga tahun 2023, kinerja penyelenggaraan perumahan yakni akses rumah tangga hunian layak baru mencapai angka 54,17 persen. Adapun kondisi infrastruktur dasar permukiman ditunjukkan dengan masih adanya praktik BABS, rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan air limbah domestik, dan belum maksimalnya penyelenggaraan SPAM serta belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang terpadu. Hingga tahun 2023, kinerja penyelenggaraan infrastruktur permukiman yakni akses sanitasi layak baru mencapai 74,88 persen, akses air minum layak sudah mencapai 93,86 persen dan akses penanganan sampah di perkotaan baru mencapai 74,64 persen. Kesemuanya memberikan gambaran kompleksnya permasalahan perumahan dan permukiman yang perlu ditangani.

Tingginya ketergantungan sumber pembangkitan listrik berbahan batubara dan bahan bakar fosil. Dari total konsumsi energi, baik dari sisi pembangkit listrik maupun konsumsi energi non-pembangkit listrik, di Provinsi Jawa Barat sebesar 35,18 MTOE (2023), sekitar 75,15 persen di antaranya masih ditopang oleh sumber energi primer fosil, seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tersebut berdampak pada peningkatan emisi gas CO₂ sehingga dalam kerangka implementasi kebijakan NZE diperlukan penerapan Mekanisme Transisi Energi (ETM) secara bertahap. Implementasi transisi energi dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan rendah emisi termasuk *co-firing* batubara dengan biomassa, konservasi dan efisiensi energi,

penggunaan teknologi dekarbonisasi seperti *Carbon Capture Storage*, dan introduksi energi baru seperti hidrogen dan/atau nuklir.

Infrastruktur digital belum merata. Disrupsi digital memiliki perkembangan yang sangat pesat dan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar memiliki potensi untuk meningkatkan potensi ekonomi digital melalui penetrasi internet di masyarakat. Berdasarkan Indeks Daya Saing Digital tahun 2024, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-2 dalam 5 (lima) tahun terakhir dibawah DKI Jakarta. Permasalahan dalam pencapaian indeks daya saing digital Provinsi Jawa Barat yaitu perkembangan penggunaan digitalisasi belum optimal dalam meningkatkan perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas serta ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sub indeks *output* memiliki capaian paling rendah dalam menunjang Indeks Daya Saing Digital di Provinsi Jawa Barat. Pada dimensi *output*, pilar kewirausahaan dan produktivitas menyumbang skor paling besar yaitu 63,2 persen, sedangkan skor pilar paling kecil yaitu perekonomian sebesar 37,3 persen. Permasalahan dalam proses digitalisasi di Provinsi Jawa Barat selanjutnya sampai dengan tahun 2024 masih terdapat Desa *Blank Spot* sebesar 27 desa, dimana desa tersebut belum memiliki akses jaringan internet.

D. Daya Saing Iklim Investasi

Permasalahan daya saing iklim investasi di Jawa Barat sebagaimana pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8
Permasalahan Daya Saing Iklim Investasi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Regulasi terkait insentif investasi masih terbatas. Regulasi terkait insentif kemudahan investasi masih terbatas pada ketentuan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada level pemerintahan, insentif terhadap kemudahan investasi PMA maupun PMDN seperti insentif

pajak dan retribusi daerah, dan subsidi bunga kredit modal kerja masih terbatas dalam penyelenggaraan investasi dan penanaman modal daerah. Model-model inisiatif yang telah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten dalam menyediakan skema insentif kredit modal kerja perlu diperluas skala implementasinya.

Belum optimalnya kepastian ruang untuk investasi. Investasi membutuhkan alokasi ruang dan infrastruktur pendukung yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah dalam rangka memberikan kepastian berusaha, serta efisiensi dalam penyediaan infrastruktur wilayah. Alokasi ruang untuk investasi belum sepenuhnya diimbangi dengan layanan infrastruktur pendukung sehingga mengurangi daya saing investasi wilayah.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan aspek pelayanan umum di Jawa Barat sebagaimana pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9
Permasalahan Pelayanan Umum Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas. Dalam mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia, integritas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi unsur penting pada tata kelola pemerintahan. Permasalahan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas di Provinsi Jawa Barat yaitu pembangunan integritas penyelenggaraan pemerintahan belum optimal, sistem tata kelola pemerintahan yang belum terpadu, sistem meritokrasi yang belum merata, sistem akuntabilitas

pemerintahan daerah belum terpadu antara provinsi dengan kabupaten dan kota, sehingga kinerja pelayanan publik belum optimal.

Birokrasi yang belum adaptif dan responsif terhadap perubahan, dinamika global, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Kapasitas birokrasi di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan yang kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan serta menghadapi disrupsi global. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki penduduk lebih banyak, sehingga diperlukan peningkatan jangkauan pelayanan untuk percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan dalam birokrasi selanjutnya yang dihadapi yaitu belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta serta akademisi baik dalam dan luar negeri.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum optimal. Di tengah dinamika mobilitas, permasalahan dan kebutuhan penduduk yang semakin kompleks, digitalisasi menjadi solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, adaptif, transparan, dan akuntabel. Permasalahan Provinsi Jawa Barat dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu belum optimalnya pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi digital serta belum terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, pengembangan inovasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik masih perlu peningkatan kolaborasi antara sektor pemerintah, sektor swasta serta akademis baik dalam dan luar negeri.

Belum optimalnya penyelenggaraan penguatan sistem inovasi daerah. Budaya inovasi dapat ditanamkan melalui pengenalan hal-hal baru, pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya seperti gagasan, metode, atau alat. Tantangan kedepan adalah menghadirkan SDM birokrasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sistem inovasi di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal dimana diperlukan peningkatan difusi pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang lebih cepat kepada masyarakat baik secara aktor-aktor inovasi maupun dari sisi keterkaitannya dengan permasalahan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan teknologi dan informasi masih diperankan oleh sektor swasta dan bisnis melalui pengembangan *Research&Development*, sementara inovasi untuk sektor layanan publik dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian relatif masih sangat terbatas. Dalam pengembangan inovasi daerah masih diperlukan kolaborasi yang intensif untuk memperkuat sistem inovasi yang melibatkan institusi riset dan pengembangan dari unsur pemerintah, akademisi dan sektor swasta.

3.2 ISU SESUAI KONTEKS

3.2.1 Isu Global

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario *intermediate*, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO) dalam *State of The Climate* 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat

melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

Gambar 3.10
Isu Global



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua per tiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dimana 95 persen penambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade kedepan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya

harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Kedepan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

Urbanisasi dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2023), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 8,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

3.2.2 Isu Nasional

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor-ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja

perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini.

Gambar 3.11
Isu Nasional



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio

ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya.

Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional.

Kedepannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi.

Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan

terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3.2.3 Isu Regional Jawa Bali

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi **pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif**. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.

Gambar 3.12
Isu Regional



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya.

Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, **daya saing SDM** secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap **perubahan tatanan sosial budaya** yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat.

Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi kedepannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu.

Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk kedepannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat.

Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan **tata kelola pemerintahan** yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk

Provinsi Jawa Barat yang ke depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi.

3.2.4 Isu Berdasarkan *West Java Development Forum (WJDF)*

A. Fokus Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Isu layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, mencakup: akses layanan kesehatan bersama; tuntas wajib belajar sampai dengan SMA; *stunting*; pemenuhan layanan pendidikan masyarakat; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama; pemenuhan akses layanan dasar yang berkualitas (kesehatan, pendidikan); dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung bonus demografi.

Adapun isu perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mencakup: kemiskinan dan rumah tidak layak huni; penanganan kemiskinan melalui ekonomi keluarga; sistem informasi PPKS; perlindungan masyarakat miskin secara tepat sasaran; pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama wilayah perbatasan; pemberdayaan masyarakat miskin petani dan nelayan; layanan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan; dan skenario mitigasi bertambahnya penduduk miskin.

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah, mencakup: pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal; pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal; ketimpangan akses sosial dan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif; kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat; pemerataan kualitas hidup berbasis teknologi; dan skenario mitigasi melebarnya tingkat ketimpangan.

Isu penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja, mencakup: ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja lokal; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; optimalisasi

kuantitas dan kualitas BLK; pencetakan wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; *digital skill* kepada tenaga kerja pemuda; kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; SDM tenaga kerja yang kompeten; dan perluasan kesempatan kerja untuk semua kalangan.

Isu kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan), mencakup: konflik antar nelayan dalam pemanfaatan ruang laut; pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap bersama pada batas wilayah laut 12 mil; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; dan pemanfaatan bersama pelabuhan perikanan.

Sedangkan isu sistem pangan yang berkelanjutan, meliputi: produktivitas pertanian dan perikanan; adaptasi varietas pertanian berketahanan iklim; sistem pangan berkelanjutan; kelancaran distribusi ternak wilayah perbatasan; belum optimalnya penerapan pola konsumsi pangan yang berkelanjutan; pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang berkelanjutan; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; ketersediaan pangan berkelanjutan; ketersediaan dan akses pangan; dan optimalisasi *logistic global value chain* dan *blue economy*.

B. Fokus Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Isu infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana, meliputi: aglomerasi perkotaan di Bodebekpunjur, Rebana, dan Cekungan Bandung sebagai *engine of growth*; infrastruktur persampahan berkelanjutan dan sistem transportasi yang efisien; penyediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air, air bersih, limbah, jalan, sampah yang merata; penyediaan dan layanan sistem transportasi; konektivitas antar pusat kegiatan; persampahan serta rantai pasok pangan yang efisien; infrastruktur berkelas dunia; keselamatan pelayaran ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) lintas provinsi; infrastruktur wilayah dan logistik terintegrasi (kereta, sistem logistik pelabuhan dan bandara, air bersih, transportasi darat); infrastruktur perbatasan terintegrasi, handal dan adaptif bencana (jalan, sampah, air

bersih, pelabuhan kereta, air limbah); dan peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung perekonomian.

Untuk isu infrastruktur digital yang merata dan berkualitas, mencakup: pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam ekonomi digital; kesiapan transformasi digital yang berkelanjutan; keterjangkauan akses digital yang merata; dan penggunaan teknologi digital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu transformasi energi fosil ke energi baru terbarukan, mencakup pengembangan EBT untuk mendukung *green economy* dan transisi energi.

Sementara, isu infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mencakup: penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan; penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, ketersediaan air baku dan air bersih yang berkualitas dan kontinyu; serta penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan.

C. Fokus Peningkatan Produktivitas Daerah

Isu produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian, mencakup: Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan; optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi; pengembangan IKM dan UKM; optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata dan ekraf; peningkatan investasi dan promosi investasi industri; peningkatan produktivitas tenaga kerja industri; pengembangan pariwisata kelas dunia; kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas; Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas; *link and match* antara industri dan sektor hulu; dan mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional.

Adapun isu UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, mencakup: peran pemuda dalam kewirausahaan; peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; optimalisasi pertumbuhan *startup*; pemberdayaan UMKM dan *startup*; penguatan IKM dan UMKM; pemberdayaan UMKM dan koperasi; peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri); pelatihan dan pemasaran digital produk

UMKM; integrasi pengembangan ekraf; pemberdayaan UMKM dan koperasi wilayah perbatasan; kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM; dan komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis.

D. Fokus Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan

Isu pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, mencakup: pendidikan usia dini berbasis lingkungan hidup; peningkatan kualitas pendidikan pada usia dini (0-5 tahun); pemajuan kebudayaan; pengelolaan SDM yang terintegrasi (publik, swasta, dan masyarakat); penguatan kurikulum adaptif berbasis TIK; pengembangan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); pelestarian masyarakat adat dan cagar budaya; optimalisasi kompetensi tenaga kerja; pendidikan vokasi; keselarasan subsidi pendidikan; akses pendidikan lintas batas wilayah perbatasan; pemajuan kebudayaan daerah; dan peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Adapun isu kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan, meliputi: pemberdayaan masyarakat yang inklusif; pembangunan yang merata dan inklusif; dan inklusivitas dalam pembangunan bagi semua kalangan. Adapun isu ketersediaan infrastruktur digital meliputi: peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital; peningkatan kemampuan SDM digital (*digital skill*); akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi melalui peningkatan literasi digital; transformasi digital; dan *digital divide*/kesenjangan untuk mengakses teknologi digital.

E. Fokus Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

Isu pembangunan keluarga yang berkualitas, mencakup: sistem informasi PPKS; Jabar sebagai provinsi yang memperhatikan lansia; meminimalisir *gangster*; dan *awareness* terhadap kesehatan mental. Adapun isu pemajuan kebudayaan, mencakup: aspek regulasi muatan lokal kebudayaan daerah; platform kebudayaan; dan penanaman nilai agama dan budaya bangsa.

F. Fokus Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan, meliputi: penanganan kualitas lingkungan terintegrasi; alih fungsi lahan; peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup; kerusakan pesisir pantai; pengelolaan sampah; Banjir Rob Pantai Utara akibat perubahan iklim; alih fungsi lahan; ekonomi berkelanjutan berbasis industri hijau; pemenuhan kawasan lindung; pengelolaan limbah; RTH dan imbal jasa ekologis; pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan; ekonomi hijau berbasis digital; dan dampak pengembangan industri manufaktur terhadap lingkungan.

Adapun isu mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, meliputi: mitigasi tsunami pada zona *megathrust* pantai selatan; penanganan bencana yang belum optimal karena terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat; mitigasi bencana dan perubahan iklim; timbulnya abrasi di pesisir laut yang menyebabkan luas daratan berkurang; dan perlindungan sosial adaptif.

G. Fokus Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu tata kelola pemerintahan kolaboratif, meliputi: kelembagaan kerjasama antar daerah; struktur organisasi yang efektif; kolaborasi *pentahelix* dalam penanganan berbagai masalah infrastruktur dasar; tata kelola pemerintahan yang inklusif; *environmental leadership*; dan perbaikan regulasi dalam semua aspek birokrasi.

Adapun isu pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik, meliputi: pelayanan adaptif dan terintegrasi pada kawasan *greater metro*; pemanfaatan citra digital dalam pendataan kendaraan bermotor; optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam pelayanan publik; digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dan kemudahan izin berusaha dan investasi.

Sementara isi sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan, meliputi: kawasan perbatasan yang berdaya saing; penyediaan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien; transformasi digital; pencarian alternatif sumber pendanaan yang lain belum optimal; pemimpin 4.0 yang adaptif dan responsif; insentif dan disinsentif dalam pengelolaan

sampah; pembangunan inklusif yang berkelanjutan; pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan; dan Peningkatan partisipasi pada forum-forum inovasi IPTEK dan sains.

3.3 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT

Isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam WJDF, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan regional Jawa Bali.

Gambar 3.13
Perumusan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

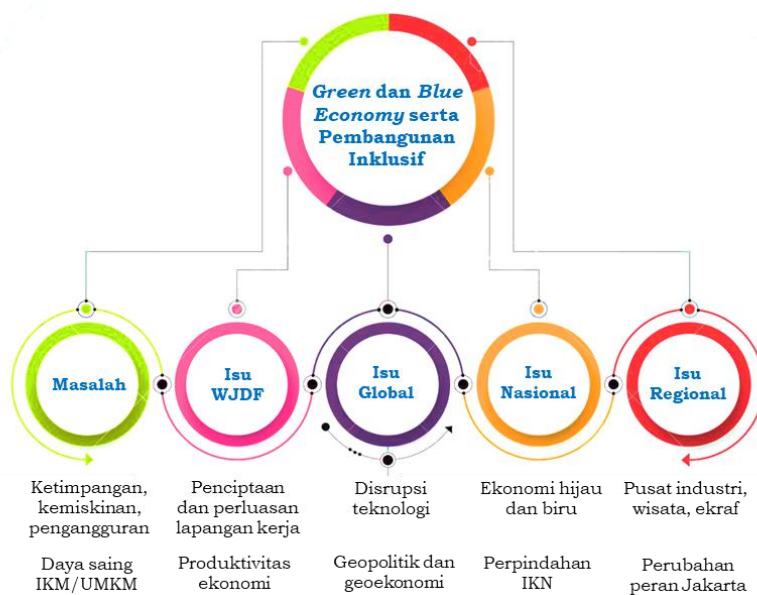
1 Green dan blue economy serta pembangunan inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta

mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik, antarindividu, antarkelompok dan antarwilayah.

Rumusan isu *green dan blue economy* serta pembangunan inklusif sebagaimana pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14
Isu Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

2 Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

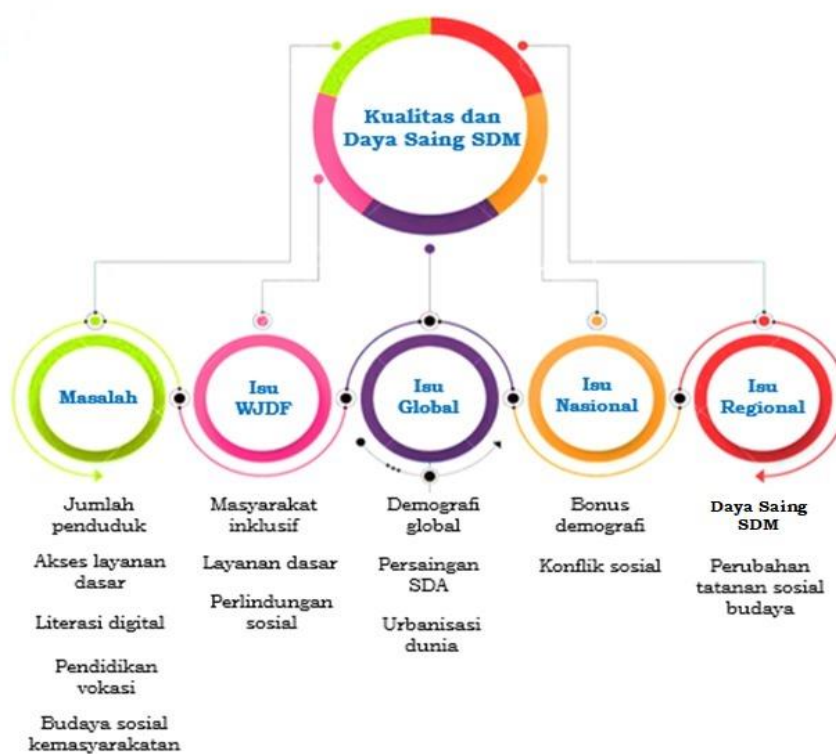
Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, karakter sosial budaya dan produktivitas. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki

peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan.

Rumusan isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagaimana pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15
Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

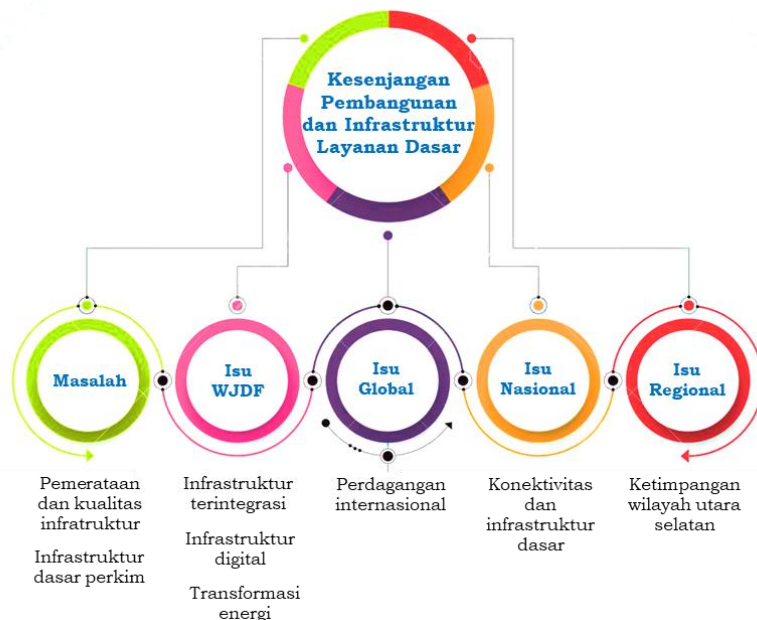
3 Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam tingkat kemajuan, atau perkembangan antara daerah, kelompok masyarakat, atau individu yang berbeda, dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan, akses, dan kualitas layanan dasar.

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Rumusan isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar sebagaimana pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16
Isu Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi.

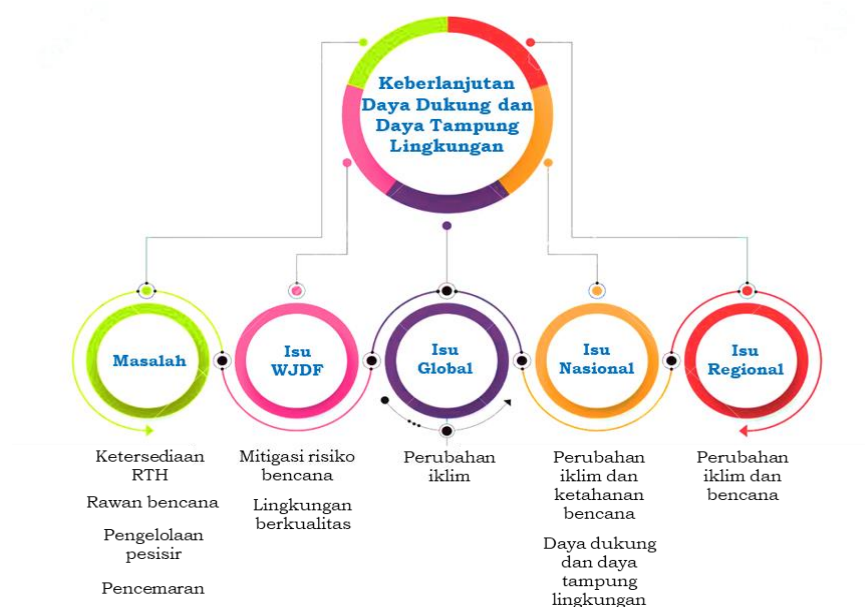
4 Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas lingkungan dan degradasi atau kerusakan yang tidak dapat pulih, untuk memastikan bahwa aktivitas manusia menggunakan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, tidak melebihi kapasitas

alam dalam menggunakan sumber daya serta tidak menghasilkan limbah (*economy circular*). Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

Rumusan isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17
Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

5 Keberlanjutan Penataan Ruang

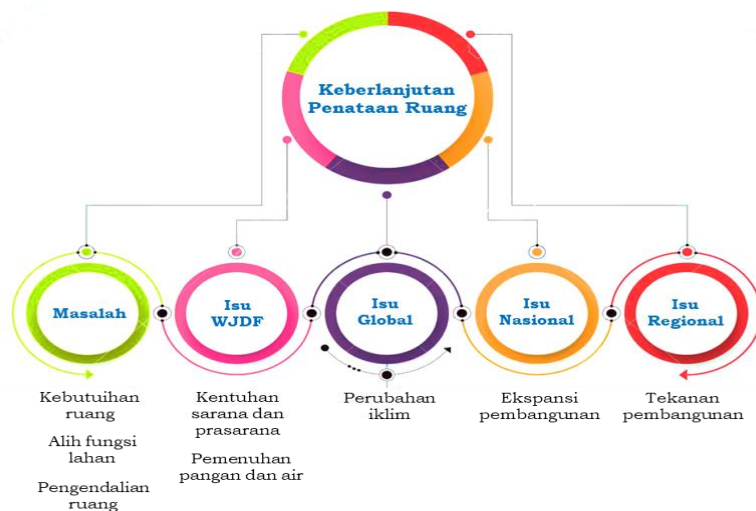
Keberlanjutan penataan ruang merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan yang seimbang antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik.

Keberlanjutan penataan ruang menjadi krusial karena pertumbuhan populasi dan perkotaan yang pesat mengakibatkan tekanan besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip

keberlanjutan ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang, dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, energi, dan pangan.

Rumusan isu keberlanjutan penataan ruang sebagaimana pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18
Isu Keberlanjutan Penataan Ruang



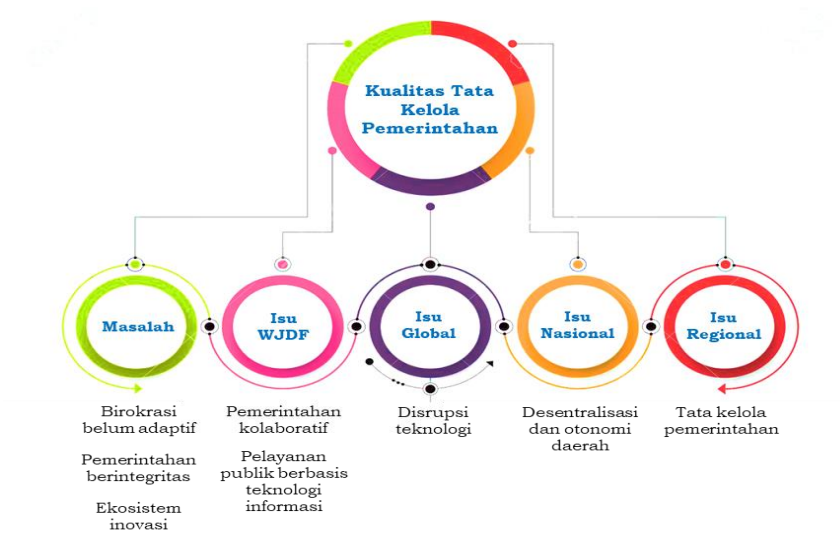
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

6 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan responsif. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Rumusan isu kualitas tata kelola pemerintahan sebagaimana pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19
Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Berikut tabel sandingan rumusan permasalahan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Tabel 3.1
Sandingan Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				
	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Jawa-Bali	Isu WJDF	Isu Strategis
Aspek Geografi dan Demografi					
Geografi 1. Relatif masih tingginya risiko bencana dan rawan bencana 2. Masih tingginya emisi gas rumah kaca 3. Kualitas lingkungan hidup relatif rendah 4. Luas kawasan yang berfungsi lindung masih rendah 5. Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6. Sistem pangan masih rentan terhadap perubahan faktor internal dan eksternal 7. Belum optimalnya pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap dalam batas wilayah laut 12 mil 8. Belum optimalnya pengembangan ekowisata terintegrasi 9. Tingginya ketergantungan pembangkit listrik terhadap konsumsi bahan bakar fosil ditengah pencapaian Target Net Zero Emission (NZE).	Perubahan iklim Geopolitik dan geoekonomi	Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana	Perubahan iklim dan bencana alam	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Demografi 1. Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi 2. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah 3. Kompetensi angkatan kerja dan penduduk usia tua 4. Tingkat urbanisasi yang masih tinggi	Demografi global Urbanisasi dunia	Bonus demografi Indonesia			Keberlanjutan Penataan Ruang
Aspek Kesejahteraan Masyarakat					

Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				
	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Jawa-Bali	Isu WJDF	Isu Strategis
Aspek Kesejahteraan Ekonomi 1. Daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi barang dan jasa 2. Angka kemiskinan absolut di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan 3. Tingkat pengangguran masih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antar wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok masyarakat 5. Masih terdapat ketimpangan akses dalam pemerataan pembangunan ekonomi 6. Kesejahteraan petani dan nelayan perlu didukung dengan pengembangan rantai nilai tambah (add value chain) berbasis pertanian dan perikanan		Ekonomi hijau dan ekonomi biru	Ketimpangan wilayah utara-selatan	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Peningkatan Produktivitas Daerah	Green dan blue economy serta pembangunan inklusif
Aspek Daya Saing Ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas 2. Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian masih belum sebanding dengan potensinya 3. Kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas 4. Tingginya investasi belum diikuti oleh percepatan peningkatan pendapatan masyarakat 5. Kinerja ekosistem ekonomi digital masih belum optimal	Perdagangan internasional		Pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Perubahan peran Jakarta sebagai kota global		



Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				
	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Jawa-Bali	Isu WJDF	Isu Strategis
Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya 1. Akses layanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang masih belum inklusif 2. Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan dan nilai agama 3. Peran pemuda dalam pembangunan yang belum optimal 4. Ketimpangan gender masih tinggi dan masih rendahnya perlindungan perempuan 5. Perlindungan anak yang belum optimal 6. Belum optimalnya kualitas keluarga 7. Kondisi lingkungan yang belum mendukung derajat kesehatan			Perubahan tatanan sosial budaya	Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju	
Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia 1. Masih adanya disparitas kualitas sumber daya manusia 2. Masih rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya anak tidak sekolah 3. Keterkaitan yang lemah (link and match) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja 4. Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM 5. Kurangnya SDM yang kompeten yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Disrupsi teknologi		Daya saing SDM	Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia



Permasalahan	Isu Sesuai Konteks				Isu Strategis
	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional Jawa-Bali	Isu WJDF	
Aspek Daya Saing Infrastruktur 1. Pemerataan dan kualitas infrastruktur belum optimal 2. Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman belum menjangkau keseluruhan masyarakat 3. Tingginya ketergantungan sumber pembangkitan listrik berbahan batubara dan bahan bakar fosil 4. Infrastruktur digital belum merata		Konektivitas dan infrastruktur dasar		Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar
Aspek Daya Saing iklim Investasi 1. Regulasi terkait insentif investasi masih terbatas 2. Belum optimalnya kepastian ruang untuk investasi					Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Aspek Pelayanan Umum 1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas 2. Birokrasi yang belum adaptif dan responsif terhadap perubahan, dinamika global, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks 3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum optimal 4. Belum optimalnya penyelenggaraan penguatan sistem inovasi daerah		Desentralisasi dan otonomi daerah	Tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024



BAB IV

VISI DAN MISI



BAB IV

VISI DAN MISI

Pada hakikatnya pembangunan merupakan transformasi secara menyeluruh menuju arah yang lebih baik, disengaja, dan menyentuh segala aspek. Melalui transformasi, daerah dalam melaksanakan pembangunan diharapkan untuk dapat meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4.1 VISI

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan Visi, 5 (lima) Sasaran Visi, 8 (delapan) Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan), dan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP), secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada peringatan 100 tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, *megatrend* global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan (lihat Gambar 4.1). Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan *megatrend* global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Gambar 4.1
Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2023 (diolah)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan besar yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak diantara 2 (dua) samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045 yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia. Kekuatan geopolitik Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritimnya secara efektif serta menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Negara Indonesia juga memiliki kekuatan bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah NKRI dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar. Selain

itu, Indonesia perlu mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritim, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisi dalam perdagangan internasional yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan regional dan dunia internasional.

Indonesia dan masyarakatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya bahari, meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan regional dan dunia internasional.

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor 5 (lima) terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

4.1.2 Visi Jawa Barat 2045

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Provinsi Jawa Barat yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua

puluh) tahun kedepan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan, dan isu strategis Provinsi Jawa Barat serta penjabaran visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, Pulau Jawa diarahkan sebagai Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan.

Gambar 4.2
Tema Pembangunan Provinsi di Pulau Jawa



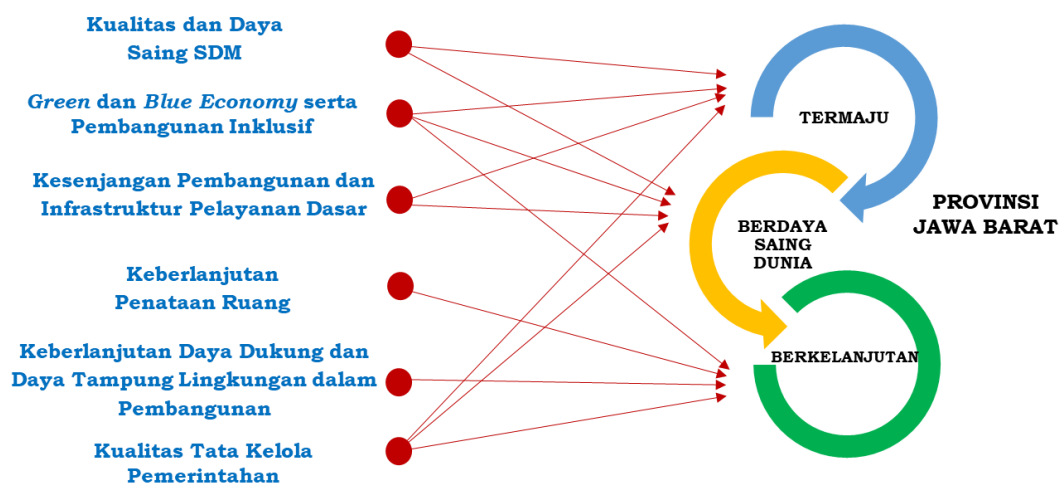
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Secara spesifik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 diarahkan sebagai pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM) bertaraf global serta penumpu ketahanan pangan nasional. Sebagai pusat *cutting-edge industry* harus memiliki pusat industri yang bertaraf global sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung dengan kawasan sains dan teknologi. Sebagai pusat inovasi dan pendidikan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM) bertaraf global harus mengintegrasikan sistem dan standar kualitas pendidikan internasional dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan dan mampu bersaing secara global. Sebagai penumpu ketahanan pangan nasional harus memiliki sistem produksi pertanian, keanekaragaman pangan, keamanan pangan, keamanan lahan dan hak petani, infrastruktur yang maju, kawasan strategis agrikultur, serta kemitraan dan kolaborasi. Ketiga peran tersebut harus didukung infrastruktur yang berkualitas dan modern,

terintegrasi dan handal; sistem pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang maju dengan standar kualitas tinggi; serta pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif.

Visi Jawa Barat dirumuskan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III. Isu strategis kualitas dan daya saing SDM, *green* dan *blue economy* serta pembangunan inklusif, kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar, serta kualitas tata kelola pemerintahan menjadi dasar perumusan visi termaju, berdaya saing dunia, dan berkelanjutan. Isu strategis *green* dan *blue economy* serta pembangunan inklusif, keberlanjutan penataan ruang, keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan, serta kualitas tata kelola pemerintahan menjadi dasar perumusan visi berkelanjutan. Keterkaitan isu strategis dengan visi sebagaimana pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3
Keterkaitan Isu Strategis dan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045



Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan uraian di atas, Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 adalah **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**. Rumusan visi tersebut diharapkan dapat menjadi komitmen, kesepakatan, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 merupakan keberlanjutan dari Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025: “Dengan Iman dan Takwa,

Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Visi Tahun 2005-2025 berorientasi maju lingkup Indonesia, sedangkan Visi Tahun 2025-2045 akan berorientasi pada tingkat dunia.

Gambar 4.4
Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045



Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 yaitu Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan, secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

A Termaju

Termaju merupakan kondisi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 cukup strategis dimana akan menjadi pusat *cutting-edge industry*, pusat STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional. Peran Jawa Barat sebagai pusat *cutting-edge industry* menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, yang didukung dengan infrastruktur berkualitas dan modern dilengkapi dengan kawasan sains dan teknologi yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar, serta mengurangi ketergantungan impor dan energi fosil. Peran sebagai penumpu pangan nasional, mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, ketahanan air, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim, didukung dengan teknologi yang modern.

Kemajuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 termanifestasikan pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah, serta infrastruktur yang berkualitas dan modern. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui kontribusi PDRB sektor industri pengolahan yang secara signifikan dapat meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat diversifikasi ekonomi. Tingkat kemiskinan rendah dapat terwujud melalui pendekatan multi-dimensional yang melibatkan kebijakan terintegrasi, investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi inklusif, serta tanggap bencana dan krisis.

B Berdaya Saing Dunia

Berdaya Saing Dunia diartikan bahwa daya saing dan kepemimpinan daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2045 memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas dan harga produk bersaing, kerja sama luar negeri yang semakin meningkat. Keunggulan kompetitif bidang teknologi dan inovasi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadopsi dan mengelola teknologi lebih efisien, efektif, dan inovatif. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah, Indeks Daya Saing Daerah, dan Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang sumber daya manusia ditunjukkan dengan kualitas SDM yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, kolaboratif, berbudaya, dan mampu bersaing di tingkat dunia, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang infrastruktur ditunjukkan dengan prasarana transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, telekomunikasi yang modern dan terintegrasi, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.

C Berkelanjutan

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 telah mewujudkan pembangunan **berkelanjutan**, yang dicirikan dengan adanya kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, termanifestasi dengan penerapan perilaku ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi (udara, air, suara, dan sampah), menerapkan praktik pertanian organik, dan memanfaatkan energi baru terbarukan, serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya.

Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dimanifestasikan dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta kualitas lingkungan hidup yang tinggi. Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi hijau dan biru dilaksanakan dengan tetap menjaga kelenturan ekosistem (menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), dan mewujudkan ekonomi yang inklusif secara produktif, ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Hijau yang tinggi, menurunnya emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap seluruh aspek layanan sosial ekonomi yang sangat baik serta memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kualitas kehidupan yang tinggi.

Berkelanjutan dimaknai pula dengan adanya kesinambungan pelaksanaan pembangunan selama 4 (empat) tahap pembangunan sesuai dengan tema pada masing-masing tahapan untuk mencapai visi Jawa Barat pada tahun 2045.

Pada tahun 2045, Provinsi Jawa Barat memiliki visi untuk menjadi daerah yang TERMAJU, BERDAYA SAING DUNIA, DAN BERKELANJUTAN.

Visi ini merupakan gambaran konkret yang dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang visioner dan inovatif, memiliki tekad dan kerja keras, serta kolaborasi antara akademisi, swasta, masyarakat dan pemerintah. Adapun sasaran visi Jawa Barat, yaitu:

1. Pendapatan per kapita meningkat;
2. Kemiskinan dan ketimpangan menurun;
3. Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Kelima sasaran visi Jawa Barat Tahun 2025-2045 tersebut ditandai dengan beberapa indikator yang sudah selaras dengan sasaran visi RPJP-Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Visi RPJPN Tahun 2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500-5.520	30.300	Pendapatan per kapita meningkat	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,41 - 57,77**	273,17 - 325,25
	b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1**	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19**	186,06
	c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,87 - 42,00**	46,43 - 47,60
Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0**	0,5 - 0,8	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46**	0,09 - 0,59**
	b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,290 - 0,320**		b. Rasio gini (Indeks)	0,383 - 0,390**	0,357 - 0,380
	c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4**	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72**	10,77
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia Internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)*	3,87	5,00
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56**	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72**
Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84
					b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)**	64,06**	72,08**

Sumber: RPJPN 2025-2045, 2024 (diolah)

*indikator proxy

** Indikator/target pemuktahiran

4.2 MISI

4.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045

Berdasarkan dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial; transformasi ekonomi; dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.

Gambar 4.5
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2023 (diolah)

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;

2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, berkaitan dengan misi yang mewujudkan Indonesia Emas 2045 terdapat satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi yaitu Kedaulatan Rakyat.

4.2.2 Misi Pembangunan Jawa Barat 2045

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan diatas, diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi tahun 2045. Rumusan umum dalam bentuk pernyataan misi tersebut untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Karena itu, misi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing

Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing dilakukan untuk membentuk masyarakat Provinsi Jawa Barat yang menggabungkan aspek moralitas dan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Masyarakat Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki karakter, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang tinggi, pendidikan yang berkualitas, mampu berkomunikasi secara global dan memiliki *networking* yang luas serta mutakhir sesuai perkembangan zaman. Upaya untuk

mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perluasan akses dan perbaikan pelayanan kesehatan prima untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, pelatihan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja, dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat.

2 Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Upaya ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi yang lebih memberikan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

3 Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, akuntabel, dan inovatif ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik, memperkuat ekosistem inovasi pemerintahan, meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatkan manajemen ASN yang unggul.

4 Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan dengan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa

Barat. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional.

5 Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan ditujukan untuk membentuk masyarakat inklusif yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, keragaman sosial budaya, kemajuan, dan peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, pengembangan budaya, peningkatan kualitas keluarga dan pemuda, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, air, energi serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

6 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah mencakup pengembangan jalan, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, dan transportasi.

7 Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup pengembangan perumahan, air minum, sanitasi, dan persampahan secara terpadu.

8 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditujukan agar pembangunan per tahapan periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Upaya ini dilakukan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif disertai dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan melaksanakan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Keselarasan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan misi RPJP-Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6
Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Misi RPJPN Tahun 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya menjadi nilai dasar yang melandasi hal itu. Di samping itu, terdapat nilai-nilai lain yang sudah tertanam dalam masyarakat Provinsi Jawa Barat dimana masyarakatnya dikenal lembut, periang, sopan, religius, dan menghormati orang tua.

Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat tampak sebagaimana dalam ungkapan silih asih, silih asah dan silih asuh. Artinya saling mengasihi (mengutamakan sifat welas asih), saling



menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu), dan saling melindungi (saling menjaga keselamatan).

Adanya nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan misi, diharapkan Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan dapat diwujudkan. Dengan demikian, perwujudan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 menjadi bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



BAB V

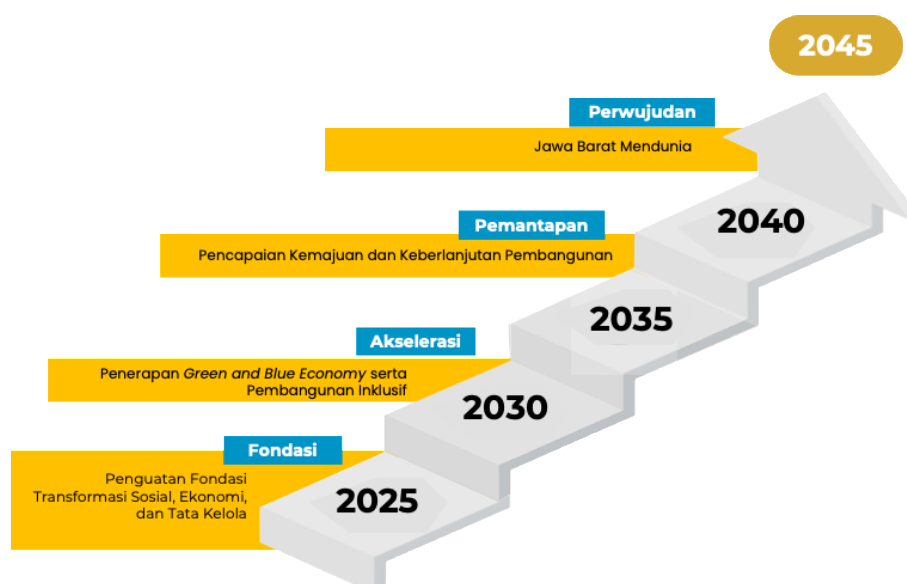
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Dengan mengikuti proses tahapan ini, kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah.

Rumusan tema dan kerangka kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Masing-masing tahap tersebut disajikan pada Gambar 5.1 berikut.

Gambar 5.1
Tema dan Tahap Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

TAHAP PERTAMA**FONDASI**

Tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan kedepan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Mendorong penduduk tumbuh seimbang di setiap wilayah;
2. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif;
3. Penguatan tata kelola sumber daya alam, pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten, serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan Inovatif;
5. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah;
6. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;
8. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
9. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

TAHAP KEDUA**AKSELERASI**

Tahap ini merupakan akselerasi pembangunan yang difokuskan pada aspek atau sektor yang telah berhasil dan aspek atau sektor yang berpotensi pada pencapaian keberhasilan pembangunan sehingga dapat menggerakkan aspek atau sektor lainnya. Upaya akselerasi pembangunan ini, meliputi:

1. Pembangunan sumber daya manusia berakhlak, berkarakter, berkualitas, dan inklusif;
2. Mempercepat pemerataan penduduk disetiap wilayah serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
3. Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa, serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru;

4. Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi;
5. Penguatan implementasi kebijakan tegas dan konkrit untuk mewujudkan provinsi yang aman dan tertib;
6. Penguatan karakter, jati diri, serta toleransi untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan, pemulihan, dan perlindungan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung;
7. Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah;
8. Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana dasar;
9. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

TAHAP KETIGA**PEMANTAPAN/EKSPANSI GLOBAL**

Pemantapan pembangunan merupakan percepatan pembangunan pada semua aspek atau sektor sehingga semakin mendekatkan pada perwujudan Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam pemantapan pembangunan ini, antara lain:

1. Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan;
2. Peningkatan pemerataan penduduk dengan dukungan sarana prasarana layanan dasar;
3. Peningkatan sinergitas sektor investasi dan industri dengan memperkuat peran Jawa Barat dalam jaringan rantai nilai global;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan berkelas dunia yang inovatif;
5. Penguatan kelembagaan dan pranata sosial untuk mewujudkan daerah yang kondusif;
6. Pemajuan karakter dan jati diri bangsa, pengarusutamaan inklusifitas gender, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten;
7. Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur wilayah secara inklusif;
8. Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
9. Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

TAHAP KEEMPAT PERWUJUDAN

Tahap ini merupakan perwujudan Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan dengan tetap melakukan percepatan pembangunan di segala aspek atau sektor. Upaya perwujudan pembangunan ini, meliputi:

1. Perwujudan manusia Jawa Barat yang maju;
2. Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan;
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan berkelas dunia yang berintegritas;
4. Perwujudan stabilitas keamanan daerah yang kondusif serta menjaga stabilitas ekonomi;
5. Perwujudan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas;
6. Perwujudan masyarakat madani yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
7. Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan inklusif;
8. Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas;
9. Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Mengacu kepada Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 20 (dua puluh) tahun kedepan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Jawa Barat untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing

Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing Provinsi Jawa Barat diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.2
Tahapan Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

Tahap I Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Adaptif

Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial meliputi upaya: Pertama, penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Kedua, Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan. Ketiga, Peningkatan penuntasan dan pencegahan stunting; peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima; Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya. Keempat, Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini/*screening*, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Kelima, Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Keenam, Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Ketujuh, Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Kedelapan, Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kesembilan,

Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Kesepuluh, Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Kesebelas, Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal; Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu. Keduabelas, Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Ketigabelas, Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global; Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. Keempatbelas, Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kelimabelas, Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Tahap II**Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkarakter, Berkualitas, dan Inklusif**

Pembangunan sumber daya manusia berakhlak, berkarakter, berkualitas dan inklusif, meliputi: Pertama, Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat yang berlandaskan kesadaran akan perubahan iklim, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Kedua, Penguatan tata kelola

pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan. Ketiga, Percepatan penuntasan dan pencegahan *stunting*; Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima; Penguatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya. Keempat, Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Kelima, Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Keenam, Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Ketujuh, Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Kedelapan, Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan); Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif. Kesembilan, Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Kesepuluh, Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Kesebelas, Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Keduabelas, Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Ketigabelas, Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). Keempatbelas, Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kelimabelas, Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan

ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Tahap III Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan

Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan, meliputi: Pertama, Penguatan sistem sanitasi, sistem air bersih, pelayanan kesehatan dan lingkungan baik secara komunal maupun individual. Kedua, Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Ketiga, Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima; Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita; Pemantapan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya. Keempat, Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; Percepatan eliminasi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit tropis terabaikan; Percepatan eliminasi penyakit menular melalui pemberdayaan masyarakat, imunisasi rutin lengkap, *surveilans*, pengendalian resistensi antibiotik, serta pengendalian penyakit tropis terabaikan dan zoonosis. Kelima, Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Keenam, Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Ketujuh, Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Kedelapan, Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan); Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kesembilan, Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kesepuluh, Penguatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Kesebelas, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, pendidikan bagi warga tidak mampu, dan berkebutuhan khusus dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja; Perluasan dan

peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Keduabelas, Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Ketigabelas, Penguatan pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia. Keempatbelas, Penguatan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif. Kelimabelas, Penguatan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif. Kelimabelas, Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Tahap IV Perwujudan Manusia Jawa Barat yang Maju

Perwujudan manusia Jawa Barat yang maju, melalui: Pertama, Perwujudan lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat. Kedua, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; Perwujudan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif. Ketiga, Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan Prima. Keempat, Perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh Terhadap Penyakit. Kelima, Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Keenam, Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Ketujuh, Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Kedelapan, Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Kesembilan, Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Kesepuluh, Perwujudan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Kesebelas, Perwujudan pendidikan vokasi berkelas dunia, berbasis TIK dengan tingkat kekerjaan tinggi. Keduabelas, Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Ketigabelas, Perwujudan sistem pendidikan tinggi yang berkelas dunia. Keempatbelas, Perwujudan sistem jaminan sosial. Kelimabelas, Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

2. Misi Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

Pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama 20 (dua puluh) tahun kedepan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi, seperti halnya pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta pergeseran geoekonomi dan geopolitik. Untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.3
Tahapan Misi Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

Tahap I	Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam, Pembentukan SDM Tenaga Kerja yang Kompeten, serta Penciptaan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan

Penguatan tatakelola sumber daya alam, pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten, serta penciptaan dan perluasan lapangan kerja meliputi: Pertama, Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi); Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. Kedua, Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketiga, Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk

unggulan, serta pada perlindungan konsumen. Keempat, Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Kelima, Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Keenam, Penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*. Ketujuh, Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Kedelapan, Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global; Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat baik dalam dan luar negeri. Kesembilan, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kesepuluh, Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. Kesebelas, Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi. Keduabelas, Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM. Ketigabelas, Penataan dan restrukturisasi BUMD. Keempatbelas, Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. Kelimabelas, Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon, serta

pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*). Keenambelas, Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. Ketujuhbelas, Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Kedelapanbelas, Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan. Kesembilanbelas, Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. Kedua puluh, Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya; Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan; Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan. Kedua puluh satu, Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). Kedua puluh dua, Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Kedua puluh tiga, Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Tahap II**Peningkatan Produktivitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Barang dan Jasa, serta Perluasan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru**

Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru meliputi: Pertama, Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan

strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri *consumer goods & general manufactures*, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (*aero-industry*), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*). Kedua, Peningkatan kualitas Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ketiga, Perluasan pemasaran produk unggulan pada perdagangan dalam dan luar negeri. Keempat, Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (*atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya; Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha; Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kelima, Peningkatan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi khususnya di Jawa Barat Selatan. Keenam, Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*. Ketujuh, Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Kedelapan, Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah serta penerapan hasil riset dan inovasi dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. Kesembilan, Pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah

Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kesepuluh, Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*; Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan *green job*, pelayanan kesehatan, dan pelatihan tenaga kerja bersertifikat dan perlindungan tenaga kerja. Kesebelas, Peningkatan kualitas tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan PMI, serta perluasan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi, dan Pemberdayaan PMI purna kerja dalam pengembangan SDM angkatan kerja, teknologi dan kewirausahaan daerah. Keduabelas, Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi. Ketigabelas, Peningkatan produktivitas BUMD. Keempatbelas, Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. Kelimabelas, Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau. Keenambelas, Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya untuk percepatan investasi pada sektor ekonomi produktif dan inklusif serta ekonomi biru dan ekonomi hijau. Ketujuhbelas, Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Kedelapanbelas, Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian; Pengembangan *closed loop model* perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan&petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. Kesembilanbelas, Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik. Kedua puluh, Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Kedua puluh satu, Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan. Kedua puluh dua, Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Kedua

puluh tiga, Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui *digital marketplace/ platform*.

Peningkatan produktivitas akan meningkatkan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang sama. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan produktivitas juga akan membuat produk barang dan jasa dari Jawa Barat akan lebih menarik dan lebih kompetitif di pasar global sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan kedua hal tersebut, berbagai upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan potensi sumber-sumber ekonomi di Provinsi Jawa Barat, antara lain: peningkatan produk strategis pertanian, pengembangan industrialisasi pertanian dan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi biru secara berkelanjutan dengan penguatan jaringan distribusi, peningkatan peran sektor industri, pariwisata dan industri jasa lainnya yang bernilai tambah tinggi, dan penumbuhan pusat-pusat inkubasi, pusat ekonomi kreatif, akselerasi investasi dan pemerataan lokasi investasi.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang mampu menciptakan inovasi baru. SDM yang berkualitas dan berinovasi merupakan kunci utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan inovasi melalui program-program penelitian. Menciptakan iklim usaha yang kondusif juga akan akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha dan investasi.

Tahap III Peningkatan Sinergitas Sektor Investasi dan Industri dengan Memperkuat Peran Jawa Barat dalam Jaringan Rantai Nilai Global

Peningkatan sinergitas sektor investasi dan industri dengan memperkuat peran Provinsi Jawa Barat dalam jaringan rantai nilai global meliputi: Pertama, Pemantapan industri pengolahan dan manufaktur bernilai tambah tinggi berbasis klaster dan ramah lingkungan di kawasan

strategis industri serta penguatan ekosistem industri halal; Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Patimban. Kedua, Peningkatan diversifikasi produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang bernilai tambah tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global. Ketiga, Penguatan sistem jejaring perdagangan pada tingkat global. Keempat, Pemantapan daya saing kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan. Kelima, Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Keenam, Pemantapan kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*. Ketujuh, Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. Kedelapan, Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. Kesembilan, Pemantapan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kesepuluh, Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi sumber daya manusia pada usia produktif yang adaptif terhadap perkembangan lansekap pasar kerja domestik dan global. Kesebelas, Pemantapan kualitas tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan PMI berkualifikasi menengah tinggi, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan PMI serta Pemberdayaan PMI purna kerja dalam pengembangan SDM, teknologi dan kewirausahaan daerah. Keduabelas, Pemantapan integrasi ekonomi dan konektivitas global. Ketigabelas, Pemantapan produktivitas dan pengembangan bisnis BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Keempatbelas, Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif. Kelimabelas, Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon. Keenambelas, Optimalisasi kemudahan perizinan akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya untuk percepatan investasi pada sektor ekonomi produktif dan inklusif serta ekonomi biru dan ekonomi hijau. Ketujuhbelas, Pemantapan komoditas

pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Kedelapanbelas, Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian; Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. Kesembilanbelas, Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global. Kedua puluh, Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung), serta kawasan perkotaan Cirebon. Kedua puluh satu, Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). Kedua puluh dua, Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; Pemeliharaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Kedua puluh tiga, Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).

Peningkatan sinergitas sektor investasi dan industri dengan memperkuat peran Provinsi Jawa Barat dalam jaringan rantai nilai global. Pada tahun 2045, Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemasok dan pendistribusi produk industri. Dengan meningkatnya sumber daya industri dan meningkatkan peran industri terhadap perekonomian, Jawa Barat dapat menjadi inti dari rantai pasok global, menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Pada sektor pertanian perlu adanya peningkatan daya saing produk pertanian agar produk pertanian mampu bersaing di pasar dan sesuai dengan permintaan konsumen khususnya di pasar global. Peningkatan peran sektor swasta dalam investasi pengembangan kawasan pertanian sekaligus industrialisasi produk pertanian perlu didorong dalam upaya memperkuat peran Provinsi Jawa Barat dalam jaringan rantai nilai global.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya kelautan yang cukup besar dengan luas perairan laut mencapai 1,6 juta hektar dan garis pantai mencapai 988,48 km, sehingga diperlukan pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Teknologi dan inovasi diharapkan dapat menghadirkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien serta tentunya mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Pengembangan teknologi dan inovasi pada perikanan tangkap menggunakan *smart fishing* yang efisien dan efektif agar dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Selain itu, *smart fishing* dapat memberikan manfaat pada aspek peningkatan keselamatan nelayan. Pada sektor perikanan budidaya didorong pengembangan riset, teknologi, dan inovasi antara lain teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dalam penggunaan *autofeeder* dan pemantauan indikator lingkungan secara *real time*.

Dari sektor pariwisata, diperlukan pengembangan destinasi pariwisata kelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya. Pelaksanaannya dengan menjamin kualitas pembangunan dan kelestarian lingkungan, menciptakan lapangan kerja serta mempromosikan budaya dan produk lokal.

Tahap IV Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan diarahkan pada: Pertama, Perwujudan industri pengolahan dan manufaktur terpadu berbasis inovasi pada kawasan strategis industri, berdaya saing global, ramah lingkungan dan halal. Kedua, Perwujudan transformasi IKM menjadi industri besar yang berdaya saing global. Ketiga, Sistem perdagangan yang andal dan menjadikan Jawa Barat menjadi penopang perdagangan Indonesia sebagai top 5 negara dunia. Keempat, Perwujudan kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan. Kelima, Perwujudan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta berdaya saing menuju ekspansi global. Keenam, Perwujudan kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*. Ketujuh, Perwujudan UMKM yang menjadi bagian dari rantai nilai industri domestik dan global. Kedelapan, Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah yang mendukung DUDI nasional berdaya saing di tataran global. Kesembilan, Perwujudan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya

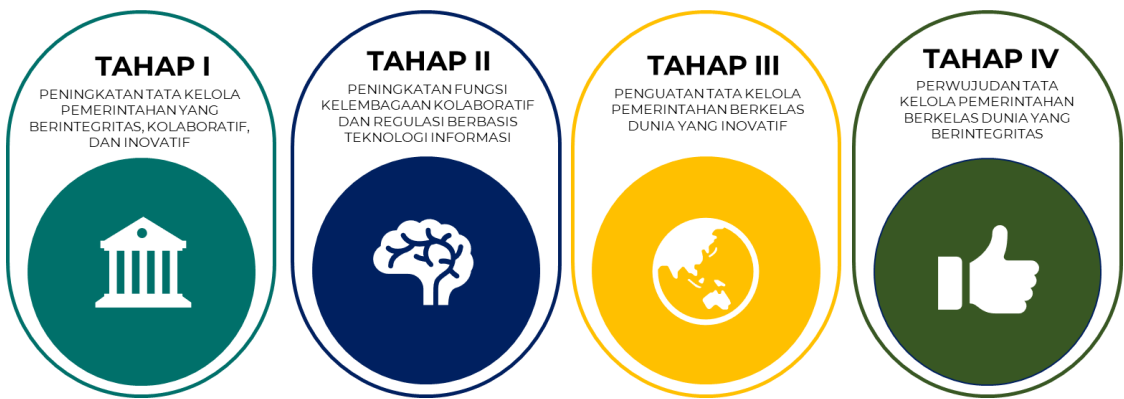
di Jawa Barat Selatan). Kesepuluh, Perwujudan sumber daya manusia pada usia produktif yang berkualitas, berdaya saing serta adaptif terhadap perkembangan lansekap pasar kerja domestik dan global. Kesebelas, Perwujudan PMI yang terlindungi, bermartabat memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, serta purna PMI yang berdaya guna bagi pembangunan daerah. Keduabelas, Jawa Barat sebagai episentrum investasi hijau di Indonesia dan destinasi investasi global. Ketigabelas, Optimalisasi produktivitas dan bisnis BUMD yang berdaya saing nasional. Keempatbelas, Perwujudan kewirausahaan yang berdaya saing. Kelimabelas, Penerapan kebijakan perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*). Keenambelas, Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. Ketujuhbelas, Perwujudan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Kedelapanbelas, Penerapan *closed loop model* pertanian dan perikanan. Kesembilanbelas, Perwujudan penerapan modernisasi koperasi. Kedua puluh, Perwujudan *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan. Kedua puluh satu, Penerapan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi. Kedua puluh dua, Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; Pemeliharaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Kedua puluh tiga, Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim.

Penguatan sistem pangan yang berkelanjutan dan tahan terhadap berbagai guncangan dari faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal; pengembangan sistem industri yang berdaya saing dan berbasis potensi sumber daya lokal didukung oleh pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*) dan *blue energy*; perwujudan sistem perdagangan yang berdaya saing; perwujudan episentrum investasi hijau di Indonesia dan destinasi investasi global.

3. Misi Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel, dan Inovatif

Untuk memperkuat tata kelola yang dinamis, berkualitas, akuntabel, dan berbasis inovasi diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.4
Tahapan Misi Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel, dan Inovatif



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

Tahap I Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Kolaboratif, dan Inovatif

Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil, meliputi: Pertama, Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah; Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. Kedua, Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan. Ketiga, Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Keempat, Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Kelima, Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Tahap II**Peningkatan Fungsi Kelembagaan Kolaboratif dan Regulasi Berbasis Teknologi Informasi**

Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi, meliputi: Pertama, Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi. Kedua, Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Ketiga, Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi. Keempat, Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Kelima, Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Tahap III**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berkelas Dunia yang Inovatif**

Penguatan kelembagaan adaptif, ASN kompetitif dan masyarakat sipil mandiri, meliputi: Pertama, Pemantapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi. Kedua, Pemantapan digitalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik. Ketiga, Pemantapan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan daya saing. Keempat, Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kelima, Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

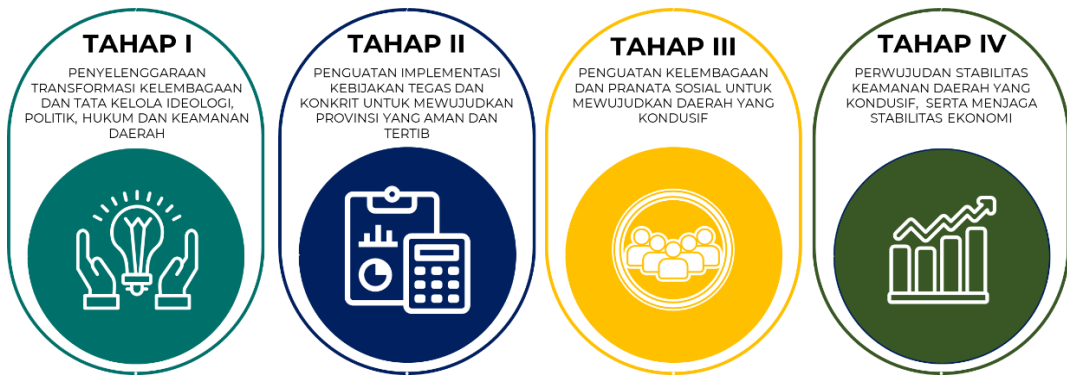
Tahap IV**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berkelas Dunia yang Berintegritas**

Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Berkualitas dan Berintegritas, meliputi: Pertama, Penerapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi. Kedua, Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital. Ketiga, Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah berkelas dunia. Keempat, Perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kelima, Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

4. Misi Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Untuk mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.5
Tahapan Misi Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

Tahap I Penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah

Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah dilaksanakan melalui arah kebijakan: Pertama, Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Kedua, Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Ketiga, Menyenggarakan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah. Keempat, Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kelima, Penguatan pengendalian inflasi daerah. Keenam, Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi

pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*. Ketujuh, Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Tahap II**Penguatan Implementasi Kebijakan Tegas dan Konkrit untuk Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib**

Penguatan implementasi kebijakan yang tegas dan Konkrit untuk mewujudkan provinsi yang aman dan tertib dilakukan melalui arah kebijakan: Pertama, Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Kedua, Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; Penguatan integritas partai politik. Ketiga, Peningkatan kemampuan pertahanan dan pembangunan serta pengembangan industri pertahanan untuk menopang stabilitas ekonomi. Keempat, Percepatan dan pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kelima, Penguatan pengendalian inflasi daerah. Keenam, Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Ketujuh, Percepatan dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Tahap III**Penguatan Kelembagaan dan Pranata Sosial untuk Mewujudkan Daerah yang Kondusif**

Penguatan kelembagaan dan pranata sosial untuk mewujudkan daerah yang kondusif dilakukan melalui arah kebijakan: Pertama, Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Kedua, Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan integritas partai politik. Ketiga, Pemantapan pertahanan dan pembangunan serta pengembangan industri pertahanan untuk menopang stabilitas ekonomi. Keempat, Pemantapan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di

Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kelima, Penguatan pengendalian inflasi daerah. Keenam, Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Ketujuh, Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Tahap IV Perwujudan Stabilitas Keamanan Daerah yang Kondusif Serta Menjaga Stabilitas Ekonomi

Perwujudan stabilitas keamanan daerah yang kondusif serta menjaga stabilitas ekonomi dicapai melalui arah kebijakan: Pertama, Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Kedua, Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat. Ketiga, Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Hukum dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Tujuan Pembangunan Nasional. Keempat, Perwujudan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Kelima, Perwujudan sistem pengendalian inflasi daerah (produksi, distribusi, dan akses pangan). Keenam, Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Ketujuh, Penerapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

5. Misi Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan

Untuk mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:



Gambar 5.6
Tahapan Misi Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

Tahap I Perlindungan Kebudayaan Lokal dan Tradisi Masyarakat serta Optimalisasi Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi: Pertama, Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat. Kedua, Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama. Ketiga, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Keempat, Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga. Kelima, Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Keenam, Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air. Ketujuh, Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Kedelapan, Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga. Kesembilan, Percepatan operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui

fasilitas pengolahan regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo); Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya); Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah. Kesepuluh, Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. Kesebelas, Pengelolaan susut dan sisa pangan. Keduabelas, Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai; Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. Ketigabelas, Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. Keempatbelas, Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. Kelimabelas, Peningkatan pelayanan sistem irigasi. Keenambelas, Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Ketujuhbelas, Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

Tahap II**Penguatan Karakter, Jati Diri, serta Toleransi untuk Mewujudkan Tata Ruang Berkelanjutan, Pemulihan, dan Perlindungan Lingkungan Hidup sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung**

Penguatan karakter, jati diri, serta toleransi untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan, pemulihan, dan perlindungan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung, meliputi: Pertama, Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; Peningkatan kapasitas masyarakat yang terbuka dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kedua, Penguatan kerukunan antar

etnis, agama, dan golongan. Ketiga, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Keempat, Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Kelima, Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan lindung dan ekosistem alami. Keenam, Akselerasi Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air. Ketujuh, Perluasan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Kedelapan, Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; Pencapaian target 0% praktik eliminasi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Kesembilan, Percepatan pengelolaan sampah terpadu di hulu; Optimalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo); Percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya). Kesepuluh, Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. Kesebelas, Pengelolaan susut dan sisa pangan. Keduabelas, Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Ketigabelas, Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak; Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui *digital marketplace/ platform*; Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. Keempatbelas, Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya. Kelimabelas, Pengembangan pelayanan sistem irigasi. Keenambelas, Percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Ketujuhbelas, Akselerasi pengelolaan risiko bencana dengan

meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan nonstruktural.

Tahap III	Pemajuan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Pengarusutamaan Inklusifitas Gender, serta Penguatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Konsisten

Pemajuan karakter dan jati diri bangsa, pengarusutamaan inklusifitas gender, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten, meliputi: Pertama, Pelestarian dan pemantapan kebudayaan lokal, serta revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat berlandaskan kemajuan teknologi. Kedua, Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, Pemantapan pembangunan responsif gender berlandaskan inklusi sosial. Keempat, Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang. Kelima, Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Keenam, Pemantapan Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air. Ketujuh, Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi *clean energy* dan memperluas akses ke pasar global. Kedelapan, Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat. Kesembilan, Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi sampah regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo), pendampingan pembangunan TPA Bersama pada 2 lokasi (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya), serta pengembangan instrumen *circular economy*. Kesepuluh, Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Kesebelas, Pengendalian susut dan sisa pangan. Keduabelas, Pemantapan tata kelola laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Ketigabelas, Pemantapan produktivitas dan daya saing produk perikanan yang berpotensi masuk pasar ekspor/global. Keempatbelas, Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya. Kelimabelas, Pemantapan peningkatan pelayanan sistem irigasi. Keenambelas, Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana

hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Ketujuhbelas, Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan nonstruktural.

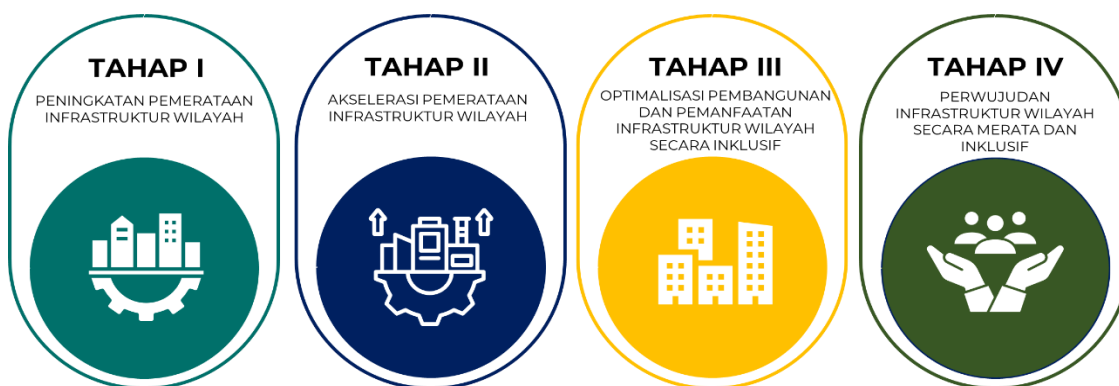
Tahap IV	Perwujudan Masyarakat Madani yang Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Perwujudan masyarakat madani yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, meliputi: Pertama, Perwujudan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi di kancah internasional. Kedua, Penerapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Keempat, Pembangunan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri. Kelima, Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Keenam, Perwujudan Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air yang berkelanjutan. Ketujuh, Pengembangan industri hijau seperti industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Kedelapan, Perwujudan sistem sanitasi lingkungan yang sehat. Kesembilan, Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*. Kesepuluh, Sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kesebelas, Pengendalian susut dan sisa pangan. Keduabelas, Penerapan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Ketigabelas, Perwujudan produk perikanan berdaya saing global. Keempatbelas, Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya. Kelimabelas, Perwujudan pelayanan sistem irigasi yang optimal. Keenambelas, Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Ketujuhbelas, Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana.

6. Misi Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Untuk meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.7
Tahapan Misi Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

Tahap I Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah meliputi: Pertama, Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. Kedua, Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan. Ketiga, Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. Keempat, Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Kelima, Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Keenam, Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Ketujuh, Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: (1) Cibadak-Palabuhanratu; (2) Cibadak-Sukabumi-

Cianjur-Ciranjang; (3) Ciranjang-Padalarang; (4) Garut-Pameungpeuk; (5) Kalipucang-Pangandaran; (6) Cirebon-Indramayu; (7) Cirebon-Kuningan; (8) Kertajati-Indramayu; (9) Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; dan (10) Akses Pelabuhan Patimban. Kedelapan, Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan. Kesembilan, Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan dry port KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. Kesepuluh, Reaktivasi layanan perkeretaapian terutama pada ruas Banjar-Pangandaran; Reaktivasi layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang; Reaktivasi layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey; Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari. Kesebelas, Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang. Keduabelas, Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung. Ketigabelas, Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Keempatbelas, Penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Kelimabelas, Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Keenambelas, Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). Ketujuhbelas, Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Kedelapanbelas, Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. Kesembilanbelas, Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik

rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *cofiring* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. Kedua puluh, Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor ekonomi strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan *cyber* dan pusat data.

Kedua puluh satu, Penataan dan pengembangan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* dan *blankspot* di kawasan perkotaan dan perdesaan. Kedua puluh dua, Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air. Kedua puluh tiga, Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: (1) Bendungan/Waduk

Matenggeng Kab. Ciamis; (2) Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang; (3) Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; (4) Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; (5) Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; (6) Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung.

Tahap II Akselerasi Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Akselerasi Pemerataan Infrastruktur Wilayah meliputi: Pertama, Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, *trust*, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. Kedua, Akselerasi konektivitas dan aksesibilitas antara desa-kota dan wilayah utara-selatan. Ketiga, Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan *grid* tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. Keempat, Percepatan pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Kelima, Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Keenam, Akselerasi dan penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Ketujuh, Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Soreang-Ciwidey-Cidaun dan Cirebon-Kuningan. Kedelapan, Akselerasi pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perdesaan dan pesisir. Kesembilan, Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik,

terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. Kesepuluh, Akselerasi layanan perkeretaapian pada ruas Banjar-Pangandaran; Integrasi layanan perkeretaapian pada ruas Cipatat-Padalarang; Akselerasi layanan perkeretaapian pada ruas Bandung-Ciwidey; Akselerasi layanan perkeretaapian pada ruas Rancaekek-Tanjungsari. Kesebelas, Akselerasi peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang. Keduabelas, Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung. Ketigabelas, Percepatan pengembangan kereta api cepat (*HST/High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Keempatbelas, Pembangunan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Kelimabelas, Peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Keenambelas, Akselerasi dan operasionalisasi sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). Ketujuhbelas, Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Kedelapanbelas, Peningkatan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. Kesembilanbelas, Peningkatan proporsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah. Keduapuluh, Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital. Kedua puluh satu, Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* dan *blankspot* di kawasan perkotaan dan perdesaan. Kedua puluh dua, Akselerasi pengembangan infrastruktur sumber daya air. Kedua puluh tiga,

Akselerasi pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air, terutama pada (1) Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis; (2) Bendungan/Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang; (3) Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; (4) Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; (5) Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung.

Tahap III	Optimalisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Wilayah secara Inklusif

Optimalisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Wilayah secara Inklusif meliputi: Pertama, Pemantapan LARAP-3C untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. Kedua, Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas wilayah antara desa-kota dan wilayah utara-selatan. Ketiga, Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal. Keempat, Pemantapan pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Kelima, Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Keenam, Pemantapan jalan daerah dan jalan desa. Ketujuh, Percepatan dan pemantapan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Garut-Pameungpeuk dan Kalipucang-Pangandaran. Kedelapan, Pemantapan pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah potensi pertambangan. Kesembilan, Pemantapan akses kereta api logistik Pelabuhan Patimban, *dry port* KA Pelabuhan Patimban, dan *dry port* KA yang terintegrasi dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. Kesepuluh, Pemantapan layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran; Pemantapan layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Cipatat-Padalarang; Pemantapan layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Bandung-Ciwidey; Pemantapan layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Rancaekek-Tanjungsari. Kesebelas, Pemantapan dan optimalisasi prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.

Keduabelas, Pemantapan dan optimalisasi elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian KA komuter di kawasan Metropolitan Bandung. Ketigabelas, Pemantapan pengembangan kereta api cepat (*HST/High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Keempatbelas, Pengembangan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Kelimabelas, Pemantapan kualitas sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Keenambelas, Pemantapan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional Kertajati dan pengembangan kawasan *aero city*. Ketujuhbelas, Pemantapan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Kedelapanbelas, Pemantapan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. Kesembilanbelas, Pemantapan proporsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah. Kedua puluh, Pemantapan pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan. Kedua puluh satu, Pemantapan *coverage* dan kecepatan akses internet untuk menjamin konektivitas area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan dan perdesaan. Kedua puluh dua, Preservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien. Kedua puluh tiga, Preservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien, terutama pada Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung.

Tahap IV Perwujudan Infrastruktur Wilayah secara Merata dan Inklusif

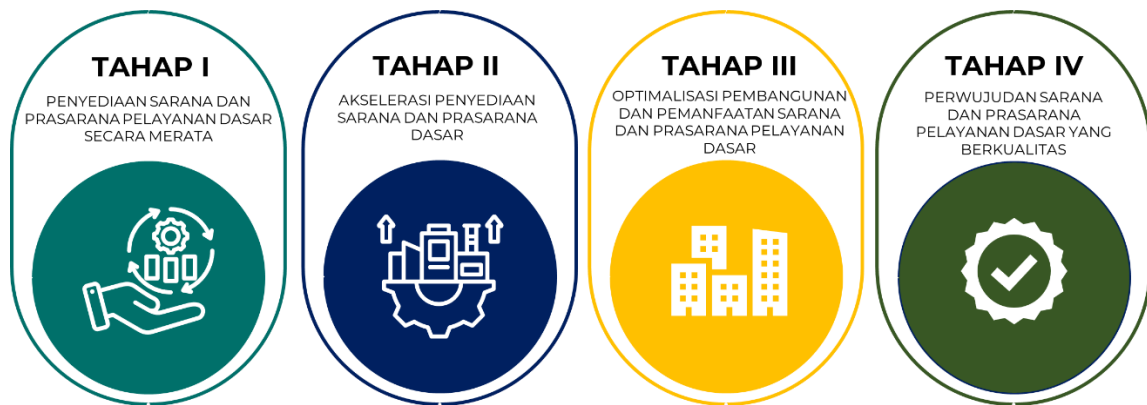
Perwujudan Infrastruktur Wilayah secara Merata dan Inklusif meliputi: Pertama, Perwujudan LARAP-3C untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. Kedua, Perwujudan konektivitas dan aksesibilitas antara desa-kota dan wilayah utara-selatan. Ketiga, Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal. Keempat, Perwujudan pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi dengan *Intelligence Transport System*, pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan

metropolitan Bandung. Kelima, Perwujudan konektivitas intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Keenam, Perwujudan jalan daerah dan jalan desa yang mantap. Ketujuh, Perwujudan konektivitas dan akses intraregional di Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik. Kedelapan, Perwujudan (pemeliharaan) jalan khusus terutama jalan akses tambang dan jalan khusus lainnya. Kesembilan, Perwujudan akses kereta api logistik Pelabuhan Patimban, *dry port* KA Pelabuhan Patimban, dan *dry port* KA yang terintegrasi dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. Kesepuluh, Perwujudan layanan perkeretaapian pada ruas Banjar-Pangandaran; Perwujudan layanan perkeretaapian pada ruas Cipatat-Padalarang; Perwujudan layanan perkeretaapian pada ruas Bandung-Ciwidey; Perwujudan layanan perkeretaapian pada ruas Rancaekek-Tanjungsari. Kesebelas, Perwujudan akses dan prasarana serta elektrifikasi perkeretaapian pada ruas Bogor-Sukabumi dan Cipatat-Padalarang. Keduabelas, Perwujudan transportasi perkeretaapian berbasis elektrifikasi kawasan Metropolitan Bandung. Ketigabelas, Perwujudan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Keempatbelas, Perwujudan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone* yang mengintegrasikan antar kawasan strategis. Kelimabelas, Perwujudan pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afiriasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Keenambelas, Perwujudan fungsi bandara Kertajati sebagai bandara internasional dan kawasan *aero city*. Ketujuhbelas, Perwujudan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Kedelapanbelas, Perwujudan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. Kesembilanbelas, Perwujudan Bauran Eenergi Daerah yang bertumpu pada EBT. Kedua puluh, Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan. Kedua puluh satu, Perwujudan *coverage* dan kecepatan akses internet di kawasan perkotaan dan perdesaan. Kedua puluh dua, Perwujudan ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien. Kedua puluh tiga, Perwujudan ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.

7. Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Untuk mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 5.8
Tahapan Misi Mengembangkan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

Tahap I **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar secara Merata**

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, meliputi: Pertama, Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Kedua, Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan. Ketiga, Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Keempat, Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.

Tahap II **Akselerasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar**

Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana dasar, meliputi: Pertama Akselerasi dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Kedua, Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh

perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. Ketiga, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Keempat, Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion & interregion* pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Tahap III Optimalisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Optimalisasi pembangunan dan pemandaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar, meliputi: Pertama, Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Kedua, Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan. Ketiga, Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi. Keempat, Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Tahap IV Perwujudan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas, meliputi: Pertama, Perwujudan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Kedua, Perwujudan hunian layak di perkotaan. Ketiga, Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi. Keempat, Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

8. Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:



Gambar 5.9
Tahapan Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jabar, 2024

Tahap I Penguatan Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkelanjutan

Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata Kelola pemerintahan yang berkelanjutan, meliputi: Pertama, Penyelenggaraan dan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir; Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.); Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kedua, Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria. Ketiga, Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Keempat, Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi; Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Tahap II Peningkatan Ketahanan Sosial, Ekonomi Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkelanjutan

Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata Kelola pemerintahan yang berkelanjutan, meliputi: Pertama, Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Kedua, Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Ketiga, Akselerasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Keempat,

Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.

Tahap III**Pemantapan Ketahanan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkelanjutan**

Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata Kelola pemerintahan yang berkelanjutan, meliputi: Pertama, Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Kedua, Pemantapan pelaksanaan Reforma Agraria. Ketiga, Optimalisasi standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Keempat, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.

Tahap IV**Perwujudan Ketahanan Sosial, Ekonomi Lingkungan Dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mencapai Pembangunan Yang Berkelanjutan**

Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meliputi: Pertama, Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kedua, Perwujudan legalisasi aset dan redistribusi lahan bagi masyarakat. Ketiga, Perwujudan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Keempat, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.

Adapun rincian arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dijelaskan seperti pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan	1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat yang berlandaskan kesadaran akan perubahan iklim, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Penguatan sistem sanitasi, sistem air bersih, pelayanan kesehatan dan lingkungan baik secara komunal maupun individual.	Perwujudan lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat.
		<u>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</u> Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan.	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Perwujudan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif.
		Peningkatan penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i> . Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima.	<u>Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting.</u> Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima. Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita.	Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan Prima.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	Penguatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	Pemantapan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	
		Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini/ <i>screening</i> , pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya .	Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya Percepatan eliminasi penyakit menular , penyakit tidak menular, dan penyakit tropis terabaikan . Percepatan eliminasi penyakit menular melalui pemberdayaan masyarakat, imunisasi rutin lengkap, surveilans, pengendalian resistensi antibiotik, serta pengendalian penyakit tropis terabaikan dan zoonosis.	Perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh Terhadap Penyakit.
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	<u>Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.</u>	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Usia Muda, serta	Pengembangan Manajemen Talenta Olahraga	Penguatan Penyelenggaraan Manajemen Talenta Olahraga	Perwujudan Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Standarisasi Sentra Pembinaan Olahraga			
		Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah	Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Penguatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Perwujudan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu.	Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebhakerjaan tinggi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, pendidikan bagi warga tidak mampu, dan berkebutuhan khusus dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perwujudan pendidikan vokasi berkelas dunia, berbasis TIK dengan tingkat kebhakerjaan tinggi.
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
			(khususnya di Jawa Barat Selatan).		
		Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global.	<u>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).</u>	Penguatan pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia.	Perwujudan sistem pendidikan tinggi yang berkelas dunia.
		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.			
		Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Penguatan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif.	Perwujudan sistem jaminan sosial.
		Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak,	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	<u>Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat</u>

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).		<u>sasaran, tepat guna, dan efisien.</u>
	2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi). Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri <i>consumer goods & general manufactures</i>, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (<i>aero-industry</i>), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan	Pemantapan industri pengolahan dan manufaktur bernilai tambah tinggi berbasis klaster dan ramah lingkungan di kawasan strategis industri serta penguatan ekosistem industri halal. Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Patimban.	Perwujudan industri pengolahan dan manufaktur terpadu berbasis inovasi pada kawasan strategis industri, berdaya saing global, ramah lingkungan dan halal.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
			ekonomi kreatif, rintisan green industry).		
		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan kualitas Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan diversifikasi produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang bernilai tambah tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global	Perwujudan transformasi IKM menjadi industri besar yang berdaya saing global
		Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	Perluasan pemasaran produk unggulan pada perdagangan dalam dan luar negeri	Penguatan sistem jejaring perdagangan pada tingkat global	Sistem perdagangan yang andal dan menjadikan Jawa Barat menjadi penopang perdagangan Indonesia sebagai top 5 negara dunia
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan	Pemantapan daya saing kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan.	Perwujudan kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
			strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.		
		Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Peningkatan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi khususnya di Jawa Barat Selatan.	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Perwujudan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta berdaya saing menuju ekspansi global.
		Penyiapan dan penataan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i>.	Pemantapan kegiatan ekonomi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Perwujudan kegiatan ekonomi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan	Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan UMKM yang menjadi bagian dari rantai nilai industri domestik dan global.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
			teknologi dan kemitraan usaha. <u>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah serta penerapan hasil riset dan inovasi dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.</u> <u>Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.</u>	Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah yang mendukung DUDI nasional berdaya saing di tataran global.
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Pemantapan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Perwujudan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>. Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan <i>green job</i> , pelayanan kesehatan, dan pelatihan tenaga kerja bersertifikat dan perlindungan tenaga kerja.	Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi sumber daya manusia pada usia produktif yang adaptif terhadap perkembangan lansekap pasar kerja domestik dan global.	Perwujudan sumber daya manusia pada usia produktif yang berkualitas, berdaya saing serta adaptif terhadap perkembangan lansekap pasar kerja domestik dan global.
		Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi	Peningkatan kualitas tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan PMI, serta perluasan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi, dan Pemberdayaan PMI purna kerja dalam pengembangan SDM angkatan kerja, teknologi dan kewirausahaan daerah	Pemantapan kualitas tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan PMI berkualifikasi menengah tinggi, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan PMI serta Pemberdayaan PMI purna kerja dalam pengembangan SDM, teknologi dan kewirausahaan daerah	Perwujudan PMI yang terlindungi, bermartabat memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, serta purna PMI yang berdaya guna bagi pembangunan daerah
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM.	Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi.	Pemantapan integrasi ekonomi dan konektivitas global.	Jawa Barat sebagai episentrum investasi hijau di Indonesia dan destinasi investasi global.
		Penataan dan restrukturisasi BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Pemantapan produktivitas dan pengembangan bisnis BUMD dalam mendorong	Optimalisasi produktivitas dan bisnis BUMD yang berdaya saing nasional.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.	pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif.	Perwujudan kewirausahaan yang berdaya saing.
		Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)	Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon	Penerapan kebijakan perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya untuk percepatan investasi pada sektor ekonomi produktif dan inklusif serta ekonomi biru dan ekonomi hijau.	Optimalisasi kemudahan perizinan akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya untuk percepatan investasi pada sektor ekonomi produktif dan inklusif serta ekonomi biru dan ekonomi hijau.	Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pemantapan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Perwujudan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.	Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan&petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Penerapan <i>closed loop model</i> pertanian dan perikanan.
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global	Perwujudan penerapan modernisasi koperasi
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-	Perwujudan <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.		Bandung), serta kawasan perkotaan Cirebon.	
		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan.	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Penerapan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Pemeliharaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Pemeliharaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/ platform</i>.	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim.
	3. Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif	Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi.	Pemantapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi.	Penerapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi.
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE	Pemantapan digitalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik.	Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.		
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	<u>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi.</u>	Pemantapan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan daya saing	Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah berkelas dunia.
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
4. Mewujudkan Provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah		Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
		Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan integritas partai politik.	Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat.
		Menyelenggarakan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah.	Peningkatan kemampuan pertahanan dan pembangunan serta pengembangan industri pertahanan untuk menopang stabilitas ekonomi.	Pemantapan pertahanan dan pembangunan serta pengembangan industri pertahanan untuk menopang stabilitas ekonomi.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Hukum dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Tujuan Pembangunan Nasional.
		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Percepatan dan pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Pemantapan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Perwujudan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Perwujudan sistem pengendalian inflasi daerah (produksi, distribusi, dan akses pangan).
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan	Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah,	Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta	Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan		retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBUD dan blended finance.	penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Percepatan dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penerapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
		Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	<u>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</u>	Pelestarian dan pemantapan kebudayaan lokal, serta revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat berlandaskan kemajuan teknologi.	Perwujudan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi di kancah internasional.
		Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	Peningkatan kapasitas masyarakat yang terbuka dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.		
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman	Penerapan moderasi beragama dan keberagaman budaya

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		toleransi antar etnis dan umat beragama.		budaya dalam kehidupan bermasyarakat.	dalam kehidupan bermasyarakat.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemantapan pembangunan responsif gender berlandaskan inklusi sosial.	Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.			
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang.	Pembangunan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri.
		Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan lindung dan ekosistem alami.	Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	Akselerasi Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	Pemantapan Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	Perwujudan Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air yang berkelanjutan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	Perluasan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi <i>clean energy</i> dan memperluas akses ke pasar global.	Pengembangan industri hijau seperti industri kimia hijau (<i>green chemistry</i>), dan teknologi nano hijau (<i>green nanotechnology</i>), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>).
		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Pencapaian target 0% praktik eliminasi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat.	Perwujudan sistem sanitasi lingkungan yang sehat.
		Percepatan operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo).	Percepatan pengelolaan sampah terpadu di hulu. Optimalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo).	Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi sampah regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo), pendampingan pembangunan TPA Bersama pada 2 lokasi (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya), serta pengembangan instrumen <i>circular economy</i> .	Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.
		Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya).	Percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya).		
		Penyiapan dan penetapan instrumen <i>circular economy</i> dalam pengelolaan sampah.			
		Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk	Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan	Sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
	Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.		<u>pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.</u>	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	
	Pengelolaan susut dan sisa pangan		Pengelolaan susut dan sisa pangan	Pengendalian susut dan sisa pangan	Pengendalian susut dan sisa pangan
	Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai.		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pemantapan tata kelola laut dan pesisir untuk pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Penerapan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
	Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.				
	Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.				
	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi <i>monitoring</i>, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Pemantapan produktivitas dan daya saing produk perikanan yang berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Perwujudan produk perikanan berdaya saing global.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna		

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.		
			Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.		
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya.	Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya.	Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perikanan budidaya.
		Peningkatan pelayanan sistem irigasi	Pengembangan pelayanan sistem irigasi	Pemantapan peningkatan pelayanan sistem irigasi	Pewujudan pelayanan sistem irigasi yang optimal
		<u>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana</u>	Percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana	Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		<u>hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.</u> <u>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</u>	hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Akselerasi pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan nonstruktural.	hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, pendidikan aman bencana dan budaya tanggap bencana serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan nonstruktural.	hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana.
	6. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif	Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Pemantapan LARAP-3C untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	Perwujudan LARAP-3C untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan.	Akselerasi konektivitas dan aksesibilitas antara desa-kota dan wilayah utara-selatan.	Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas wilayah antara desa-kota dan wilayah utara-selatan.	Perwujudan konektivitas dan aksesibilitas antara desa-kota dan wilayah utara-selatan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal.	Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal.
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Percepatan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Pemantapan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Perwujudan pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi dengan <i>Intelligence Transport System</i> , pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.
		Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan,	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan,	Perwujudan konektivitas intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Akselerasi dan penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Pemantapan jalan daerah dan jalan desa.	Perwujudan jalan daerah dan jalan desa yang mantap.
		Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1) Cibadak-Palabuhanratu; 2) Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; 3) Ciranjang-Padalarang; 4) Garut-Pameungpeuk; 5) Kalipucang-Pangandaran; 6) Cirebon-Indramayu; dan 7) Cirebon-Kuningan; 8) Kertajati-Indramayu 9) Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; 10) Akses Pelabuhan Patimban.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1) Soreang-Ciwidey-Cidaun 2) Cirebon-Kuningan	Percepatan dan pemantapan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1) Garut-Pameungpeuk (2035-2039) 2) Kalipucang-Pangandaran (2035-2039)	Perwujudan konektivitas dan akses intraregional di Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.
		Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan	Akselerasi pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perdesaan dan pesisir	Pemantapan pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah potensi pertambangan	Perwujudan (pemeliharaan) jalan khusus terutama jalan akses tambang dan jalan khusus lainnya
		Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA	Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan	Pemantapan akses kereta api logistik Pelabuhan Patimban, <i>dry port</i> KA Pelabuhan	Perwujudan akses kereta api logistik Pelabuhan Patimban, <i>dry port</i> KA Pelabuhan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	Patimban, dan <i>dry port</i> KA yang terintegrasi dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	Patimban, dan <i>dry port</i> KA yang terintegrasi dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.
		Reaktivasi layanan perkeretaapian terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.	Akselerasi layanan perkeretaapian pada ruas Banjar-Pangandaran.	Pemantapan layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.	Perwujudan layanan perkeretaapian pada ruas Banjar-Pangandaran.
		Reaktivasi layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang	Integrasi layanan perkeretaapian pada ruas Cipatat-Padalarang.	Pemantapan layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Cipatat-Padalarang.	Perwujudan layanan perkeretaapian pada ruas Cipatat-Padalarang.
		Reaktivasi layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey	Akselerasi layanan perkeretaapian pada ruas Bandung-Ciwidey	Pemantapan layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Bandung-Ciwidey	Perwujudan layanan perkeretaapian pada ruas Bandung-Ciwidey
		Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari	Akselerasi layanan perkeretaapian pada ruas Rancaekek-Tanjungsari	Pemantapan layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Rancaekek-Tanjungsari	Perwujudan layanan perkeretaapian pada ruas Rancaekek-Tanjungsari
		Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	Akselerasi peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	Pemantapan dan optimalisasi prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	Perwujudan akses dan prasarana serta elektrifikasi perkeretaapian pada ruas Bogor-Sukabumi dan Cipatat-Padalarang.
		Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	Pemantapan dan optimalisasi elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian KA komuter di kawasan Metropolitan Bandung.	Perwujudan transportasi perkeretaapian berbasis elektrifikasi kawasan Metropolitan Bandung.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Pengembangan kereta api cepat (HST/ High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Penyiapan pembangunan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	Percepatan pengembangan kereta api cepat (HST/ High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Pembangunan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Akselerasi dan operasionalisasi sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	Pemantapan pengembangan kereta api cepat (HST/ High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Pemantapan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional Kertajati dan pengembangan kawasan <i>aero city</i>.	Perwujudan kereta api cepat (HST/ High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Perwujudan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> yang mengintegrasikan antar kawasan strategis. Perwujudan pelabuhan pengumpul/ pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Perwujudan fungsi bandara Kertajati sebagai bandara internasional dan kawasan <i>aero city</i>.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Pemantapan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Perwujudan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	Peningkatan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	Pemantapan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	Perwujudan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.
		Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi	Peningkatan proporsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah.	Pemantapan proporsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah.	Perwujudan Bauran Eenergi Daerah yang bertumpu pada EBT.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) <u>pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</u> <u>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital</u> yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan	Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital.	Pemantapan pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan.	Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta, (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data.			
		Penataan dan pengembangan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> dan <i>blankspot</i> di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> dan <i>blankspot</i> di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Pemantapan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet untuk menjamin konektivitas area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan dan perdesaan.	Perwujudan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet di kawasan perkotaan dan perdesaan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.	Akselerasi pengembangan infrastruktur sumber daya air.	Preservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien.	Perwujudan ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: 1. Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis 2. Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang 3. Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; 4. Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; 5. Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; 6. Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung;	Akselerasi pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air, terutama pada 1. Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis 2. Bendungan/Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang 3. Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; 4. Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; 5. Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung;	Preservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien, terutama pada Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung;	Perwujudan ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.
	7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian	Akselerasi dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui	Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan.	Perwujudan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Perwujudan hunian layak di perkotaan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
		vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.		
		Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi.	Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi.
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.	<u>Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).</u>	Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik pada Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Penyelenggaraan dan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain	Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang.	Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang.	Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
	termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).				
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.				
	Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria.	Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.	Pemantapan pelaksanaan Reforma Agraria.	Perwujudan legalisasi aset dan redistribusi lahan bagi masyarakat.	
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Akselerasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Optimalisasi standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Perwujudan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Pusat dan Daerah.	
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.				

Sumber: Analisa Bappeda Jabar, 2024

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Provinsi Jawa Barat 2045 yaitu Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan mengacu kepada Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPN-RPJPD dan Indikator Daerah sesuai karakteristik daerah.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan melalui penyelarasan terhadap koridor Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 serta sesuai karakteristik dan potensi wilayah.

Berdasarkan proses penyelarasan tersebut, Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Tabel 5.2) adalah (1) Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua; (2) Pendidikan Berkualitas yang Merata; (3) Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju; (4) Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah; (5) Penerapan Ekonomi Hijau; (6) Transformasi Digital; (7) Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global; (8) Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Kluster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan; (9) Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif; (10) Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi Yang Berkualitas; (11) Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; (12) Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah; (13) Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan; (14) Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesetaraan Gender; (15) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (16) Peningkatan Ketahanan Pangan, Air Dan Energi; serta (17) Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah Dan Perubahan Iklim.



Tabel 5.2
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua
	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata
	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju
Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah
	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau
	IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital
	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global
	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan
Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas
	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan
	IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesetaraan Gender
	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi
	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2024

Adapun penjelasan dari Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

1. Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua merupakan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2045, dimana derajat kesehatan masyarakat tinggi dan setiap penduduk dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan berkualitas, adil dan bermutu dengan biaya terjangkau di seluruh wilayah.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat yang berlandaskan kesadaran akan perubahan iklim, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini/*screening*, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; Percepatan eliminasi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit tropis terabaikan; Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata mewujudkan generasi unggul yang bermutu dan berkarakter disertai akses layanan pendidikan yang adil dan bermutu, serta pendidikan yang memenuhi standar kompetensi Nasional dan global.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital *literacy*,

dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan); Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.

- 3. Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju** mencerminkan masyarakat sejahtera, perlindungan inklusif bagi tenaga kerja, keberpihakan sektor formal dan informal terhadap gender, serta perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan); Percepatan Pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan); Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

- 4. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah** melalui perwujudan Pusat *cutting edge industry* bertaraf global sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung dengan kawasan sains dan teknologi; pusat destinasi wisata dan ekonomi kreatif sebagai destinasi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dengan memanfaatkan sumber daya

alam, budaya, seni dan kearifan masyarakat; UMKM dan IKM memiliki keterkaitan dengan industri pengolahan; koperasi memiliki daya saing dalam perekonomian serta peluang dan akses kesempatan kerja bagi perempuan meningkat.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri consumer goods & general manufactures, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (*aero-industry*), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*); Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); Sistem perdagangan yang andal dan menjadikan Jawa Barat menjadi penopang perdagangan Indonesia sebagai top 5 negara dunia; Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya; Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha; Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan); Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*; Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai

industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah serta penerapan hasil riset dan inovasi dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri; Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan); Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*; Peningkatan produktivitas BUMD.

5. Penerapan Ekonomi Hijau sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, pelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya, yang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan transisi energi baru terbarukan (EBT), pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan, dan investasi hijau di berbagai sektor.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*); Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan; Pengembangan closed loop model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian; Industrialisasi koperasi melalui

hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.

6. Transformasi Digital merupakan salah satu upaya transformatif super prioritas di bidang ekonomi dalam mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat *cutting-edge industry* pada tahun 2045, yang memiliki kemampuan mengoptimalkan pengembangan *superplatform digital* tentang tata kelola pemerintahan, yang mencakup aspek regulasi, institusi, infrastruktur, riset dan inovasi digital, keamanan siber, pembiayaan dan insentif, hingga industri digital. Transformasi digital juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat berbasis teknologi yang bermanfaat dalam memproduksi SDM dan talenta digital yang adaptif dan berdaya saing global.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*; Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya); Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian; Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan; Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor ekonomi strategis; Peningkatan literasi digital bagi masyarakat (*digital ethic, digital cultural, digital skill, digital security*).

7. Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan

Global: mewujudkan keterkaitan antar industri kecil, menengah dan besar dalam proses produksi dan perdagangan domestik dan global, yang didukung dengan berfungsinya infrastruktur transportasi dan logistik yang efektif dan efisien serta dilakukannya penetrasi produk pelaku usaha IKM dan besar ke pasar global.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui arah kebijakan , antara lain: percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern dan terintegrasi); serta pengembangan kompleksitas industri; Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.

8. Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan

melalui penerapan pusat kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan; penguatan dan pemantapan desa mandiri dengan ketersediaan dan akses terhadap layanan sosial ekonomi yang berkualitas; serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya; Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan serta Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa; Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan; Perwujudan *City beautification* dalam rangka membangun

citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan; Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).

9. Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif

merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, responsif terhadap perubahan, perilaku *zero corruption* serta mampu menciptakan solusi baru untuk berbagai tantangan yang dihadapi.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah; Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat; Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi; Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata,

dan berkelanjutan; Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

10. Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas

merupakan wujud kepatuhan masyarakat yang tinggi pada peraturan perundang-undangan, yang menjamin keamanan warga serta kebebasan dan kesetaraan kapasitas lembaga demokrasi yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; Penguatan integritas partai politik.

11. Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemudahan dunia usaha mengakses modal dan pembiayaan, terkendalinya inflasi, mengurangi risiko terjadinya fluktuasi ekonomi yang berlebihan dan bertambahnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Penguatan pengendalian inflasi daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

12. Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah

menjadikan Jawa Barat sebagai mitra strategis kerjasama baik kerjasama regional maupun internasional dengan kondisi wilayah yang sangat tangguh yang mampu bertahan dan pulih dari berbagai tantangan eksternal, termasuk bencana alam, konflik, perubahan iklim, dan tekanan lingkungan lainnya, serta mampu menghadapi dan mengatasi ancaman dengan cara yang efektif, serta dapat mempertahankan fungsi-fungsi kunci seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Menyelenggarakan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah; Peningkatan kemampuan pertahanan dan pembangunan serta pengembangan industri pertahanan untuk menopang stabilitas ekonomi; Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan); Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

13. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan

menjadikan masyarakat yang menjunjung nilai luhur agama, menghormati dan memuliakan nilai-nilai spiritual, keyakinan, dan praktik keagamaan yang diyakini oleh individu dan masyarakat, melestarikan kebudayaan serta memiliki toleransi yang tinggi antar etnis, agama dan golongan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila serta Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

14. Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesenjangan Gender

mewujudkan keluarga harmonis dan berkualitas, didukung dengan pemuda yang memiliki kepedulian dan berkualitas serta menjamin hak dan perlindungan anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; Pemenuhan hak dan perlindungan anak,

perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan; Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

15. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup: mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara fisik, biologis, maupun kimia dapat mendukung kehidupan manusia dan organisme lainnya dengan baik, didukung oleh keanekaragaman hayati yang lestari, kualitas udara yang baik, air bersih yang sehat, ekosistem laut yang terjaga, tutupan lahan yang meningkat di kawasan lindung, sanitasi yang aman, serta sistem pengolahan sampah terpadu dan menyeluruh.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan lindung dan ekosistem alami; Akselerasi Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air; Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

16. Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi menjadi perhatian dan agenda pembangunan di semua Negara. Ketahanan pangan dicirikan berdasarkan 3 (tiga) aspek: ketersediaan stok pangan, keterjangkauan harga dan akses, serta pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi masyarakat. Ketahanan energi dicirikan dengan efisiensi penggunaan energi dalam mendukung perekonomian. Ketahanan air dicirikan dengan tersedianya kapasitas atau daya tampung air baku yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy; Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan; Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya; Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; Pengendalian susut dan sisa pangan; Pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim; Peningkatan pelayanan sistem irigasi; Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan; Peningkatan konservasi dan efisiensi energi pada seluruh pengguna energi; Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan&rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; serta Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.

17. Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim sejalan dengan semakin berkurangnya dampak negatif yang ditimbulkan dari bencana; kapasitas pemerintah dan masyarakat menghadapi bencana semakin membaik; nilai bahaya dan kerentanan berkurang serta adanya berbagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca untuk mengurangi pemanasan global dan adaptif perubahan iklim.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui arah kebijakan, antara lain: Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* secara struktural (infrastruktur) dan non struktural; Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan secara menyeluruh; Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami,

gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; serta Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Rincian arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.5.

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Provinsi Jawa Barat dan mendukung tercapainya visi Jawa Barat. Secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Transformasi untuk Setiap Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua	Transformasi Sosial • Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. • Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. • Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. • Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i>. • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. • Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. • Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. • Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	• Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah • Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan. Transformasi Ekonomi • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. • Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan. Transformasi Tata Kelola • Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. • Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Implementasi Transformasi: • Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>. • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
Pendidikan Berkualitas yang Merata	Transformasi Sosial • Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). • Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. • Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. • Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Arah Pembangunan

Arah Kebijakan Transformasi

- Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
- Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
- Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
- Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
- Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.
- Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Transformasi Ekonomi

- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.

Arah Pembangunan**Arah Kebijakan Transformasi**

- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta, (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data.

Transformasi Tata Kelola

- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Implementasi Transformasi

- Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju	Transformasi Sosial • Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. • Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. • Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. • Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. • Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. • Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. • Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. • Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i>.

Arah Pembangunan

Arah Kebijakan Transformasi

- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
- Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
- Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
- Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
- Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
- Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.

Transformasi Ekonomi

- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green & grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.
- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.

Transformasi Tata Kelola

- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. • Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. • Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. • Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah	Implementasi Transformasi
	• Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
	Transformasi Sosial • Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). • Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). • Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>. • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Transformasi Ekonomi • Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. • Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode

Arah Pembangunan

Arah Kebijakan Transformasi

pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*.

- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
- Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
- Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri *consumer goods & general manufactures*, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (*aero-industry*), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*).
- Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya.
- Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
- Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
- Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	- Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. - Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. - Peningkatan produktivitas BUMD. - Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta, (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data. Transformasi Tata Kelola - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. - Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi - Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. - Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Implementasi Transformasi - Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. - Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Penerapan Ekonomi Hijau	• Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>. Transformasi Ekonomi • Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. • Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri <i>consumer goods & general manufactures</i>, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (<i>aero-industry</i>), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan green industry). • Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan. • Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan. • Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon. • Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi)

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Transformasi Digital	pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. Transformasi Ekonomi • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i>. • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i>. • Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan. • Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. • Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global	digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta, (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data. Transformasi Ekonomi • Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. • Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. • Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi) • Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. • Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung), serta kawasan perkotaan Cirebon. • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. • Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan. • Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	• Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan megapolitan/metropolitan (<i>urban tourism</i>) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. • Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Pengembangan multi-infrastruktur <i>backbone & maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. • Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: a. Cibadak-Palabuhanratu; b. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; c. Ciranjang-Padalarang; d. Akses Pelabuhan Patimban; e. Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; f. Garut-Pameungpeuk; g. Kalipucang-Pangandaran; h. Cirebon-Indramayu; dan i. Cirebon-Kuningan. • Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. • Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. • Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran. • Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang. • Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung. • Pengembangan kereta api cepat (HST/<i>High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon- Semarang-Surakarta-Surabaya.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	• Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Patimban. • Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. • Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. • Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. • Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta, (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data.
Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan	Transformasi Sosial • Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah

Arah Pembangunan

Arah Kebijakan Transformasi

- Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.

Transformasi Ekonomi

- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.
- Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
- Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri *consumer goods & general manufactures*, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (*aero-industry*), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*).
- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan.
- Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.
- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.
- Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	• Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan megapolitan/metropolitan (<i>urban tourism</i>) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. • Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. • Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global • Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Transformasi Tata Kelola • Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. • Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. • Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi. • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. • Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. • Penguatan integritas partai politik

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	Implementasi Transformasi • Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb). • Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. • Percepatan pelaksanaan reforma agraria. • Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. • Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. • Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. • Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah • Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. • Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Transformasi Ekonomi • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. • Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. - Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	Implementasi Transformasi Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPB dan <i>blended finance</i>.
	Transformasi Ekonomi - Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). - Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah - Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut. - Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan	Implementasi Transformasi Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesetaraan Gender	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi - Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	Transformasi Sosial Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. • Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Transformasi Ekonomi • Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. • Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>. • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. • Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Implementasi Transformasi • Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb). • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. • Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi	Transformasi Sosial • Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Transformasi Ekonomi

Arah Pembangunan

Arah Kebijakan Transformasi

- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.
- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
- Pengembangan *closed loop* model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital *marketplace/platform*.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
- Pengembangan *closed loop model* perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	• Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. • Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan. • <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan. • Peningkatan produktivitas BUMD. • Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. • Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Implementasi Transformasi • Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. • Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb). • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. • Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. • Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. • Percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Sumber: Lampiran SEB Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024, diolah, 2024

a. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Jawa Barat mengacu pada Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN yang terdiri dari 45 indikator. IUP dan target Jawa Barat tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur capaian arah pembangunan dan sasaran pokok sebagai penjabaran visi dan misi RPJPD Jawa Barat yang dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan RPJPN Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	Kesehatan untuk Semua			Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua			
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80,0	1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78
2	Kesehatan Ibu dan Anak			2.	Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122**	16	a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151**	15
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80**	5,0	b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,0**	5
3	Insidensi Tuberkolis (per 100.000 penduduk)	272**	76	3.	Penanganan Tuberkulosis:	95**	95**
				a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)		
				b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88**	98**
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,52**	99,5
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			
5	Hasil pembelajaran			5.	Hasil pembelajaran:		
a.	Rata-rata nilai PISA			a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Membaca	396	485		i) Literasi Membaca	25,93 - 33,33**	70,37 - 74,07**
	- Matematika	404	490		ii) Numerasi	7,41 - 14,81**	62,96 - 66,67**
	- Sains	416	487	b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					i) Literasi Membaca	45,30 - 47,30**	71,42 - 73,42
					ii) Numerasi		



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
					34,83 - 36,83**	63,01 – 65,01	
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33**	12,0	c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 – 9,53	12,05 – 12,09
c.	Harapan lama sekolah	13,32**	14,81	d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 – 12,88	14,24 – 14,29
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,64	9,64 – 14,50
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78**	75,00	7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,19**	75,00
IE3	Perlindungan sosial yang adaptif			Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju			
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0**	0,5-0,8	8.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 – 6,46	0,09-0,59**
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19**	99,5	9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04
10	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0**	60,0	10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI			
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah			
11	Produktivitas Industri dan Pertanian			11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 – 42,00	46,43 – 47,60
a.	Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28,0				
b.	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)**	3,2**	3,4**				
12	Pengembangan Pariwisata			12.	Pengembangan Pariwisata:		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6**	8,0	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,15	5,36**
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,10**	100	b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	536,60	1.341,50
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92**	11,00**	13.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)**	22,81**	18,69**



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14. Produktivitas UMKM dan Koperasi		
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,44**	5	a. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,50	9,86
b.	Rasio kewirausahaan (%)	3,14**	8,0	b. Return On Aset (ROA) BUMD (%)	1,62	5,56
c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0**	-		
d.	Return Of Aset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	-		
				15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik**		
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,50-5,00**	4,0	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 – 6,99	5,16 - 6,14**
				b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**	45**	86**
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	56,30**	70,0	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3
17	Tingkat penguasaan IPTEK			17. Tingkat penguasaan IPTEK:	71,76	81,76
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,3**	2,2-2,3	a. Indeks Inovasi Daerah*		
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	60**	30 besar			
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70,80	90,65	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,30	85,05
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,40	67,91
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital		
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	43**	20 besar	19. Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	6,4	8
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global		
20	Biaya logistik (% PDB)	13,5**	8,0**	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,88	5,00
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1-30,2**	27,2	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,72**	21,07**
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0-21,6**	40,0	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	29,32**
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan		



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34**	48,92	-		
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00**	100	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	4,00**	16,25**	b. Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51
				c. Kemantapan Jalan (%)*	86,17	99
				d. Moda Share Angkutan Umum (%)*	13	45
TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA		
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif		
24	Indeks materi hukum	0,51**	0,71**	24. Indeks Reformasi Hukum	90,7	100
25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,12**	5,0	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30	5,00
26	Indeks pelayanan publik	3,68**	5,0	26. Indeks Pelayanan Publik	4,60	5,00
27	Anti Korupsi			27. Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89
a.	Indeks integritas nasional	74,52**	96,98			
b.	Indeks persepsi korupsi	38**	60			
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH		
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas		
28	Indeks pembangunan hukum	0,69**	0,89**	28. Indeks Kepatuhan Daerah*	84,08	94,08
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5**	80,0	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78	69,16
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Terkendalanya stabilitas ekonomi makro daerah		
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20**	18,0-20,0	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,58**	4,6
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32. Tingkat Inflasi (%)	3,3 - 3,8**	1,1 - 3,2



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:		
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	b Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0**	60	-		
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	-		
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120	-		
e.	Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	-		
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	34. Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah		
35	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influencer</i>)	61,54**	75,0-80,0	35. Efektivitas Kerjasama Internasional*	90,91 (2023)	99,71
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	16**	45,00	36. Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat*	3,022	4,5
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI		
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Peningkatan kerukunan umat beragama dan Pemajuan Kebudayaan		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39**	68,15	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70 - 56,73**	65,99 - 66,28**
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77**	84,20	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29**	80,00	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425**	0,15	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459- 0,458**	0,230- 0,215**
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Peningkatan kualitas lingkungan hidup		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44**	0,75**	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741
42	Kualitas Lingkungan Hidup			42. Kualitas Lingkungan Hidup:		
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	76,68**	74,15**	a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	64,06**	72,08**
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,49**	85,00



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	24 (16% terdaur ulang) **	90 (35% terdaur ulang)	c. Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	11** 48**	90,00 100
IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		
43	Ketahanan energi, air, dan Kemandirian pangan			43. Ketahanan energi, air, dan pangan		
a.	Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi		
	- Indeks ketahanan energi	6,77**	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.404	2.670
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	191	165
b.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	7,21**	0,77**	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	0,32**
c.	Ketahanan air			c. Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	65,18**	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	105,28**	278,71**
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39,20**	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100
IE17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,137**	0,11	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	109,18**	92,98-79,08**
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
a.	Kumulatif	28,12	51,51	b. Kumulatif	2,66	31,65
b.	Tahunan	32,65	80,89	c. Tahunan	9,27	70,08

Keterangan: *indikator *proxy* **indikator/target pemutakhiran

Sumber: Rantir RPJPN Tahun 2025-2045, Bappeda, 2024

Bappeda, 2024

Tabel 5.5
Perumusan Sasaran Pokok Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN POKOK	KET
TRANSFORMASI SOSIAL							
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	Terwujudnya pelayanan kesehatan prima untuk semua	
		2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	2. Kesehatan Ibu dan Anak:				
		3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151**	15		
		4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,0**	5		
		5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	3. Penanganan Tuberkulosis:				
		6. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	95**	95**		
		7. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88**	98**		
		8. Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,52**	99,5		
		9. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 6. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	5. Hasil pembelajaran:			Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	
			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			i) Literasi Membaca	25,93 - 33,33**	70,37 - 74,07**		
			ii) Numerasi	7,41 - 14,81**	62,96 - 66,67**		
			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			i) Literasi Membaca	45,30 - 47,30**	71,42 - 73,42		
			ii) Numerasi	34,83 - 36,83**	63,01 - 65,01		
			c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 - 9,53	12,05 - 12,09		
			d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 - 12,88	14,24 - 14,29		
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,64	9,64 - 14,50		
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,19**	75		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		7. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 8. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 9. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 10. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. 11. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 12. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 13. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 14. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		(<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).					
		15. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.					
		16. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.					
	Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju	1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	8. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 – 6,46	0,09-0,59**	Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju	
		2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04		
		3. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET TARGET 2045	SASARAN POKOK	KET
		masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 4. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).					
TRANSFORMASI EKONOMI							
Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah.	1. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri <i>consumer goods & general manufactures</i> , industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (<i>aero-industry</i>), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan <i>green industry</i>). 2. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 – 42,00	46,43 – 47,60	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	
			12. Pengembangan Pariwisata:				
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,15	5,36**		
			c Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	536,60	1.341,50		
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)**	22,81**	18,69**		
			14. Produktivitas UMKM dan Koperasi:				
			b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,5	9,86		
			d Return On Aset (ROA) BUMD (%)	1,62	5,56		
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik**				
			a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 – 6,99	5,16 - 6,14**		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**	45**	86**		
		3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3		
		4. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	17. Indeks Inovasi Daerah*	71,76	81,76		
		5. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya.					
		6. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.					
		7. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.					
		8. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.					
		9. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.					
		10. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		11. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. 12. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 13. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global 14. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 15. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global 16. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah,					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 17. Peningkatan produktivitas BUMD.					
	Penerapan Ekonomi Hijau	1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 2. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 3. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. 4. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. 5. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau: a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	61,3 23,4	85,05 67,91	Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	
	Transformasi Digital	1. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan. 2. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i>	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,4	8	Terwujudnya transformasi digital	

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data. 3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i>. 4. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i>. 5. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 6. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.					
	Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global	1. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,88	5	Meningkatnya Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global	
		2. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,72**	21,07**		
		3. Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	29,32**		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. 4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. 5. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/<i>stockyard</i> yang modern terintegrasi) 6. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. 7. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		Jakarta-Bandung), serta kawasan perkotaan Cirebon. 8. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 9. Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. 10. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: a. Cibadak-Palabuhanratu; b. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; c. Ciranjang-Padalarang; d. Akses Pelabuhan Patimban; e. Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; f. Garut-Pameungpeuk; g. Kalipucang-Pangandaran; h. Cirebon-Indramayu; dan i. Cirebon-Kuningan. 11. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. 12. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		13. Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Patimban. 14. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. 15. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). 16. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. 17. Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .					
	Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Meningkatnya Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap	
		2. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100		
		3. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan	b. Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	c. Kemantapan Jalan (%)*	86,17	99	Wilayah Pengembangan	
			d. Moda <i>Share</i> Angkutan Umum (%)*	13	45		
		4. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.					
		5. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.					
		6. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.					
		7. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.					
		8. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.					
		9. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.					
		10. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan.					
		11. Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		KA komuter di kawasan metropolitan Bandung. 12. Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. 13. Peningkatan akses pendidikan tinggi dan kesehatan.					
TRANSFORMASI TATA KELOLA							
Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel, dan Inovatif	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	24. Indeks Reformasi Hukum	90,7	100	Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	
		2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,3	5		
		3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	26. Indeks Pelayanan Publik	4,6	5		
		4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	27. Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89		
		5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi.					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 8. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. 9. Penguatan integritas partai politik 10. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb). 11. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. 12. Percepatan pelaksanaan reforma agraria. 13. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 14. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. 15. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 16. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah					



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.					
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH							
Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	28. Indeks Kepatuhan Daerah*	84,08	94,08	Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	
		2. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78	69,16		
		3. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	30. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi		
	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	1. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,58**	4,6	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	
		2. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	32. Tingkat Inflasi (%)	3,3 - 3,8**	1,1 - 3,2		
		3. Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:				
			a. Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8		
		4. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman	34. Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 5. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 6. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> . 7. Akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.					
	Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah	1. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,	35. Efektivitas Kerjasama Internasional*	90,91 (2023)	99,71	Meningkatnya kerjasama internasional dan ketahanan daerah	
			36. Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat*	3,022	4,5		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN POKOK	KET
		termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). 2. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. 3. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 4. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.					
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Peningkatan kerukunan umat beragama dan Pemajuan Kebudayaan	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70 - 56,73**	65,99 - 66,28**	Terwujudnya kerukunan umat beragama dan Pemajuan Kebudayaan	
		2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 – 74,85	81,68 – 82,32		
	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 – 70,95	75,81 – 76,05	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	
		2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459-0,458**	0,230-0,215**		

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.					
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan lindung, dan ekosistem alami.	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		2. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	42. Kualitas Lingkungan Hidup:				
		3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	64,06**	72,08**		
		4. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,49**	85		
		5. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).	c. Pengelolaan Sampah:				
		6. Penyelenggaraan dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah	i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11**	90		
			ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	48**	100		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. 7. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. 8. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 9. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; 10. Pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut					
	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	1. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan	43. Ketahanan energi, air, dan pangan			Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	
			a. Ketahanan Energi:				
			i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.404	2.670		
			ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	191	165		
			b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	0,32**		
			c. Ketahanan Air:				
			i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	105,28**	278,71**		
			ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap	34,74	100		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. 3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. 5. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. 6. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur	Air Siap Minum Perpipaan (%)				

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045		
		konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 7. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. 8. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. 9. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. 10. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.					
	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	1. Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan lindung dan ekosistem alami.	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	109,18**	92,98–79,08**	Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	
		2. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				
			a. Kumulatif	2,66	31,65		
		3. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	b. Tahunan	9,27	70,08		

Sumber: BappedaProvinsi Jawa Barat, 2024

*indikator *proxy*

Tabel 5.6
Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua	Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	
		Kesehatan Ibu dan Anak:			
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151**	15	
		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,0**	5	
		Penanganan Tuberkulosis:	95**	95**	
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)			
		b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88**	98**	
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,52**	99,5	
		Hasil pembelajaran			
		a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
		i) Literasi Membaca	25,93 - 33,33**	70,37 - 74,07**	
		ii) Numerasi	7,41 - 14,81**	62,96 - 66,67**	
		b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi			



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
		minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	45,30 - 47,30**	71,42 - 73,42	
		i) Literasi Membaca	34,83 - 36,83**	63,01 - 65,01	
		ii) Numerasi			
		c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 - 9,53	12,05 - 12,09	
		d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 - 12,88	14,24 - 14,29	
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,64	9,64 - 14,50	
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,19**	75,00	
Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju	Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46	0,09-0,59**	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04	
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70	
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 - 42,00	46,43 - 47,60	
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,15	5,36**	
		b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	536,60	1.341,50	



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)**	22,81**	18,69**	
		Produktivitas UMKM dan Koperasi			
		a. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,50	9,86	
		b. Return On Aset (ROA) BUMD (%)	1,62	5,56	
		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik**			
		a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 – 6,99	5,16 – 6,14**	
		b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**	45**	86**	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3	
		Indeks Inovasi Daerah*	71,76	81,76	
Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
		a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,30	85,05	
		b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,40	67,91	
Terwujudnya Transfromasi Digital	Transfromasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	6,4	8	
Meningkatnya Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global	Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,88	5,00	
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,72**	21,07**	
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	29,32**	



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
Meningkatnya pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100	
		b. Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51	
		c. Kemantapan Jalan (%)*	86,17	99	
		d. Moda <i>Share</i> Angkutan Umum (%)*	13	45	
Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Indeks Reformasi Hukum	90,7	100	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,3	5,00	
		Indeks Pelayanan Publik	4,6	5,00	
		Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89	
Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Daerah*	84,08	94,08	
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78	69,16	
		Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	
Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,58**	4,6	
		Tingkat Inflasi (%)	3,3 - 3,8**	1,1 - 3,2	
		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
		a. Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8	
		Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03	



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
Meningkatnya kerjasama regional maupun internasional	Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah	Efektivitas Kerjasama Internasional*	90,91 (2023)	99,71	
		Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat*	3,022	4,5	
Terwujudnya kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan	Peningkatan kerukunan umat beragama dan Pemajuan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70 - 56,73**	65,99 - 66,28**	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	
Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459-0,458**	0,230-0,215**	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741	
		Kualitas Lingkungan Hidup			
		a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	64,06**	72,08**	
		b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,49**	85,00	
		c. Pengelolaan Sampah	11**	90,00	
		- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)			
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) RT)	48**	100	
		Ketahanan energi, air, dan pangan			



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	a. Ketahanan Energi			
		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.404	2.670	
		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	191	165	
		b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	0,32**	
		c. Ketahanan Air			
		- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	105,28**	278,71**	
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100	
Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	109,18**	92,98-79,08**	
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
		a. Kumulatif	2,66	31,65	
		b. Tahunan	9,27	70,08	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

*indikator proxy

5.3 UPAYA TRANSFORMASI SUPER PRIORITAS (*GAME CHANGERS*)

RPJPD sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changers*), yaitu:

Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
5. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
6. Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting*.
7. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

Tranformasi Ekonomi

8. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.
10. Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan.
11. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital.
12. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion & interregion* pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).

Transformasi Tata Kelola

13. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
14. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menuju penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi.
15. Penguatan integritas partai politik.

Landasan Transformasi

16. Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
17. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah.
18. Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
19. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
20. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.
21. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.
22. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
23. Pengembangan industri hijau seperti industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*).
24. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya



serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.



BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

6.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Disusunnya RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 diharapkan agar arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka panjang dapat diturunkan kedalam RPJMD serta dioperasionalkan dalam RKPD. Setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada RPJPD ini. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan arah kebijakan RPJPD. Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD ini harus melibatkan multipihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, berarti RPJPD periode Tahun 2046-2065 akan disusun mulai dari tahun 2044.

6.2 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RPJPD Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pendanaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pendanaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, dan APBD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti sumber pendanaan alternatif (CSR, KPBU, pinjaman daerah atau penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, dana umat, dan peran serta masyarakat).

Guna mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri maka menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan agar

memanfaatkan produk dari Provinsi Jawa Barat khususnya. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, perlu sinergi dan kerja sama guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045: “Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan”.

6.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi RPJPD dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian melalui perubahan RPJPD sesuai dengan dinamika yang terjadi. Hal ini dilakukan sebagai proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk memastikan tercapainya target kinerja secara efektif dan efisien.

6.4 PROSES PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam implementasi setiap visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJPD Provinsi Jawa Barat ada beberapa hal yang dapat menghambat atau mencegah ketercapaian keberhasilan RPJPD. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah setiap elemen dapat membangun *framework* manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan

mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *Impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 287 Dago Bandung

   [bappedajabar](#)

 [Bappeda Provinsi Jawa Barat](#)

 bappeda.jabarprov.go.id